Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2024 RENCANA KERJA

Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata

2024
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen digital Rencana Kerja ini dapat diakses dengan memindai *QR code* berikut:

Renja KLHK Tahun 2024

Deretan Pohon *Swietenia macrophylla* (Mahoni) yang menjulang tinggi di sepanjang jalan masuk Taman Nasional Alas Purwo membawa hawa asri pagi para pengunjung

Foto oleh : Sandi Kusuma

RENCANA KERJA

2024

Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata

Kementerian mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreatifitas dan keahlian untuk menghias dokumen rencana kerja ini.

Kontributor foto, (sesuai urutan abjad):

Ariyanto Wibowo (Biro Perencanaan), **Asep Robik** (Biro Perencanaan), **Ninditha Adhiesty N** (Biro Perencanaan), **M Azhar Fakhri** (TN Gunung Gede Pangrango) **Sandi Kusuma** (Biro Perencanaan), **Saraswati W** (Biro Perencanaan), **Triandu** (Biro Perencanaan).

Credit asset grafis, (sesuai urutan abjad):

freepik.com, M Desby Adhitia (Biro Perencanaan), **Saraswati W** (Biro Perencanaan),

Dokumen ini disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan. Proses pembahasan, pendokumentasian dan penyusunan dilakukan secara teknokratik baik dalam kementerian maupun diluar kementerian. Sedangkan proses politik dilakukan melalui pembahasan dengan Komisi IV DPR RI sepanjang tahun 2023.

Keterangan :
Pelepasliaran Tukik kembali ke habitatnya saat senja di Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur

Foto oleh : Ninditha Adhiesty Novthalia

Sekelompok rusa (*Rusa timorensis*) mendekati kolam air buatan untuk melepas dahaga dipanasnya padang savana bekol. Populasi hewan kunci TN Baluran ini terus meningkat karena intensifnya pengelolaan habitat.

Foto oleh : Sandi Kusuma

IKHTISAR

Capaian Pembangunan LHK

Antisipasi Krisis Pangan dan Ketimpangan

40 ribu Hektar
Penyediaan lahan untuk food estate

5,3 juta Hektar
Pemberian akses kelola

4,1 juta Hektar
Pencadangan Kawasan untuk TORA

Komitmen aksi pengendalian perubahan iklim

0,12 Juta hektar/tahun
Laju deforestasi

56,83 Persen
Penurunan Emisi(GRK) yang ter verifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah

Potensi sumberdaya hutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

14,2 Milyar USD
Ekspor kayu olahan

118,39 Triliun Rupiah
kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sector Kehutanan

12,54 Triliun Rupiah
kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sector LH

Tema Pembangunan LHK Tahun 2024

Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata

Sasaran makro Ekonomi

3-4%
Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK

5-7%
Peningkatan nilai transaksi keuangan kelompok tani untuk mendorong pemerataan pembangunan

2-3%
Penurunan beban lingkungan :kebakaran hutan dan lahan, laju deforestasi dan perbaikan parameter lingkungan

Perkiraan target ekonomi

17,91 Triliun Rupiah
Perkiraan investasi daur ulang sampah dan kehutanan termasuk wisata alam. Serapan tenaga kerja diperkirakan 307 ribuan orang.

16 Miliar US$
Perkiraan ekspor kayu olahan, yang didukung oleh produksi kayu bulat sebesar 60 juta m3, perkiraan produksi kayu olahan 52,38 juta m3 oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang 106,02 juta m3 per tahun.

2 Triliun Rupiah
Perkiraan nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan dari produksi barang dan jasa hasil hutan bukan kayu

Pagu KLHK Perprogram
Rp.7,71 Triliun

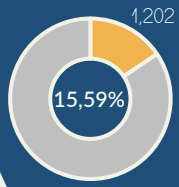

1,202 Triliun
Kualitas Lingkungan Hidup

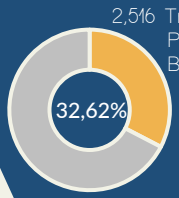

2,516 Triliun
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

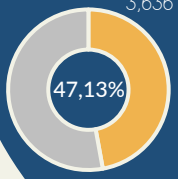

3,636Triliun
Dukungan Manajemen

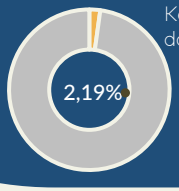

169 Miliar
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

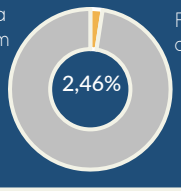

190 Miliar
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Dukungan KLHK dalam Prioritas Nasional
Rp.3,54 Triliun

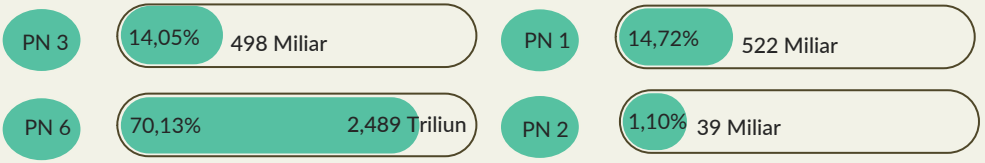

Indeks Kinerja Utama KLHK

Pilar Lingkungan

69,74
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

17,47%
Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan

0,2 Juta Hektar
Penurunan Laju Deforestasi

70 Poin
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Pilar Ekonomi

15 Triliun Rupiah
Kontribusi sektor LH terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)

122,2 Triliun Rupiah
Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)

16 Miliar US$
Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting

7,48 Triliun Rupiah
Nilai PNBP Fungsional KLHK

Pilar Sosial

10 Juta Hektar
Luas kawasan hutan dengan status penetapan

119,39 Ribu Hektar
Luas hutan yang dilepaskan untuk TORA

224,25 Ribu Hektar
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

Pilar Tata Kelola

80 Poin
Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK

85 Poin
Nilai kinerja reformasi birokrasi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pesan utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode 2020-2024 yakni **memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja, investasi dan pemerataan wilayah**. Pesan ini sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju 2045 dengan penguatan proses transformasi ekonomi untuk menjadi negara maju dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-5 (lima).

Tahun 2020 di awal Pandemi COVID 19, Kementerian LHK mampu beradaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah. Selama periode 3 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022, menjadi momentum positif Kementerian LHK dalam memperbaharui tata kelola untuk menginternalisasi kebutuhan tapak ke dalam rencana pembangunan.

Kawasan hutan yang merupakan rumah dari 17% total spesies yang ada didunia dan kurang lebih 40 ribu spesies tumbuhan serta ribuan lain spesies fauna terdiri dari mamalia, unggas dan reptile amphibi merupakan sumber cadangan pangan, energi serta obat-obatan bagi manusia.

Dalam rangka antisipasi krisis pangan dan energi, Kementerian LHK pada periode 2020-2022 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) menyediakan lahan untuk lumbung pangan yang berasal dari kawasan hutan dalam mendukung pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 40 ribu hektar melalui perubahan fungsi kawasan, dan (2) memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan melalui perhutanan sosial, sebagai contoh Kementerian LHK telah menyiapkan lahan untuk mendukung **ketahanan pangan di Pulau Jawa seluas 106.212,1 hektar.** Utamanya untuk jagung (30.400,1 hektar) melalui pola agroforestry di lahan perhutanan sosial, dan di lahan Perum Perhutani dengan pola agroforestry seluas 15.553 hektar untuk padi dan 60.259 hektar untuk jagung, serta menyiapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk membantu penyediaan lahan dalam bentuk agroforestry untuk membantu ketahanan pangan di setiap wilayah.

Kementerian LHK juga terus mendorong pelaksanaan transformasi struktural dan produktifitas untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut dicapai salah satunya dengan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial.

Capaian pemberian akses kelola hutan sampai pada akhir tahun 2022 kurang lebih **5,3 juta hektar.** Akses kelola hutan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dengan pelibatan hampir lebih dari **1,15 juta Kepala Keluarga** petani hutan dari alokasi pemanfaatan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Keberpihakan kepada rakyat juga diaktualisasikan dalam pencadangan kawasan untuk tanah obyek reforma agraria (TORA) seluas **4,1 juta hektar.**

Aktualisasi potensi sumber daya hutan juga diwujudkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional terutama sektor non migas. Pada tahun 2022 kinerja capaian ekspor kayu olahan telah mencapai **14,2 Milyar USD**, hal ini perlu ditingkatkan sampai mencapai target angka 60,08 Milyar USD di tahun 2045 dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan dari sumber daya hutan dan lingkungan tersebut. Kementerian LHK juga memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sektor lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 sebesar **Rp 130,92 triliun.**

Pada kancah global, Kementerian LHK berkomitmen untuk ikut serta dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim dunia termasuk didalamnya adalah komitmen dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) atau agenda 2030. Komitmen tersebut diwujudkan dengan keberhasilan Indonesia telah mengendalikan **laju deforestasi** dari awalnya seluas 1,09 juta hektar per tahun menjadi **0,12 juta hektar per tahun**, dan ini adalah sejarah bagi Indonesia.

Tahun 2024 merupakan titik akhir dari periode perencanaan jangka menengah 2020 – 2024. Akhir dari rangkaian rencana pembangunan nasional pada lima tahun terakhir tertuang dalam tema Rencana Kerja Pemerintah 2024 adalah untuk **mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**

Berbicara dalam konteks keterlibatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap tema besar pembangunan 2024, harapan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah **"Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata"**. Rangkaian dari tema pembangunan LHK diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan sirkular ekonomi serta keberdayaan masyarakat terhadap akses kelola hutan.

Terdapat 3 (tiga) sasaran makro ekonomi dalam pembangunan LHK tahun 2024, diantaranya adalah **(1) Pertumbuhan 3 - 4% PDB dan ekspor sektor LHK** yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; **(2) Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 5 - 7%** yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan; **(3) Penurunan beban lingkungan sebesar 2 - 3%** dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan. Berkaitan dengan ini, KLHK berperan penting untuk dapat mengartikulasikan kinerja dalam pembangunan LHK untuk sumbangsih PDB, pengurangan kemiskinan, dan indeks gini ratio.

Sumbangsih sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto Nasional pada tahun 2024 diprediksi sebesar **Rp.137,2 triliun.** Angka tersebut tercermin pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dan sub sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang.

Nilai investasi yang masuk di bidang usaha lingkungan hidup dan kehutanan diperkirakan akan mencapai nilai komitmen investasi sebesar **Rp. 23,1 triliun** dengan proyeksi **tenaga kerja terserap** sejumlah **307,74 ribu orang**.

Produksi kayu bulat diprediksi mencapai angka **60 juta m^3**, sedangkan perkiraan produksi kayu olahan akan mencapai **52,38 juta m^3** yang didukung oleh **540 unit** industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang sebesar **106,02 juta m^3** per tahun.

Kinerja ekspor sektor LHK diperkirakan mencapai angka **US$ 16 miliar** di tahun 2024. Hal tersebut ditopang dari ekspor produk hasil hutan, bioprospecting dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lesatari dan berkelanjutan (TSL).

Dalam perannya untuk memberikan sumbangsih bagi akselerasi ekonomi masyarakat dari bidang LHK, dengan salah satu sumbangan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Rencana PNBP yang akan diterima pada tahun 2024 dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan adalah sebesar **Rp 7,49 triliun** dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan/atau perusakan LH, serta denda administrasi bidang kehutanan. Angka ini meningkat42% dari angka target tahun 2023.

Langkah – langkah **kebijakan PNBP KLHK pada tahun 2024** adalah **(a)** Perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan (Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja); **(b)** Implementasi perijinan berusaha berbasis multiusaha; **(c)** Optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain dengan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN); **(d)** Penguatan implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; **(e)** Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar Kementerian/ Lembaga dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar; serta **(f)** Mendorong pasar karbon di sektor kehutanan untuk menuju *Nationally Determined Contribution* 2030 dan *Nett Zero Emission* (NZE)

Justifikasi rencana pendapatan PNBP 2024 yang mengalami peningkatan dan/ atau penurunan dibandingkan dikarenakan sebagai berikut : (a) PNBP Penggunaan Kawasan Hutan mengalami penurunan target karena terdapat beberapa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) masa berlakunya telah berakhir di tahun 2023; (b) Terdapat beberapa pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mengembalikan sebagian atau seluruh areal PPKH karena dinilai sudah tidak mempunyai nilai ekonomi; (c) PNBP bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) disusun dengan mempertimbangkan di tahun 2024 kondisi ekonomi sudah tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga kunjungan wisata ke kawasan konservasi diprediksi normal sepenuhnya; (d) Dasar perhitungan PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi (DR) TA. 2024 disusun berdasarkan produksi hasil hutan bahwa target kayu bulat produksi Hutan Alam 9,908 juta m3, kayu bulat produksi Hutan Tanaman 45 juta m3 ,kayu bulat produksi Perhutani dari Jati 1.380 ribu m3, serta hasil hutan bukan kayu 1.085 ribu m3; (e) Luas dari Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) diperkirakan sebesar 130.900 hektar; dan (f) PNBP lainnya mengalami kenaikan target karena dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Selanjutnya, Kementerian LHK terus meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 183 ribu hektar dan pelepasan Kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria dengan target seluar 119,3 ribu hektar. Peningkatan kapasaitas kelompok tani hutan tidak berhenti pada pemberian akses kelola perhutanan sosial, tetapi Kementerian LHK terus berupaya melakukan pendampingan dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Harapannya upaya tersebut mampu mengungkit nilai transaksi usaha perhutanan sosial pada kelompok-kelompok tani hutan pada tahun 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.

Berikutnya, Kementerian LHK juga terus menjaga kondisi lingkungan dan hutan yang sehat dalam mendukung perikehidupan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri. Upaya tersebut akan dicapai dengan Penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan.

Fokus sasarannya dengan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah serta menjaga kelestarian hutan sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dalam mendukung pembangunan rendah karbon di sebagian besar provinsi Keberhasilannya didekati melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69,74 Poin, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 70 Poin, Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan 17,47 %, dan Laju deforestrasi dan degradasi hutan 0,2 juta hektar per tahun.

Hasil kerja Kementerian akan memberikan dukungan bagi prioritas nasional (PN), yaitu : (PN 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Untuk mencapai kinerja Kementerian LHK tersebut diatas, maka penggunaan belanja kementerian diarahkan untuk menegaskan pesan pembangunan rendah karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk Indonesia yang semakin tangguh. Sasaran utamanya untuk mengikhtisarkan upaya peningkatan produktivitas tapak hutan, penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada sampai batas toleransi yang dibutuhkan

Pada tahun 2024 Kementerian LHK memperolah anggaran belanja sebesar Rp 7,715 triliun, terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 5,809 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 1,64 triliun, Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 210,48 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 50,27 miliar

Seluruh aktifitas pembangunan Kementerian LHK difasilitasi dalam 5 (lima) program. Kelima program itu adalah program dukungan manajemen indikasi anggaran sebesar Rp.3,653 triliun, program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp.2,516 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp.190,13 miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp.1,202 triliun, dan program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp.169,3 miliar.

Untuk menebalkan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, pada belanja Kementerian LHK 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,780 triliun atau 23,24% dari total anggaran belanja kementerian untuk anggaran belanja yang berkarakteristik untuk pemberdayaan masyarakat.

Anggaran belanja berbasis masyarakat ini meningkat 5,95% (YoY) jika diperbandingkan dengan anggaran belanja tahun 2023. Peningkatan anggaran belanja berbasis masyarakat pada tahun 2024 menjadi salah satu investasi Kementerian LHK terhadap modal sosial masyarakat di tingkat tapak.

Jenis kegiatan anggaran belanja berbasis masyarakat meliputi : Fasilitasi UMKM untuk Kegiatan SVLK, Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kebun Bibit Rakyat, Produksi dan Distribusi Bibit Berkualitas, Penyediaan Bibit, Bangunan Konservasi Tanah dan Air, Rehabilitasi Mangrove, Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi, Fasilitasi Kelompok Masyarakat Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi, Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari),

Penanaman Intensif Bersama Masyarakat, Pemeliharaan Bersama Masyarakat, Rehabilitasi Terumbu Karang Bersama Masyarakat, Pengendalian Jenis Invasif, Penanaman Pengkayaan Bersama Masyarakat, Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, Fasilitasi Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan Mandiri, Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha, Bang Pesona dan Alat Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes, Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK, Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas, Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional, Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah, Fasilits Pengurangan Sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut, Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Revegetasi Ekosistem Gambut, Revitalisasi Mata Pencaharian dan Ekonomi Masyarakat, Rehabilitasi Mangrove, Desa Mandiri Peduli Gambut, Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat, Program Kampung Iklim, dan Pengelolaan KHDTK.

Kementerian LHK juga mengalokasikan anggaran belanja pendidikan yang bersifat mandat dari Undang – Undang. Besaran anggaran belanja pendidikan di Kementerian LHK sebesar Rp.126,27 miliar. Anggaran pendidikan tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dengan target jumlah lulusan sebanyak 491 orang yang kompeten dan berorientasi pada dunia usaha.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan belanja melalui konsep *value for money* dan penguatan konsolidasi fiskal pada penganggaran Kementerian LHK adalah dengan 1) Memprioritaskan terhadap belanja pegawai sebagai usaha menjaga ketahanan dan daya beli pegawai dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, 2) Mengurangi perjalanan dinas dan rapat di luar kantor serta belanja yang tidak berkaitan langsung dalam pencapaian milestone dan sasaran utama, 3) Melaksanakan penandaan anggaran terhadap pendamping hibah luar negeri, dan 4) Meningkatkan kualitas belanja dengan memperhatikan Kelompok Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

Susur Hutan mangrove
Menyiapkan generasi cinta lingkungan para calon pemimpin di seluruh pelosok Nusantara yang tergabung dalam Green Leadership Indonesia beach ke-2 menelusuri hutan mangrove Graha Indah di Balikpapan

Foto oleh : Sandi Kusuma

KESINAMBUNGAN

TEMA PEMBANGUNAN

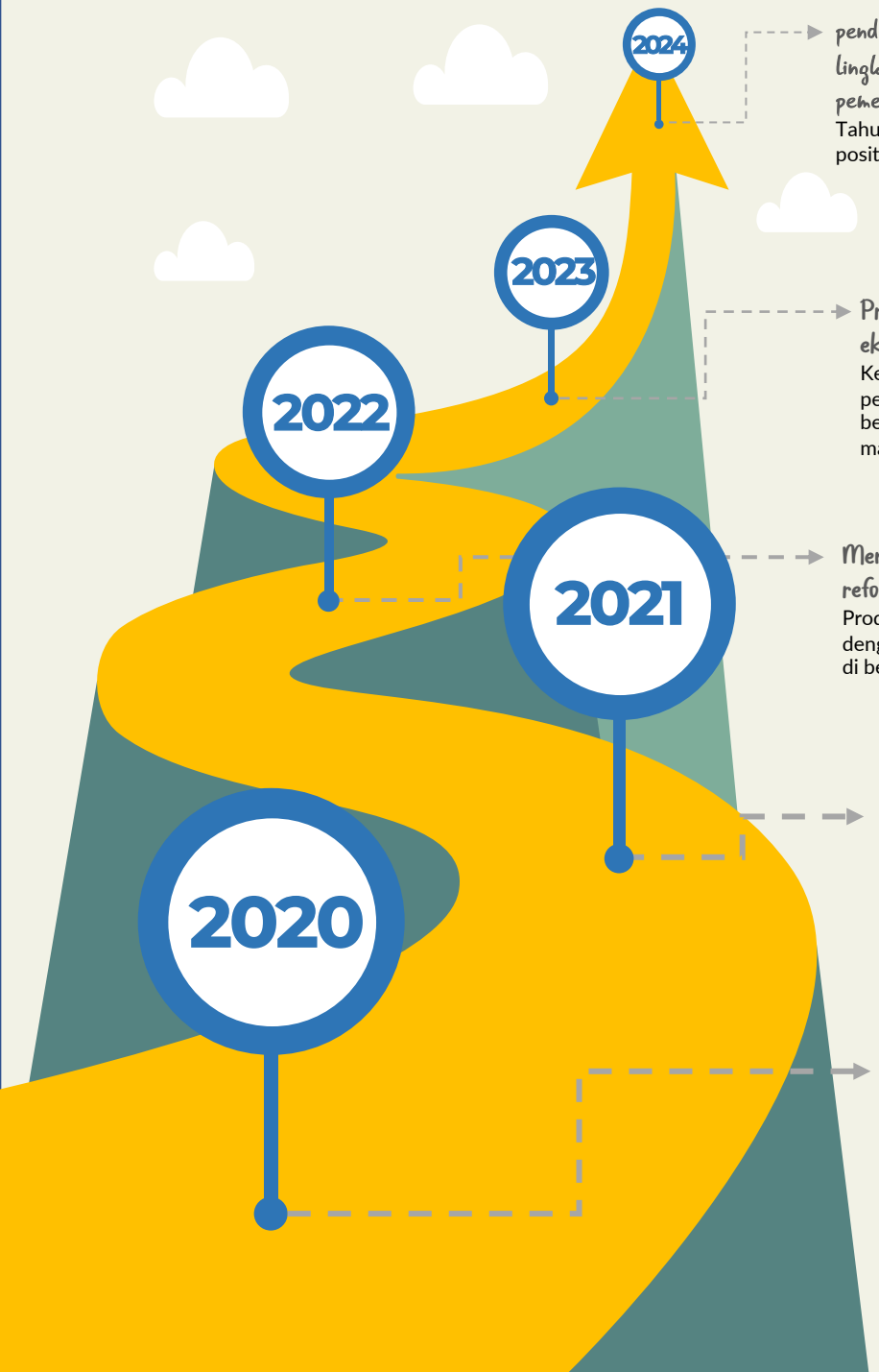

pendulum perubahan yang mengayunkan geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah

Tahun 2024 akan di dorong dari geliat di beberapa titik ini membawa energi positif sehingga seluruh provinsi di Indonesia menunjukan geliatnya.

Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia

Keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.

Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi birokrasi

Produktivitas masyarakat tingkat tapak untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dengan akses kelola hutan dan pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular.

Menebalkan modal sosial, memperkuat kinerja positif pembangunan LHK

Pengelolaan yang saling sinergi dan tanggap dengan adanya perubahan menjadi modal utama dalam pembangunan yang tangguh. Kementerian LHK optimis melanjutkan dan meningkatkan kinerja dalam melestarikan alam dan mendukung peningkatan ekonomi yang tangguh melalui pendampingan masyarakat dan pemulihan lingkungan.

Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah

Tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa dibalik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor: SK. 1.263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34)

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ SET.1/6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); dan

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
KEDUA	:	Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
KETIGA	:	Unit Kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait;
KEEMPAT	:	Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2024, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2024; dan
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 27 November 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth:
Seluruh Pejabat Eselon I untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
SK. 1.263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

Hamparan savana bekol tempat hidup satwa Banteng Jawa (*Bos javanicus*), Rusa Jawa (*Rusa timorensis*), Merak Hijau (*Pavo muticus*), Kerbau (*Bubalus bubalis*), Macan Tutul (*Panthera pardus*) dan Ajag (*Cuon alpinus*).

Foto oleh : Saraswati W

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ini disusun paralel dengan proses penyusunan R-APBN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Semangatnya adalah memperkuat internalisasi pembangunan nasional ke dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam satu derap langkah yang prosesnya di awali dari pembahasan teknokratik antar Kementerian di Pemerintah hingga pembahasan politik di Komisi IV DPR RI.

Tema Renja Tahun 2024 ini adalah **geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata**. Dari sini, Kementerian ingin menguntai pesan bahwa hasil kerja-kerja di tingkat tapak mulai bisa diartikulasikan dalam pembangunan wilayah. Setidaknya dalam narasi besar bahwa entitas tapak lingkungan hidup dan kehutanan yang senantiasa berkiblat pada kelestarian lingkungan dapat menjadi teladan dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan memeratakan pembangunan wilayah. Setidaknya, di setiap provinsi, Kementerian berharap teladan teladan itu bisa berjumlah 1 hingga 2 entitas tapak.

Kementerian mempercayai bahwa perubahan yang menguntai hingga ke tingkat tapak, senantiasa dimulai dari denyutan tata kelolanya. Dalam skenario Kementerian, tata kelola (internal proses) yang baik akan mendenyutkan perbaikan lingkungan dan sosial (pada skala costumer perspektif) dan berujung pada perbaikan ekonomi (stakeholder perspektif). Mari kita lihat nukilan data untuk membuktikan betapa bahwa Kementerian ini memiliki modal kerja yang cukup dalam menjemput pembangunan tahun 2024.

Sumbangan lingkungan hidup dan kehutanan pada pembentukan produk domestik bruto Indonesia tahun 2022 sebesar Rp. 130,923 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian pada tahun 2022, sebesar Rp.6,350 triliun, kita mendapatkan angka bahwa dalam setiap rupiah yang dibelanjakan (termasuk di dalamnya adalah belanja pegawai) mengular hingga 20,62 kali lipat. Pendekatan yang sama jika digunakan pada tahun 2021 angkanya sebesar 16,71 kali lipat. Dan tahun 2020 sebesar 16,66 kali lipat. Dari perbaikan *value for money* ini, Kementerian hendak menyampaikan bahwa perbaikan proses bisnis dalam tata kelola sedang dan terus berlangsung, semakin baik dan semakin berdampak bagi geliat tapak.

Salah satu contoh perbaikan proses bisnis ini adalah perbaikan kualitas belanja yang langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, Kementerian menyebutnya kegiatan berbasis masyarakat. Angka pada tahun 2022 sebesar Rp.0,537 triliun. Pada tahun 2023, jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp.1,674 triliun dan pada tahun 2024 jumlah ditingkatkan menjadi Rp. 1,780 triliun. Gugusan data ini akhirnya menjadi relevan jika kita menilik data Badan Pusat Statistik bahwa proporsi angka kemiskinan yang menyebar di perdesaan, seperempatnya tinggal di tepi hutan. Datanya menyebutkan bahwa dari jumlah desa sebanyak 84.904 di Indonesia, diperkirakan 23,88% tinggal di dalam dan sekitar hutan. Angkanya 3.406 desa (4,05%) berada dalam kawasan hutan dan sebanyak 16.871 desa (19,99%) berada di sekitar hutan. Dengan demikian, Kementerian ini sungguh berada pada garda depan dalam menyelesaikan seperempat kantung kemiskinan di perdesaan.

Untuk menegaskan kembali betapa Kementerian ini memusatkan perhatian dalam perbaikan tata kelola, setidaknya mari kita singgahi hubungan antara peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KLHK (selanjutnya di sebut dengan SAKIP) yang mampu mendorong pertumbuhan investasi dan penerimaan negara bukan pajak di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2021 kenaikan SAKIP sebesar 0,26 poin mampu meningkatkan nilai investasi sebesar Rp. 6,2 triliun dan angka PNBP sebesar Rp. 1,26 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2022, peningkatan nilai SAKIP sebesar 0,8 poin mampu mengungkit kenaikan investasi sebesar Rp. 3,95 triliun dan angka PNBP sebesar Rp. 0,72 triliun. Kisah ini ingin menegaskan bahwa derap langkah perbaikan birokrasi telah mengayunkan dampak bagi perbaikan ekonomi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Mungkin tidak cukup untuk memotret dan mengungkapkan perbaikan lingkungan hidup dengan saduran data-data. Kementerian ingin bergerak ke contoh yang lebih riil. Jika data laju penyusutan hutan menunjukkan bahwa tata kelola hutan semakin bisa dikonsolidasikan. Maka contoh di lapangan memperkuat hal ini. Kelahiran satwa kunci yang menjadi kebanggaan Indonesia mulai bisa dilihat. Diantaranya adalah badak jawa, badak sumatera, gajah sumatera, orangutan Kalimantan dan elang jawa. Bahkan di Kalimantan Barat, wilayah hutan yang dulunya terbakar pada tahun 1982 dan 1997, berdasarkan data patroli bersama masyarakat kini telah mulai bisa ditemukan orangutan yang singgah dan memperluas teritorinya. Bagi Kementerian, kondisi mencerminkan bahwa penyusutan hutan tak lagi hanya bisa dikonsolidasikan, namun justru mendapatkan makna bahwa hutan terus tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika proses alaminya ke arah semakin baik. Di sini, Kementerian menyebut pengawalan proses suksesi hutan berjalan pada koridor yang baik.

R-APBN Kementerian Tahun 2024 memberikan profil pendapatan sebesar Rp.7,49 triliun dengan pagu belanja sebesar Rp.7,71 triliun. Sasaran makro ekonomi pembangunan LHK yang hendak diwujudkan pada tahun 2024, didefinisikan yaitu : (a). Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK sebesar 3-4%. Selanjutnya, di dalam konteks pembangunan nasional, sasaran ini akan digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan surplus neraca perdagangan non migas; (b). Peningkatakan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat (KUPS, KTH, kelompok pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung, kelompok usaha bank sampah) sebesar 5-7%. Sasaran ini akan diartikulasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan indeks desa membangun; dan (c). Penurunan beban lingkungan sebesar 2-3%. Angka ini didekati dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, penurunan laju penyusutan hutan, dan perbaikan parameter lingkungan hidup termasuk penurunan timbulan sampah dan limbah. Keberhasilan dari sasaran ini akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat narasi pembangunan Indonesia yang semakin netral karbon.

Kementerian juga berusaha memperkirakan target-target yang telah didefinisikan ke dalam angka yang lebih mudah untuk dilacak. Diantaranya, **pertama**, angka investasi pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.17,91 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 307 ribu orang. **Kedua**, ekspor kayu olahan direncanakan sebesar US$ 16 miliar, yang akan didukung dari produksi kayu bulat sebesar 60 juta meter kubik dan produksi kayu olahan sebesar 52,38 juta meter kubik oleh 540 unit industri hasil hutan. Dan **ketiga**, nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan (termasuk di dalamnya kelompok perhutanan sosial) diperkirakan sebesar Rp.1,8 triliun dari produksi barang dan jasa hasil hutan bukan kayu.

Sekali lagi, Kementerian ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi hasil kerja-kerja di tahun tahun sebelumnya telah membentuk modal kerja dan modal sosial dalam menjemput dan memenuhi kinerja yang telah digariskan dan disepakati secara teknokratik dan politik pada tahun 2024. Dan, akhirnya, semoga dokumen Rencana Kerja Kementerian Tahun 2024 ini bermanfaat dan Allah SWT senantiasa meridloi langkah kita. Amin.

Jakarta, 27 November 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Lahirnya budaya dan seni. Eksotika pohon yang sudah tua membawa suasana masa lampau, Tampak muda mudi berpose mengenakan pakaian daerah dengan latar pohon Trembesi di Dejawatan Kabupaten Banyuwangi

Foto oleh : Sandi Kusuma

DAFTAR ISI

BAB I.
Pendahuluan
Hal. 2

Hal. 3 Milestone Pembangunan

Hal. 4 Kelembagaan

BAB II.
Capaian Kinerja Pembangunan LHK
Hal. 7

Hal. 8 Capaian Kinerja KLHK

BAB III.
Rencana 2024
Hal. 68

Hal. 69 RKP Bidang LHK

Hal. 70 Rencana Kerja Kementerian LHK

Hal. 78 Pendapatan Kementerian LHK

Hal. 83 Belanja Kementerian LHK

BAB IV.
Penutup
Hal .119

Hal. 120 Konklusi

Lanskap Taman Nasional Baluran
Membentang dari pertautan ekosistem pantai, mangrove, savana dan pegunungan

Foto oleh : Triandu

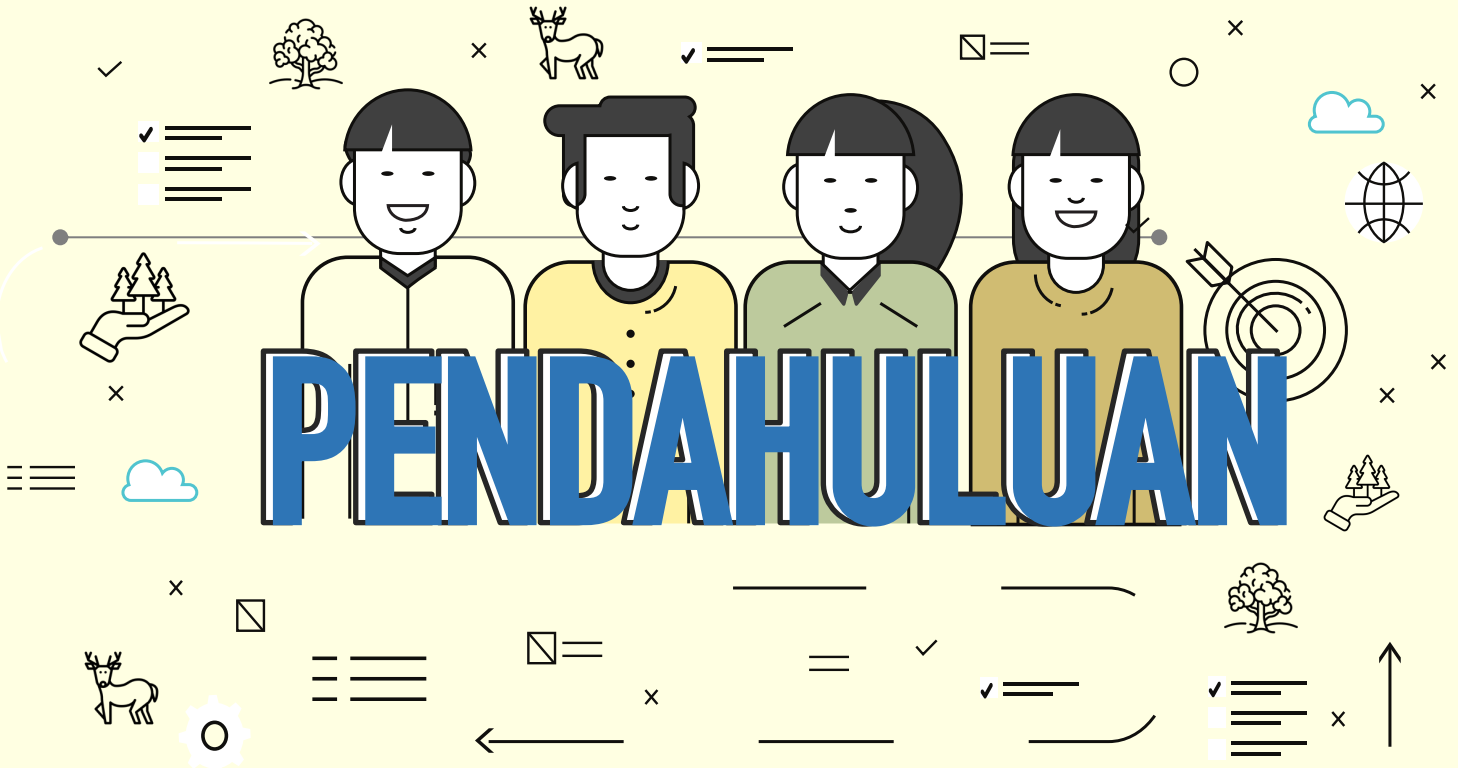
PENDAHULUAN

MILESTONE PEMBANGUNAN

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa dibalik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang. Selanjutnya pada tahun 2021, Kementerian LHK terus berupaya untuk menebalkan modal sosial, dan memperkuat kinerja positif pembangunan LHK. Pengelolaan yang saling sinergi dan tanggap dengan adanya perubahan menjadi modal utama dalam pembangunan yang tangguh. Kementerian LHK optimis melanjutkan dan meningkatkan kinerja dalam melestarikan alam dan mendukung peningkatan ekonomi yang tangguh melalui pendampingan masyarakat dan pemulihan lingkungan. Kondisi masyarakat yang semakin stabil dan wabah pandemi yang berangsur hilang dari bumi pertiwi merupakan modal sosial bagi keberlangsungan pembangunan LHK. Bercermin pada tahun 2021, arah pembangunan LHK tahun 2022 adalah memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi birokrasi. Pemanfaatan ragam hayati secara aktual oleh masyarakat seperti menemukan momentumnya di masa pandemi. Di sini, Kementerian menyebutnya sebagai upaya membangun transformasi keunggulan ragam hayati dan produktivitas masyarakat tingkat tapak untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dengan akses kelola hutan dan pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular. Tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian LHK bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia

Tahun 2024 merupakan periode akhir pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 dan menjadi penentu dalam menilai keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan periode tertentu. Sebagai tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini di fokuskan kepada pemenuhan target untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024 mengusung tema pendulum perubahan yang mengayunkan geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah. Pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia mulai terlihat dari beberapa titik menunjukan eksistensinya, Tahun 2024 akan di dorong dari geliat di beberapa titik ini membawa energi positif sehingga seluruh provinsi di Indonesia menunjukan geliatnya.

KELEMBAGAAN

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, KLHK menyelenggarakan fungsi diantaranya :

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, dan 18 Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri. Struktur ini diharapkan memacu KLHK untuk lebih optimal dalam mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.

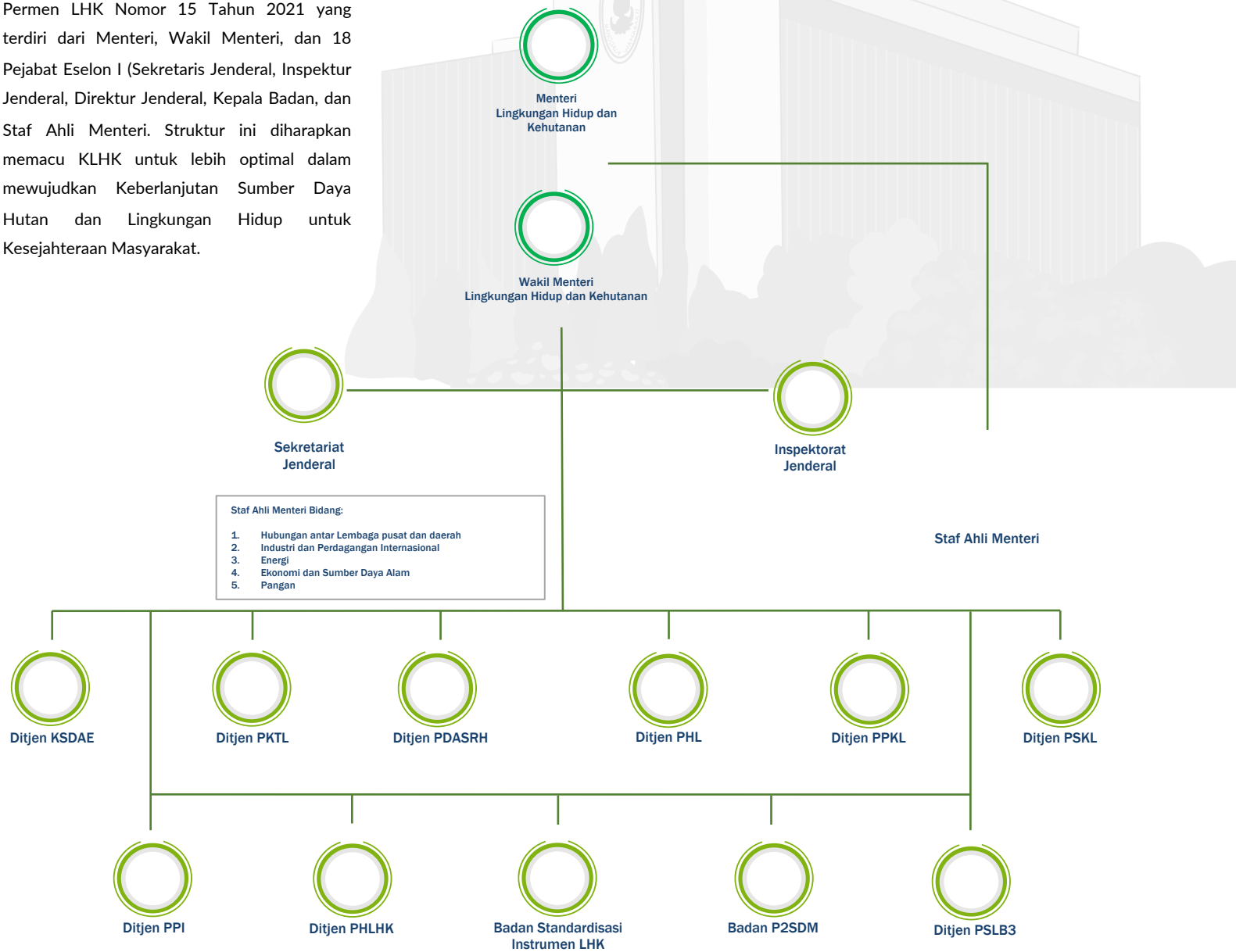

Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Magnet kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Menjadi penggerak ekonomoni regional dan memberi sumbangsih pembangunan nasional

Foto oleh : Asep Robik

CAPAIAN
KINERJA PEMBANGUNAN

BERDASARKAN Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, di mana terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis dengan masing-masing IKU pembentuknya sebagai berikut:

Sasaran strategis 1, yaitu Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 mencapai 72,42 poin dari target 69,22 poin, yang berarti melebihi target sebesar 104,62%
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan dan limbah tercapai 56,83% dari target yang ditetapkan 17,22%, sehingga persentase capaiannya lebih dari 330,02%.
3. Penurunan Laju Deforestasi tercapai sebesar 0,11 juta Ha per tahun, yang artinya terjadi pelambatan laju deforestasi dari target 0,20 juta Ha/tahun, atau secara persentase sebesar 181,82%.
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, mencapai 50,70 poin atau 78% dari target sebesar 65,00 poin.
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya capaiannya sebesar 30.712 Ha dari target 30.850 Ha atau 99,55%.
6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*) tercapai sebesar 12,20 juta Ha dari target sebesar 10,4 juta Ha atau 117,22%.

Sasaran strategis 2, yaitu Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor LHK pada PDB Nasional mencapai 130,92 triliun rupiah atau 120,11% dari target sebesar 109 triliun rupiah.
2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting* mencapai 15,25 miliar dolar Amerika dari target 14 miliar dolar Amerika atau sebesar 108,9%.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK mencapai 6,38 triliun rupiah dari target 4,90 triliun rupiah atau 139,38%.

Sasaran strategis 3, yaitu Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan mencapai 6,51 juta Ha melebihi target penetapan sebesar 5,90 juta Ha atau 110%.
2. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 113,66 ribu Ha, melebihi dari target 94,75 ribu Ha atau 119%.
3. Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat (luas hutan sosial) mencapai 427,45 ribu Ha, melebihi dari target 180 ribu Ha atau tercapai 237,41%.

Sasaran Strategis 4, yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 2,73 poin dari target 3,81 poin yang berarti tercapai 75,83%.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan mencapai 2,40 poin melebihi dari target sebesar 2,30 poin atau 104,35%.
3. Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, mencapai 1.370 kasus dari target sebanyak 981 kasus atau 139,65%.
4. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, mencapai 76,14 poin atau 94,00% dari target sebesar 81,00 poin.
5. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK sesuai target, tercapai 100%.
6. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK mencapai 89,98 poin, melebihi target sebesar 75,00 poin atau sebesar 119,97%
7. Level Maturitas SPIP KLHK pada tahun 2022 meningkat menjadi 3 level dari target 3 level dengan capaian 100%.

Indikator Utama KLHK Tahun 2022

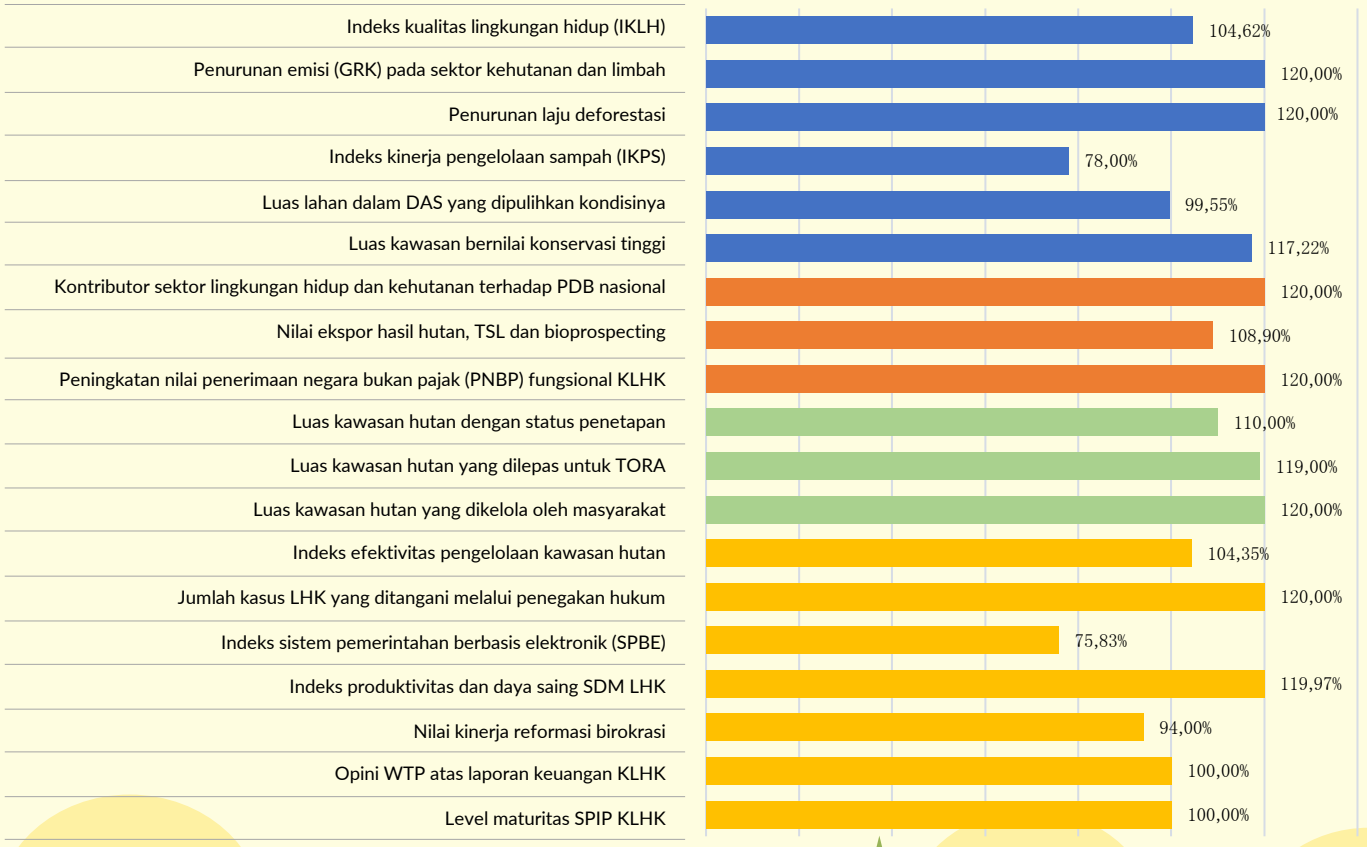

SASARAN STRATEGIS

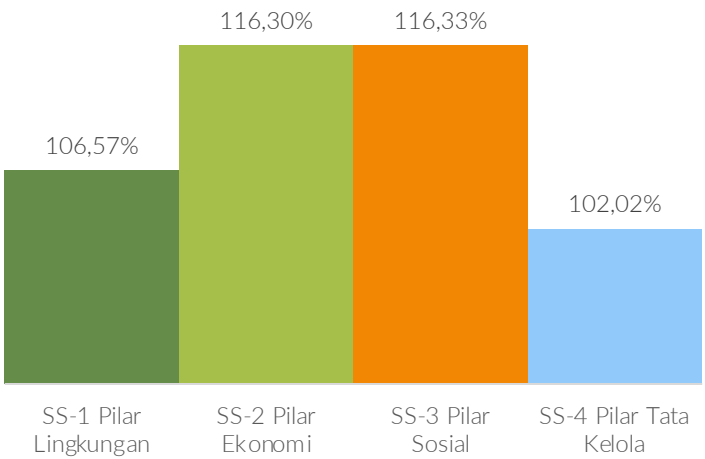

110,30%

KINERJA FISIK SASARAN STRATEGIS

97,58%

REALISASI ANGGARAN

Kinerja fisik pemenuhan Sasaran Strategis dihitung dari rerata capaian setiap Indikator Kinerja Utama, dimana capaian yang melebihi 120% diperhitungkan maksimal 120%. Realisasi anggaran TA. 2022 merupakan realisasi anggaran DIPA BA 029 yang di dalamnya terdapat anggaran KLHK dan BRGM.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dan sasaran strategis di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pembangunan yang dilakukan Kementerian LHK pada tahun 2022 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Tujuan untuk terus mempertahankan kualitas lingkungan pada rentang yang baik, menahan laju deforestasi, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mengurangi beban lingkungan akibat pencemaran dan sampah, berjalan seiring dengan positifnya parameter ekonomi khususnya dalam upaya untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan termasuk dalam rangka memutar ekonomi (*circular economy*). Secara bertahap juga tersurat arah perbaikan menuju keadilan sosial bagi masyarakat dengan semakin banyaknya distribusi lahan hutan baik dalam bentuk akses maupun aset.

Selain dibandingkan dengan target tahunan, pada setiap indikator juga dilakukan analisis terhadap target 5 (lima) tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024. Bentuk analisis ini memberikan gambaran posisi saat ini terhadap kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Kemudian, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja atas alokasi anggaran yang telah dibelanjakan untuk pemenuhan kinerja, dilakukan analisis efisiensi untuk membandingkan capaian fisik dengan realisasi anggaran pada setiap indikator. Analisis ini digunakan untuk mengukur apakah anggaran yang direncanakan telah efisien dalam menghasilkan target yang ditetapkan.

Dari penjelasan capaian pada masing-masing Sasaran Strategis di atas, disimpulkan bahwa nilai kinerja fisik pembangunan KLHK berada pada angka 110,30%. Angka tersebut dibentuk dari nilai masing-masing pilar sasaran strategis yaitu: Pilar Lingkungan sebesar 106,57%, Pilar Ekonomi 116,30%, Pilar Sosial 116,33 persen dan Pilar Tata Kelola 102,02%.

Realisasi anggaran BA.029 tahun anggaran 2022 mencapai 97,58%. Angka ini merupakan realisasi anggaran tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INTERAKSI antara pertumbuhan populasi, kepadatan, dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya Interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat

Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta stimulasi baik berupa penerapan peraturan, dan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri 18/2020, pencapaian IKLH pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap target IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH kabupaten/kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

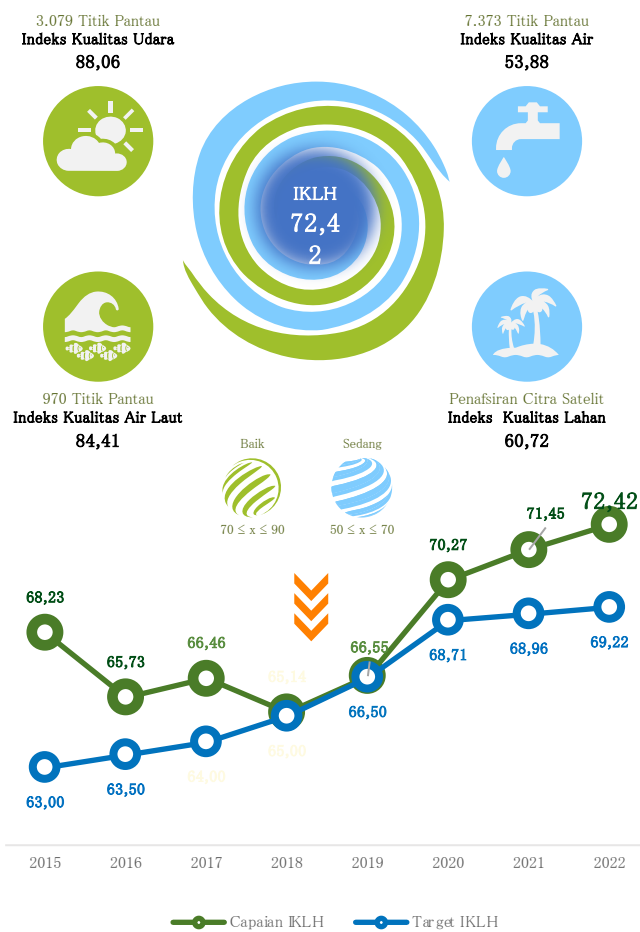

Gambar Target dan Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO_3-N), dan TSS. (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO_2, dan SO_2, (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter tutupan hutan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan/lahan, dan dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut, (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

No.	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	Aceh	60,41	90,62	76,24	89,20	78,29
2	Sumatera Utara	61,20	89,69	48,69	85,19	74,11
3	Riau	53,88	90,69	50,00	83,95	72,10
4	Kepulauan Riau	56,79	90,27	58,29	85,56	74,17
5	Jambi	49,49	89,85	52,28	81,67	70,32
6	Bengkulu	46,18	91,27	55,19	88,02	70,82
7	Sumatera Barat	55,64	90,65	64,01	88,32	74,98
8	Sumatera Selatan	59,85	89,10	42,16	81,03	72,12
9	Kepulauan Bangka Belitung	57,68	89,75	39,28	85,02	71,67
10	Lampung	54,72	87,32	34,29	86,48	69,10
11	Banten	55,49	73,97	38,96	77,76	63,41
12	DKI Jakarta	41,17	68,06	27,07	80,08	54,65
13	Jawa Barat	47,13	80,31	41,88	87,83	64,66
14	Jawa Tengah	48,16	85,14	42,45	84,70	66,85
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	39,31	89,16	46,28	83,58	65,96
16	Jawa Timur	56,13	84,28	47,36	85,45	69,92
17	Bali	53,50	89,19	43,36	88,49	70,89
18	Nusa Tenggara Barat	43,39	89,3	65,61	89,48	70,56
19	Nusa Tenggara Timur	52,62	91,52	58,74	86,96	73,49
20	Kalimantan Barat	55,52	90,90	59,05	63,30	71,90
21	Kalimantan Tengah	56,69	91,25	75,03	83,92	76,62
22	Kalimantan Selatan	54,63	89,52	50,52	84,42	71,97
23	Kalimantan Timur	53,02	87,59	81,85	81,45	74,46
24	Kalimantan Utara	54,46	94,52	100	84,85	80,67
25	Sulawesi Selatan	57,79	90,35	55,46	85,59	74,17
26	Sulawesi Tenggara	56,21	92,05	74,33	85,70	76,88
27	Sulawesi Tengah	57,71	91,86	82,48	88,42	78,66
28	Sulawesi Barat	56,41	91,88	71,88	87,92	76,77
29	Gorontalo	58,07	94,47	85,45	83,31	79,79
30	Sulawesi Utara	48,24	92,41	61,89	82,65	72,37
31	Maluku	52,08	91,46	90,21	89,28	77,69
32	Maluku Utara	55,69	92,74	86,58	87,83	78,84
34	Papua Barat	62,00	95,79	100	89,30	84,22
33	Papua	55,07	95,32	100	87,29	81,46
Nasional		**53,88**	**88,06**	**60,72**	**84,41**	**72,42**

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2015 – 2022

Gambar Perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2022

B. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PERUBAHAN IKLIM menjadi perhatian dunia internasional karena akan mempengaruhi pola iklim global sehingga berdampak besar bagi sosial ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan seluruh dimensi kehidupan manusia. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu komitmen bersama negara-negara di dunia untuk menahan laju peningkatan suhu rata-rata global yang tertuang dalam *Paris Agreement*. Indonesia telah menetapkan kontribusi target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebut *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan 41% dengan dukungan kerja sama internasional (*conditional*) pada tahun 2030.

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan komitmen pemerintah yang dilaksanakan pada 5 (lima) sektor yaitu : sektor energi, sektor *industrial process and product use* (IPPU), sektor pertanian, serta sektor kehutanan dan limbah. Kementerian LHK mengemban amanah sebagai koordinator atau *national focal point* (NFP) untuk pengurangan emisi GRK pada 5 sektor, juga sebagai penanggung jawab aksi untuk pengurangan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan.

Pengurangan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan mencapai 56,83 persen atau terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 499,72 juta ton CO_2e berdasarkan perhitungan dari hasil inventory sebesar 379,61 juta ton CO_2e yang dibandingkan dengan baseline (BAU) sebesar 879,33 juta ton CO_2e.

Pengurangan emisi GRK pada sektor kehutanan sebesar 477,58 juta ton CO_2e atau sebesar 65,67 persen dari target baseline sebesar 727,29 juta ton CO_2e sedangkan pengurangan emisi GRK pada sektor limbah sebesar 14,56% persen atau 22,14 juta ton CO_2e dari target baseline 152,04 juta ton CO_2e. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel Pengurangan Emisi GRK Berdasarkan Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK dengan *Baseline* (BaU) Tahun 2021 pada Sektor Kehutanan dan Limbah

	Limbah	Kehutanan	Total Kehutanan + Limbah
Baseline (BaU) (Juta ton CO_2e)	152,04	727,29	879,33
CM1 (Juta ton CO_2e)	149,56	387,86	537,42
Inventory (Juta ton CO_2e)	129,9	249,71	379,61
Pengurangan Emisi (Juta Ton CO_2e)	22,14	477,58	499,72
Persentase emisi (Capaian terhadap BAU) (%)	14,56%	65,67%	56,83%

penurunan emisi GRK mencapai 56,83 persen dari target kinerja 17,22 persen. Persentase capaian didapatkan dari angka capaian dibandingkan dengan baseline (BaU) tersebut.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini dengan sebesar 56,83 persen mengalami penurunan sebesar 13,76% (YoY) dari capaian tahun sebelumnya sebesar 65,90 persen. Capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 17,54 persen memperoleh capaian 324%.

INVENTARISASI EMISI
GAS RUMAH KACA NASIONAL

Komitmen nasional yang tertuang dalam Dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution)* menetapkan target *unconditional* (CM 1) sebesar 29% dan target *conditional* (CM 2) sebesar 41% dibandingkan dengan skenario *Business as Usual* (BaU) di tahun 2030. BaU merupakan kondisi pada saat sebelum dilaksanakan aksi/kegiatan mitigasi.

Perhitungan emisi/serapan GRK (Hasil I*nventory*) diperoleh melalui perhitungan data aktivitas (AD) dengan faktor emisi (EF). Data aktivitas merupakan besaran kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan atau menyerap GRK. Sedangkan faktor emisi adalah besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer atau diserap persatuan aktivitas tertentu.

Counter Measure 1 (CM 1) adalah kondisi skenario mitigasi dengan mempertimbangkan target pembangunan sektoral (*unconditional*). *Emission Reduction* (ER) adalah total pengurangan emisi yang diharapkan. Perhitungan ER CM1 didapatkan dari selisih antara BaU dengan CM 1. Sedangkan perhitungan ER CM 1 (%) didapatkan dari nilai ER CM 1 dibandingkan dengan nilai BaU.

Perhitungan Capaian ER (%) didapatkan dari selisih antara BaU dengan Hasil Inventory, kemudian dibandingkan dengan BaU. Nilai Capaian ER (%) ini yang kemudian dijadikan capaian penurunan emisi gas rumah kaca.

Tahun 2021, nilai BaU sebesar 2.031 juta ton CO_2e dan nilai hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK sebesar 1.141 juta ton CO_2e, maka diperoleh pengurangan emisi GRK sebesar 890 juta ton CO_2e. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian pengurangan emisi GRK sebesar 43,84% terhadap nllai BaU di tahun 2021.

Hasil *inventory* emisi GRK tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa Kementerian LHK terus berupaya dalam mengurangi emisi melalui aksi mitigasi perubahan iklim.

Tabel Perhitungan Penurunan Emisi GRK Nasional

	TAHUN																				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baseline (BAU) – Juta tCO_2e	1.334	1.476	1.508	1.540	1.582	1.620	1.682	1.752	1.827	1.908	1.999	2.031	2.104	2.182	2.266	2.358	2.452	2.552	2.652	2.756	2.870
CM 1 – Juta tCO_2e	1.334	1.321	1.331	1.342	1.361	1.377	1.404	1.439	1.474	1.513	1.556	1.543	1.575	1.607	1.642	1.684	1.747	1.817	1.887	1.960	2.036
ER CM 1 – Juta tCO_2e	0	155	177	198	220	243	278	313	353	396	442	488	530	575	623	674	704	734	765	797	833
ER CM 1 – %	0	10,49	11,72	12,88	13,94	15,00	16,54	17,86	19,31	20,73	22,14	24,02	25,17	26,36	27,51	28,60	28,72	28,78	28,85	28,90	29,04
Hasil *Inventory* – Juta tCO_2e	815	937	1.354	1.228	1.635	2.340	1.296	1.314	1.593	1.843	1.050	1.141									
Capaian ER – %	38,94	36,51	10,17	20,28	(3,37)	(44,40)	22,97	25,01	12,83	3,42	47,45	43,84									

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

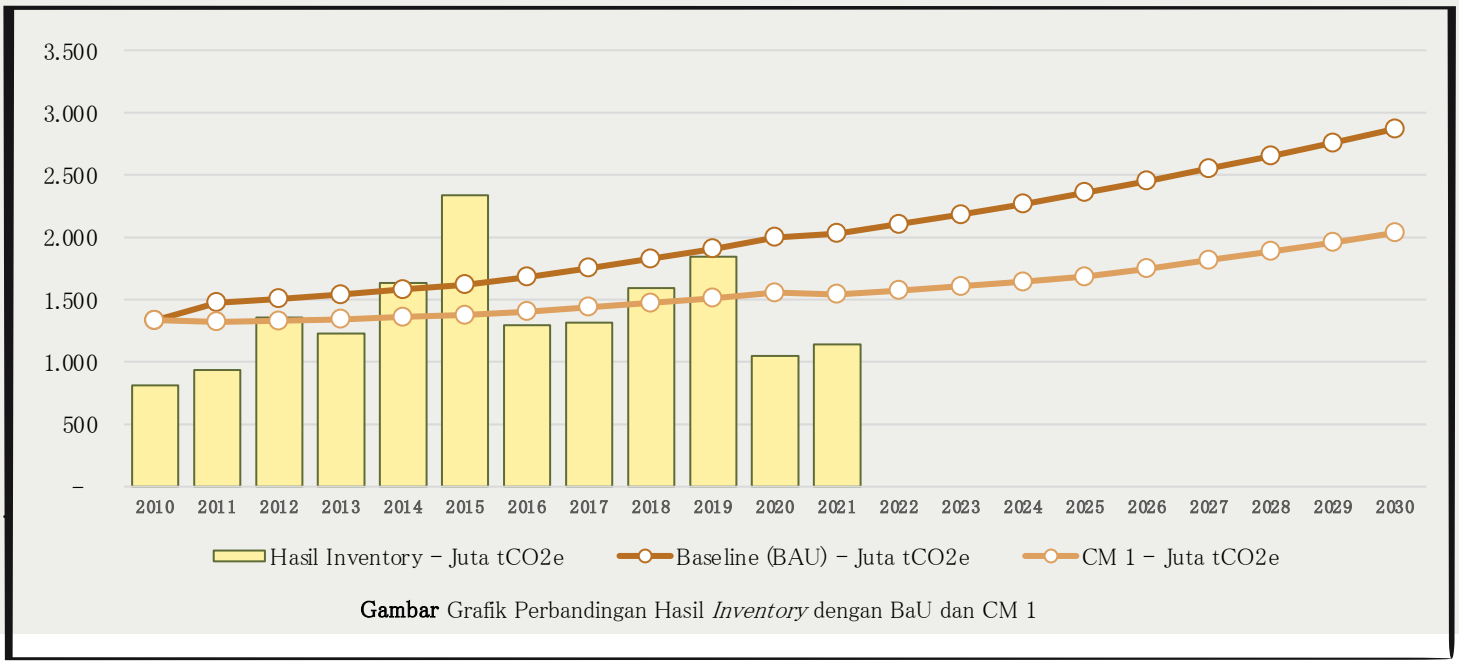

Gambar Grafik Perbandingan Hasil *Inventory* dengan BaU dan CM 1

Berdasarkan grafik Perbandingan hasil *inventory* dengan BaU dan CM 1, hasil *inventory* tahun 2021 mencapai 1.141 juta ton CO_2e. Hasil *inventory* tahun 2021 mengalami peningkatan dari hasil *inventory* tahun sebelumnya. BaU tahun 2021 sebesar 2.031 juta ton CO_2e, sedangkan dengan skenario pembangunan sectoral (CM 1), penurunan emisi GRK menjadi 1.543 juta ton CO_2e

Inventarisasi GRK dilaksanakan pada 5 (lima) sektor, yaitu Energi, Kehutanan, Limbah, Pertanian, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk. Besaran emisi GRK pada masing-masing kategori berdasarkan perolehan terbesar berturut-turut:

1. Energi sebesar 595,86 juta ton CO_2e
2. Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FoLU) sebesar 249,71 juta ton CO_2e
3. Limbah sebesar 129,90 juta ton CO_2e
4. Pertanian sebesar 105,89 juta ton CO2e
5. Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) sebesar 59,38 juta ton CO_2e

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, emisi GRK pada Sektor Energi meningkat 1,98% di tahun 2021, sektor Energi memiliki program dan kebijakan pemerintah terkait pengadaan dan penggunaan energi, serta peran aktif pihak swasta dan masyarakat berupa tindakan yang bersifat mitigasi sektor energi. Sumber emisi pada sektor energi adalah energi industri (penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik, panas, kilang minyak dan proses batubara) diikuti oleh penggunaan bahan bakar pada transportasi dan kegiatan manufaktur.

Emisi GRK pada Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FoLU) tahun 2021 meningkat 36,13% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Sektor Limbah 2,44% lebih tinggi dibandingkan dengan emisi GRK tahun 2020. Sektor Pertanian menyumbang 7,28% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 terhadap emisi nasional tahun 2021. Sumber emisi pada sektor pertanian diantaranya peternakan (pengelolaan kotoran ternak), pembarakan biomassa residu pertanian, pembakaran biomassa pertanian berpindah, aplikasi kapur pertanian dan pupuk urea, emisi langsung dan tidak langsung N_2O) dari tanah terkelola, dan emisi metana dari budidaya padi sawah.

Sektor Industri dan Penggunaan Produk menyumbang 3,83% lebih tinggi dibandingkan emisi tahun 2020 terhadap emisi nasional. Sumber emisi pada sektor Industrl mencakup CO_2, CH_4, N_2O dan PFC dalam bentuk CF_4 dan C_2F_6 yang berasal dari penggunaan energi dan proses produksi.

Emisi GRK tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 secara nasional meningkat 8,62%. Peningkatan ini diakibatkan karena tahun sebelumnya merupakan masa pandemi Covid-19, dimana aktivitas masyarakat berkurang signifikan karena adanya pembatasan, sehingga emisi tahun tersebut yang umumnya diakibatkan karena aktivitas masyarakat juga ikut menurun.

Tahun 2021, masyarakat sudah mulai bangkit dari pandemi Covid-19. Sehingga emisi GRK lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019, emisi GRK tahun 2021 38,09% lebih rendah. Untuk Inventarisasi GRK pada tahun 2022, saat ini masih dalam proses verifikasi.

Tabel Perbandingan Emisi Tahun 2020 dan 2021 per Sektor

Sektor	Tahun (Mton CO_2e)		% penurunan/ peningkatan*
	2020	2021	
Energi	584,28	595,86	↑ 1,98
IPPU	57,19	59,38	↑ 3,83
Limbah	126,80	129,90	↑ 2,44
Pertanian	98,70	105,89	↑ 7,28
FoLU	183,43	249,71	↑ 36,13
Total	1.050,4	1.141	↑ 8,62

* Persen penurunan/peningkatan pada tabel ini adalah penurunan/peningkatan jumlah emisi hasil inventory dari 2021 ke 2022

PERBANDINGAN HASIL INVENTARISASI GRK TERHADAP BAU PADA SEKTOR LIMBAH

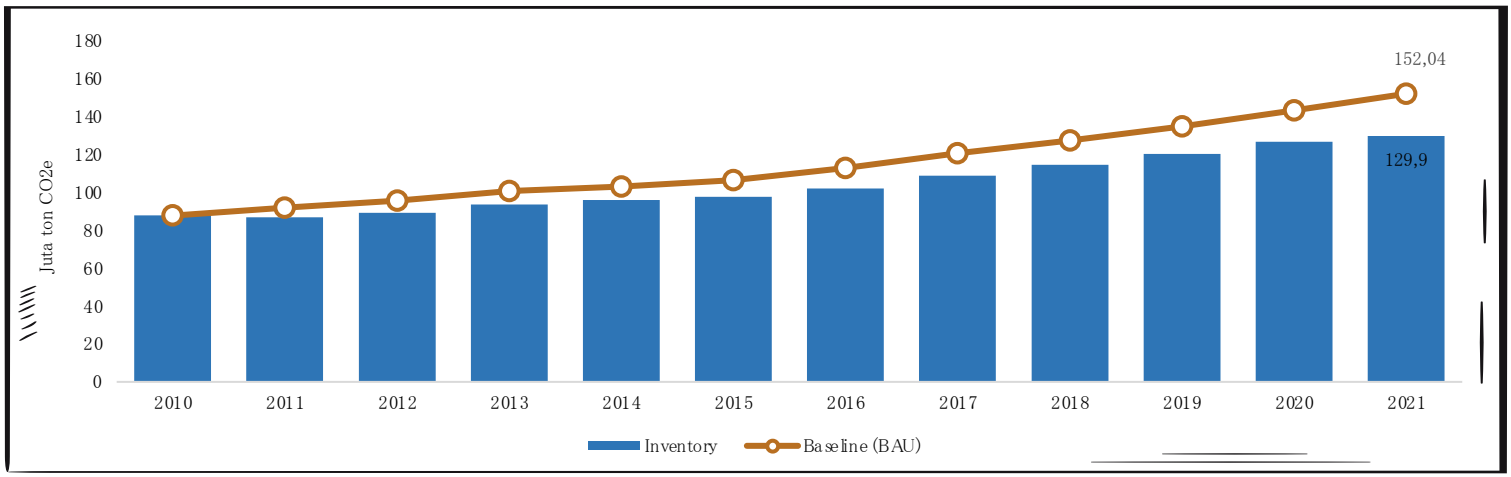

Gambar Grafik Perbandingan Hasil Inventory dengan Bau Sektor Limbah

Tabel Perbandingan Hasil *Inventory* dengan Bau Sektor Limbah

	TAHUN											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	**2021**
Baseline (BAU) - juta ton CO_2e	87,73	91,97	95,75	100,73	103,16	106,46	112,75	120,55	127,39	134,81	143,15	152,04
Inventory – juta ton CO_2e	87,77	86,94	89,21	93,57	95,88	97,54	102,11	108,94	114,64	120,33	126,80	129,90
Penurunan dari BAU juta ton CO_2e	−0,04	5,04	6,54	7,16	7,28	8,92	10,64	11,61	12,75	14,48	16,35	22,14
% Penurunan dari BAU	−0,04%	5,48%	6,83%	7,11%	7,05%	8,38%	9,44%	9,63%	10,01%	10,74%	11,42%	14,56%

Hasil perhitungan inventarisasi GRK tahun 2021 sektor Limbah sebesar 129,90 juta ton CO_2e sedangkan emisi *baseline* (BaU) tahun 2021 sektor Limbah sebesar 152,04 juta ton CO_2e.

Sehingga capaian pengurangan emisi GRK sektor limbah berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi GRK sektor limbah dengan emisi *baseline* NDC (BaU) adalah sebesar 22,14 juta ton CO_2e atau 14,56 persen.

Adapun sumber emisi utama untuk sektor limbah adalah pengolahan limbah cair industri (*industrial wastewater treatment and discharge*), pengelolaan limbah padat domestik pada TPA (*unmanaged solid waste disposal*) dan limbah cair domestik.

Sektor limbah merupakan sektor ketiga penyumbang emisi nasional sebesar 14,56 persen, dan angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 3,24 persen.

PERBANDINGAN HASIL INVENTARISASI GRK TERHADAP BAU
PADA SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

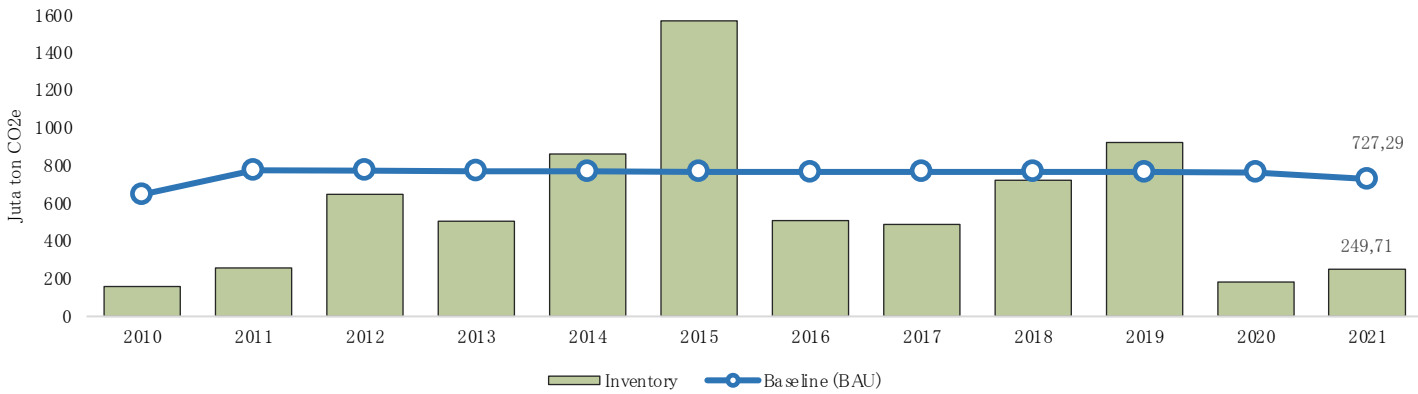

Gambar Grafik Perbandingan Hasil *Inventory* dengan Bau Sektor Kehutanan

Tabel Perbandingan Hasil *Inventory* dengan BaU Sektor Kehutanan

	TAHUN											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baseline (BAU) - juta ton CO_2e	646,58	774,80	772,93	771,03	769,07	767,05	764,97	767,34	766,30	765,20	764,05	727,29
Inventory – juta ton CO_2e	159,48	258,09	646,72	503,33	862,07	1.565,58	507,65	488,52	723,51	922,82	183,43	249,71
Penurunan dari BAU juta ton CO_2e	487,10	516,71	126,21	267,70	– 93,00	– 798,53	257,32	278,82	42,79	–157,62	580,61	477,58
% Penurunan dari BAU	75,34%	66,69%	16,33%	34,72%	–12,09%	–104,10%	33,64%	36,34%	5,58%	–20,60%	75,99%	65,67%

Hasil perhitungan inventarisasi GRK menunjukkan bahwa emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya adalah sebesar 249,71 juta ton CO_2e, sedangkan emisi baseline NDC (BaU) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar 727,29 juta ton CO_2e.

Capaian pengurangan emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2021 berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi GRK sektor kehutanan dengan emisi baseline NDC (BaU) adalah sebesar 477,58 juta ton CO_2e atau sebesar 65,67 persen.

Sumber emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya berasal dari perubahan stok karbon pada biomassa, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut, dengan emisi terbesar bersumber dari dekomposisi gambut (*peat decomposition*).

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya merupakan sektor kedua penyumbang emisi nasional sebesar 65,67%, namun angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 10,33 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perubahan luas tutupan lahan.

C. PENURUNAN LAJU DEFORESTASI

PEMANTAUAN sumber daya hutan dilakukan secara berkala, dengan interval tiga tahun, antara tahun 2000 dan 2009. Dengan kemajuan teknologi penginderaan jauh, sejak 2011, pemantauan sumber daya hutan dilakukan setiap tahun sekaligus penyiapan peta tutupan lahan melalui interpretasi citra satelit resolusi menengah (Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI) dan citra satelit resolusi tinggi (SPOT-6, SPOT-7). Untuk setiap periode satu tahun, proses tersebut telah berhasil mengidentifkasi adanya kenaikan atau penurunan laju deforestasi.

Angka laju deforestasi tahun 2020-2021 mencapai 0,11 juta Ha, di mana angka ini menurun 8,33% dibanding tahun kemarin atau dapat diartikan bahwa kinerjanya semakin baik. Bila dibandingkan dengan targetnya, kinerja laju deforestasi mencapai 181,81% atau melebihi target.

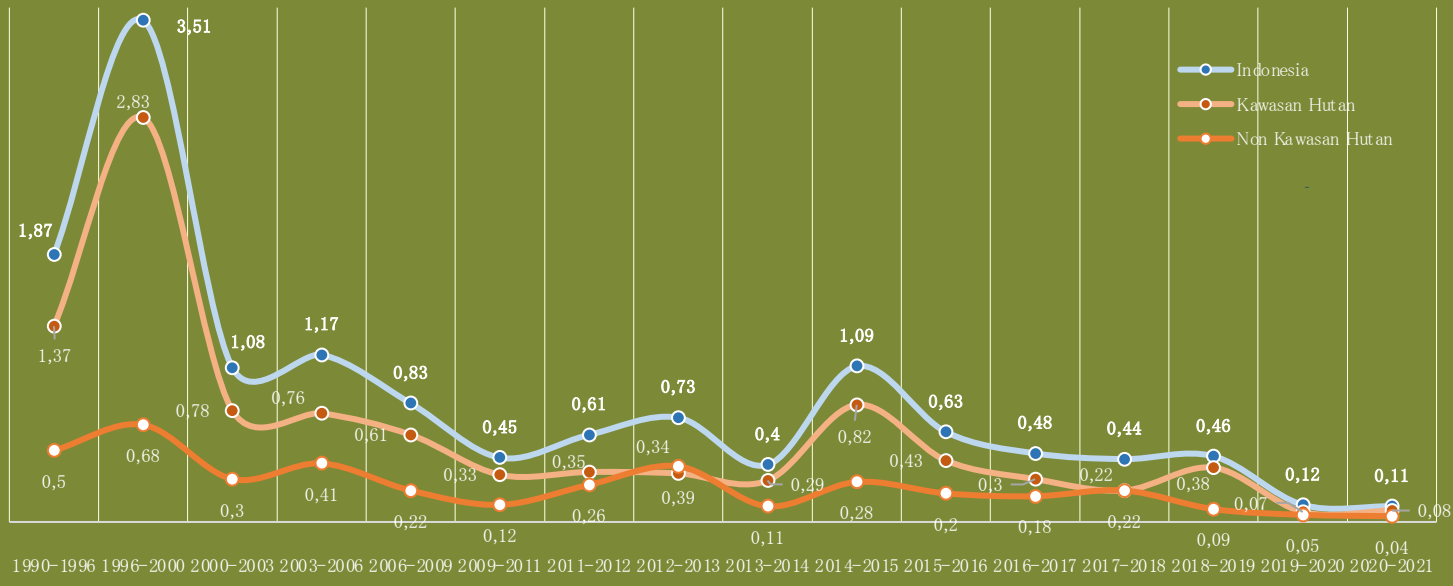

Gambar Grafik Penurunan Laju Deforestasi (Juta Ha)

D. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah. Penilaian pengelolaan sampah ini penting mengingat dibutuhkan standar penilaian yang seragam baik untuk kota metropolitan, kota besar, maupun kecil, selain itu IKPS menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik mengenai pencapaian pengelolaan sampah. Skor dari penilaian ini menunjukkan tingkat pengelolaan sampah di tingkat kota, di mana semakin besar skor berarti kota tersebut semakin andal dalam mengelola sampah/*waste*, bersih, dan sehat. Hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif dan disinsentif, fungsi kontrol, dan mendorong proses perbaikan lestari.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari penilaian IKPS adalah "Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim". Sementara itu, sasaran program ini adalah "Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik". Dalam lima tahun, diharapkan telah dikelola sampah sebesar 128.917.722 ton, yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penilaian IKPS turut menyokong program Prioritas Nasional 6, yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Secara umum, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan alat ukur dengan beberapa dasar hukum, di antaranya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 mengatur Pengelolaan Sampah, kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan oleh produsen sampah/skala terkecil seperti rumah tangga. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik mengatur pengelolaan sampah spesifik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

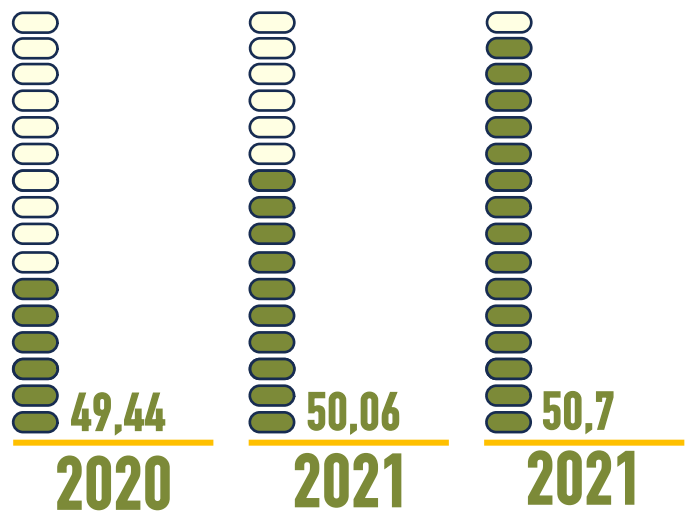

Gambar Tren Nilai IKPS Tahun 2020-2022

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
TERTINGGI

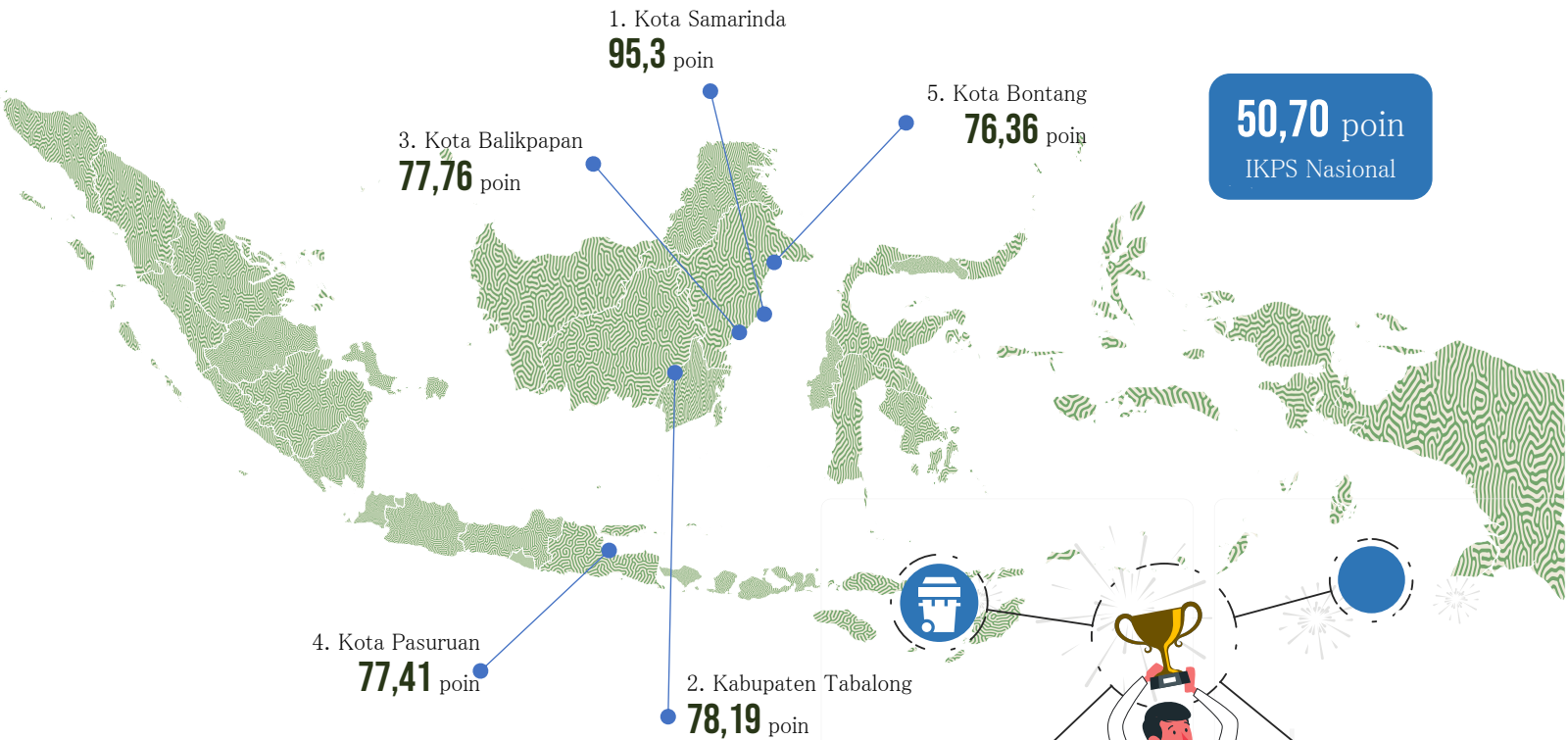

Gambar Sebaran 5 Kota Dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tertinggi

E. LUAS DALAM DAS YANG DIPULIHKAN KONDISINYA

Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya pada tahun 2022 seluas 30.712 ha. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99,55% dengan target 30.850 ha. Capaian terhadap renstra yaitu 52,32%.

Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

LUAS LAHAN DALAM daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan kondisinya yaitu luas lahan dalam DAS baik itu di dalam dan di luar kawasan hutan yang dipulihkan kondisinya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif dan sipil teknis. Beberapa intervensi yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2022 dalam upaya pemulihan kondisi lahan antara lain melalui rehabilitasi hutan, perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS, serta konservasi tanah dan air. Kegiatan rehabilitasi hutan yang berhasil dilakukan di tahun 2022 baik yang bersumber dari dana APBN maupun pihak-pihak lain yang bersumber dari dana non APBN, secara keseluruhan adalah seluas 259.106 Ha.

Kegiatan perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS yang mendukung menurunnya persentase lahan kritis antara lain yaitu (1) pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIPDAS secara realtime yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan DAS, revitalisasi alat monitoring SPAS, AWS dan sistim peringatan dini longsor, peningkatan kapasitas pengamat SPAS, monitoring sebaran banjir, penyusunan Rencana Umum RHL, pengembangan media sosial. (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, yaitu identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan daerah/nasional, dan koordinasi multipihak dalam mendukung indikasi program.

Peningkatan pemahaman terhadap wilayah DAS dan sistem pengelolaan DAS dapat dibantu dengan membangun sebuah Sistem Informasi pengelolaan DAS Indonesia (SIPDAS). Keberadaan SIMDAS dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan DAS khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air. Sedangkan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan DAS dan perlu mendapat perhatian berbagai stakeholder untuk saling memahamkan dan menyamakan persepsi tentang pengelolaan DAS. Kegiatan sharing praktik baik dari berbagai forum DAS daerah dan Forum DAS tingkat nasional diharapkan dapat diaplikasikan, diterapkan dan dimodifikasi untuk dapat dilakukan di daerah.

Pada tahun 2022 telah melakukan update Peta Lahan Kritis Nasional. Peta lahan kritis tersebut juga telah disahkan melalui SK Direktur Jenderal PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/ DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022. Penyusunan Peta Lahan Kritis mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 yang memperhitungkan pengaruh erosi, lereng lahan, dan penutupan lahan. Dari peta yang telah disusun tersebut diperoleh informasi bahwa secara nasional terdapat sekitar 12.744.925 Ha berada dalam kondisi kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

LAHAN DALAM DAS YANG DIPULIHKAN

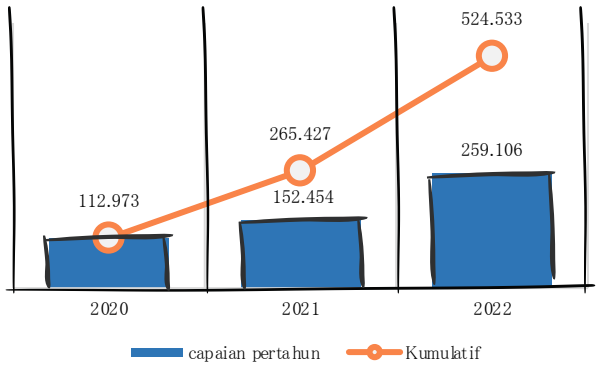

Gambar Grafik Das yang Dipulihkan (Ha)

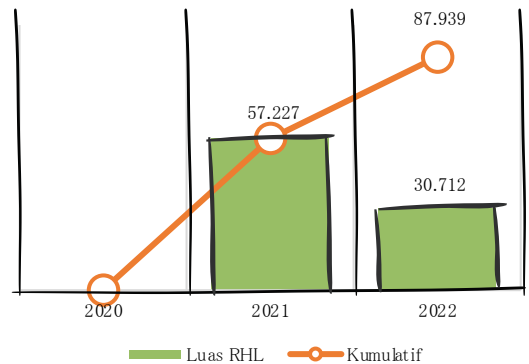

Gambar Grafik Rehabiltasi Lahan Vegetatif (Ha)

Capaian lahan dalam DAS yang dipulihkan selama periode tahun 2020-2022 secara kumulatif seluas 524.533 Ha. Pelaksanaan RHL pada tahun 2020-2022 seluas 87.939 Ha, sedangkan secara sipil teknis dengan periode yang sama telah terbangun dam penahan dan gully plug sebanyak 7.781 unit.

Kegiatan penyediaan bibit berkualitas memiliki peran penting dalam keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan. Upaya untuk memproduksi bibit berkualitas secara massal, rutin, cepat, dan berkelanjutan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit. Saat ini terdapat Persemaian Permanen (PP) yang tersebar di seluruh Indonesia yang menghasilkan bibit berkualitas untuk mendukung kegiatan RHL terutama untuk penanaman insentif (mengakomodir permintaan masyarakat). Bahkan tahun 2022 telah dibangun Persemaian Skala Besar yang mendukung Destinasi Super Prioritas. Jumlah produksi bibit dari persemaian permanen sebanyak 41.362.040 batang dan dari persemaian skala besar sebanyak 19.300.000 batang.

Penyediaan bibit berkualitas juga dilakukan melalui penyediaan bibit produktif, yaitu bibit tanaman berkayu yang menghasilkan buah dan memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berfungsi sebagai tanaman penghijauan. Fasilitasi bibit produktif tahun 2022 mencapai 3.167.994 batang. Bahkan untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, juga ada skema penyediaan bibit melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD). KBR yang berhasil dibangun di tahun 2022 sebanyak 1.076 Unit dan KBD sebanyak 166 unit.

Kegiatan produksi bibit di PP, KBR maupun KBD tidak semata-mata menghasilkan bibit berkualitas saja, namun sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan RHL. Bahkan untuk kegiatan KBR dan KBD, pembuatan dan penanaman bibitnya dikelola oleh lembaga desa/ kelompok adat/ kelompok masyarakat/ kelompok tani hutan perhutanan sosial, yang beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan.

Sebagai contoh untuk pembuatan 1 unit KBR diperuntukkan untuk 1 kelompok, dimana jumlah orang yang terlibat minimal sebanyak 15 orang apabila bibit tersebut di tanam di luar kawasan hutan dan minimal sebanyak 30 orang apabila bibit di tanam di dalam kawasan hutan. Dari anggota kelompok yang ikut terlibat, juga tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi dari anggota baik laki-laki dan/atau perempuan. Bahkan di beberapa lokasi justru partisipasi perempuan jauh lebih banyak. Hal ini tentu saja sesuai dengan arah kebijakan pengarusutamaan gender yang memberikan akses yang setara terhadap sumberdaya yang ada.

CAPAIAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2022

Tabel Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2022 per Provinsi (Ha)

NO	PROVINSI	APBN									SUMBER DANA LAINNYA			JUMLAH
		RHL VEGETATIF	MANGROVE	IKN	KBR	KBD	BITPRO	PP	PSB	UPSA	REHABILITASI	REKLAMASI	DAK	
1	Aceh	889	75	-	1.467	320	313	1.250	-	-	-	-	-	4.314
2	Sumatera Utara	3.050	-	-	534	185	370	3.750	12.500	40	-	-	-	20.429
3	Sumatera Barat	1.452	25	-	1.668	-	136	4.029	-	-	-	-	338	7.648
4	Riau	-	-	-	162	251	233	3.750	-	-	-	-	-	4.396
5	Kepulauan Riau	330	-	-	310	75	95	1.250	-	-	-	-	-	2.060
6	Jambi	1.098	50	-	228	225	111	1.875	-	-	619	2	-	4.208
7	Bengkulu	1.000	-	-	550	257	306	3.125	-	-	-	-	-	5.238
8	Sumatera Selatan	1.500	50	-	2.400	1.600	200	6.250	-	-	2.273	16	-	14.289
9	Bangka Belitung	490	-	-	285	75	149	1.875	-	-	-	-	-	2.874
10	Lampung	1.600	25	-	2.638	142	313	6.250	-	-	-	-	395	11.363
11	Banten	83	-	-	821	-	-	-	-	-	-	-	-	904
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	1.217	75	-	3.420	266	607	11.625	20.000	-	-	-	2.188	39.398
14	Jawa Tengah	500	50	-	3.100	464	397	6.375	-	-	-	-	660	11.546
15	D.I. Yogyakarta	550	-	-	200	-	278	2.000	-	-	-	-	-	3.028
16	Jawa Timur	1.050	76	-	2.475	203	584	3.750	-	-	-	-	961	9.099
17	Kalimantan Barat	790	-	-	1.422	75	349	2.500	-	10	-	-	-	5.146
18	Kalimantan Tengah	950	100	-	1.569	240	145	2.500	-	-	737	5	-	6.246
19	Kalimantan Selatan	1.100	-	-	300	125	291	4.625	-	-	853	321	-	7.615
20	Kalimantan Timur	-	-	1.064	750	150	117	2.000	2.500	-	11.856	245	-	18.682
21	Kalimantan Utara	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
22	Sulawesi Utara	950	50	-	171	-	95	3.750	200	-	-	7	1.675	6.898
23	Gorontalo	1.300	75	-	301	100	178	1.875	-	-	-	-	1.105	4.934
24	Sulawesi Tengah	800	50	-	340	360	95	1.875	-	-	809	3	705	5.038
25	Sulawesi Barat	1.000	25	-	550	75	145	250	-	-	-	-	1.105	3.150
26	Sulawesi Selatan	1.893	75	-	2.569	166	862	7.251	-	-	-	-	450	13.266
27	Sulawesi Tenggara	900	165	-	550	75	76	1.250	-	-	90	6	420	3.532
28	Bali	500	45	-	792	135	170	538	180	-	-	-	350	2.710
29	Nusa Tenggara Barat	1.500	100	-	1.100	425	283	4.988	-	-	63	-	4.542	13.001
30	Nusa Tenggara Timur	1.050	25	-	1.407	172	507	8.500	2.500	-	-	-	1.450	15.611
31	Maluku	1.250	75	-	800	75	199	1.250	-	-	-	-	300	3.949
32	Maluku Utara	870	-	-	550	75	170	750	-	-	1.198	3	-	3.616
33	Papua Barat	500	-	-	300	75	75		-	-	-	-	-	1.550
35	Papua	550	-	-	469	50	75	1.750	-	-	-	-	425	3.319
JUMLAH		30.712	1.211	1.064	34.248	6.436	7.924	103.406	37.880	50	18.498	608	17.069	259.106

F. LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

PENGELOLAAN kawasan bernilai keaneka-ragaman hayati tinggi (Nilai Konservasi Tinggi) di Indonesia memerlukan data akurat baik lokasi maupun luasan yang terverifikasi. Luas kawasan konservasi yang dikelola negara baru mencakup 57 juta Ha dari luas kawasan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan data inventarisasi kawasan bernilai keaneka-ragaman tinggi yang terverifikasi, baik di dalam maupun di luar kawasan.

RPJMN Tahun 2020-2024 mengamanatkan adanya penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati pada 70 juta Ha kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berupaya untuk memenuhi amanat tersebut dengan mengukur luasan kawasan hutan bernilai keanekaragaman hayati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi secara partisipatif di dalam dan luar kawasan konservasi. Amanat ini dituangkan secara mengikat pada dokumen perencanaan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024 pada Sasaran Program "Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik di dalam dan di luar kawasan konservasi".

Perhitungan luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi di dalam maupun di luar kawasan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru sebagai dasar hukum.

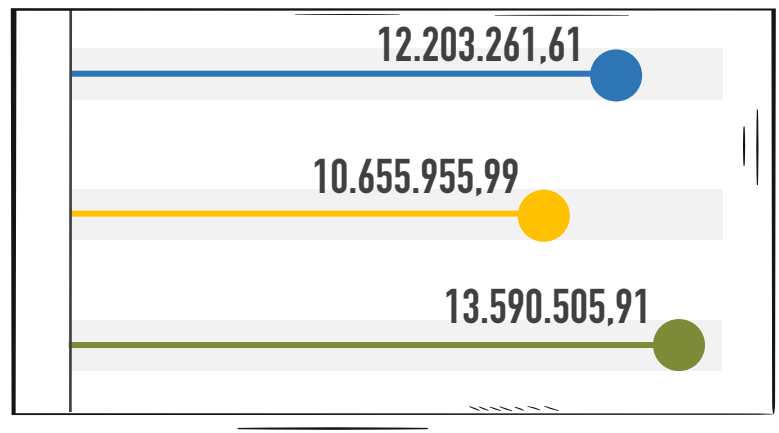

Gambar Tren luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi (Ha)

Tabel Komponen penyusun indikator kinerja utama Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

RINCIAN	LUAS (Ha)
Luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di dalam kawasan konservasi	4.143.293,33
Luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi	8.059.968,28
TOTAL	12.203.261,61

LUAS KAWASAN BERNILAI KEHATI TINGGI YANG DIINVENTARISASI DAN TERVERIFIKASI DI DALAM KAWASAN

Kawasan Konservasi, Suaka Alam, Taman Buru

Luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan terverifikasi di dalam kawasan

4.143.294 HA

Gambar Peta luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi di dalam kawasan berdasarkan region

Pada tahun 2022, inventarisasi dan verifikasi luas kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (NKT) dicanangkan untuk mencapai sebesar 10.410.368 Ha seperti yang tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022. Target ini turut mencakup luas kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas 4.482.148 Ha dan di luar kawasan konservasi seluas 5.928.220 Ha. Perbedaan antara target pada dokumen Renstra 2020-2024 revisi dan Perjanjian Kinerja adalah karena adanya *automatic ajdustment* anggaran.

Dari target 10,4 juta Ha, tahun ini kinerja inventarisasi dan verifikasi luas kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi mencapai 12.203.261 Ha, atau sebesar 117,22% dari target. Sementara itu, untuk kegiatan di dalam kawasan seluas 4.143.293,33 Ha, mencapai 92,44% dan sisanya 8.059.968,28 Ha berada di luar kawasan konservasi (135,96%).

Inventarisasi dan verifikasi di luar kawasan dilakukan pada Area Penggunaan Lain/APL atau area konsesi untuk luar kawasan dan pada Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru untuk dalam kawasan. Untuk area dalam kawasan, Taman Nasional dan UPT Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) selaku pengelola kawasan menjadi pengampu inventarisasi dan verifikasi kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi, sedangkan untuk area luar kawasan diampu oleh Taman Nasional dengan mitra pemegang konsensi area, seperti instansi perusahaan terbatas, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mendata kawasan bernilai keanekaragaman tinggi. Sebanyak 45 unit TN melakukan kegiatan inventarisasi seluas 2.908.862,33 Ha dan 24 UPT KSDA seluas 1.234.431 Ha di dalam kawasan. Sementara itu sebanyak 19 UPT KSDA melakukan kegiatan inventarisasi di luar kawasan dengan mitra.

LUAS KAWASAN BERNILAI KEHATI TINGGI YANG DIINVERTARISASI DAN TERVERIFIKASI DI LUAR KAWASAN

Selain Kawasan Konservasi, Suaka Alam, Taman Buru

Luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan terverifikasi di luar kawasan

8.059.968 HA

Gambar Peta luas kawasan bernilai kehati tinggi yang diinventarisasi dan diverifikasi di luar kawasan berdasarkan region

Pada tahun 2020, luas kawasan NKT yang diinventarisasi dan diverifikasi seluas 13.590.505 Ha, pada tahun 2021 seluas 10.655.955 Ha, dan pada tahun 2022 seluas 12.203.261 Ha. Capaian kinerja IKU ini fluktuatif dari tahun 2020 sampai 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 data yang digunakan berbasis pada sebaran TSL yang sumbernya dari UPT, mitra dan metadata seperti jurnal dan portal. Sebagian besar data berupa poligon sehingga cakupan capaian bisa tinggi, meskipun sebagian besar masih mengandalkan data sekunder. Sementara itu pada tahun 2021 capaian kinerja menurun karena kondisi yang masih pandemi membuat pelaksanaan tidak dapat sepenuhnya terlaksana, belum adanya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terutama kegiatan di dalam kawasan, minimnya pendampingan karena belum terstrukturnya langkah verifikasi dan validasi, dan capaian hanya berbasis data primer UPT tanpa komplementer data sekunder dari mitra untuk inventarisasi di dalam kawasan konservasi.

Hasil inventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi pada tahun 2022 meningkat sebesar 2,4 juta Ha atau 140,34% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini antara lain karena adanya komunikasi yang intensif dan peningkatan pendampingan teknis oleh tim teknis spasial pusat kepada UPT, juga karena adanya panduan inventarisasi dan verifikasi yang membantu penyelesaian data spasial di UPT sehingga proses analisis dan kompilasi di tingkat pusat semakin terarah dan terintegrasi. Sementara itu, capaian inventarisasi dan verifikasi di luar kawasan konservasi turun seluas 875.091,32 Ha atau 9,76% dibanding tahun sebelumnya karena kebijakan *Automatic Adjustment* pada tahun 2022. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya pagu anggaran untuk kegiatan inventarisasi dan verifikasi di tingkat tapak.

G. KONTRIBUSI SEKTOR LHK TERHADAP PDB NASIONAL

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara atau jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Nilai PDB tersebut merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah pada kondisi waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nilai PDB sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tercermin dari PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, nilai PDB sektor LHK berdasarkan harga berlaku adalah Rp 130,92 Triliun, atau mencapai 120,11% dari target tahun 2022 sebesar Rp 109 Triliun. Capaian tersebut meningkat 16,90% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan harga konstan, dapat dilihat bahwa nilai PDB sektor LHK pada tahun 2022 sebesar Rp 72,69 Triliun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 73,16 Triliun.

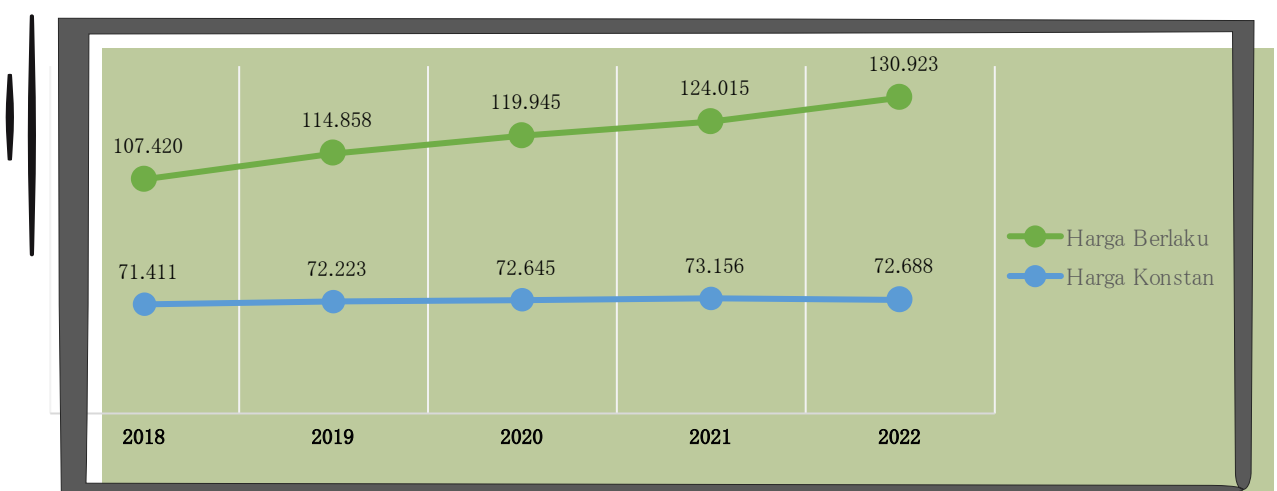

Gambar PDB Sektor LHK menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018–2022 (miliar rupiah)

KONTRIBUSI SEKTOR LHK
TERHADAP PDB NASIONAL

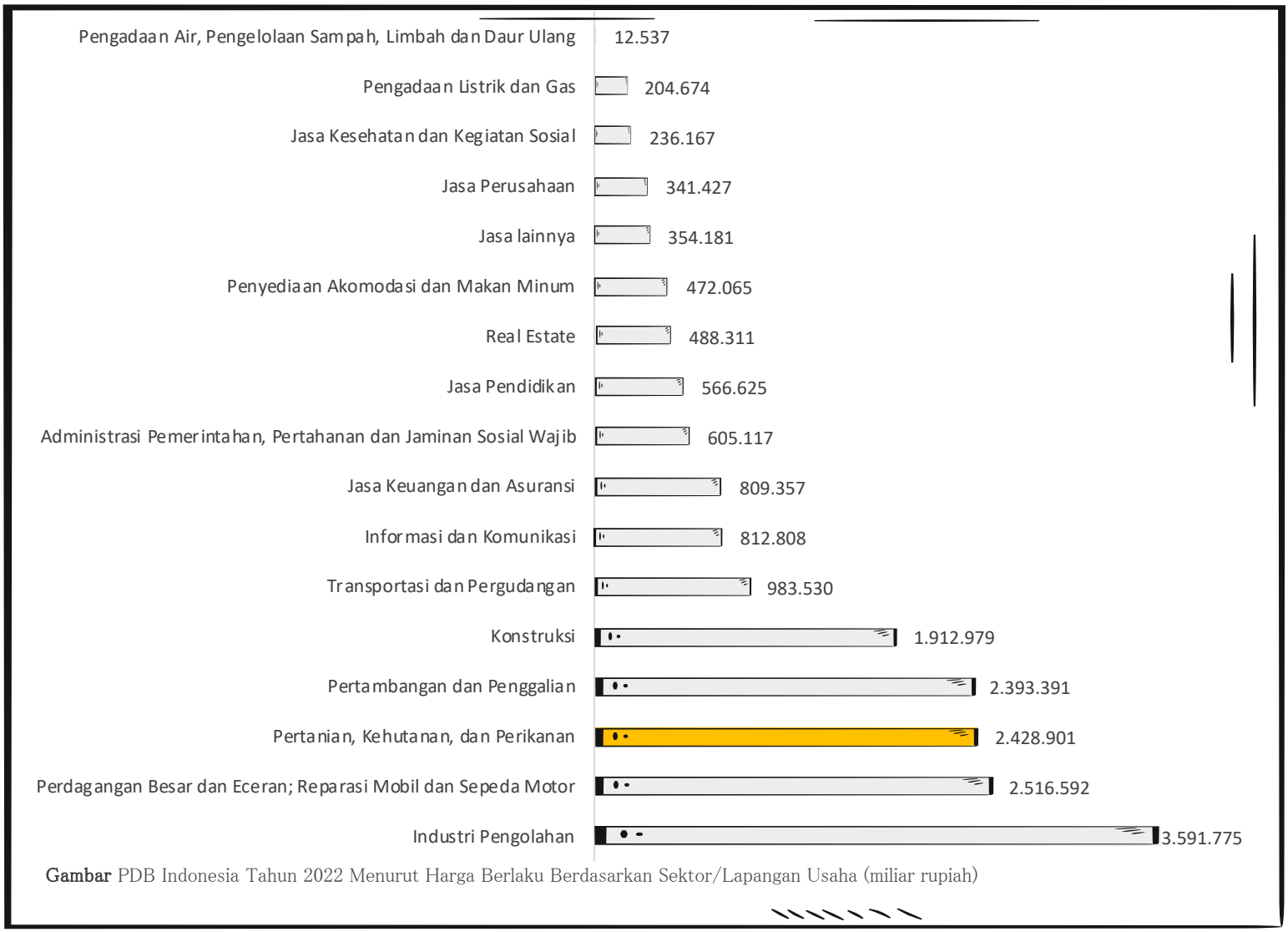

Gambar PDB Indonesia Tahun 2022 Menurut Harga Berlaku Berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha (miliar rupiah)

PDB Harga Berlaku
Rp 19.588,45 Triliun

Nilai PDB: Rp 12,54 Triliun
%Kontribusi PDB: 0,06%

Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Sektor LH)

Nilai PDB: Rp 118,39 Triliun
%Kontribusi PDB: 0,60%

Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu (Sektor Kehutanan)

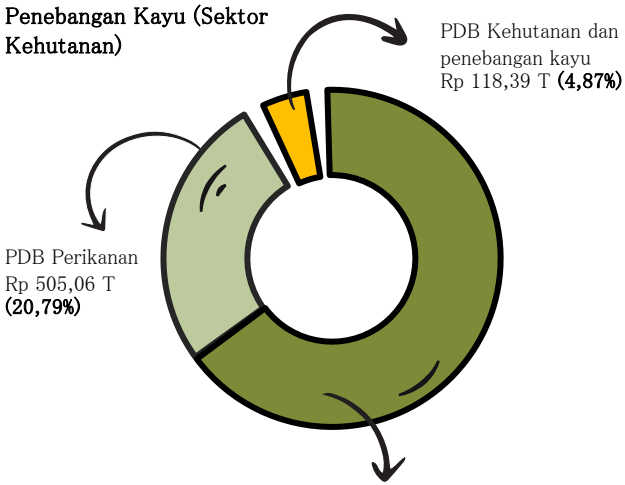

Gambar PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dapat tercermin dari nilai PDB berdasarkan pendekatan sisi produksi. Di mana, unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha (sektor) seperti dapat dilihat pada gambar di samping. Kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dapat dilihat dari nilai PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang serta sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang tergabung di dalam sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Capaian PDB tersebut merupakan kontribusi dukungan berbagai pihak, tidak hanya KLHK.

Berdasarkan gambar tersebut, nilai PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang adalah Rp 12,54 Triliun. Nilai tersebut menggambarkan kontribusi PDB sektor Lingkungan Hidup (LH) sebesar 0,06% dibandingkan dengan PDB nasional.

Sementara itu, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat ke 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki PDB tertinggi setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan. Dengan demikian, struktur ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor non primer yang menandakan telah terjadinya transformasi struktural. Di mana, kegiatan ekonomi beralih dari sektor primer menuju sektor sekunder (manufaktur) atau tersier (jasa). Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya industrialisasi dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, termasuk komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Selain itu, kebijakan ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat meningkatkan investasi di sektor hilir agar mendorong transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menjadi manufaktur.

Nilai PDB setiap sub sektor di dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dilihat pada grafik di samping. Secara berturut-turut, nilai PDB setiap unit usaha tersebut, yaitu; 1.) pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sebesar Rp 1.805,45 Triliun (74,33%); 2.) perikanan sebesar Rp 505,06 Triliun (20,79%), dan 3.) kehutanan dan penebangan kayu sebesar Rp 118,39 Triliun (4,87%). Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan nilai PDB secara nasional sebesar Rp 19.588,45 Triliun, kontribusi sektor kehutanan adalah sebesar 0,60%.

H. PENINGKATAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL, DAN BIOPROSPECTING

PEROLEHAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL DAN BIOPROSPEKSI turut menyumbang dalam neraca perdagangan internasional dengan nilai sebesar USD 15,25 Miliar, atau melebihi target sebesar USD 14,00 Miliar. Angka tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai ekspor hasil hutan sebesar 14,52 Miliar US$ dan nilai ekspor TSL sebesar 0,73 Miliar US$ (Kurs Dollar= Rp 14.900).

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2021, total ekspor hasil hutan kayu dan TSL mengalami penurunan. Variabel yang sangat mempengaruhi nilai ekspor kayu adalah harga pasar produk kayu yang fluktuatif. Berdasarkan gambar di bawah, capaian nilai tertinggi adalah pada tahun 2021 karena tingginya permintaan juga diikuti oleh naiknya harga kayu di pasar global. Meskipun kinerja ekspor tahun 2022 di bawah capaian 2021, namun demikian produk kayu Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar di Uni Eropa di tengah rencana penerapan kebijakan rantai pasok bebas deforestasi/ *Deforestation-free Supply Chain* (DFSC).

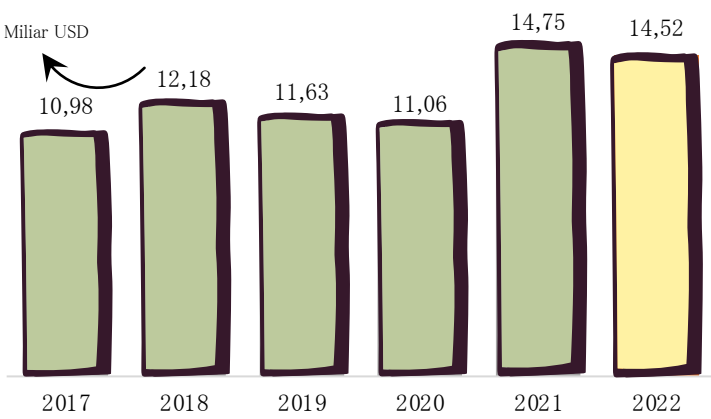

Gambar Kinerja Ekspor Hasil Hutan

Sumber : diakses pada phl.menlhk.go.id 2 Februari 2023

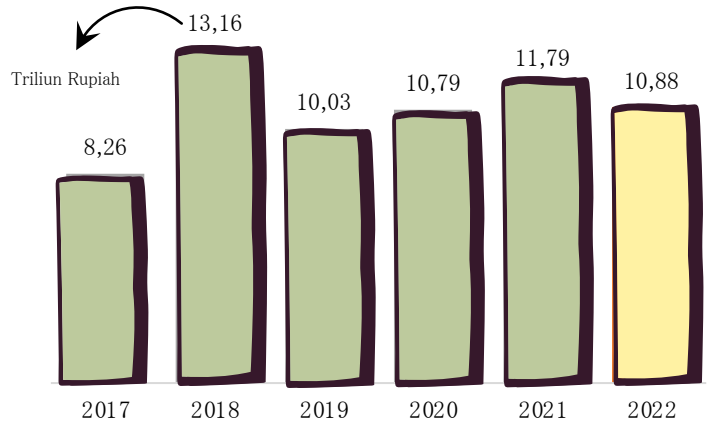

Gambar Kinerja Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar

Sumber : Ditjen KSDAE

EKSPOR HASIL HUTAN KAYU
BERDASARKAN VALUE JENIS PRODUK

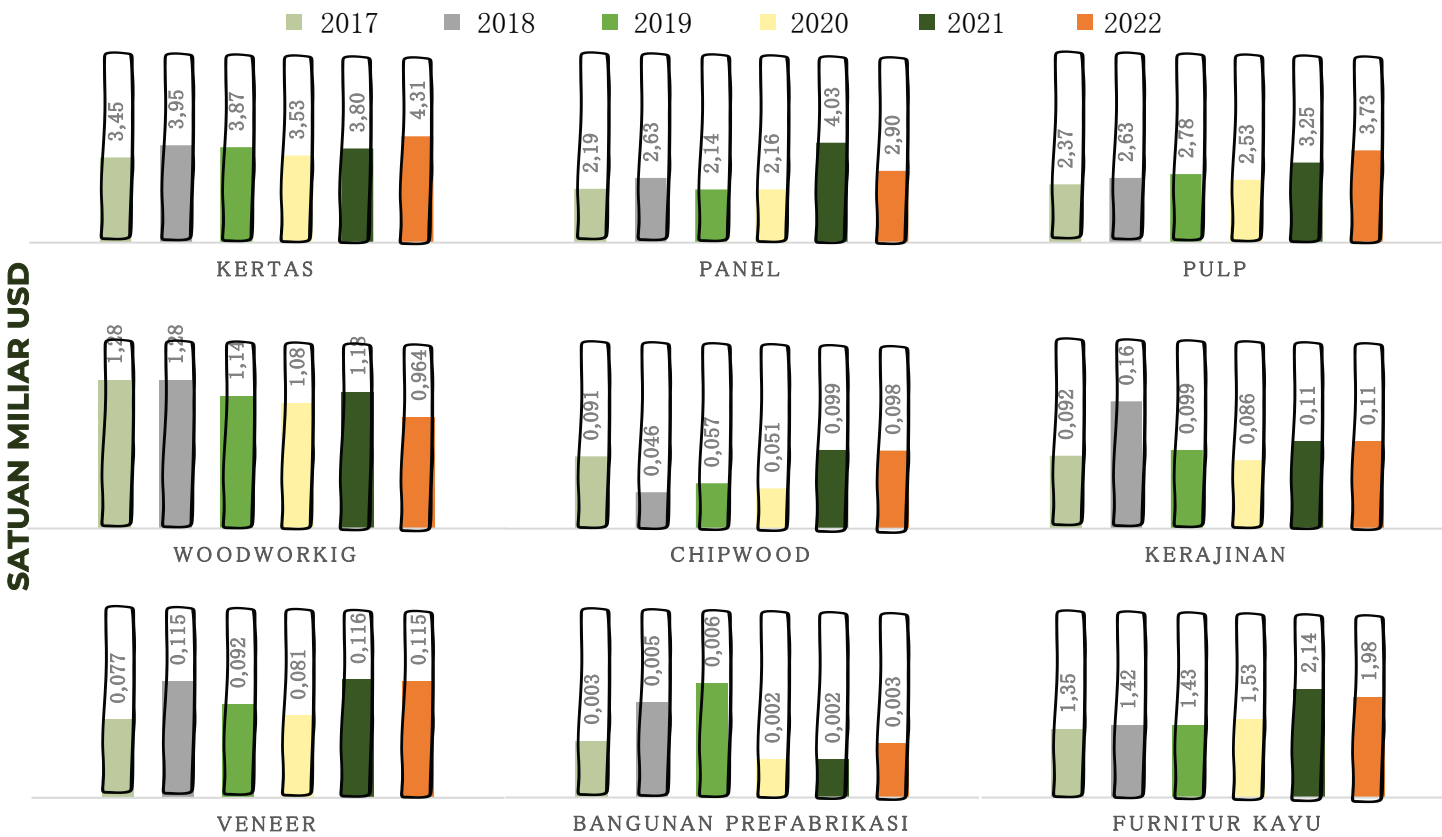

Gambar Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Nilai Jenis Produk

Hingga semester I tahun 2022, ekonomi global masih bergejolak akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan yang disambung dengan krisis Rusia-Ukrania. Meski demikian, ekspor produk kayu Indonesia masih bisa mencatat hasil menggembirakan. Tren positif ditunjukkan oleh kinerja Hutan Tanaman Industri dalam mendorong keberlanjutan *supply* untuk industri *pulp* dan kertas pada tahun 2022.

Selain itu, nilai ekspor kertas dan *pulp* meningkat di tahun 2022 sebesar 4,31 Miliar USD dan 3,73 Miliar USD. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan *pulp* yang meningkat dan harga kertas yang naik di tahun 2022.

NETTO EKSPOR KAYU OLAHAN
BERDASARKAN VOLUME JENIS PRODUK

Gambar Kinerja Ekpor Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Volume Jenis Produk

Tren positif juga ditunjukkan oleh ekspor produk kerajinan kayu dan bangunan prefabrikasi. Permintaan material kayu untuk prefabrikasi dalam pembangun properti di Eropa dan beberapa negara maju meningkat seiring berkembangnya gaya hidup *sustainable* pada kontruksi bangunan.

Masih positifnya kinerja ekspor juga diimbangi dengan positifnya kinerja di sektor hulu, baik produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman. Produksi kinerja kayu olahan juga didorong oleh berkembangnya industri hasil hutan kayu, khususnya di wilayah region Sumatra.

PRODUKSI KAYU OLAHAN PER REGION

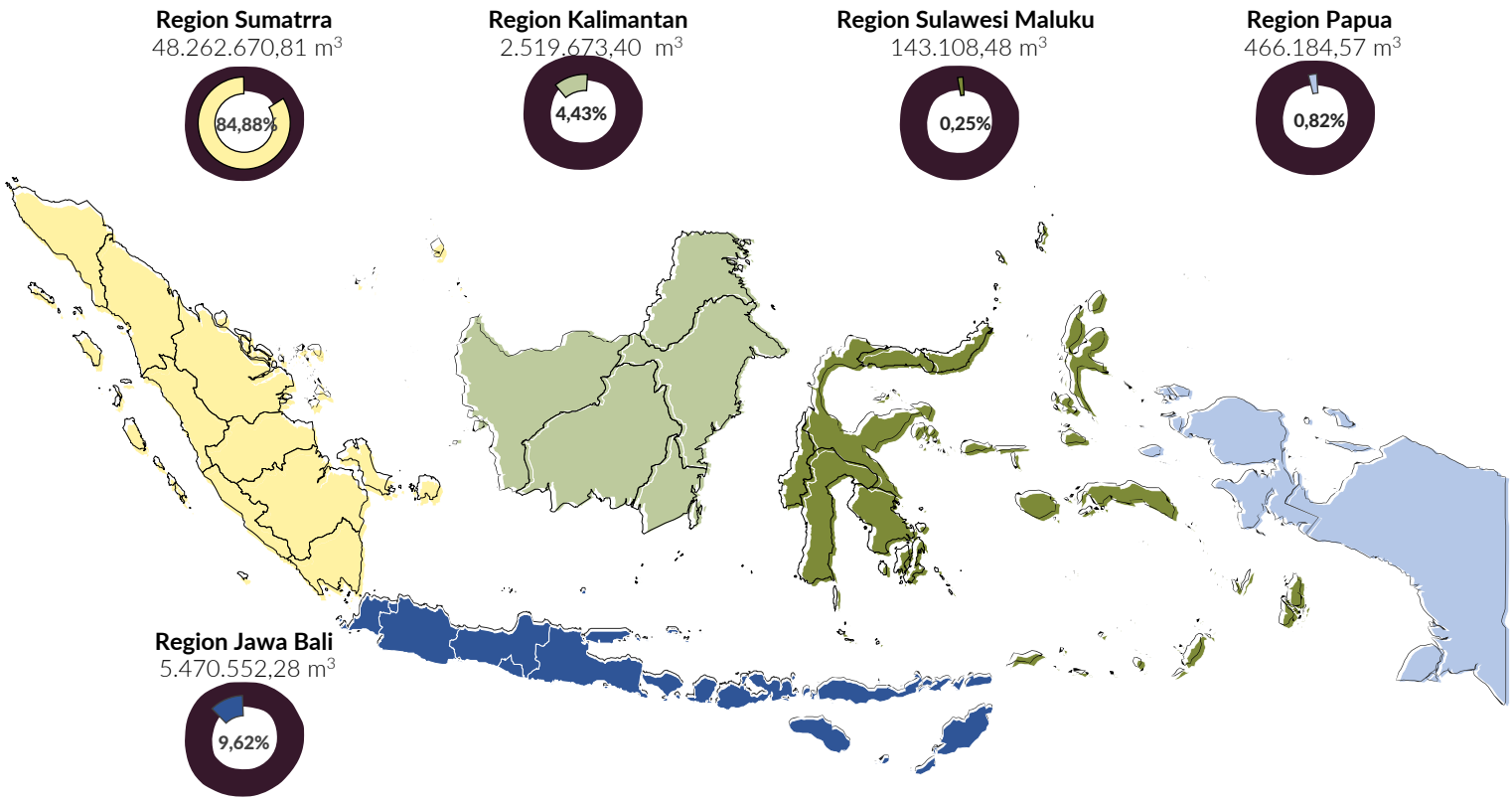

Gambar Sebaran Kayu Olahan per Region di Indonesia

Kinerja ekspor hasil hutan kayu tahun 2022 yang mencapai 14,21 Miliar USD didukung oleh kinerja produksi kayu olahan. Jika dilihat per region, produksi kayu olahan di tahun 2022 paling banyak bersumber dari industri di wilayah region Sumatra yaitu mencapai 48,26 juta m3. Hasil produksi tersebut meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 47,82 juta m³. Memperhatikan tren dari tahun-tahun sebelumnya, maka perlu menjadi pertimbangan agar arah industri pengolahan hasil hutan juga dikembangkan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Kinerja positif di tengah kondisi pandemi ini tidak lepas dari intevensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Kementerian LHK dari hulu hingga hilir serta di sektor pasar. Intervensi tersebut diantaranya penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

EKSPOR KAYU OLAHAN
PER KAWASAN NEGARA

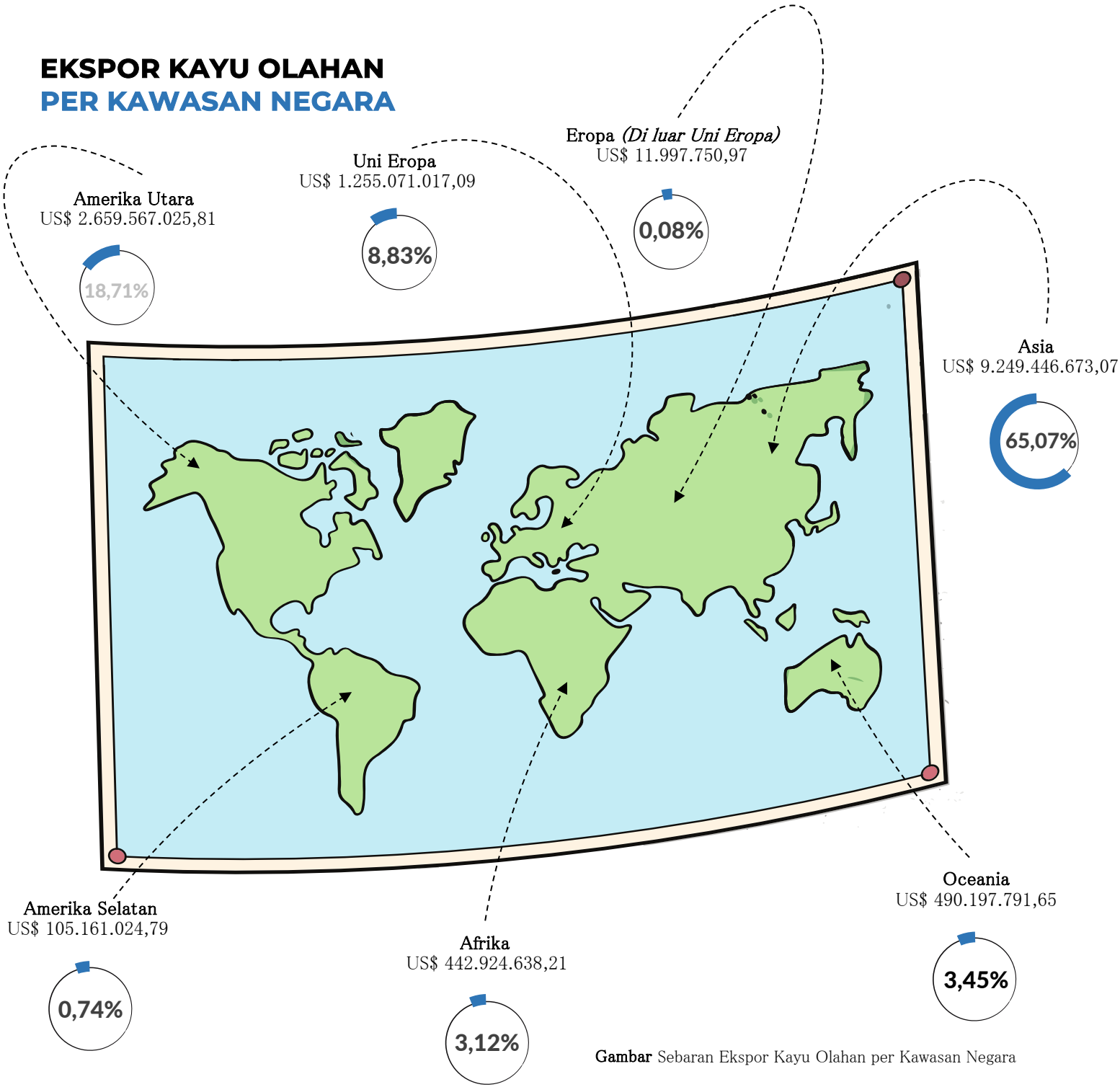

Gambar Sebaran Ekspor Kayu Olahan per Kawasan Negara

NILAI EKSPOR
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR PER JENIS

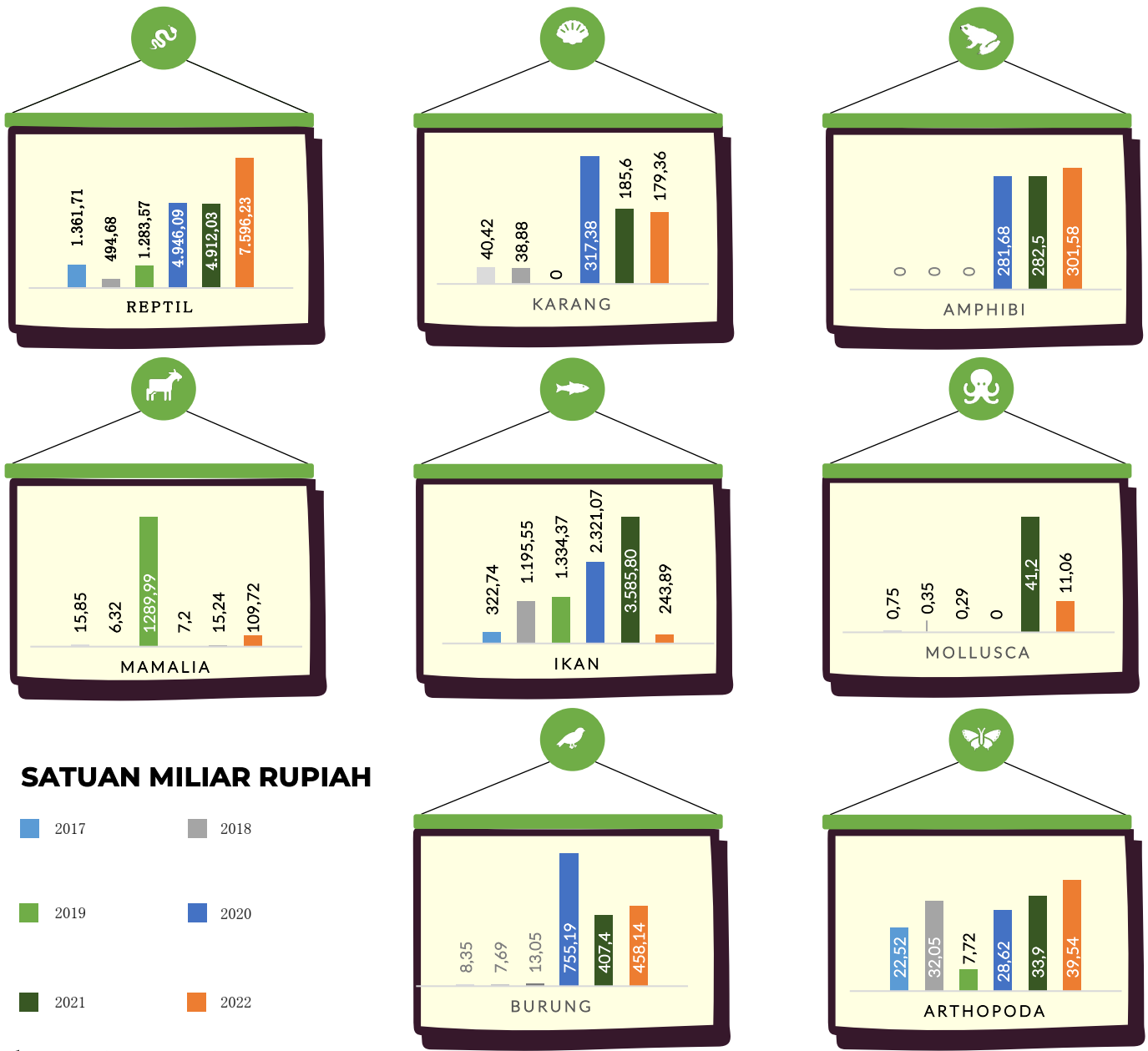

Gambar Nilai Ekspor Tumbuhan Dan Satwa Liar per Jenis

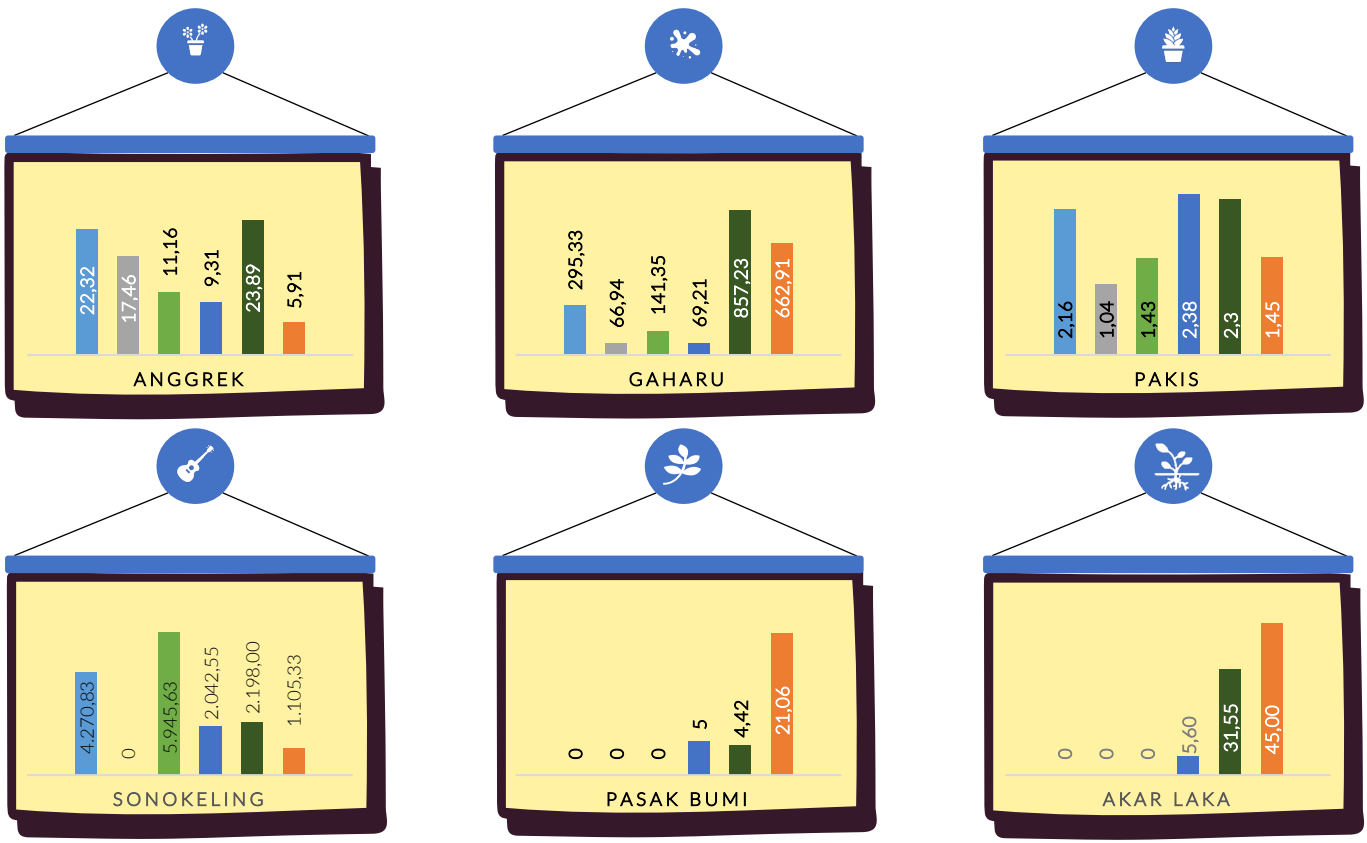

Nilai ekspor dari perdagangan TSL ke luar negeri pada tahun 2022 ialah USD 730.317.915,2. Adapun jenis TSL hasil penangkaran yang diekspor selama tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis primata, reptil hidup, kulit buaya, daging buaya, kupu-kupu, koral, kima, ikan arwana, dan sarang burung walet. Sedangkan dari tumbuhan budidaya ialah dari jenis anggrek, gaharu budidaya, dan sonokeling. Dari tumbuhan, nilai terbesar diperoleh dari ekspor gaharu, pakis, pasak bumi, dan akar laka. Sedangkan ekspor terbesar dari satwa ialah dari jenis-jenis reptil, amphibi, arthopoda dan burung (aves).

Selama ini, kuota ekspor TSL ditetapkan oleh Kementerian LHK atas rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan otoritas ilmiah CITES atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Angka kuota diperoleh dari survei populasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK dan masukan dari asosiasi pengusaha TS.

Selain meningkatkan devisa, nilai ekspor TSL juga mempresentasikan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu penerimaan bagi negara. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86 Tahun 2016, jenis PNBP ini bersumber dari pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/ penangkapan dari habitat alam; pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis asli Indonesia, serta pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

I. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL KLHK

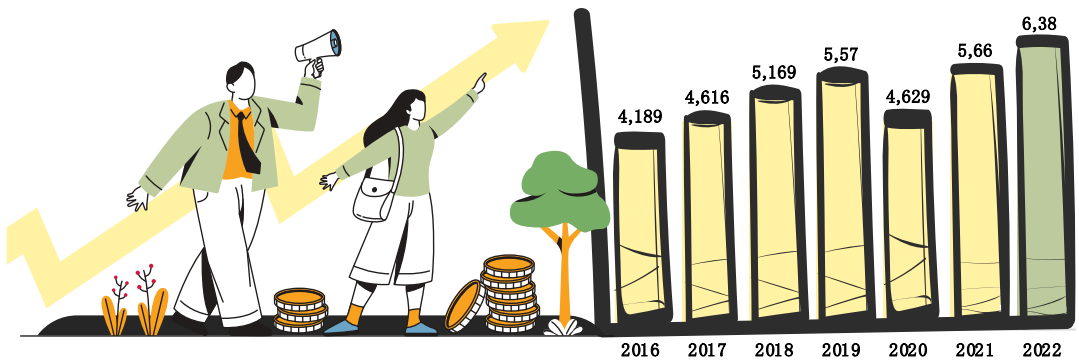

dalam triliun rupiah

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan PNBP yang menjadi target kinerja KLHK adalah PNBP Fungsional, yaitu PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat digunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penerimaan negara bukan pajak sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penyetoran PNBP Fungsional ke Rekening Kas Umum Negara TA. 2022 adalah sebesar 6,38 triliun rupiah atau 139,38% dari target PNBP APBNP 2022 sebesar 4,90 triliun rupiah. Realisasi PNBP meningkat 0,72 triliun rupiah atau 8,47% dibandingkan tahun lalu (realisasi PNBP TA. 2021 sebesar 5,66 triliun rupiah). Sedangkan berdasarkan target Renstra 2020-2024 sudah mencapai 62,9%.

Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Penerimaan dari sektor jasa wisata meningkat pesat dengan dicabutnya kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat meskipun protokol kesehatan tetap berlaku di beberapa area.

REALISASI PNBP FUNGSIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

Penyetoran PNBP Fungsional ke Rekening Kas Umum Negara sebesar 6,38 triliun rupiah atau 139,38% dari target PNBP sebesar 4,9 tirliun rupiah. Realisasi PNBP meningkat 0,72 triliun rupiah atau 8,47% dibandingkan tahun lalu (realisasi PNBP tahun 2021 sebesar 5,66 triliun rupiah). Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penerimaan bukan pajak fungisonal yang terdiri dari Pendapatan Kehutanan atau SDA (4214) dan PNBP Lainnya. PNBP SDA yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berasal dari Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Pendapatan Dana Reboisasi (DR), Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) dan Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Jenis PNBP yang menyumbang jumlah tertinggi adalah PNBP PKH yaitu sebesar 2,93 triliun rupiah. Diikuti oleh jenis PNBP DR sebesar 1,68 triliun rupiah, PNBP PSDH sebesar 1,20 triliun rupiah, PNBP Lainnya sebesar 0,52 triliun rupiah dan PNBP IIUPH yaitu 0,04 triliun rupiah.

PNBP Lainnya berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi (425151), Pendapatan dari Administrasi dan Penegakkan Hukum (4252), Pendapatan dari Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254), Pendapatan dari Jasling (4256), dan Pendapatan Denda di Bidang LHK (425829).

Penerimaan Negara Bukan Pajak meningkat setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengakses informasi dan proses pembayarannya, seperti pembayaran PNBP Pemanfataan Hasil Hutan yang terpusat satu pintu melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SI-PNBP) dan Pembayaran PNBP atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

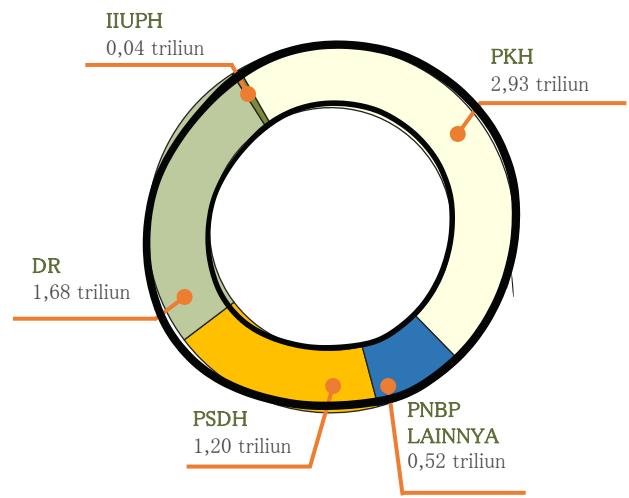

Gambar Realisasi PNBP Berdasarkan Jenis Pendapatan

J. LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN

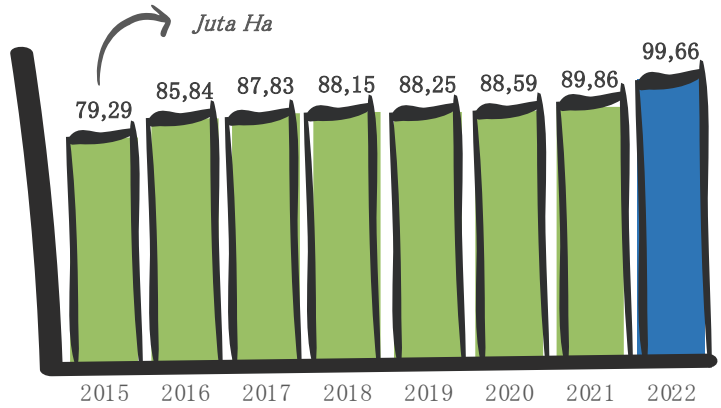

Gambar Grafik Capaian Penetapan Kawasan Hutan per Tahun (Kumulatif)

KAWASAN HUTAN yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.

Target awal luas kawasan hutan dengan status penetapan di tahun 2022 adalah 2,5 juta Ha, namun dengan adanya penambahan anggaran penataan batas kawasan hutan, terjadi perubahan target menjadi 5,9 juta Ha.

Penambahan penataan batas tidak serta merta langsung menghasilkan luas penetapan kawasan hutan pada tahun anggaran yang sama. Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh BPKHTL baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian luas kawasan hutan dengan status penetapan hingga tahun 2022 secara kumulatif seluas 99,66 juta Ha. Capaian pada tahun 2022 yakni 6,51 juta Ha atau tercapai 110% dari target 5,90 juta Ha.

Kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 atau *year on year* (Y-o-Y) mengalami penurunan. Kinerja tahun 2021 sebesar 124%, sedangkan kinerja tahun 2022 sebesar 110% atau turun 11,29%. Penurunan ini disebabkan karena target yang ditetapkan tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 seluas 12 juta Ha, sementara target pada tahun 2022 seluas 5,9 juta Ha. Meski demikian capaian terhadap target pada tahun 2021 dan tahun 2022 keduanya diatas 100% atau melampaui target.

Progres terhadap target rencana strategis (renstra) 2020-2024 telah mencapai 79,22% atau 99,66 juta Ha dari target 125,79 juta Ha. Sisa dari target tersebut adalah seluas 26,13 juta Ha yang direncanakan selesai pada tahun 2023-2024.

CAPAIAN
PENETAPAN KAWASAN HUTAN INDONESIA TAHUN 2022

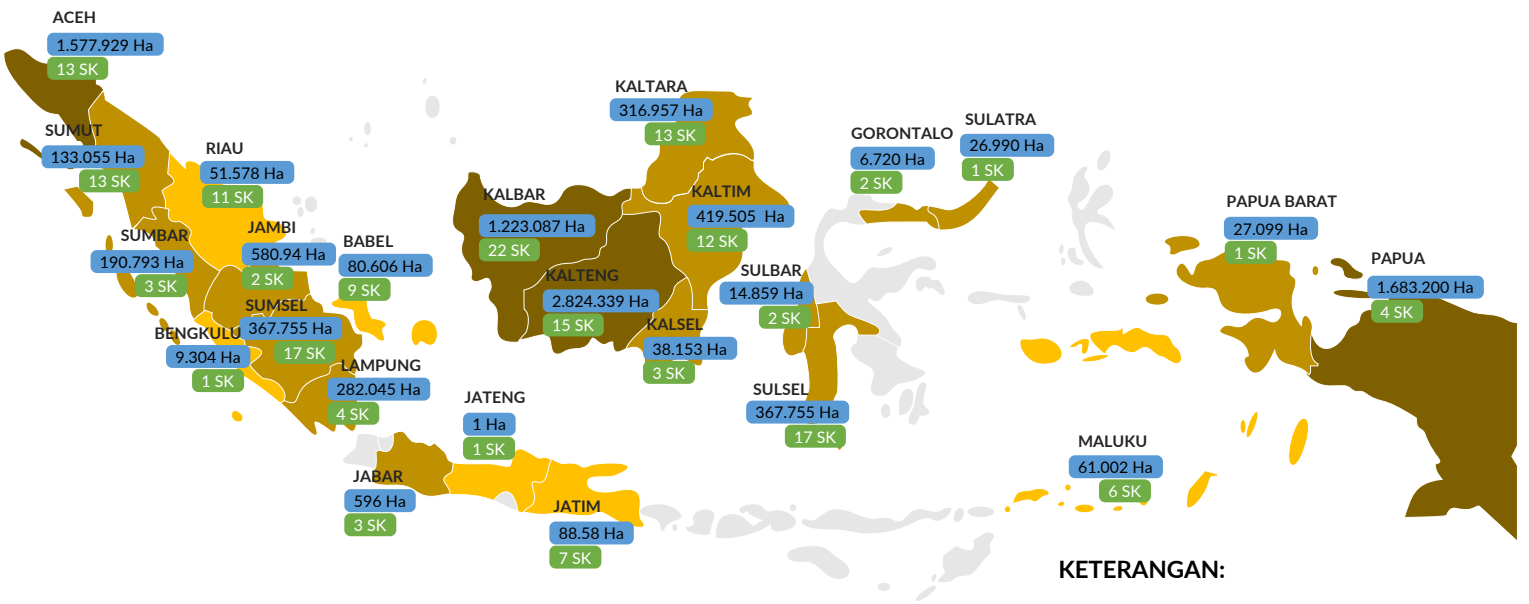

Gambar Sebaran Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi Tahun 2022

Luas total penetapan Kawasan hutan tahun 2022 mencapai 10.005.244 Ha. Jumlah SK yang diterbitkan pada tahun 2022 adalah 178 surat keputusan (SK). Untuk melihat capaian luas dan jumlah SK yang diterbitkan dari penetapan Kawasan hutan per provinsi dapat melihat pada infografis di bawah ini.

Pada tahun 2022 penetapan Kawasan hutan dilaksanakan di 24 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan luas penetapan kawasan hutan terluas yaitu provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.824.339 Ha dengan jumlah SK yang diberikan sejumlah 15 SK. Provinsi dengan luas penetapan Kawasan hutan terkecil yaitu provinsi Jawa Tengah seluas 1 Ha dengan jumlah SK yang diberikan sejumlah 1 SK.

SK
178 SK

Jumlah SK yang diterbitkan Penetapan Kawasan hutan tahun 2022

Luas
10.005.244 Ha

Capaian Luas Penetapan Kawasan hutan tahun 2022

RINCIAN
PENETAPAN KAWASAN HUTAN PER PROVINSI SAMPAI DENGAN 2022

Tabel Tabel Rincian Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi Hingga Tahun 2022

No	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Ha) ***	PENETAPAN ***	SISA	PERSENTASE PENETAPAN
1	Aceh	3.550.390,2	2.504.127,3	1.046.262,9	70,5%
2	Bali	130.686,0	137.428,1		100,0%
3	Bangka Belitung	643.615,0	622.427,5	21.187,5	96,7%
4	Banten**	253.254,0	202.427,4	50.826,6	79,9%
5	Bengkulu	924.631,0	714.652,2	209.978,8	77,3%
6	DI. Yogyakarta	16.819,5	8.860,9	7.958,6	52,7%
7	DKI Jakarta	108.475,5	107.856,2	619,3	99,4%
8	Gorontalo	824.668,0	812.008,9	12.659,1	98,5%
9	Jambi	2.098.535,0	2.312.602,7		100,0%
10	Jawa Barat**	816.603,0	953.346,4		100,0%
11	Jawa Tengah	757.250,0	787.416,6		100,0%
12	Jawa Timur	1.361.146,0	1.059.788,8	301.357,2	77,9%
13	Kalimantan Barat	8.388.072,0	7.657.233,2	730.838,8	91,3%
14	Kalimantan Selatan	1.779.982,0	1.560.854,3	219.127,7	87,7%
15	Kalimantan Tengah	12.719.707,0	6.737.283,2	5.982.423,8	53,0%
16	Kaltim dan Kaltara*	13.831.724,9	12.850.877,3	980.847,6	92,9%
18	Kep. Riau	381.832,1	104.105,8	277.726,3	27,3%
19	Lampung	1.004.735,0	885.282,8	119.452,3	88,1%
20	Maluku	3.919.617,0	2.730.737,8	1.188.879,2	69,7%
21	Maluku Utara	2.515.220,0	1.433.667,1	1.081.552,9	57,0%
22	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,0	1.187.581,0		100,0%
23	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,0	1.048.909,8	693.489,3	60,2%
24	Papua	30.387.499,0	26.660.448,7	3.727.050,3	87,7%
25	Papua Barat	9.713.137,0	8.148.998,0	1.564.139,0	83,9%
26	Riau	5.406.992,0	2.228.795,2	3.178.196,8	41,2%
27	Sulawesi Barat	1.092.376,0	1.076.853,5	15.522,5	98,6%
28	Sulawesi Selatan	2.636.297,0	2.035.440,2	600.856,8	77,2%
29	Sulawesi Tengah	4.254.717,0	2.570.986,9	1.683.730,1	60,4%
30	Sulawesi Tenggara	3.830.579,0	3.263.657,6	566.921,4	85,2%
31	Sulawesi Utara	764.739,0	408.349,0	356.390,0	53,4%
32	Sumatera Barat	2.380.057,0	1.604.652,2	775.404,8	67,4%
33	Sumatera Selatan	3.456.797,0	3.349.776,0	107.021,0	96,9%
34	Sumatera Utara	3.055.795,0	1.891.763,0	1.164.032,0	61,9%
	Grand Total	**125.795.306,2**	**99.659.195,5**	**26.132.927,9**	**79,2%**

*Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi

**Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital

***Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas PENETAPAN dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan

- *Untuk luas penetapan KH yang melebihi luas kawasan hutannya disebabkan karena terdapat beberapa SK Penetapan lama yang kemudian saat ini kawasan hutannya telah mengalami perubahan kawasan hutan baik itu melalui Review Tata Ruang, Penataan Batas Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan perubahan lainnya sesuai dengan regulasi.*

K. LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA

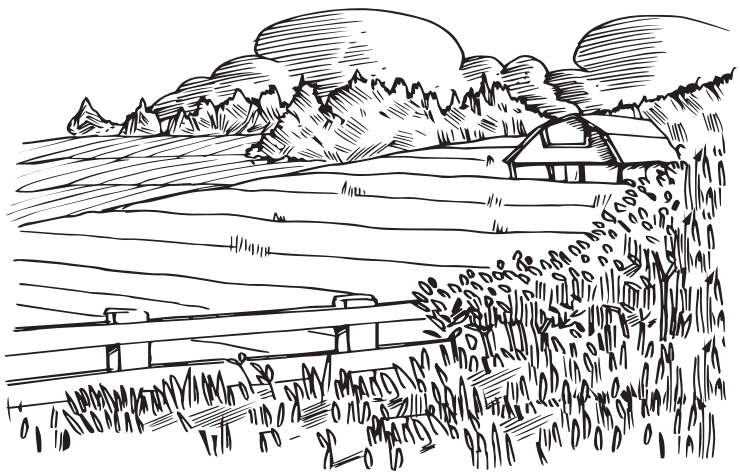

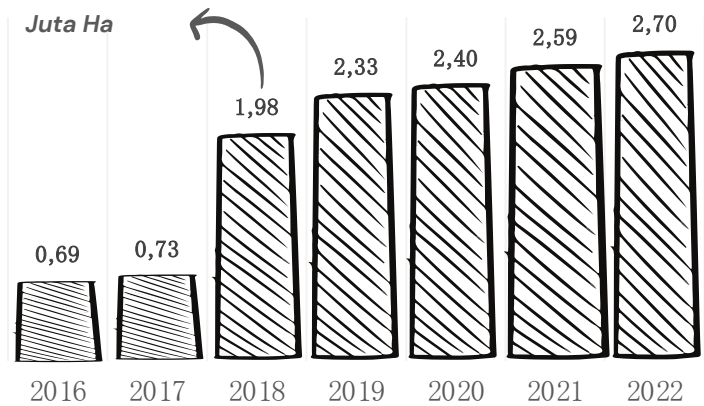

Gambar Grafik Capaian TORA per Tahun (Kumulatif)

TANAH OBYEK Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/ pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat Indonesia.

Capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2022 seluas 113.669,52 Ha dari target tahun 2022 sebesar 94.756 Ha atau tercapai 119% dari target yang telah ditetapkan. Persen capaian tersebut yang menjadi kinerja TORA tahun 2022.

Kinerja tahun 2022 sebesar 119% jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 atau *year on year* (Y-o-Y) sebesar 100,17% meningkat sebesar 15,96%. Capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA tahun 2022 terdiri dari SK surat penegasan transmigrasi tahun 2015 seluas 1.543 Ha, SK Biru Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seluas 7.092,90 Ha dan Potensi pelepasan kawasan hutan untuk TORA dari pelaksanaan penataan batas hasil inventarisasi dan verifikasi PPTPKH seluas 105.003,62 Ha.

Capaian TORA hingga tahun 2022 secara kumulatif seluas 2,70 juta Ha. Capaian kumulatif pada tahun sebelumnya adalah 2,59 juta Ha atau meningkat 113,66 ribu Ha. Nilai 113,66 ribu Ha tersebut juga merupakan capaian pada tahun 2022.

Target pada rencana strategis (renstra) 2020-2024 tentang luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA adalah seluas 4.139.000 Ha. Progres capaian luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2022 telah mencapai 65%. Sisa luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA adalah 1.437.600 Ha. Sisa tersebut direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2023 dan 2024.

CAPAIAN
TORA YANG SUDAH DITERBITKAN SK DI TAHUN 2022

Dalam rangka penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dilakukan proses perubahan batas kawasan hutan.

Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA dan telah dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2021 seluas 184.731 Ha, dimana pada waktu pelaporan terdapat data seluas 89.645,9 Ha merupakan potensi pelepasan kawasan hutan. Potensi tersebut telah dilepaskan seluas 90.851,78 Ha melalui SK Biru pada tahun 2022 seluas 59.172,8 Ha (35 SK) dan hasil tata batas menjadi APL di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas 31.679 Ha.

Penetapan penyediaan sumber TORA SK Biru tahun 2022 diberikan di 14 Provinsi Indonesia meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.

Luas pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 18.582,02 Ha, kedua yaitu 18.546,96 Ha di Provins Kalimantan Tengah, sementara terendah di Provinsi Bengkulu.

SEBARAN LUAS PENYEDIAAN SUMBER TORA YANG SUDAH TERBIT SK TAHUN 2022

Gambar Sebaran Per Provinsi Penyediaan Sumber TORA Tahun 2022

CAPAIAN
PENYEDIAAN SUMBER TORA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian LHK memiliki target hingga tahun 2024 seluas 4.139.000 Ha. Capaian kumulatif hingga tahun 2022 mencapai 2.701.400 Ha (Prioritas I dan Prioritas II) atau tercapai 65% dan sisa target yang belum tercapai seluas 1.437.600 Ha (Prioritas III).

Capaian kumulatif seluas 2.701.400 Ha meliputi Prioritas I 1.189.597 Ha telah berubah menjadi area penggunaan lain (APL) dengan rincian 34.134 Ha adalah Adendum IUPHHK; 193.982,1 Ha adalah SK perubahan batas hasil inver PPTKH sejumlah 133 SK; 268.894 Ha adalah pemukiman transmigrasi; 317.619 ha review rencana tata ruang wilayah (RTRW); realisasi hasil tata batas kawasan hutan 342.593 Ha; SK pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 695,70 Ha dan hasil tata batas kawasan hutan reguler tahap III 31.679 Ha.

Pada Prioritas II seluas 1.511.803 Ha telah ditempuh proses pelepasan kawasan hutan namun belum diterbitkannya surat keputusan (SK) dengan rincian 196.821 Ha proses perubahan batas 114 kabupaten (sedang dalam tahap rekam tata batas dan konsep SK Biru; 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan 429.358 Ha (menunggu regulasi); SK pencadangan hutan produksi konversi (HPK) tidak produktif dan pencetakan sawah baru 977.411 Ha (menunggu permohonan) dan addendum IUPHHK tahap I seluas 16.895 Ha (progres inver).

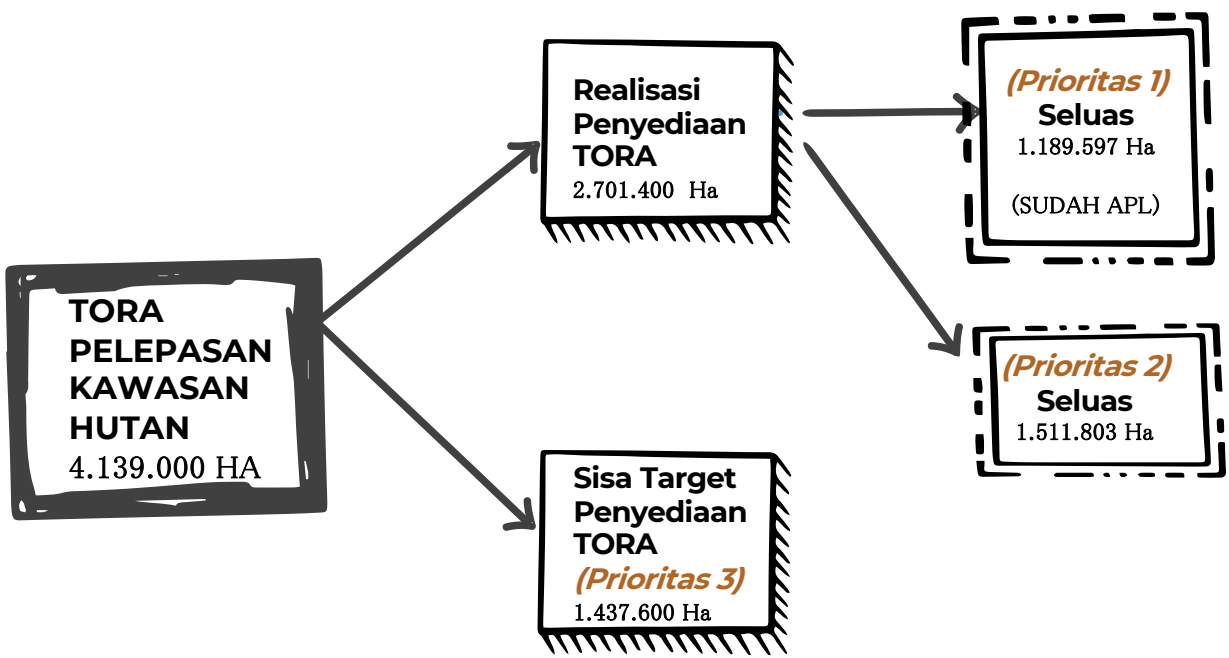

Gambar Diagram Rincian Capaian dan Target TORA yang Belum Terpenuhi

SEBARAN PER PROVINSI
PENYEDIAAN SUMBER TORA 2.701.400 Ha

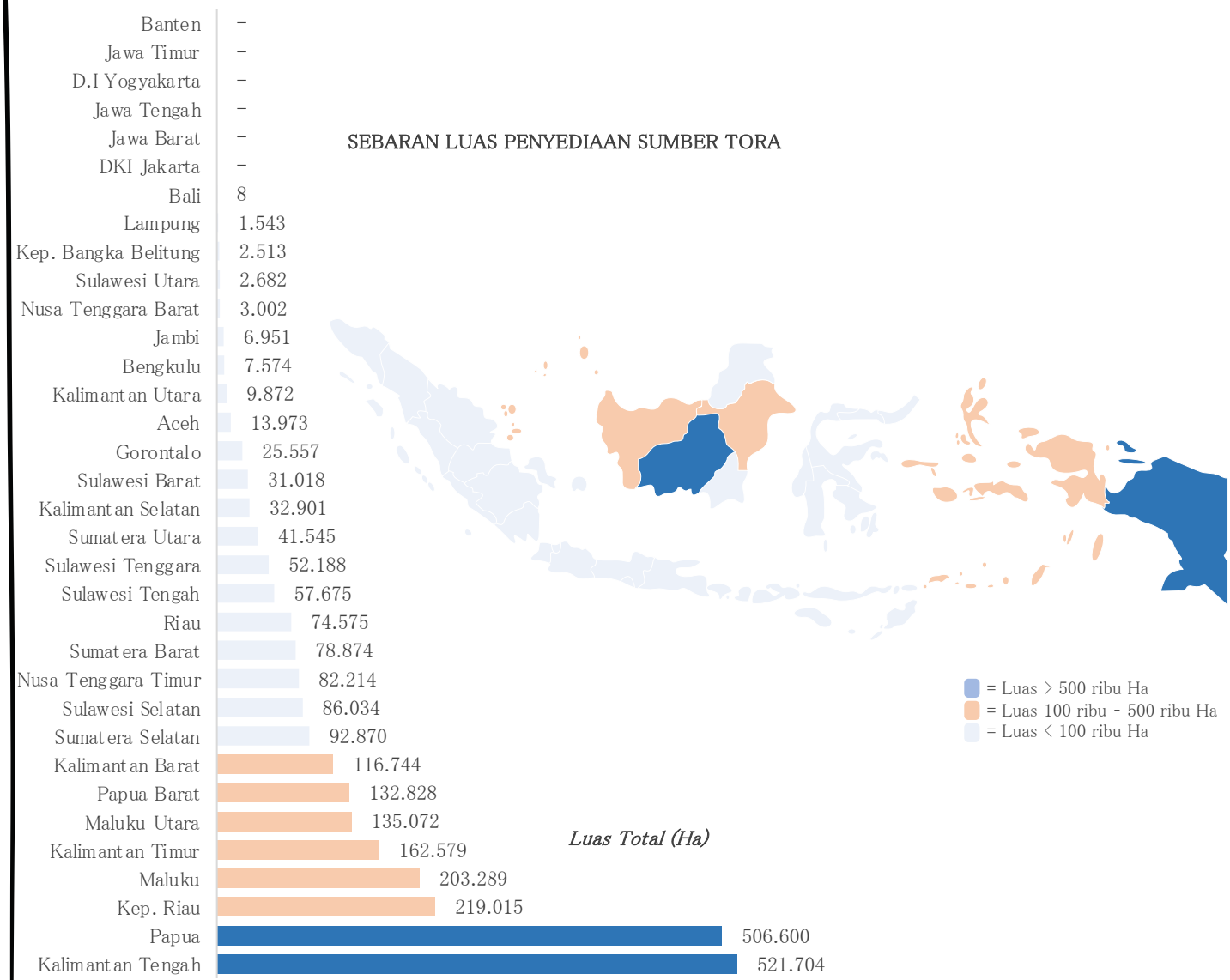

Gambar Grafik Sebaran Per Provinsi Penyediaan Sumber TORA akumulasi

CAPAIAN

TORA YANG TELAH DITERBITKAN SK PELEPASAN HINGGA TAHUN 2022

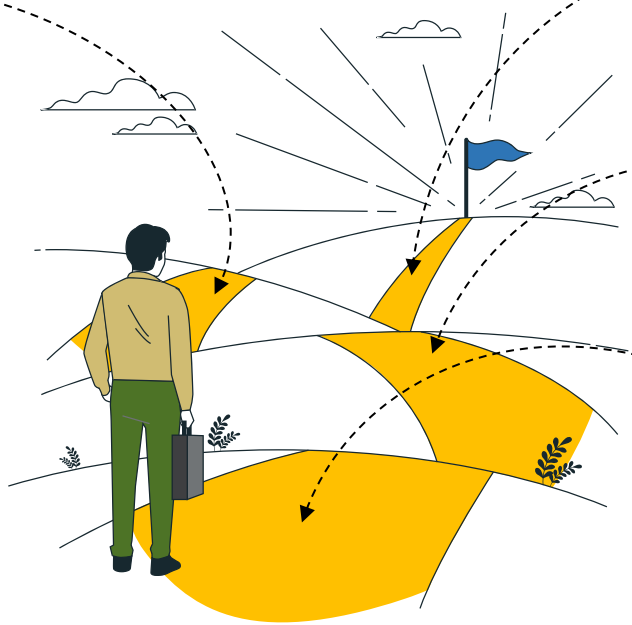

2022
66.265,7 HA
36 SURAT KEPUTUSAN
14 PROVINSI

2021
37.754,3 HA
29 SURAT KEPUTUSAN
10 PROVINSI

2020
70.183,75 HA
53 SURAT KEPUTUSAN
15 PROVINSI

2019
19.778,18 HA
15 SURAT KEPUTUSAN
6 PROVINSI

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan.

Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

Penyediaan sumber TORA penyerahan SK Biru merupakan salah satu bukti kepemilikan lahan untuk masyarakat. Penyerahan SK Biru yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 ini dan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya yang mana diberikan langsung oleh presiden RI.

Penyerahan SK Biru oleh Presiden RI pada tahun 2022 sebagian belum diserahkan oleh presiden di tahun 2022 dan kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Total penyerahan SK Biru yang belum diserahkan sejumlah 35 SK Biru dengan total 66.265,7 Ha yang tersebar di 14 Provinsi.

RINCIAN PER PROVINSI
CAPAIAN TORA YANG TELAH DITERBITKAN SK PELEPASAN HINGGA TAHUN 2022

Tabel Tabel Rincian Capaian TORA yang Telah Diterbitkan SK Pelepasan Per Provinsi Hingga Tahun 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	TANGGAL	LUAS (HA)
1.	Kalimantan Barat	Sekadau	22 Agustus 2019	410,61
2.	Kalimantan Selatan	Balangan	22 Agustus 2019	31
3.	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	22 Agustus 2019	1.625,89
4.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	22 Agustus 2019	46,38
5.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	22 Agustus 2019	17,01
6.	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	22 Agustus 2019	160,68
7.	Kalimantan Selatan	Tapin	22 Agustus 2019	191,00
8.	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	22 Agustus 2019	8.983,09
9.	Kalimantan Tengah	Barito Utara	22 Agustus 2019	5.951,46
10.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara (PT Acacia, adendum IUPHHK)	22 Agustus 2019	469,34
11.	Gorontalo	Boalemo	18 Oktober 2019	902
12.	Gorontalo	Bone Bolango	18 Oktober 2019	29
13.	Gorontalo	Gorontalo Utara	18 Oktober 2019	911
14.	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	18 Oktober 2019	23
15.	Maluku Utara	Kota Ternate	20 November 2019	26,72
16.	Maluku Utara	Halmahera Tengah	11 Maret 2020	4.866,50
17.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	11 Maret 2020	281,14
18.	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	3 Maret 2020	102,64
19.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	3 Maret 2020	71,51
20.	Sulawesi Tenggara	Kolaka	3 Maret 2020	438,23
21.	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	3 Maret 2020	13.268,59
22.	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	3 Maret 2020	1.702,98
23.	Maluku Utara	Halmahera Barat	5 Maret 2020	484,41
24.	Maluku Utara	Halmahera Timur	5 Maret 2020	2.487,69
25.	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	5 Maret 2020	255,94
26.	Sulawesi Tengah	Banggai	9 Maret 2020	3.650,41
27.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	9 Maret 2020	322,27
28.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	9 Maret 2020	278,93
29.	Sulawesi Tenggara	Konawe	9 Maret 2020	1.642,24
30.	Maluku	Kota Tual	9 Maret 2020	5,25
31.	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	9 Maret 2020	9,23
32.	Sulawesi Tengah	Morowali	9 Maret 2020	120,87
33.	Aceh	Aceh Tamiang	13 April 2020	1.365,55
34.	Bengkulu	Bengkulu Utara	22 April 2020	48,02
35.	Sulawesi Tengah	Buol	22 April 2020	23,78
36.	Sulawesi Tengah	Tojo Una una	22 April 2020	2.399,08
37.	Bengkulu	Muko-muko	23 April 2020	21,56
38.	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	27 April 2020	4.446,31
39.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	27 April 2020	445,04
40.	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	30 April 2020	661,55

NO	.PROVINSI	KABUPATEN	TANGGAL	LUAS (HA)
41.	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	30 April 2020	160,24
42.	Kalimantan Barat	Sekadau	16 April 2020	6.901,20
43.	Kalimantan Tengah	Kapuas	8 Mei 2020	8.169,47
44.	Bangka Belitung	Bangka Barat	17 Juli 2020	7,28
45.	Bangka Belitung	Bangka Selatan	17 Juli 2020	10,76
46.	Nusa Tenggara Barat	Dompu	17 Juli 2020	33,00
47.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	17 Juli 2020	35,63
48.	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	17 Juli 2020	46,70
49.	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	27 Juli 2020	3.244,44
50.	Bangka Belitung	Bangka Tengah	28 Juli 2020	199,82
51.	Kep. Riau	Batam	30 Juli 2020	78,91
52.	Kep. Riau	Kep. Anambas	30 Juli 2020	72,51
53.	Kep. Riau	Karimun	07 September 2020	235,11
54.	Kep. Riau	Bintan	07 September 2020	778,28
55.	Bengkulu	Kaur	07 September 2020	43,64
56.	Papua Barat	Teluk Bintuni	30 Juli 2020	5.088,724
57.	Papua Barat	Teluk Wondama	30 Juli 2020	576,7742
58.	Kep. Riau	Kota Tanjungpinang	30 Juli 2020	7,7887
59	Kep. Riau	Lingga	30 Juli 2020	53,223
60.	Jambi	Muaro Jambi	30 Juli 2020	1505,052
61.	Jambi	Tanjung Jabung Barat	30 Juli 2020	598,3028
62.	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	04 Agustus 2020	11,44
63.	Sulawesi Selatan	Barru	07 Agustus 2020	2103,113
64.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	28 Agustus 2020	494,97
65.	Nusa Tenggara Timur	Lembata	28 Agustus 2020	159,760
66.	Nusa Tenggara Timur	Ngada	28 Agustus 2020	16,183
67.	Nusa Tenggara Timur	Malaka	28 Agustus 2020	23,445
68.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	28 Agustus 2020	128,26
69.	Papua	Mimika	26 Maret 2021	3.340
70.	Papua	Nabire	30 Maret 2021	314
71.	Papua	Jayapura	30 Maret 2021	445
72.	Papua	Merauke	26 Maret 2021	2.984
73.	Papua	Biak Numfor	26 Maret 2021	1.158
74.	Papua	Keerom	30 Maret 2021	632
75.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	26 Agustus 2021	283,2
76.	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	26 Agustus 2021	303,9
77.	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	26 Agustus 2021	278,1
78.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat	26 Agustus 2021	114,7
79.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	26 Agustus 2021	701,1
80.	Maluku	Buru	08 September 2021	2.552,6
81.	Sumatera Utara	Padang Lawas	31 Desember 2021	1.854,3
82.	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	31 Desember 2021	204,4
83.	Sumatera Utara	Langkat	31 Desember 2021	1.101,7
84.	Sumatera Utara	Karo	31 Desember 2021	5.522,8
85.	Sumatera Utara	Samosir	31 Desember 2021	6.234,0
86.	Sulawesi Selatan	Enrekang	31 Desember 2021	1.669,3
87.	Sulawesi Selatan	Maros	31 Desember 2021	583,8
88.	Jambi	Batanghari	27 Desember 2021	5,4
89.	Jambi	Kerinci	27 Desember 2021	50,2
90.	Jambi	Sarolangun	27 Desember 2021	75,4

No	.Provinsi	Kabupaten	TANGGAL	LUAS (Ha)
91.	Jambi.	Tanjung Jabung Timur	27 Desember 2021	31,4
92.	Jambi.	Tebo	27 Desember 2021	396,4
93.	Kepulauan Riau	Natuna	27 Desember 2021	20,2
94.	Maluku	Maluku Tengah	27 Desember 2021	5.821,8
95.	Nusa Tenggara Timur	Belu	31 Desember 2021	277,7
96.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	31 Desember 2021	227,2
97.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	31 Desember 2021	571,7
98.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	31 Desember 2021	21,6
99.	Sulawesi Tenggara	Muna	11 April 2022	727,8
100.	Sulawesi Barat	Pasangkayu	26 April 2022	2.880,6
101.	Papua Barat	Kaimana	26 April 2022	279,1
102.	Papua Barat	Kota Sorong	25 April 2022	2.375,5
103.	Kalimantan Selatan	Banjar	12 Mei 2022	1.368,6
104.	Kalimantan Selatan	Kotabaru	12 Mei 2022	1.960,1
105.	Sulawesi Tenggara	Buton	7 Juni 2022	109,34
106.	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	7 Juni 2022	34,86
107.	Sulawesi Barat	Majene	6 Juni 2022	119,94
108.	Sulawesi Selatan	Wajo	30 Mei 2022	3.315,52
109.	Kalimantan Timur	Kutai Barat	5 Juli 2022	119,53
110.	Sulawesi Barat	Mamasa	30 Juni 2022	899,36
111.	Papua Barat	Manokwari	08 Juli 2022	1.835,3
112	Papua Barat	Pegunungan Arfak	12 Juli 2022	2.029,5
113.	Papua Barat	Fakfak	08 Juli 2022	584,0
114.	Bengkulu	Kepahiang	07 September 2022	2,4
115.	Aceh	Kota Sabang	07 September 2022	28,1
116.	Bengkulu	Seluma	07 September 2022	1,9
117.	Kalimantan Barat	Bengkayang	04 Juli 2022	6.519,2
118.	Aceh	Aceh Utara	23 Desember 2022	78,8
119.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	23 Desember 2022	6,8
120.	Kalimantan Selatan	Tanahbumbu	23 Desember 2022	1.391,5
121.	Maluku	Kepulauan Aru	23 Desember 2022	4.568,7
122.	Sumatera Barat	Dharmasraya	23 Desember 2022	515,6
123.	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	23 Desember 2022	153,8
124.	Sumatera Barat	Lima Puluh Koto	23 Desember 2022	733,7
125.	Sumatera Barat	Sijunjung	23 Desember 2022	2.244,2
126.	Sumatera Barat	Solok Selatan	23 Desember 2022	208,3
127.	Kalimantan Barat	Ketapang	30 Desember 2022	2,056.61
128.	Kalimantan Barat	Kuburaya	30 Desember 2022	5,050.75
129.	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	30 Desember 2022	11,454.06
130.	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	30 Desember 2022	7,092.90
131.	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	30 Desember 2022	4,955.46
132.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	30 Desember 2022	534.39
133.	Bali	Buleleng	30 Desember 2022	7,98

KETERANGAN	
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Inver) dan sudah diserahkan Presiden di Pontianak Tahun 2019
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Adendum IUPHHK) dan sudah Diserahkan Presiden di Pontianak Tahun 2019
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Inver) dan sudah diserahkan Presiden Secara Factual di Jakarta dan Virtual tgl 7 Januari 2021
	SK Perubahan Batas TORA (sumber dari Inver) dan sudah diserahkan Yth. Bapak Presiden Secara Faktual di Sumut dan Virtual tgl 3 Februari 2022
	SK Perubahan Batas TORA yang belum diserahkan Presiden

193.982,1
Total Luas SK Biru

L. LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT

PROGRAM perhutanan sosial (PS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program PSsendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program PS membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan.

Secara prinsip, perhutanan sosial merupakan sebuah sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah memberikan persetujuan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun.

Perhutanan Sosial menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat tapak. Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah menyalurkan stimulan bantuan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas produksi komoditas kelompok tani sekitar hutan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses Kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 Juta Ha luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini hingga akhir tahun 2022, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 5.318.376,20 Ha dengan capaian tahun 2022 ini seluas 427.453,18 Ha.

Capaian terhadap Renstra 2020-2024 sebesar 32,81%, nilai ini diperoleh dari penjumlahan capaian luas perhutanan sosial tahun 2020 sampai dengan 2022 dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan 2024.

Luas Perhutanan Sosial 2022
427.453,18 Ha

Tabel Tabel Capaian Luas Perhutanan Sosial Tahun 2022

Luas (Ha)	Skema
219.931	Hutan Desa (HD)
105.955	Hutan Kemasyarakatan (HKM)
7.759	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
79.250	Kemitraan Kehutanan
14.558	Hutan Adat (HA)

CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL
BERDASARKAN SKEMA

Tabel Tabel Capaian Luas Perhutanan Sosial Tahun s/d 2022

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1.	Hutan Desa (HD)	2.144.084,21
2.	Hutan Kemasyarakatan (HKM)	973.535,57
3.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	352.697.08
4.	Kemitraan Kehutanan	
	a. Kulin KK	572.203,54
	b. IPHPS	34.789,79
5.	Hutan Adat (HA*)	1.241.066,01
	TOTAL	**5.318.376,20**

*) Catatan :
- Penetapan Hutan Adat = 152.917 Ha
- Indikatif Hutan Adat = 1.088.149 Ha

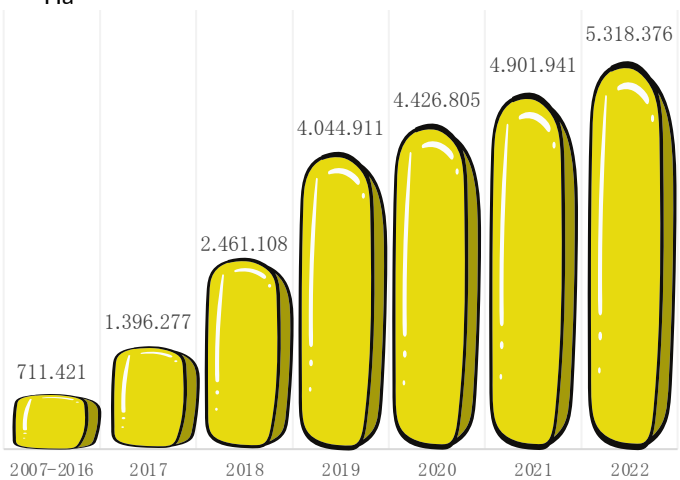

Gambar Capaian Kumulatif Luas Perhutanan Sosial s/d 2022 (Dalam Ha)

Saat ini luasan perhutanan sosial yang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi VII seluas ± 14.677.386 Ha untuk memenuhi target pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial seluas 12,7 Juta Ha hingga 2024.

Hingga akhir Desember 2022 telah didistribusikan akses kelola perhutanan sosial seluas 5.318.376,20 Ha bagi 1.149.595 KK dengan jumlah 8.041 unit SK dalam bentuk Persetujuan/Izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL
PER PROVINSI

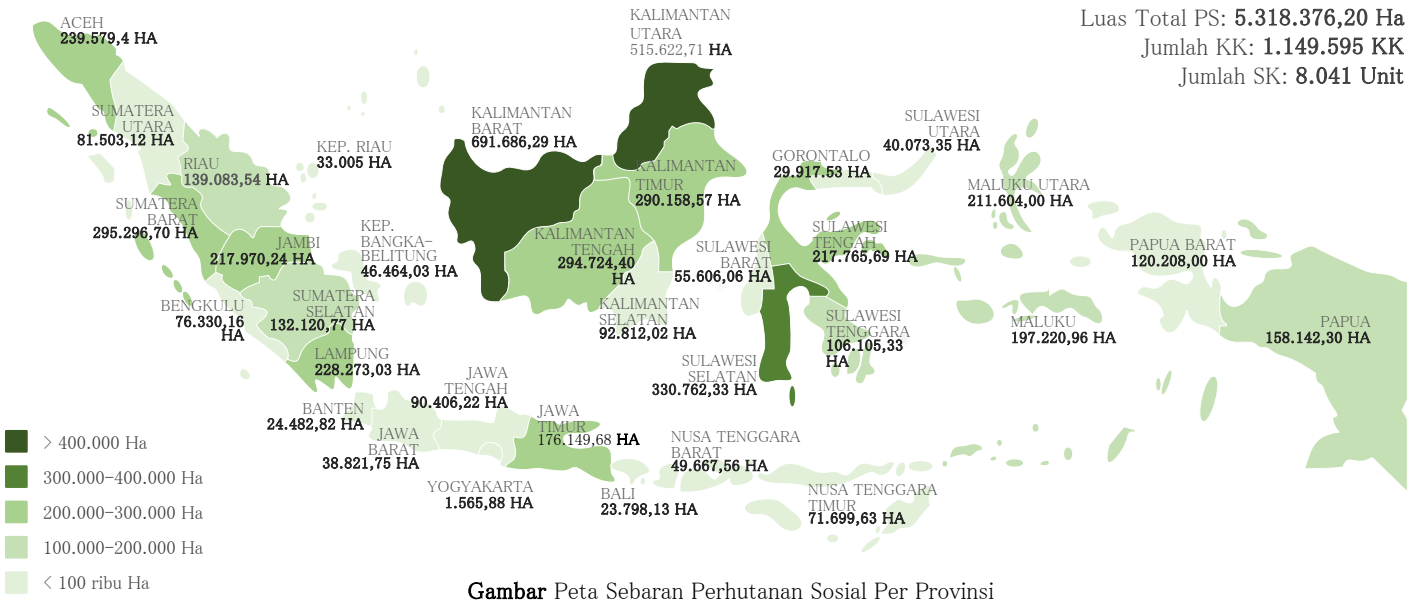

Gambar Peta Sebaran Perhutanan Sosial Per Provinsi

Program perhutanan sosial secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengelolaannya. Pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, hingga 2022 sebanyak ± 1.149.555 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih lagi masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari hasil budidaya tanaman dan jangka panjangnya masyarakat mendapatkan bukti pengelolaan lahan yang sah dalam bentuk SK Hijau (SK perhutanan Sosial).

Penerbitan SK perhutanan sosial menjadi bukti bagi masyarakat dalam hak pengelolaan hutan sosial. Penerbitan SK perhutanan sosial hingga tahun 2022 ini sejumlah 8.041 unit SK, dengan jumlah SK yang diterbitkan tahun ini sejumlah 616 unit SK. Penerbitan SK perhutanan Sosial bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian Kawasan hutan siring dengan manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

Program perhutanan sosial telah menjangkau di 34 provinsi Indonesia. Aliran manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat hingga tingkat tapak. Provinsi dengan luas perhutanan sosial tertinggi berada di provinsi Kalimantan Barat seluas 691 Ribu Ha, di ikuti oleh provinsi Kalimantan Utara seluas 515 Ribu Ha dan provinsi Sulawesi Selatan seluas 330 Ribu Ha.

Berbanding terbalik, provinsi dengan luas perhutanan sosial yang masih rendah menjadi perhatian utama untuk dapat ditingkatkan. Provinsi dengan luas perhutanan sosial terendah berada di provinsi Yogyakarta seluas 1,5 Ribu Ha, di ikuti oleh provinsi Bali seluas 23 Ribu Ha dan provinsi Banten seluas 24 Ribu Ha.

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS) tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK), namun harus bergulir sebagai perekonomian yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kepala keluarga yang telah memperoleh akses kelola Kawasan hutan, maka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Capaian KUPS yang telah terbentuk hingga tahun 2022 sejumlah 9.985 KUPS. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.831 KUPS dari capaian tahun 2021 yaitu 8.154 KUPS. Hal ini karena masyarakat di daerahnya masing-masing dapat merasakan manfaat pembentukan perhutanan sosial secara langsung.

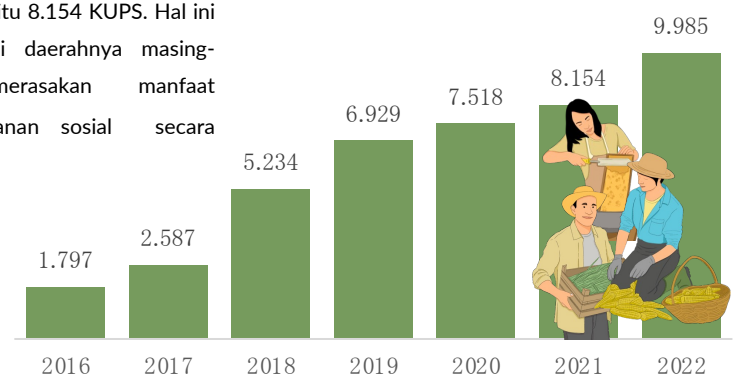

Gambar Capaian Kumulatif KUPS 2016–2022 (Kelompok)

JUMLAH KUPS YANG MENINGKAT KINERJANYA

Capaian KUPS pada tahun 2022 sebanyak 9.985 KUPS. Persentase KUPS berdasarkan kategori tertinggi adalah kategori Biru sebesar 46,72% atau sejumlah 4.665 KUPS, kategori Perak sebesar 43,41% atau sejumlah 4.334 KUPS, kategori Emas sebesar 9,37% atau sejumlah 936 KUPS dan kategori platinum sebesar 0,51% atau sejumlah 50 KUPS. Kelompok usaha perhutanan sosial yang telah terbentuk diharapkan dapat terus berkembang. Perkembangan KUPS akan beriringan dengan kapasitas anggota kelompoknya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dengan memberikan intervensi KUPS diantaranya pendampingan KUPS dalam upaya penyesuaian bentuk strategi, kebijakan, manajemen, teknologi dan sikap agar pengembangan usaha PS dapat melahirkan titik ekonomi baru. Dari segi SDM intervensi yang diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha perhutanan sosial. Muara dari intervensi yang diberikan tidak lain adalah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat.

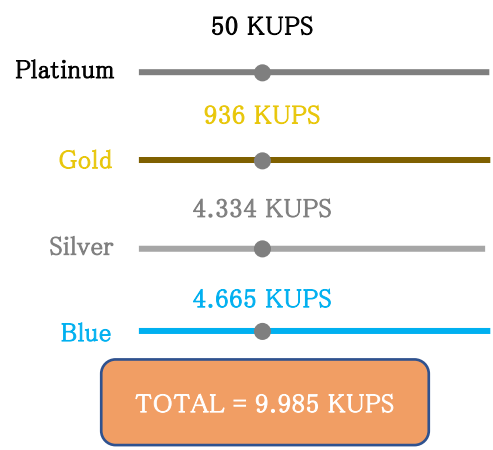

NILAI TRANSAKSI EKONOMI
KUPS TAHUN 2022

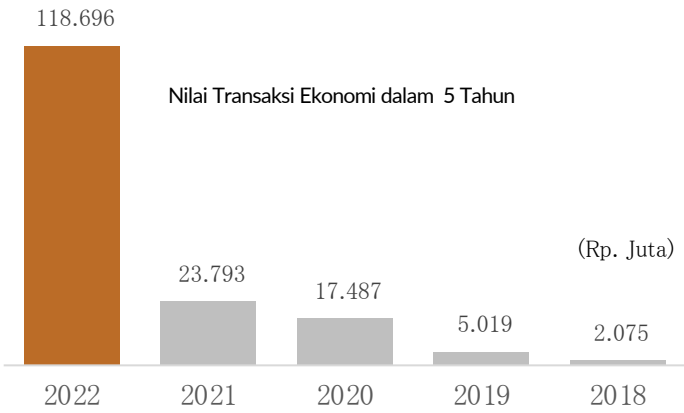

Gambar 3.12.6. Tren Nilai Transaksi Ekonomi KUPS

Pemerintah berupaya mendorong roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Perhutanan Sosial melalui KUPS menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat tapak.

Berdasarkan aplikasi GoKUPS.menlhk.go.id sampai dengan Januari 2023 nilai transaksi ekonomi KUPS pada tahun 2022 sebesar Rp 118.696.313.785. Provinsi dengan Nilai Tukar Ekonomi tertinggi yaitu Sumatera Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)

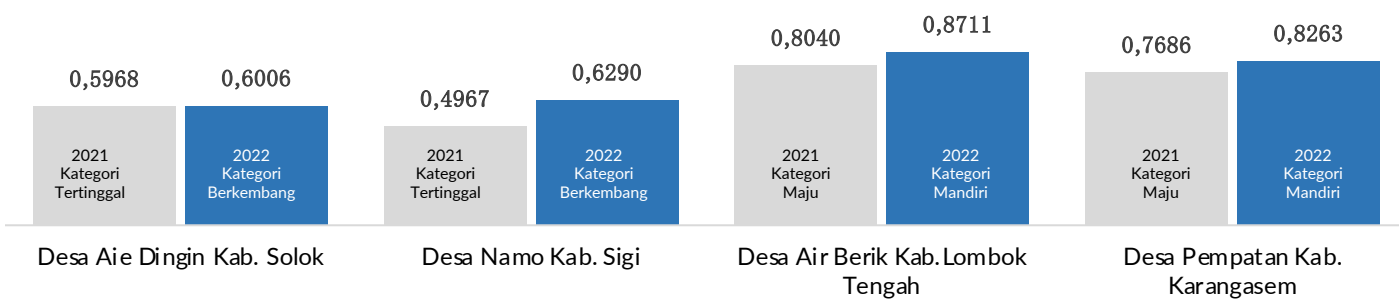

Gambar Nilai Indeks Desa Membangun Desa Aie Angin, Desa Namo, Desa Air Berik dan Desa Pempatan Tahun 2021-2022

Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan.

Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dengan peningkatan kapasitas desa pada indeks desa membangun. Peran KUPS mampu memberikan sumbangan pada peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Sebagai contoh peningkatan kelas KUPS menjadi Emas dan Platinum yang ada di Desa Aie Angin (Kab. Solok), Desa Namo (Kab. Sigi), Desa Air Berik (Kab. Lombok Tengah) dan Desa Pempatan (Kab. Karangasem) mampu meningkatkan Nilai Indeks Desa Membangun dari kategori tertinggal menjadi berkembang dan kategori maju menjadi mandiri, seperti terlihat pada gambar di atas.

M. INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (IEPKH) adalah indeks atau indikator untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, entitas pengukurannya ditujukan pada seluruh kawasan hutan, baik kawasan hutan konservasi (KSA/KPA), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Nilai indeks efektivitas pengelolaan hutan di tahun 2022 senilai 2,4 poin. Nilai ini dibentuk oleh nilai indeks efektivitas empat kawasan hutan berdasarkan fungsi, antara lain Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Capaian ini melebihi target sebesar 0,1 dari target yang ditetapkan pada renstra sebesar 2,3 pada tahun 2022.

Nilai Indeks Efektivitas
Pengelolaan Kawasan Hutan 2022
2,4 Poin

Tabel Nilai IEPKH Per Kawasan Hutan Tahun 2022

Nilai (Poin)	Kawasan Hutan Berdasar Fungsi
63,24	Hutan Konservasi
73,12	Hutan Lindung dan Produksi
74,86	KHDTK Diklat

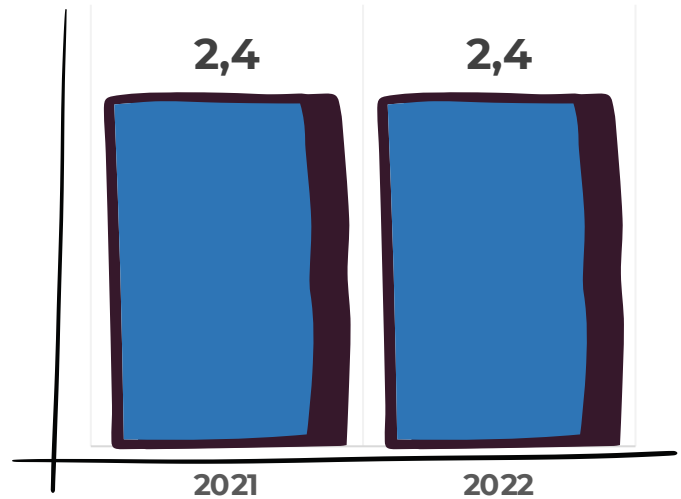

*Interval 2,1 – 2,5 poin

Gambar Capaian IEPKH Tahun 2021–2022

DATA LUAS KAWASAN DAN
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Sampai dengan tahun 2022, Luas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Tahun 2022

No	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi	Luas (Ha)	Persentase	Nilai Indeks	Nilai Terbobot Skala 0–100
1.	Hutan Konservasi	27.360.620,40	21,60%	63,24	63,24
2.	Hutan Lindung & Produksi	99.255.185,79	78,33%	73,12	73,12
3.	KHDTK Diklat	92.212,58	0,07%	74,86	74,86
4.	Hutan Penelitian	33.949,50	0,03%	–	–
Jumlah		**126.615.806,19**	**100%**	–	–

Dari target senilai 2,3 Poin, indeks efektivitas pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 2,4 poin. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 2,5 Poin, atau telah tercapai 96% dari Renstra.

Hasil penilaian dengan menggunakan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) ini diharapkan menjadi salah satu titik referensi untuk perbaikan pengelolaan Kawasan hutan di Indonesia. Untuk itu, kondisi dan tingkat pencapaian yang tercermin dari angka indeks ini, nantinya perlu ditindaklanjuti dalam sejumlah rencana aksi untuk peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan sekaligus menjadi satu sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

N. KASUS LHK YANG DITANGANI MELALUI PENEGAKAN HUKUM

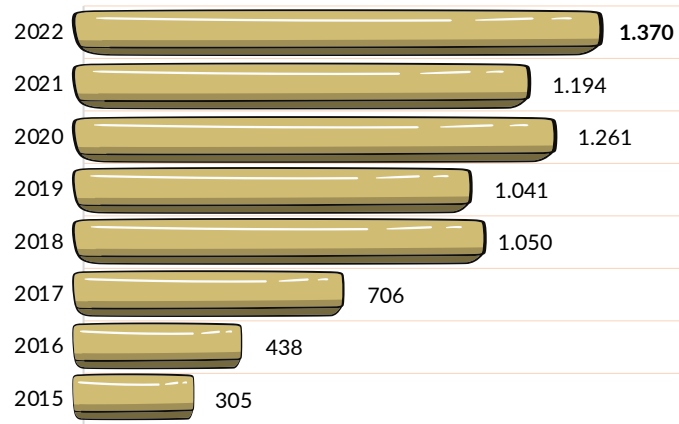

Gambar Grafik Kasus LHK yang Ditangani Penegakan Hukum 2015-2022 (kasus)

KEMENTERIAN LHK melalui penegakan hukum berkomitmen dalam penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diyakini memiliki daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang berkelanjutan. Kerja-kerja penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kinerja Kementerian LHK pada tahun 2022 telah melaksanakan langkah-langkah tepat penegakan hukum yang ditunjukan dengan telah berhasil menyelesaikan 1.370 kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang kedepannya akan memberikan kemanfaatan bagi bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kepastian hukum, keadilan bagi lingkungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

24
Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan

110
Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan

910
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha

20
Gugatan Perdata Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan

16
Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan

153
Kasus Tindak Pidana P21

137
Operasi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan

PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS LHK PER PROVINSI

Pada tahun 2022, kinerja penegakan hukum LHK dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Penyelesaian permasalahan lingkungan dan kehutanan terus dilakukan demi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Secara total pada tahun 2022 penegakan hukum LHK telah menyelesaikan permasalahan sejumlah 1.370 kasus, dengan rincian 638 kasus permasalahan kehutanan dan 732 kasus permasalahan lingkungan.

Apabila dilihat per provinsi, permasalahan kehutanan paling banyak terdapat di provinsi Sulawesi Tenggara, dan permasalahan lingkungan terbanyak di provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk permasalahan kehutanan paling sedikit terdapat di provinsi Bali, Banten, dan Kalimantan Utara, serta permasalahan lingkungan paling sedikit terdapat di provinsi Gorontalo.

Perlu ditekankan kembali bahwa Kementerlian LHK melalui Ditjen Gakkum berkomitmen dalam melakukan pencegahan pencegahan terkait kasus kehutanan dan lingkungan agar tidak terjadi. Sehingga masyarakat menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivtas sehari-hari.

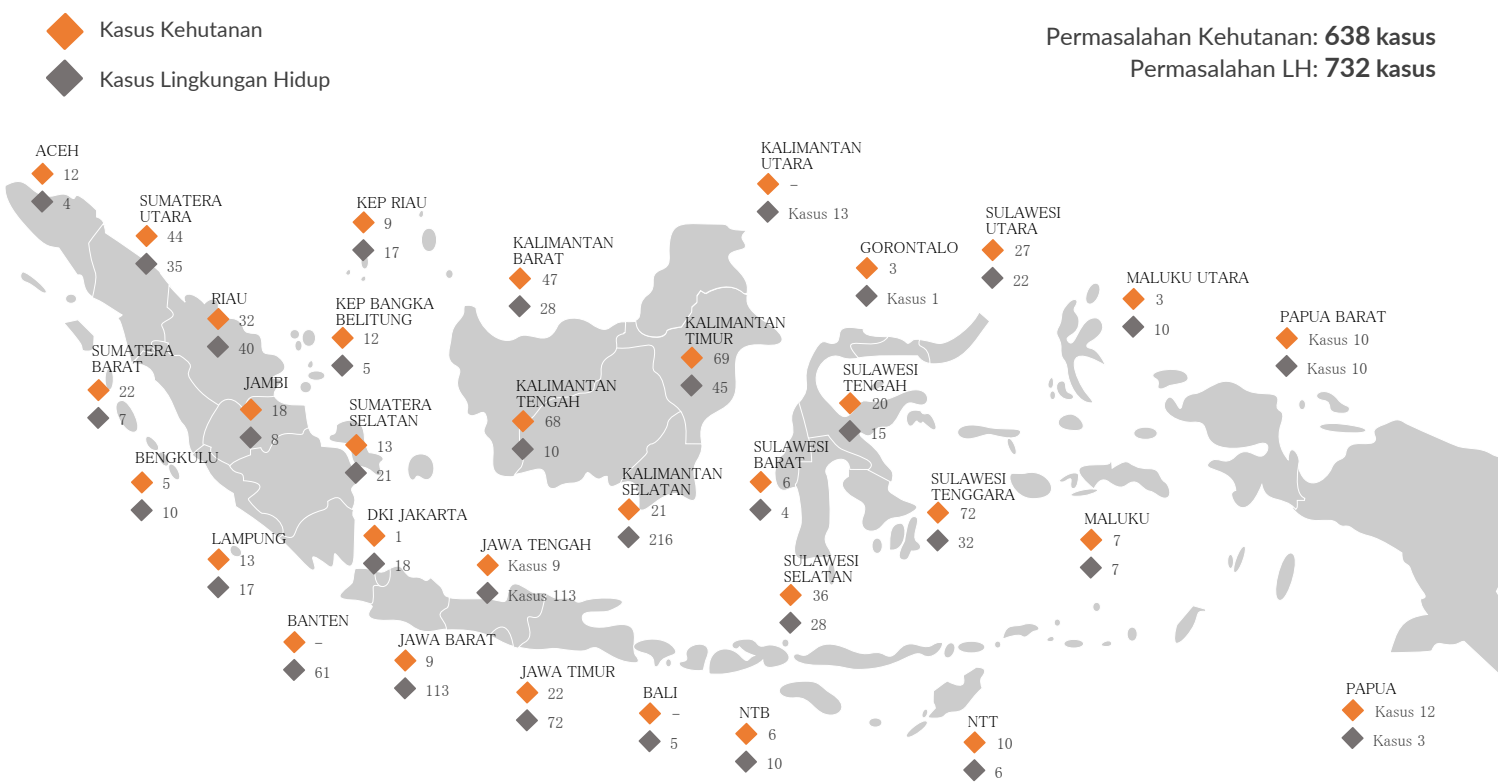

Gambar Peta Sebaran Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022

O. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

PELAKSANAAN Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mengatur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrument sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

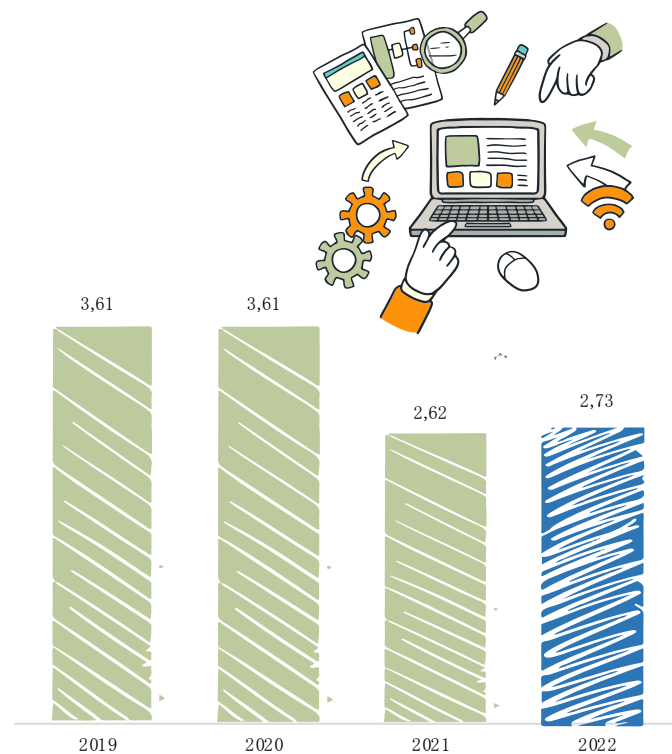

Gambar Data Capaian SPBE Tahun 2019–2022 (poin)

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri PANRB No.108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kementerian LHK memperoleh nilai sebesar 2,73 (kategori baik). Perolehan nilai yang didapat ini mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin (4,2%) dari penilaian Tahun 2021. Pencapaian ini sebesar 76% dari target Rencana Kerja Tahun 2022 sehubungan adanya keterbatasan sumber daya terkait dengan alokasi anggaran Pusat Data dan Informasi yang mengalami penurunan dari Rp.28.129.215.000,- pada Tahun 2021 menjadi Rp.20.262.183.000,- di Tahun 2022 dengan persentase penurunan sebesar 28%, bahkan penurunan alokasi anggaran pada Pengelolaan Teknologi Informasi mencapai 36% dari tahun sebelumnya. Penurunan alokasi anggaran ini diakibatkan adanya *Refocusing* Anggaran Penanganan Covid-19.

P. INDEKS PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan nilai penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

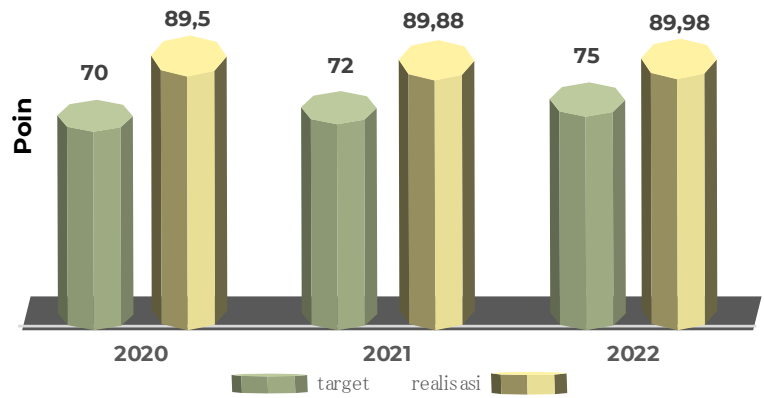

Gambar Progres Pencapaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2022

Pada tahun 2022, Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat sebesar 89,98 poin dari target 75 poin, atau sebesar 119,97%. Apabila dibandingkan terhadap Renstra 2020-2024 telah mencapai 112,48%. Nilai 89,98 poin ini meningkat dari nilai tahun 2021 sebesar 89,88 poin dan nilai tahun 2020 sebesar 89,5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BP2SDM telah sesuai target untuk menuju SDM KLHK yang kompeten dan berkapasitas.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengukur upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok usaha dan kelompok lingkungan hidup.

Strategi pengembangan SDM lingkungan dan kehutanan dicapai melalui peningkatan kapasitas individu dan peningkatan kapasitas individu dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang berperan dalam mendidik dan meningkatkan kapasitas dan produktivitas individu. Kelembagaan dalam hal ini meliputi kelembagaan formal dan informal. Peningkatan kapasitas kelembagaan formal dilakukan melalui penyelenggarakan Pendidikan teknis menengah kejuruan kehutanan din 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri binaan Kementerian LHK. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan formal juga dilakukan melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Adapun pada sisi non formal, dilakukan pendekatan people to people contact dengan membentuk institusi Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung sasaran strategis keempat Kementerian LHK, yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik”.

Q. NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 adalah 76,14 poin, atau tercapai 94% dari target 81 poin. Pencapaian ini meningkat sebesar 0,83% atau 0,63 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sebesar 75,51 poin. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, capaian tahun 2022 sebesar 89,57%.

Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada delapan area perubahan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang sangat variatif, sehingga diharapkan lebih relevan dalam mengungkit fokus pembangunan. Kedelapan area perubahan tersebut diantaranya adalah

a. Manajemen Perubahan
b. Deregulasi Kebijakan
c. Penataan Organisasi
d. Penataan Tata Laksana
e. Penataan SDM Aparatur
f. Penguatan Akuntabilitas
g. Penguatan Pengawasan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Monitoring dan evaluasi kinerja agen perubahan, integrasi sistem informasi baik internal maupun eksternal, sarana konsultasi dan pengawasan satu pintu serta penyesuaian SOP atas tindak lanjut peta proses bisnis baru setelah penyederhanaan birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mendukung tren positif nilai Reformasi Birokrasi

EVALUASI ATAS pelaksanaan reformasi birokrasi pada level kementerian dilakukan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Permen PANRB tahun 2020-2024. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Permen PANRB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi ialah: a.Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja; b. Birokrasi yang efektif dan efisien, dan; c.Birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya adalah mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu), dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut serta melakukan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui strategi yang terancang pada Rencana Strategis Kementerian LHK pada tahun 2020-2024 dalam indikator Nilai Reformasi Birokrasi yang ditargetkan selalu bertambah setiap tahun.

CAPAIAN KINERJA
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks reformasi birokrasi tahun 2022 merupakan hasil penilaian oleh Kementerian PAN&RB pada tahun 2021. Berdasarkan surat No. B/46/M.RB/06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 76,14 poin. Target nilai kinerja Reformasi Birokrasi untuk tahun 2022 sebesar 81 poin dengan capaian sebesar 94% dari target. Tahun ini indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau 0,83% (tahun 2021 indeks RB sebesar 75,51 poin).

Penilaian reformasi birokrasi tahun 2021 dibagi ke dalam 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit mendapatkan nilai sebesar 42,33 poin (naik 0,53 poin dari nilai tahun lalu yaitu 41,80 poin), sedangkan nilai komponen hasil sebesar 33,81 poin (meningkat 0,10 poin dari nilai tahun lalu yaitu 33,71 poin).

Komponen pengungkit terdiri atas 3 aspek yang bobot tertinggi pada aspek Reform (30%) yaitu 19,92 poin, aspek pemenuhan (20%) yaitu 16,05 dan hasil antara (10%) yaitu 6,36.

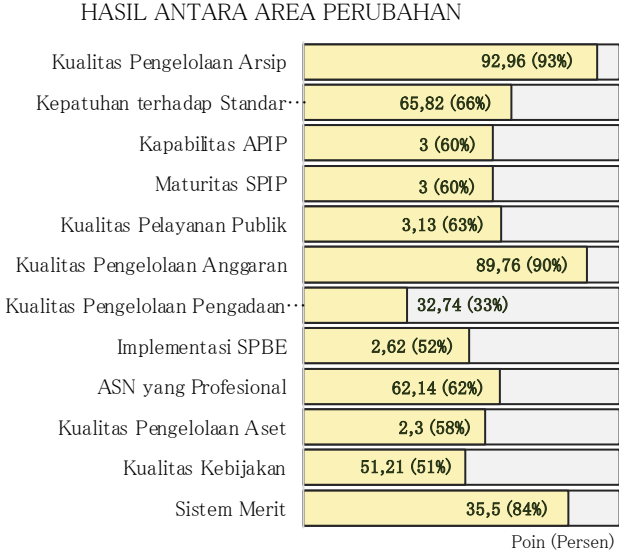

Gambar Hasil Antara Area Perubahan

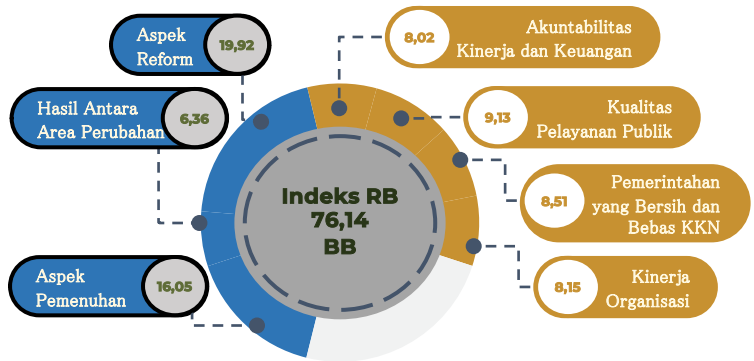

Gambar Hasil Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Komponen hasil menyumbang bobot 40 poin yang terdiri dari 4 penilaian. Bobot tertinggi terdapat pada penilaian kualitas pelayanan publik sebesar 9,13 poin, meningkat 0,2 poin dibandingkan tahun lalu. Nilai ini merupakan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN&RB. Hal ini menunjukkan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum oleh KLHK sudah baik.

Penilaian lainnya yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan menyumbang 8,02 poin (meningkat 0,13 poin), kinerja organisasi yaitu 8,15 (meningkat 0,64 poin), dan juga pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yaitu 8,51 poin (mengalami penurunan 0,87 poin dari tahun lalu).

Pada tahun ini terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh KPK. Hal ini menyebabkan nilai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN mengalami penurunan.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa KLHK telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

R. OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2022 Kementerian LHK kembali mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan opini BPK atas laporan keuangan tahun 2021. Atas prestasi ini pula, Kementerian LHK memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu Kementerian yang memperoleh Opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2017.

Atas capaian opini BPK tersebut, jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, maka telah terealisasi sebesar 100%. Ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun berikutnya.

SETIAP KEMENTERIAN atau lembaga negara berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 ditargetkan memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab melakukan tata kelola administrasi keuangan dan aset sehingga sesuai dengan kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Biro Keuangan menjadi koordinator bersama-sama Biro Umum dalam proses penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian LHK.

S. LEVEL MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LHK

SALAH SATU IKU yang mendukung pilar Tata Kelola adalah Level Maturitas SPIP Kementerian LHK yang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai Maturitas SPIP Kementerian LHK Tahun 2022 adalah 3,50 poin atau level 3 dengan karakteristik "Terdefinisi" yang artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Target SPIP Kementerian LHK Tahun 2022 adalah Level 3, sehingga capaian kinerja indeks maturitas SPIP tercapai 100%. Nilai Indeks Maturitas SPIP tersebut merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim BPKP, dimana tahun 2022 merupakan tahun pertama BPKP melakukan evaluasi SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian LHK. Jika dibandingkan terhadap target Renstra tahun 2020-2024 maka diperoleh capaian sebesar 75%. Capaian Maturitas SPIP KLHK Tahun 2022 telah mencapai target Standar Nasional yaitu minimal Level 3.

MEKANISME PENILAIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian LHK untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK yang dilakukan tahun 2022 terdiri dari: 1) Penilaian Mandiri/PM Kementerian oleh Sekretariat Jenderal; 2) Penjaminan Kualitas/PK oleh Inspektorat Jenderal; 3) Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM dan PK. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Periode penilaian maturitas SPIP dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli T-1 s/d 30 Juni T0 menghasilkan (1)Nilai Maturitas SPIP, (2)Nilai Manajemen Risiko Indeks, (3)Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi. Komponen penilaian terdiri dari penetapan tujuan, struktur dan proses dan pencapaian tujuan.

SENI: PERTAUTAN ANTARA ALAM DAN MANUSIA

Harmoni. Dari seni tari di Bali, hendaknya belajar bagaimana mensyukuri alam yang telah memberikan penghidupan dengan menjaga dan merawat lingkungan

Foto oleh : Sandi Kusuma

RENCANA 2024

A. RENCANA KERJA PEMERINTAH

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui:

(1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

KLHK sebagai salah satu pelaksana program pemerintah mendukung terhadap 4 (empat) Prioritas Nasional yaitu : (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN2)Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN3)Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; (PN6)Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

B. RENCANA KERJA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Kementerian bertekad untuk menginternalisasi pembangunan nasional Tahun 2024 ke dalam setiap derap langkah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, sedemikian rupa sehingga setiap entitas tapak mampu mendetak produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya melukiskan geliat ekonomi yang terus tumbuh, kondisi lingkungan yang semakin dapat dirasakan manfaatnya dan relasi sosial yang semakin merekatkan.

Diharapkan, setidaknya pada Tahun 2024, setiap provinsi memiliki satu-dua tapak yang mampu memendarkan teladan baik sekaligus sebagai jendela pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dimana seluruh stake holder dapat memiliki dan mempelajari cerita sukses dari transformasi kebijakan. Untuk itu, milestone pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2024 diringkas dalam narasi utama **" Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata ."** Dan selanjutnya untuk memenuhi perbaikan kualitas reformasi birokrasi yang diharapkan memiliki dampak nyata di setiap provinsi dan nasional, sasaran utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan sebagai ukuran keberhasilan yaitu :

a. Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK sebesar 3-4% persen. Di dalam konteks pembangunan nasional, sasaran in akan digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan surplus neraca perdagangan non migas.
b. Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat (KUPS, KTH, kelompok pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung, kelompok usaha bank sampah) sebesar 5-7%. Sasaran ini akan diartikulasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks desa membangun.
c. Penurunan beban lingkungan sebesar 2-3%. Angka ini didekati dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, penurunan laju penyusutan hutan, dan perbaikan parameter lingkungan hidup termasuk penurunan timbulan sampah dan limbah. Keberhasilan dari sasaran in akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat narasi pembangunan Indonesia yang semakin netral karbon.

Berkaitan dengan ini, KLHK berperan penting untuk dapat mengartikulasikan kinerja dalam pembangunan LHK untuk sumbangsih PDB, pengurangan kemiskinan, dan indeks gini ratio.

SASARAN MAKRO EKONOMI LHK 2024

3-4%
Pertumbuhan PDB sektor LHK dan ekspor LHK

5-7%
Peningkatan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan

2-3%
Penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan

Kementerian berupaya membantu membentuk peradaban di setiap jengkal tapak pembangunan untuk menyongsong Indonesia Maju 2045 yang terus tumbuh dan semakin Tangguh utamanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tema dan sasaran pembangunan LHK tahun 2024 diharapkan berdampak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan LHK dalam kerangka 4 (empat) pilar, yakni Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Tata Kelola serta menjiwai pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis beserta indikatornya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P .16 / MENLHK / SETJEN / SET .1 / 8 / 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Adapun arsitektur kinerja KLHK yang memuat tujuan pembangunan LHK dan sasaran strategis KLHK yang dinaungi oleh 4 (empat) pilar adalah sebagai berikut.

Pilar Lingkungan		
Tujuan 1 Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	**Sasaran Strategis 1** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Sasaran Strategis 3** Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	**Sasaran Strategis 4** Menurunnya laju penyusutan hutan
Pilar Ekonomi		
Tujuan 2 Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	**Sasaran Strategis 5** Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	**Sasaran Strategis 7** Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
	Sasaran Strategis 6 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	**Sasaran Strategis 8** Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pilar Sosial		
Tujuan 3 Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan	**Sasaran Strategis 9** Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	**Sasaran Strategis 11** Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
	Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	
Pilar Tata Kelola		
Tujuan 4 Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	**Sasaran Strategis 12** Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	**Sasaran Strategis 13** Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Keberhasilan Kementerian dalam mencapai 13 (tiga belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan diukur melalui seberapa besar target IKU yang dapat direalisasikan. KLHK memiliki 13 (tiga belas) IKU sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja kementerian. Adapun Rancangan Kinerja Utama 13 (tiga belas) IKU yang dijabarkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan LHK adalah sebagai berikut.

Kinerja Utama 2024

Pilar Lingkungan

Kementerian LHK juga terus menjaga kondisi lingkungan dan hutan yang sehat dalam mendukung perikehidupan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri. Upaya tersebut akan dicapai dengan Penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan.

Fokus sasarannya dengan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah serta menjaga kelestarian hutan sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dalam mendukung pembangunan rendah karbon di sebagian besar provinsi Keberhasilannya didekati melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan, dan Laju deforestrasi dan degradasi hutan

69,74 Poin
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
70 Poin

17,47 Persen
Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan

Laju deforestrasi dan degradasi hutan
0,2 juta hektar

Kinerja Utama 2024

Pilar Ekonomi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah dan limbah serta produktifitas barang dan jasa di tingkat tapak untuk mempertahankan kecendurungan positif PDRB sektor kehutanan dan lingkungan di seluruh provinsi. Fokus sasaran kinerja yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan sirkular ekonomi sampah dan limbah, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, meningkatkan hasil ekspor hasil hutan, TSL dan *Bioprospecting*, meningkatkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak dari lingkungan hidup dan kehutanan

16 Miliar US$
Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan *Bioprospecting*

7,480 Triliun Rupiah
Nilai PNBP Fungsional KLHK

122,2 Triliun Rupiah
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (Berdasarkan harga berlaku)

15 Triliun Rupiah
Kontribusi Sektor LH terhadap PDB Nasional (Berdasarkan harga berlaku)

Kinerja Utama 2024

Pilar Sosial

Kementerian LHK terus meningkatkan kepastian penggunaan hutan yang adil dan merata antara swasta dan masyarakat sembari menyelesaikan status Kawasan hutan secara legal dan legitimate sebagai upaya untuk meminimalisir konflik tenurial di seluruh provinsi. Kementerian juga melakukan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat, pelepasan Kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria dan penetapan Kawasan hutan.

10 Juta Hektar Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan	**119.390** Hektar Luas Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	**224.250** Hektar Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat

Kinerja Utama 2024

Pilar Tata Kelola

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pilar tata kelola terus memperbaiki tata kelola manajemen dan sumberdaya manusia baik aparatur maupun non aparatur kementerian. Strategi yang ditempuh diantaranya melalui peningkatkan kualitas pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien di dukung oleh SDM berkualitas yang mampu mensinergikan antara pendanaan dan PNBP sebagai upaya peningkatan value for money pada setiap belanja kementerian

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	**80** Poin
85 Poin	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Program Kementerian LHK Tahun 2024

KLHK mengelompokkan 13 (tiga belas) IKU ke dalam 5 (lima) program yang memuat 13 (tiga belas) Sasaran Program (Saspro) dan 13 Indikator Kinerja Program (IKP). Merujuk pada konsep Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), satu program dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu UKE I. Konsep ini diimplementasikan dalam dokumen perencanaan KLHK dimana untuk melaksanakan suatu program oleh UKE I disusunlah sasaran UKE I dan Indikator Kinerja UKE I. Program-program KLHK yang akan dikerjakan di tahun 2024 yaitu :

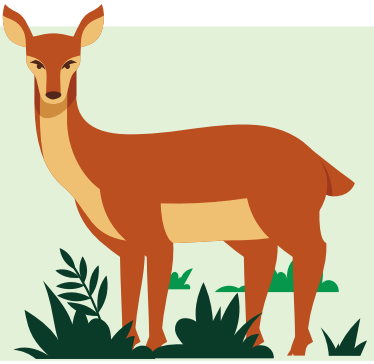

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program ini akan dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem , Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini akan dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah dan B3, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program ini dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim dan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh seluruh Eselon I dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Gerai kopi Solok Radjo yang ada di Bandara Internasional Minangkabau, salah satu terobosan inovatif dalam pemasaran produk lokal perhutanan sosial yang menginspirasi kelompok-kelompok lainnya

Foto oleh : M Azhar Fakhri

C. PENDAPATAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam perannya untuk memberikan sumbangsih bagi akselerasi ekonomi masyarakat dari bidang LHK, dengan salah satu sumbangan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Rencana PNBP yang akan diterima pada tahun 2024 dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan adalah sebesar Rp 7,4909 triliun dengan proprosi terbesar adalah dana reboisasi (32,06%), menyusul berikutnya penggunaan kawasan hutan (30,%) dan provisi sumberdaya hutan (16,68%). Angka ini naik 42 % dibandingkan angka tahun 2023. Dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan/atau perusakan LH, serta denda administrasi bidang kehutanan.

Langkah – langkah kebijakan PNBP KLHK pada tahun 2024 adalah (a) Perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan (Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja); (b) Implementasi perijinan berusaha berbasis multiusaha; (c) Optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain dengan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN); (d) Penguatan implementasi Automatic Blocking System (ABS) untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; (e) Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar Kementerian/ Lembaga dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar; serta (f) Mendorong pasar karbon di sektor kehutanan untuk menuju Nationally Determined Contribution 2030 dan Nett Zero Emission (NZE)

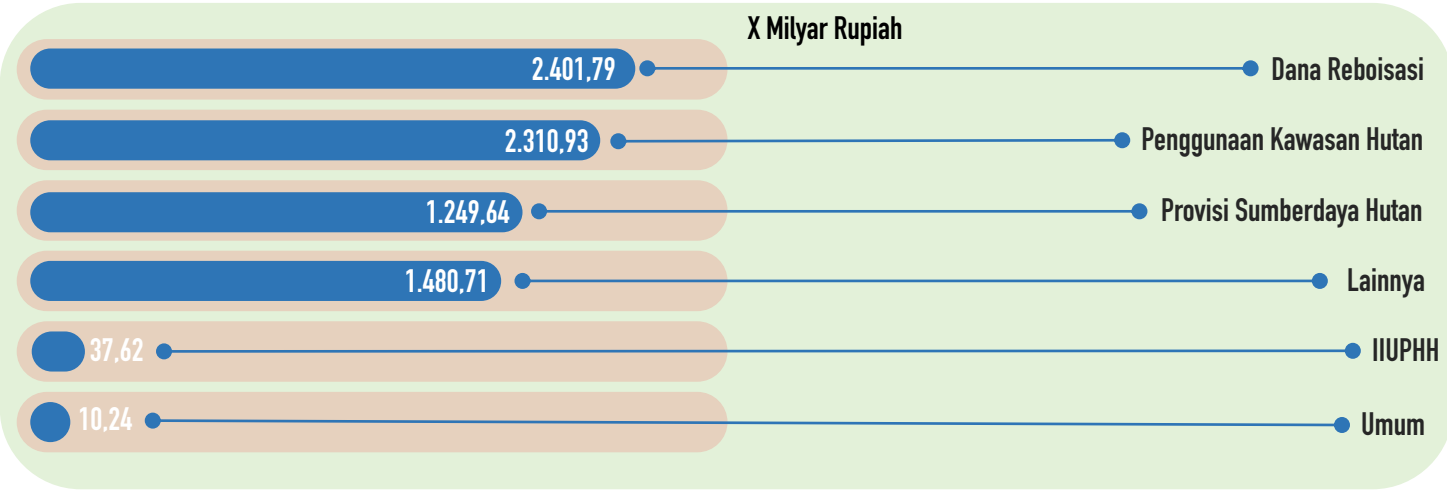

Anggaran Sumber Dana Hibah Luar Negeri (HLN)

Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari luar negeri. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

HLN merupakan salah satu upaya KLHK dalam mengurangi beban APBN. Hibah luar negeri dilakukan demi mengisi beban anggaran yang semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan.

Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Kementerian LHK mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.2/MENLHK/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Dalam peraturan ini telah mengatur beberapa hal terkait hibah yaitu kriteria, klasifikasi, penggunaan, serta penarikan hibah.

Kebijakan diambil oleh KLHK dalam rangka memaksimalkan penggunaan hibah luar negeri diantara : (1)KLHK Menyusun Annual Working Plan (AWP) 2024 dengan scenario moderat yang mempertimbangkan ruang fiscal KLHK (2)Penarikan hibah 2024 dilakukan dengan tepat waktu dan menargetkan *no objection letter* dari pemberi pinjaman dan hibah untuk AWP 2024 sebelum 31 Desember 2023 (3)KLHK tidak mengalokasikan Rupiah Murni Pendamping (RMP) untuk tahun 2024.

Pada Tahun 2024 rencana penarikan hibah luar negeri adalah sebesar Rp. 210,49 miliar dengan proporsi terbesar adalah lembaga donor KfW, diikuti dengan World Bank. KfW memiliki lima proyek Kerjasama hibah dengan KLHK yaitu :

1. Forest Programme II (REDD ++) - Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management
2. Forest Programme III – Sulawesi Programme
3. Forest Programme IV – Watershed Mamasa/Sulawesi
4. Forest Programme V – Social Forestry Support Programme
5. Forest Programme VI – Protection of Mangrove Forest.

Sedangkan dua proyek Kerjasama antara World Bank dengan KLHK yaitu :

1. BioCarbon Fund (BioCF ISFL) - Jambi Sustainable Landscape Managemen Project
2. Strengthtening Social Forestry in Indonesia Project.

Tabel Rencana Penarikan HLN Tahun 2024

Mitra	Proyek	Kegiatan	Penanggung Jawab Es II	Anggaran
Jerman/KFW	Forest Programme II (REDD+) - Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management			**8.908.680.000**
		Pembayaran Jasa Konsultan, Pembayaran Konsultan Pendukung, Audit Independen FP II, Koordinasi dan Pertemuan, Dana Pendukung Hibah (RM)	Ditjen PDASRH	8.908.680.000
			Direktorat KTA	8.908.680.000
	Forest Programme III - : Sulawesi Programme			**17.660.910.600**
		Optimalisasi SIMRELI, Pengembangan Pusat Pembelajaran Agroforestry, Pembangunan Sistem Pasar HHK, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa untuk Pemeliharaan Bangunan KTA, Peningkatan Sistem Monev dan Pengelolaan Data, Mendukung Program FOLU Net Sink, Perpanjangan Kontrak Konsultan	Ditjen KSDAE	14.413.230.600
			Direktorat PKK	12.613.230.600
			BTN. Lore Lindu	1.800.000.000
			Ditjen PDASRH	550.000.000
			BPDASRH Palu Poso	550.000.000
			Ditjen PSKL	2.697.680.000
			BPSKLK Wil. Sulawesi	2.697.680.000
	Forest Programme IV - : Watershed Mamasa/Sulawesi			**61.375.000.000**
		Peningkatan pengelolaan DAS (RHL dan implementasi PES), peningkatan kapasitas KPH, SMART Patrol, pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan DAS (KBR, KTH, agroforestry), pengembangan dan pengelolaan TN Gandang Dewata (penanaman, patrol hutan, pembangunan infrastruktur TN)	Ditjen PDASRH	45.502.455.000
			Dit. Rehabilitasi Lahan	13.500.000.000
			BPDAS Jeneberang sadang	29.877.455.000
			BPDAS Lariang Mamasa	3.500.000.000
			Ditjen KSDAE	14.497.545.000
			BBKSDA Sulsel	14.497.545.000
	Forest Programme V: *Social Forestry Support Programme*			35.900.000.000
		Peningkatan kapasitas PS, penguatan kelompok PS, harmonisasi kebijakan terkait PS di Ditjen PSKL dan antar instansi	Ditjen PSKL	35.900.000.000
			Direktorat PKTHA	10.175.000.000
			BPSKL Jawa	3.005.000.000
			BPSKL BalNusra	7.930.000.000
			BPSKL Kalimantan	14.790.000.000
	Forest Programme VI - : *Protection of Mangrove Forest*			23.500.000.000
		Implementation Consultant, NPMU & DPMU, Kegiatan teknis PIU, Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan, Standardisasi Instrumen, WMC, Manajemen	BSILHK	18.500.000.000
			Pusat Standardisasi Instrumen PHB	18.500.000.000
		Kegiatan Teknis Konservasi, Restorasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ditjen KSDAE	5.000.000.000
			BBKSDAE Sumut	5.000.000.000

Tabel Rencana Penarikan HLN Tahun 2024

Mitra	Proyek	Kegiatan	Penanggung Jawab Es II	Anggaran
World Bank	BioCarbon Fund (BioCF ISFL) : Jambi Sustainable Landscape Managemen Project			**14.145.250.000**
		Knowledge sharing dan peningkatan kapasitas manfaat non karbon, peningkatan kapasitas implementasi safeguard, sistem MAR, pengaturan institusi sistem MAR di Provinsi Jambi, establishing Benefit Sharing Plan, perlindungan dan pengamanan hutan termasuk pengelolaan karhutla, monev	Ditjen PPI	8.625.000.000
			Dit. Mitigasi Perubahan Iklim	6.527.000.000
			Dit. IGRK&MPV	1.300.000.000
			Dit. Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	798.000.000
	BioCarbon Fund (BioCF ISFL) : Jambi Sustainable Landscape Managemen Project			**14.145.250.000**
		Knowledge sharing dan peningkatan kapasitas manfaat non karbon, peningkatan kapasitas implementasi safeguard, sistem MAR, pengaturan institusi sistem MAR di Provinsi Jambi, establishing Benefit Sharing Plan, perlindungan dan pengamanan hutan termasuk pengelolaan karhutla, monev	Ditjen KSDAE	5.520.250.000
			BBTN Kerinci Seblat	1.863.750.000
			BTN Bukit Duabelas	1.065.000.000
			BTN Bukit Tiga puluh	769.000.000
			BTN Berbak Sembilang	1.597.500.000
			BKSDA Jambi	225.000.000
	Strengthtening Social Forestry in Indonesia Project			**49.000.000.000**
		Pembayaran Jasa Konsultan, Pembayaran Konsultan Pendukung, Audit Independent FP II, Pertemuan dan Koordinasi, Dana Pendukung Hibah	Ditjen PSKL	49.000.000.000
			Dit. PKPS	16.125.500.000
			BPSKL. Wil. Sumatera	13.910.936.000
			BPSKL Wil. Bali Nusa tenggara	9.545.220.000
			BPSKL Wil. Maluku Papua	9.418.344.000
			TOTAL	210.489.840.600

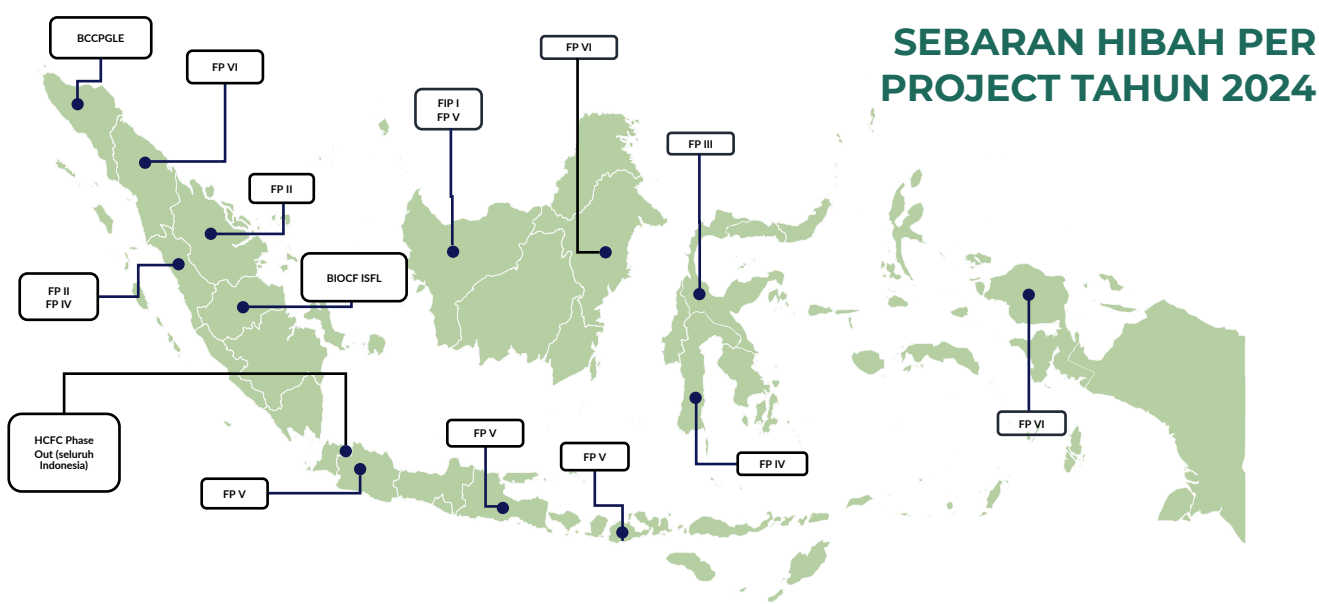

Ekosistem mangrove di Graha Indah di Balikpapan yang banyak memberikan manfaat dalam satu tempat. Selain digandrungi generasi muda sebagai tempat swafoto, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan karbon, tempat hidup biota laut, menciptakan iklim mikro, pencegah abrasi bahkan sebagai *forest healing*

Foto oleh : Sandi Kusuma

D. BELANJA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Untuk mencapai kinerja Kementerian LHK, maka penggunaan belanja kementerian diarahkan untuk menegaskan pesan pembangunan rendah karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk Indonesia yang semakin tangguh. Sasaran utamanya untuk mengikhtisarkan upaya peningkatan produktivitas tapak hutan, penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada sampai batas toleransi yang dibutuhkan

Kementerian mengarahkan kebijakan fiskal Tahun 2024 sebagai implementasi peningkatan ***value for money*** dan memperkuat konsolidasi fiskal Kementerian, yang pelaksanaannya setidaknya sebagai berikut :

a. Memberikan prioritas terhadap belanja pegawai (gaji, tunjangan dan upah), operasional perkantoran dan hal-hal lain yang berkarkater fix cost sebagai upaya untuk menjaga ketahanan dan daya beli pegawai dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

b. Mengurangi belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, serta belanja yang tidak terkait langsung dalam pemenuhan milestone dan sasaran utama sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas. Termasuk di dalamnya adalah menyederhanakan proses bisnis yang diharapkan dapat melahirkan inovasi yang mampu memberi dampak pada efisiensi anggaran Kementerian. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar senantiasa melakukan pemantauan secara langsung dampak penyederhaaan proses bisnis dan efisiensi anggaran.

c. Melaksanakan penandaan anggaran terhadap pendamping hibah luar negeri, sebagai tindak lanjut atas kebijakan penghentian rupiah murni pendamping atas hibah luar negeri di Tahun 2024.

d. Meningkatkan kualitas belanja dengan melihat kembali Kelompok Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Penyesuaian dapat dilakukan sekiranya KRO dan RO yang ada dianggap kurang sesuai dalam memenuhi sasaran dan indikator kinerja kegiatan.

Kementerian LHK dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan capaian target tahun 2024 seperti yang telah ditetapkan. Melalui Analisa capaian kinerja masing-masing program KLHK dari tahun 2020-2023, pada tahun 2024 Backlog RPJMN 2020-2024 target Major Project bidang Lingkungan Hidup akan dipenuhi 100% sedangkan target Prioritas Nasional (Non Major Project) akan dipenuhi sesuai dengan sumber daya yang tersedia atau dapat diluncurkan ke RPJMN selanjutnya.

Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK. tanggal 25 September 2023, memperolah anggaran belanja sebesar Rp 7.715.092.753.000,- yang seluruh aktifitas pembangunan Kementerian LHK difasilitasi dalam 5 (lima) program. Kelima program itu adalah program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp3.636.181.569.000,-, program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp2.516.971.706.000,- , program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp190.134.415.000,- , program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp1.202.474.761.000,- , dan program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp169.330.302.000,- .

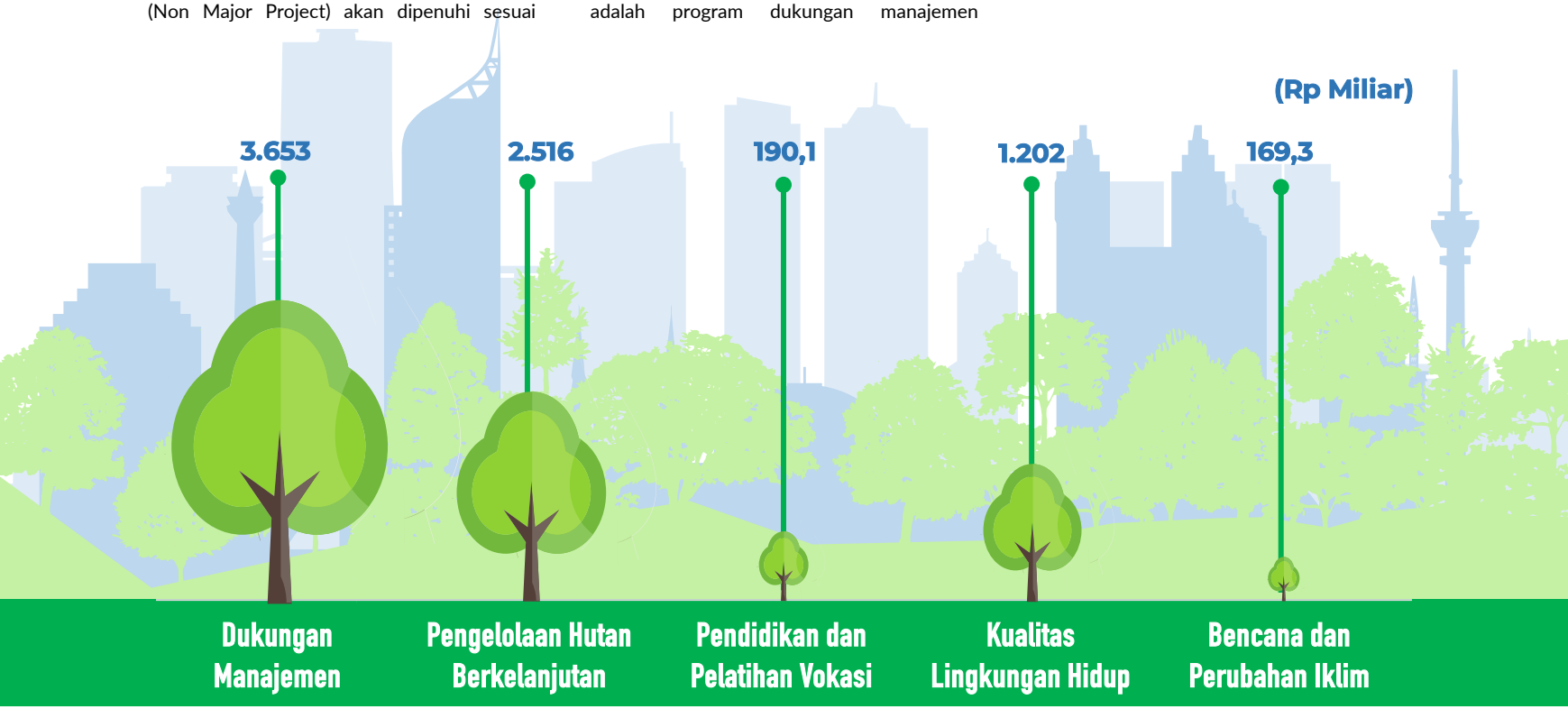

PROGRAM

Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini untuk menguatkan sistem peringatan dini bencana, pembangunan fasilitas pengelolaan limbah, restorasi gambut, dan peningkatan pengawasan terhadap ketaatan dan penegakan hukum. Saspro Program Kualitas Lingkungan Hidup yaitu (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan IKP yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 69,7 poin; (2) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah dengan IKP Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dengan target 70 poin; dan (3) Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah dengan IKP Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) dengan target 15 triliun rupiah. Untuk mencapai sasaran dan kinerja tersebut, anggaran pada program ini sebesar Rp1.202.474.761.000,-.

Program kualitas lingkungan hidup dilaksanakan sinergi oleh beberapa UKE I lingkup KLHK. Adapun rumusan kinerja Eselon I adalah :

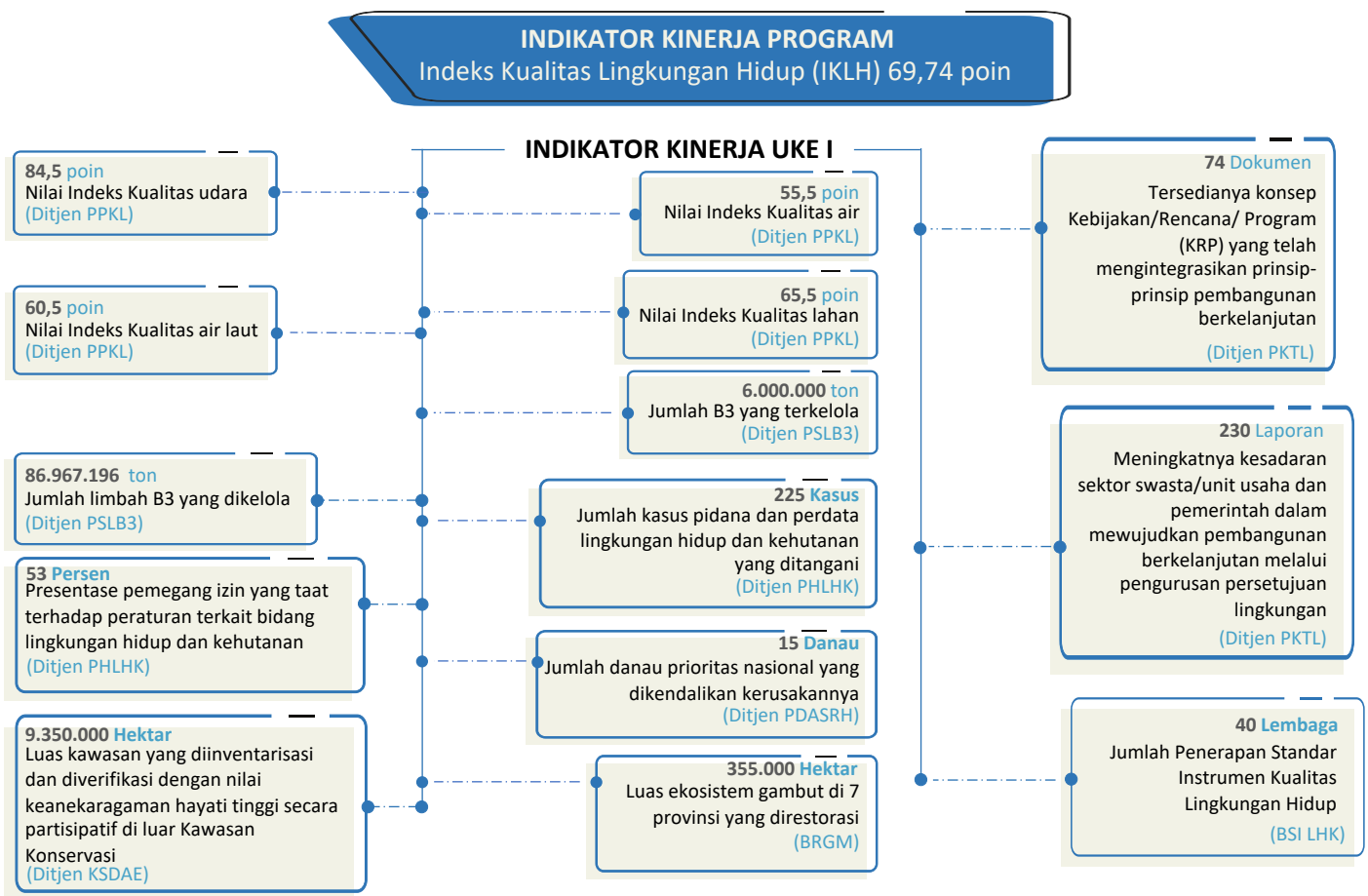

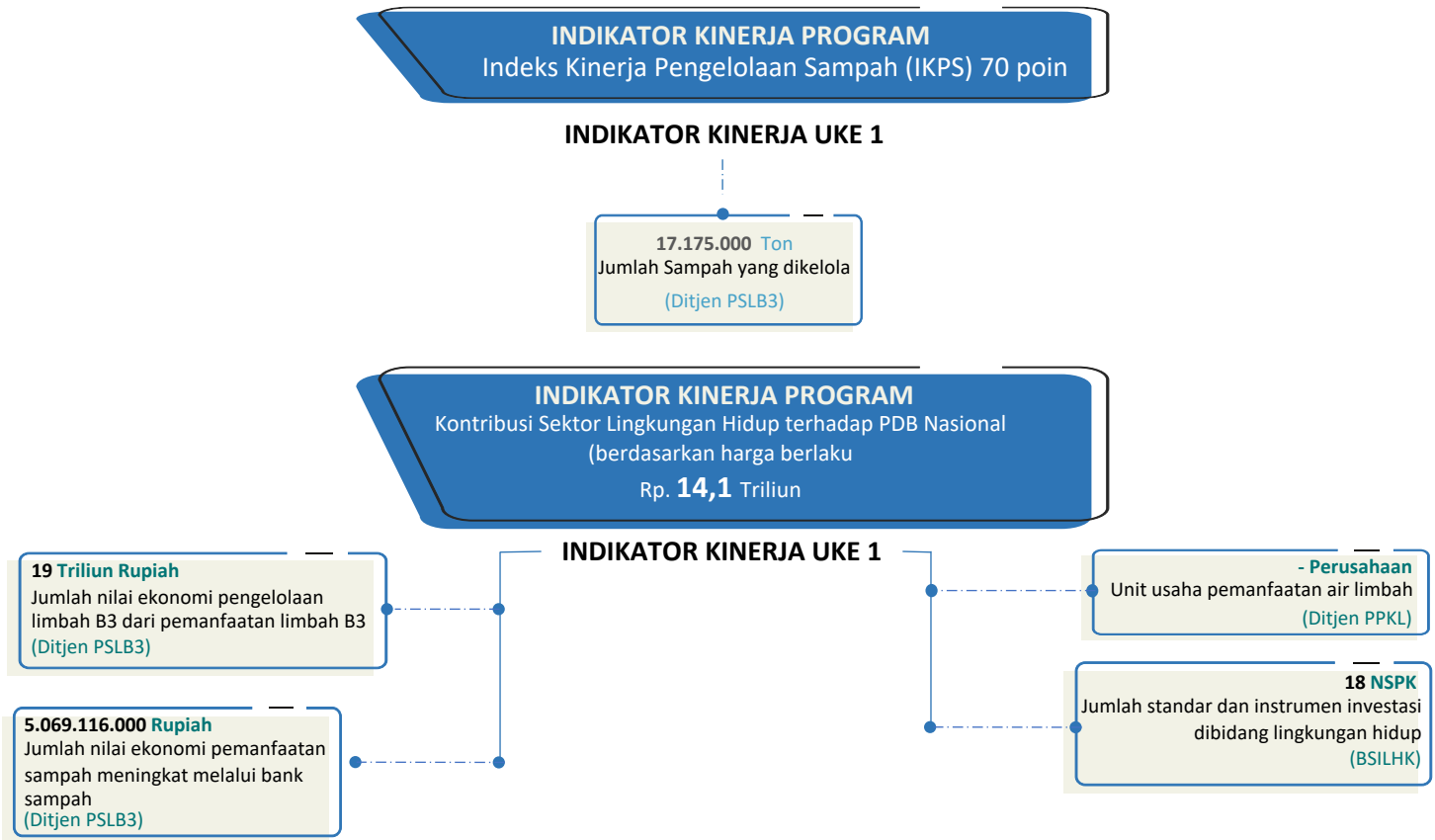
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 70 poin
INDIKATOR KINERJA UKE 1
17.175.000 Ton
Jumlah Sampah yang dikelola
(Ditjen PSLB3)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional
(berdasarkan harga berlaku
Rp. 14,1 Triliun
INDIKATOR KINERJA UKE 1
19 Triliun Rupiah
Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3
(Ditjen PSLB3)
5.069.116.000 Rupiah
Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah
(Ditjen PSLB3)
- Perusahaan
Unit usaha pemanfaatan air limbah
(Ditjen PPKL)
18 NSPK
Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup
(BSILHK)

PROGRAM

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Arah program ini untuk menurunkan laju deforestasi di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, peningkatan akses kelola, tanah obyek agrarian, dan peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat. Sasaran program pengelolaan hutan berkelanjutan yaitu (1) Menurunnya laju penyusutan hutan dengan IKP Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan 0,2 juta ha/tahun; (2) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dengan IKP Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) 122,2 triliun rupiah;, (3)Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate dengan IKP Luas kawasan hutan dengan status penetapan 10 Juta Hektar, ;(4)Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan dengan IKP Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA 119.390 Hektar; (5) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting dengan IKP Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting 10,5 U$D Milyar; (6) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan IKP Nilai PNBP Fungsional KLHK 7,48 Triliun Rupiah; (7) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata dengan IKP Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat 224.250 Hektar. Untuk mencapai sasaran dan kinerja tersebut, anggaran pada program ini sebesar Rp2.516.971.706.000-.

Program kualitas lingkungan hidup dilaksanakan sinergi oleh beberapa UKE I lingkup KLHK. Adapun rumusan kinerja Eselon I adalah :

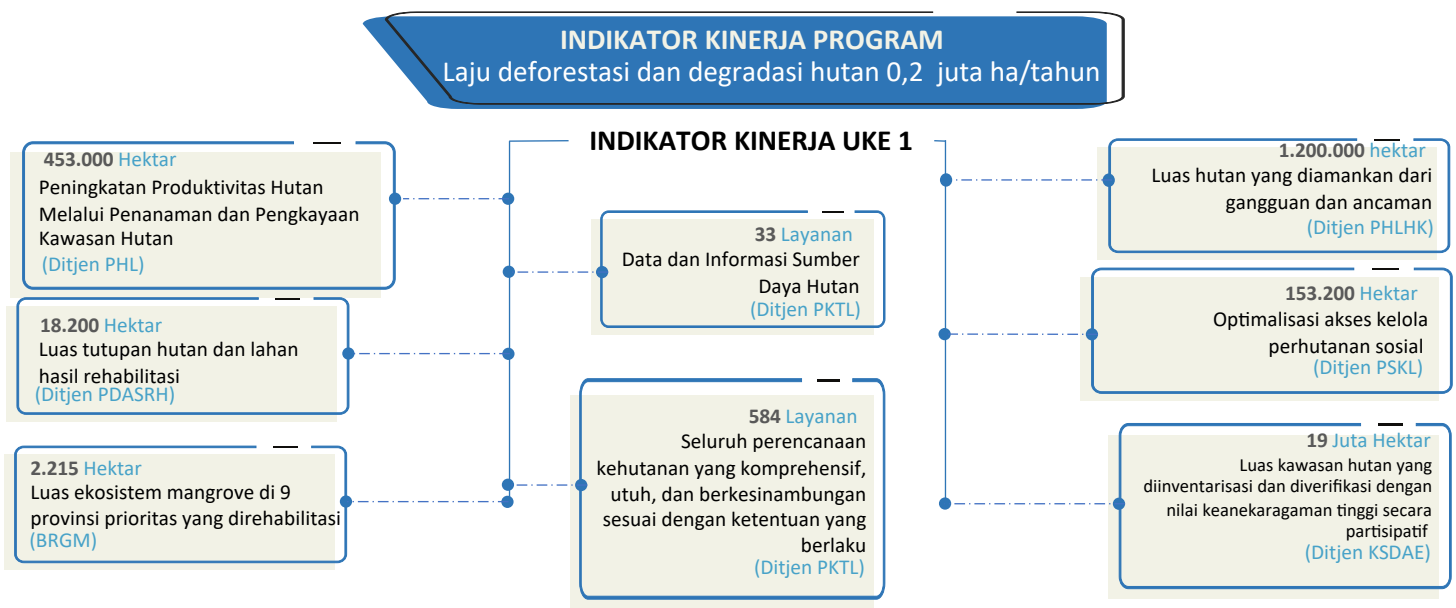

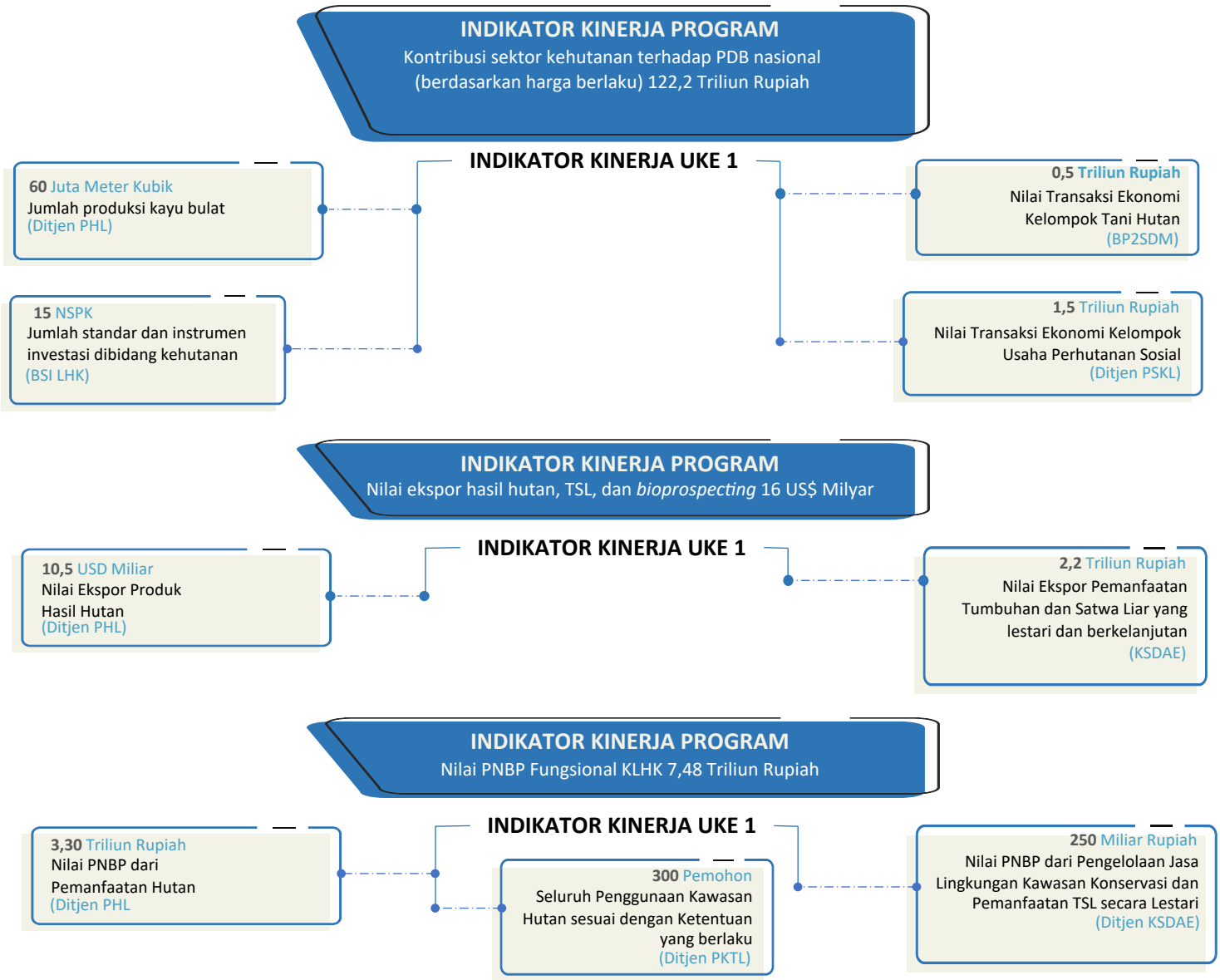
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku) 122,2 Triliun Rupiah
INDIKATOR KINERJA UKE 1
60 Juta Meter Kubik
Jumlah produksi kayu bulat
(Ditjen PHL)
15 NSPK
Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan
(BSI LHK)
0,5 Triliun Rupiah
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan
(BP2SDM)
1,5 Triliun Rupiah
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(Ditjen PSKL)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting 16 US$ Milyar
INDIKATOR KINERJA UKE 1
10,5 USD Miliar
Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
(Ditjen PHL)
2,2 Triliun Rupiah
Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
(KSDAE)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Nilai PNBP Fungsional KLHK 7,48 Triliun Rupiah
INDIKATOR KINERJA UKE 1
3,30 Triliun Rupiah
Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan
(Ditjen PHL
300 Pemohon
Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
(Ditjen PKTL)
250 Miliar Rupiah
Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
(Ditjen KSDAE)

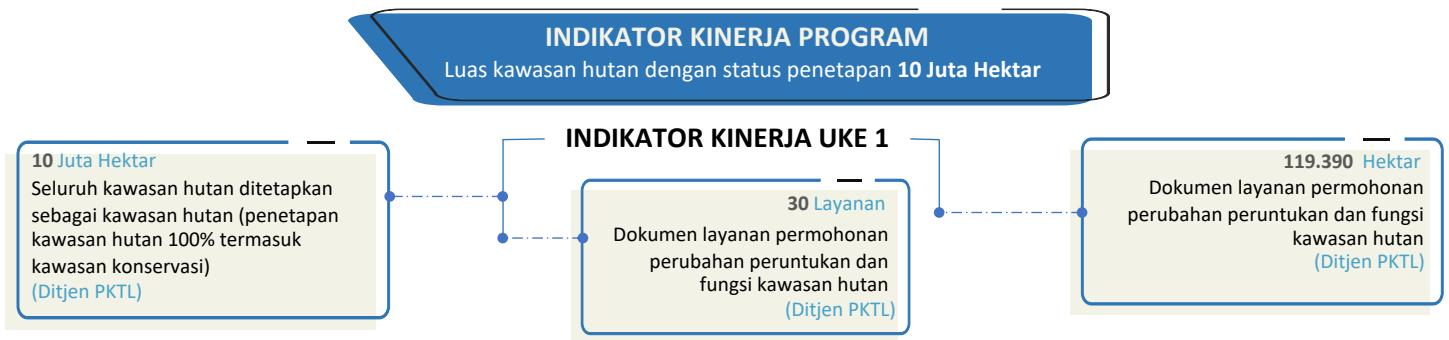
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Luas kawasan hutan dengan status penetapan 10 Juta Hektar
INDIKATOR KINERJA UKE 1
10 Juta Hektar
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)
(Ditjen PKTL)
30 Layanan
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
(Ditjen PKTL)
119.390 Hektar
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
(Ditjen PKTL)

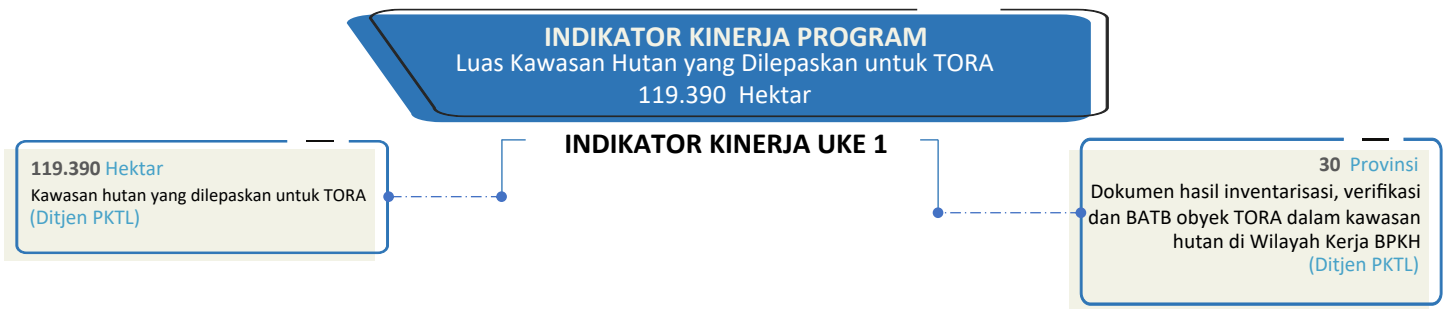
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA
119.390 Hektar
INDIKATOR KINERJA UKE 1
119.390 Hektar
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
(Ditjen PKTL)
30 Provinsi
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH
(Ditjen PKTL)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
224.250 Hektar
INDIKATOR KINERJA UKE 1
183.000 Hektar
Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat
(Ditjen PSKL)
15.000 Hektar
Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
(Ditjen PHL)
1.200 Desa
Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
(Ditjen KSDAE)

PROGRAM

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah program ini untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, penguatan kerangka kebijakan pelaksanaan FoLU Net Sink 2030, intervensi kampung iklim sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca. Sasaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yaitu (1) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon dengan IKP Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan dengan target 17,47 persen. Untuk mencapai sasaran dan kinerja tersebut, anggaran pada program ini sebesar Rp169.330.302.000,-.

Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dilaksanakan oleh Ditjen PPI dan BSILHK. Adapun rumusan adalah sebagai berikut :

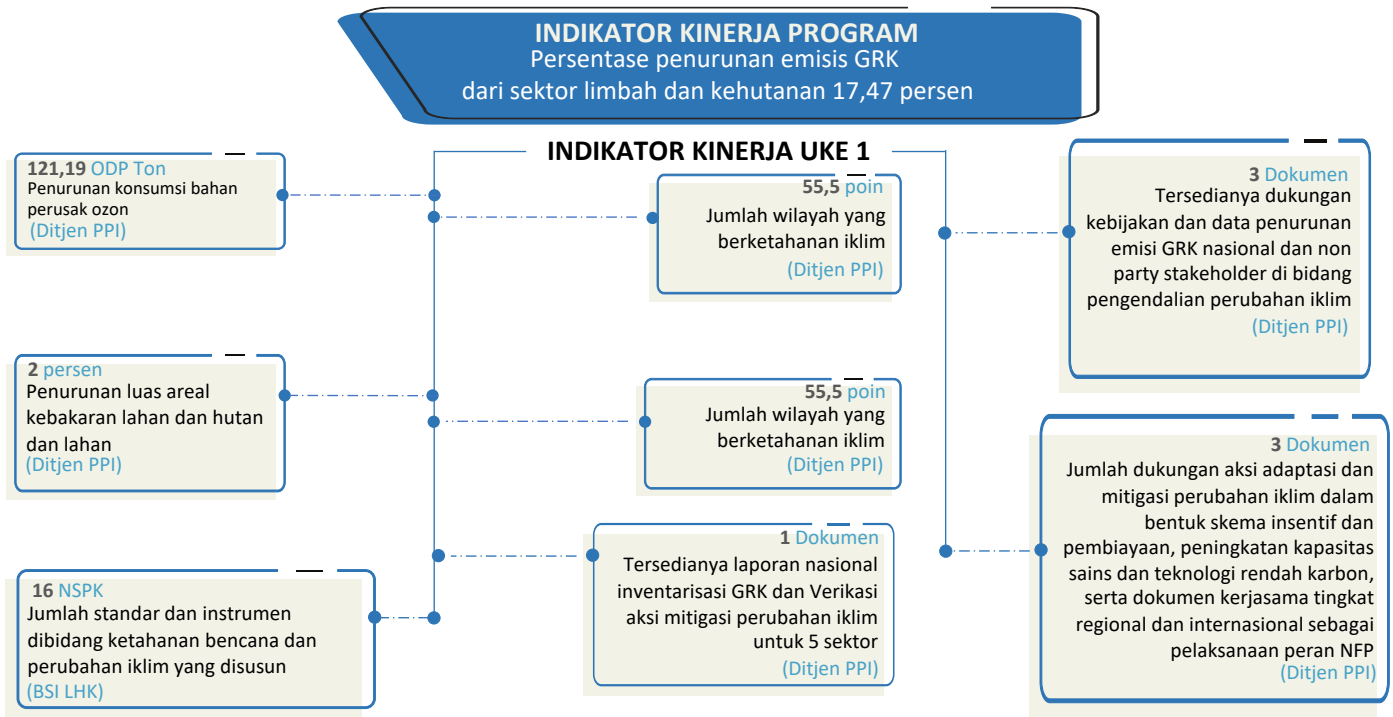

PROGRAM

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Arah program ini adalah untuk pengembangan kompetensi SDM LHK melalui sertifikasi dan pelatihan vokasi untuk mendukung industry kehutanan dan wirausaha kreatif bidang LHK, peningkatan kualitas Pendidikan formal (SMK Kehutanan) serta peningkatan sarpras sekolah termasuk didalamnya untuk pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari, serta pembinaan kepada Lembaga maupun kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yaitu (1) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas dengan IKP Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK dengan target 80 poin. Untuk mencapai sasaran dan kinerja tersebut, anggaran pada program ini sebesar Rp190.134.415.000.-.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan oleh BP2SDM dengan rumusan adalah sebagai berikut :

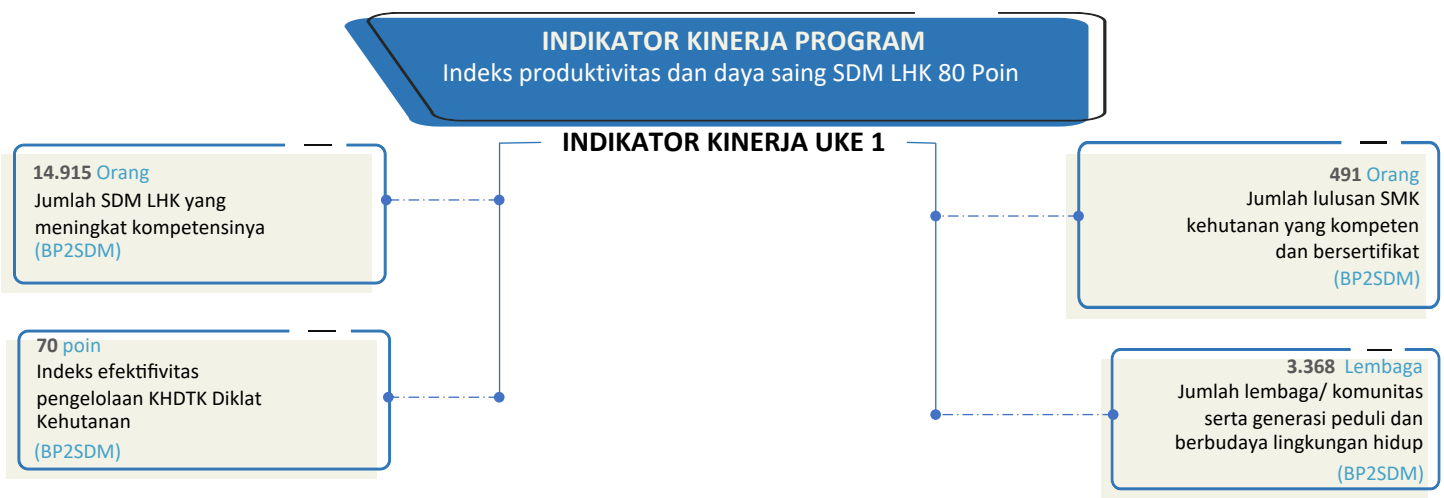

PROGRAM

Dukungan Manajemen

Arah program ini untuk pengelolaan reformasi birokrasi berdampak dan manajemen talenta. Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien dengan IKP adalah Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi dengan target 85 poin. Untuk mencapai sasaran dan kinerja tersebut, anggaran pada program ini adalah Rp3.636.181.569.000,-.

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh seluruh UKE I dan BRGM, Adapun rumusanya adalah sebagai berikut :

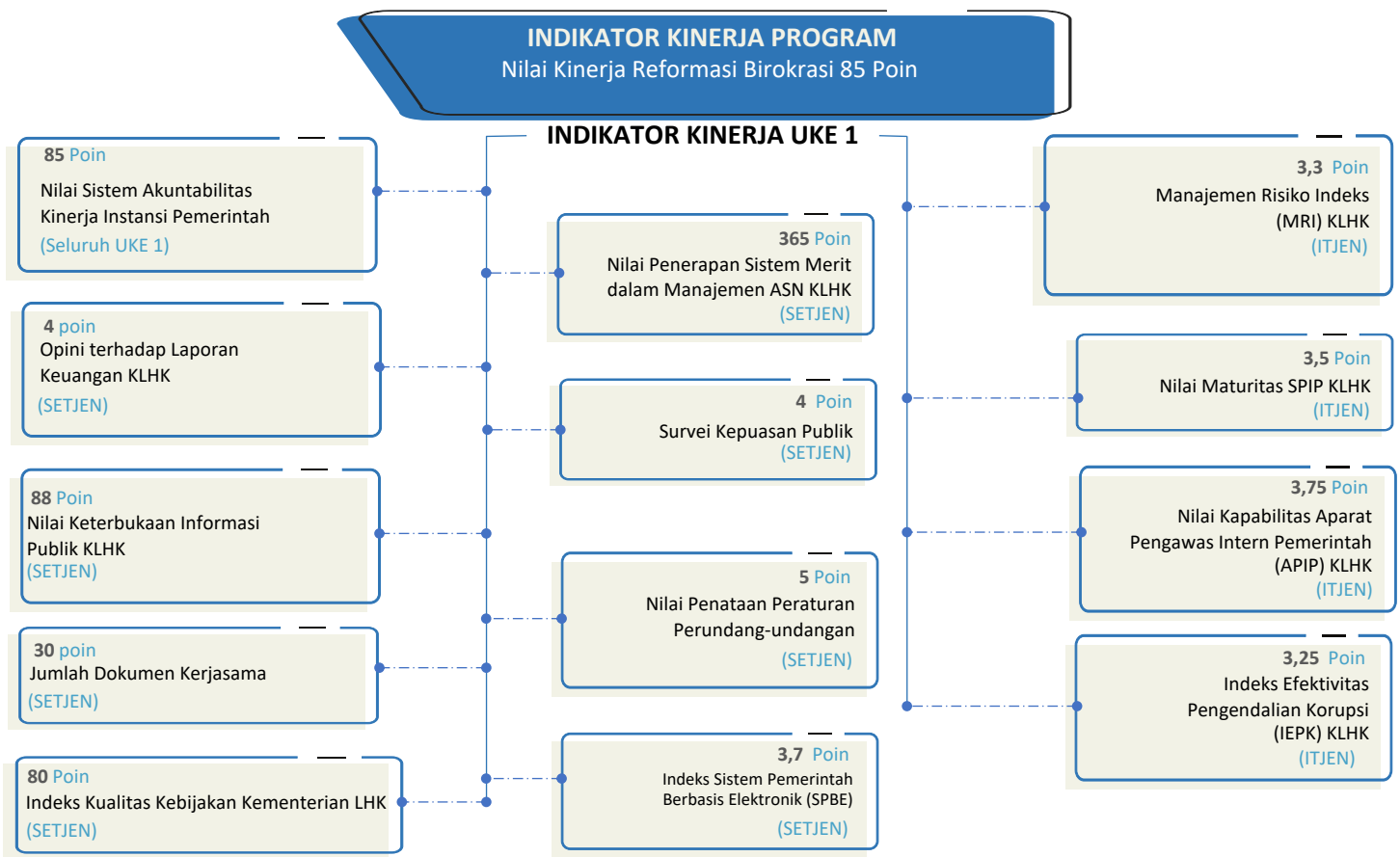

Senada dengan reformasi fiskal, Kementerian telah mengalokasikan belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional dengan prinsip efektif, efisien, dan semakin produktif. Adapun proporsi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 menurut belanja operasional pegawai dan belanja operasional barang, serta belanja non operasional yang di dalamnya memuat indikasi rupiah murni (RM), penggunaan PNBP, hibah luar negeri (HLN) dan SBSN.

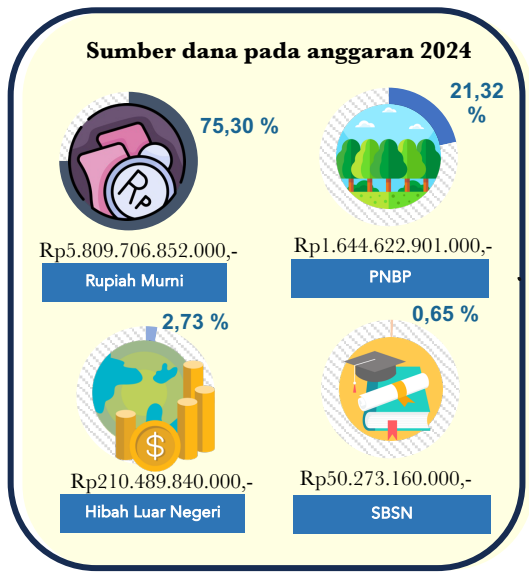

Dalam implementasinya, seluruh anggaran program KLHK dilaksanakan oleh 13 Unit Kerja Eselon (UKE) I dan BRGM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi anggaran tahun 2024 setiap UKE I dan BRGM adalah sebagai berikut.

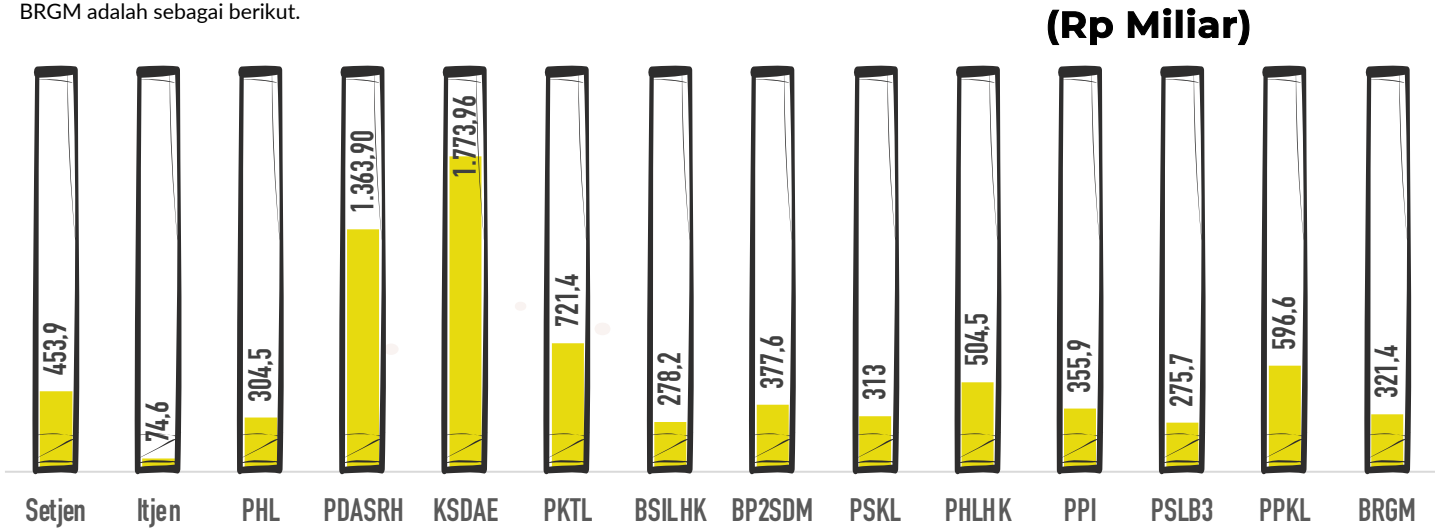

Pagu Kementerian LHK Per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Unit Kerja Eselon I	Belanja Operasional			Belanja Non Operasional					Pagu Alokasi Anggaran 2024
		Pegawai	Barang	Jumlah	RM	PNBP	HLN	SBSN	Jumlah	
1	Sekretariat Jenderal	121.135.949	164.933.661	286.069.610	165.287.706	2.512.809	-	-	167.800.515	453.870.125
2	Inspektorat Jenderal	28.947.141	5.958.348	34.905.489	39.737.617	-	-	-	39.737.617	74.643.106
3	Ditjen PHL	106.914.138	30.705.111	137.619.249	96.595.062	70.250.842	-	-	166.845.904	304.465.153
4	Ditjen PDASRH	194.320.659	85.687.149	280.007.808	479.144.414	548.383.597	56.336.135	-	1.083.864.146	1.363.871.954
5	Ditjen KSDAE	759.565.813	291.642.317	1.051.208.130	502.675.896	180.645.057	39.431.025	-	722.751.978	1.773.960.108
6	Ditjen PKTL	160.170.891	49.913.461	210.084.352	88.686.616	422.608.796	-	-	511.295.412	721.379.764
7	BSILHK	132.564.642	55.525.636	188.090.278	46.533.985	25.089.585	18.500.000	-	90.123.570	278.213.848
8	BP2SDM	113.206.294	46.922.095	160.128.389	107.054.787	60.161.255	-	50.273.160	217.489.202	377.617.591
9	Ditjen PSKL	46.005.729	36.078.842	82.084.571	100.673.636	42.652.296	87.597.680	-	230.923.612	313.008.183
10	Ditjen PHLHK	168.766.717	32.077.791	200.844.508	79.541.436	224.085.774	-	-	303.627.210	504.471.718
11	Ditjen PPI	61.644.186	120.424.902	182.069.088	99.973.963	65.232.890	8.625.000	-	173.831.853	355.900.941
12	Ditjen PSLB3	38.773.499	9.490.268	48.263.767	227.437.022	-	-	-	227.437.022	275.700.789
13	Ditjen PPKL	38.949.216	12.742.196	51.691.412	541.914.023	3.000.000	-	-	544.914.023	596.605.435
14	BRGM	12.075.825	15.389.069	27.464.894	293.919.144	-	-	-	293.919.144	321.384.038
JUMLAH		1.983.040.699	957.490.846	2.940.531.545	2.869.175.307	1.644.622.901	210.489.840	50.273.160	4.774.561.208	7.715.092.753

Jenis belanja khususnya no operasional diharapkan mampu direalisasikan secara optimal untuk belanja-belanja yang produktif dan memberikan nilai tambah di tingkat tapak atas pencapaian-pencapaian target kinerja setiap Unit Kerja Eselon I. Selengkapnya kinerja Unit Eselon I tahun 2024 adalah sebagai berikut

PAGU DAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL

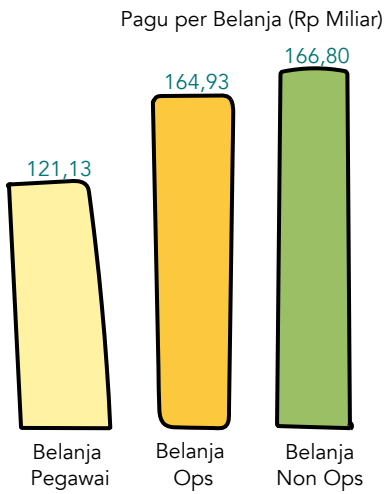

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pagu Sekretariat Jenderal tahun 2024 sebesar Rp453.870.125.000,- yang seluruhnya berada pada program Dukungan Manajemen yang akan diprioritaskan untuk Pengelolaan reformasi birokrasi berdampak, penguatan manajemen talenta dan penguatan rancang bangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekretariat Jenderal memiliki andil dalam mendukung tema pembangunan KLHK yang telah diputuskan. Kegiatan yang mendukung dalam tema tersebut terbagi menjadi 11 kegiatan yang mencerminkan tiap tugas dan fungsi dari satuan kerja pengampu antara lain : Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan, Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK, Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK, Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Pengendalian Pembangunan LHK Regional, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK, Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK, Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengembangan Telaahan Kebijakan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KINERJA	TARGET
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 Poin
Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK	365 Poin
Opini terhadap laporan keuangan KLHK	4 Poin
Survei Kepuasan Publik	4 Poin
Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5 Poin
Jumlah Dokumen Kerjasama	30 Dokumen
Indeks Sistem pemerintah Berbasis Elektronik	3,7 Poin
Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK	80 Poin
Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	88 Poin

PAGU DAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pagu Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar **Rp74.643.106.000,-** yang seluruhnya berada pada program dukungan manajemen yang akan diprioritaskan untuk menjamin terwujudnya zona integritas bebas korupsi dan pengelolaan resiko, dan pengawasan major project dan prioritas nasional. Inspektorat Jenderal menunjang program dukungan manajemen dengan 3 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK, Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK, dan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.

KINERJA	TARGET
Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3,3 Poin
Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,5 Poin
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,5 Poin
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3,25 Poin
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	86 Poin

Pagu per Belanja (Rp Miliar)

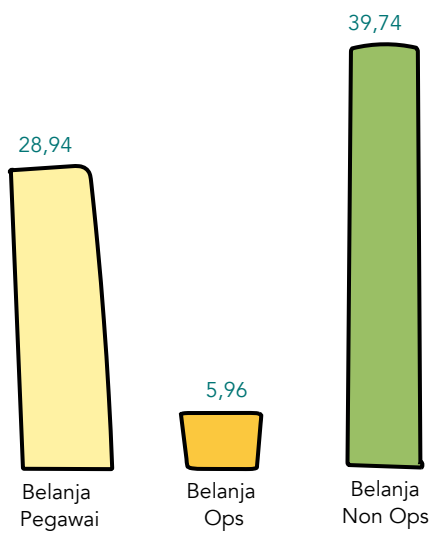

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PHL

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Pagu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2024 sebesar 304.465.153.000,- . Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang 2 program yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp159.715.197.000,- melalui kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari , program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp144.749.956.000,- melalui 5 kegiatan antara lain Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan, Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan, Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan. Tahun 2024 Sebagian besar anggaran Ditjen PHL akan diprioritaskan untuk Peningkatan iklim investasi untuk ekspor, industri primer, dan produksi kayu bulat, hasil hutan bukan kayu serta fasilitasi dan pembinaan UMKM kehutanan.

KINERJA	TARGET
Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	453.000 hektar
Jumlah Produksi Kayu Bulat	60 Juta m3
Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	US$ 10,5 Miliar
Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	3,302 triliun rupiah
Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	15.000 ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	83 Poin

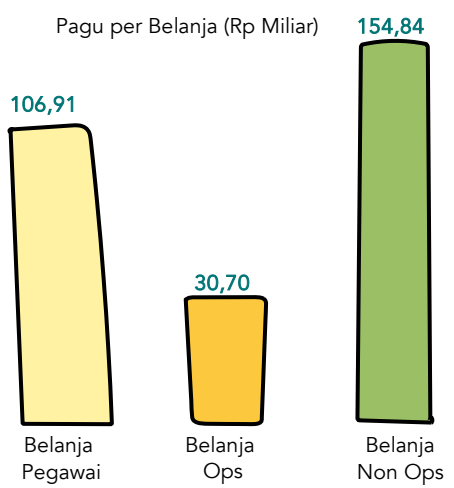

PAGU DAN KINERJA DITJEN PDASRH

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. Pagu Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tahun 2024 sebesar **Rp 1.363.871.954.000,-** . Anggaran Ditjen PDASRH tersebut digunakan untuk menunjang 3 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp324.649.264.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp1.029.365.848.000,- melalui 5 kegiatan antara lain Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan; Konservasi Tanah dan Air; Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Rehabilitasi Hutan, Rehabilitasi Mangrove. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp9.856.842.000,- melalui kegiatan Rehabilitasi Perairan Darat. Pada tahun 2024 Sebagian besaar anggaran akan diprioritaskan untuk Rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan tanaman RHL (P1 dan P2) termasuk perbaikan mekanisme rehabilitasi DAS, persemaian permanen, bibit berkualitas, kebun bibit rakyat dan bibit produktif.

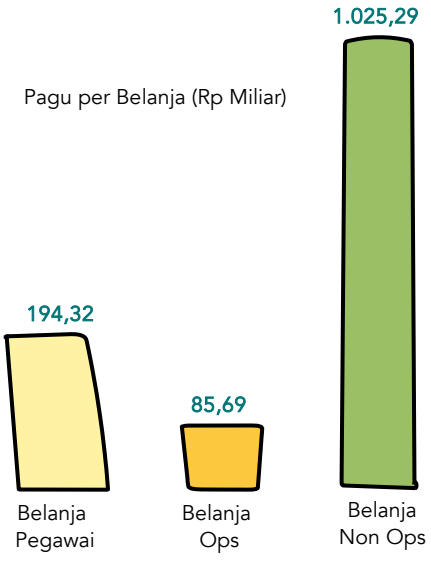

KINERJA	TARGET
Pengendalian Kerusakan Danau Prioritas Nasional	15 Danau
Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	18.200 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	80 Poin

PAGU DAN KINERJA
DITJEN KSDAE

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Pagu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2024 sebesar **Rp 1.773.960.108.000,- .** Anggaran tersebut di gunakan untuk mendukung 3 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.175.673.270.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp587.866.887.000,- melalui 5 kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; Perencanaan Kawasan Konservasi; Pengelolaan Kawasan Konservasi; Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik; Pemulihan Ekosistem , program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp10.419.951.000,- melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial. Pada tahun 2024 Sebagian besar anggaran akan diprioritaskan untuk Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort, fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi, dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat wisata alam.

KINERJA	TARGET
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	9.350.000 Ha
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	19 Juta Ha
Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	2,2 Triliun Rupiah
Nilai PNBP Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dam pemanfaatan TSL secara lestari	250 Miliar Rupiah
Desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1.200 Desa
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Ekosistem	80 Poin

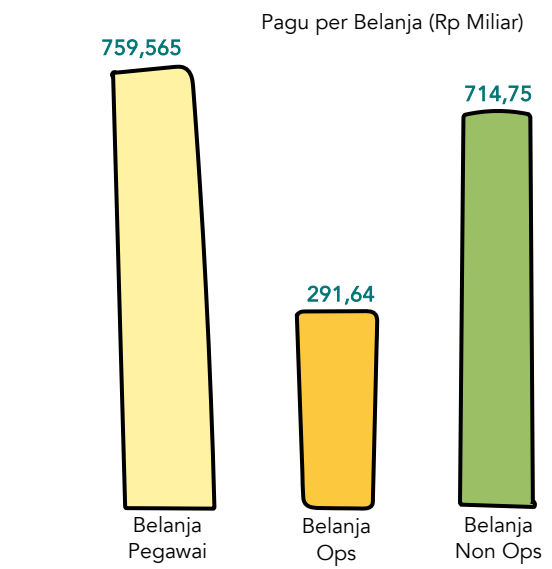

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PKTL

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 sebesar **Rp 721.379.764.000,-** Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang 3 program. program dukungan manajemen sebesar Rp285.786.716.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp339.388.300.000,- melalui 4 kegiatan yaitu Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp96.204.784.000,- melalui kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Pelepasan kawasan hutan untuk TORA, keplanologian kehutanan dan percepatan implementasi amdalnet serta penataan lingkungan.

KINERJA	TARGET
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	10 Juta Ha
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan
Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119.390 Ha
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	74 Dokumen
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	230 Laporan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80 Poin

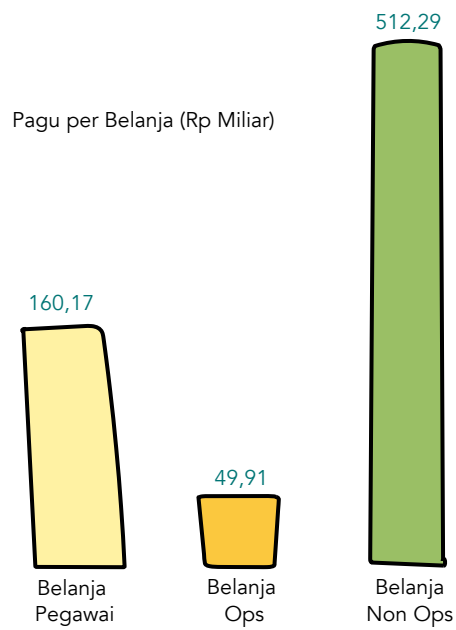

PAGU DAN KINERJA BSI LHK

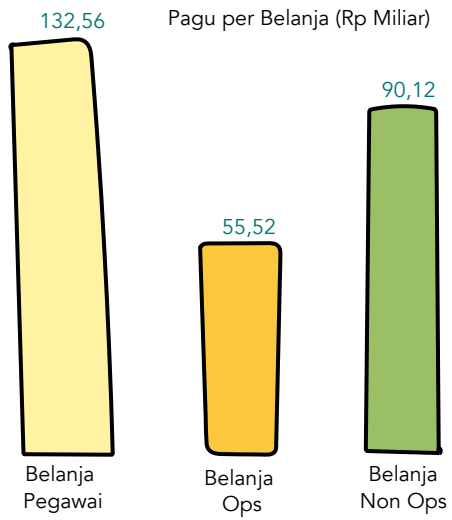

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pagu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 sebesar **Rp 278.213.848.000,-.** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 4 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp208.600.262.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp51.118.102.000,- melalui kegiatan Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp12.391.569.000,- melalui kegiatan Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp6.103.915.000,- melalui kegiatan Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim . Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Penyusunan dan penerapan standar intrumen bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pemeliharaan laboratorium.

KINERJA	TARGET
Jumlah penerapan standar instrument kualitas lingkungan hidup	40 Lembaga
Jumlah standar dan instrument investasi di bidang lingkungan hidup	18 NSPK
Jumlah standar dan instrument investasi di bidang kehutanan	15 NSPK
Jumlah standar dan instrument investasi di bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	16 NSPK
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79 Poin

PAGU DAN KINERJA
BP2SDM

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Pagu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 sebesar **Rp377.617.591.000,-** Anggaran tersebut terbagi dalam 3 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp181.944.569.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp5.538.607.000,- melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp190.134.415.000,- melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK; Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan; Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perencanaan dan Pengembangan SDM. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Anggaran pendidikan, mempercepat penyelesaian capaian atau meminimalkan gap capaian target Renstra melalui pelatihan vokasi tenaga teknis yang berorientasi industri dan wirausaha dan Lembaga formal yang pedulu dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan, serta memprioritaskan alokasi anggaran yang mendukung Agenda Pembangunan seperti peningkatan kapasitas KTH serta penyuluh dan/atau pendamping.

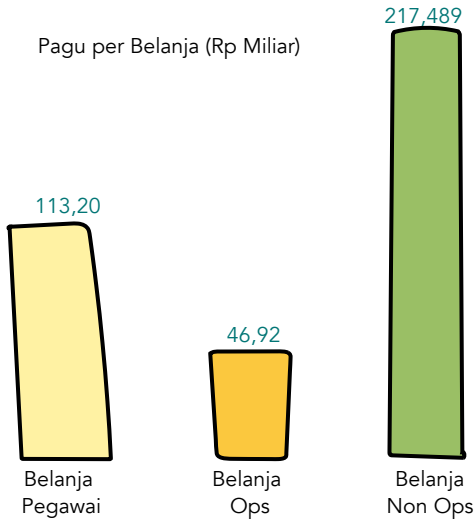

KINERJA	TARGET
SDM LHK yang meningkat kompetensinya	14.915 Orang
Jumlah Lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 Orang
Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	70 Poin
Lembaga/Komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	3.368 Lembaga/Komunitas
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,5 Triliun Rupiah
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80 Poin

PAGU DAN KINERJA DITJEN PSKL

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Pagu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tahun 2024 sebesar **Rp 313.008.183.000,- .** Anggaran tersebut akan digunakan untuk menunjang 2 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp103.958.592.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Program pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kemitraan Lingkungan. Pada Tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Peningkatan luas akses kelola perhutanan sosial, peningkatan kelas dan kapasitas KUPS, sarana dan prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (Bang Pesona).

KINERJA	TARGET
Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial	153.200 Ha
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	1,5 Triliun Rupiah
Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat	183.000 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	75 Poin

Pagu per Belanja (Rp Miliar)

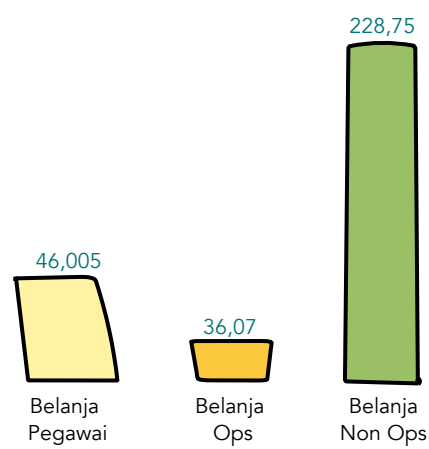

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PHLHK

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Pagu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 sebesar **Rp 504.471.718.000,-** . Anggaran tersebut terbagi dalam 3 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp301.339.685.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp78.227.339.000,- melalui kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp124.904.694.000,- melalui kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Pengawasan ketaatan penyelenggara kegiatan/ usaha, Penyelesaian kasus tindak pidana LHK, penanganan keterlanjutan penggunaan kawasan hutan, operasi pengamanan hutan dan dukungan penindakan kerusakan lingkungan hidup.

Pagu per Belanja (Rp Miliar)

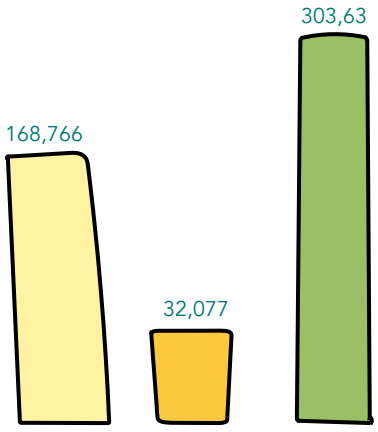

KINERJA	TARGET
Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	53 Persen
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	225 Kasus
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1,2 Juta Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80 Poin

PAGU DAN KINERJA DITJEN PPI

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim. Pagu Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tahun 2024 sebesar **Rp 355.900.941.000,-**. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp192.674.554.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp163.226.387.000,- melalui kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim , Mitigasi Perubahan Iklim, Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penghitungan penurunan emisi GRK, penguatan kerangka kebijakan pelaksanaan FoLU Net Sink 2030, dan penguatan program kampung iklim.

KINERJA	TARGET
Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK Nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	3 Dokumen
Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	222 Kelompok Masyarakat
Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen Kerjasama tingkat regional dan internasional sevagai pelaksanaan peran NFP	3 Dokumen
Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor	1 Dokumen
Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	121,19 ODP Ton
Penurunan luas areal kebakaran lahan hutan	2 Persen
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	80 Poin

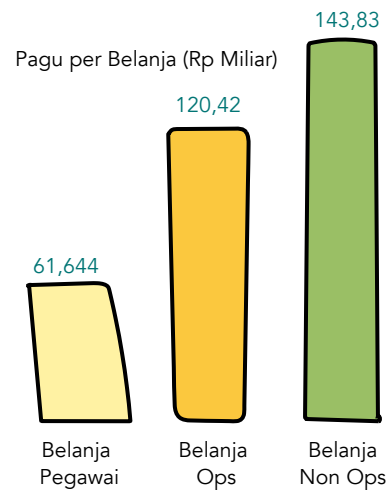

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PSLB3

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pagu Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 tahun 2024 sebesar **Rp 275.700.789.000,-** . Anggaran tersebut terbagi menjadi 2 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp69.300.789.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp206.400.000.000,- melalui kegiatan Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Pembangunan fasilitas pengolahan limbah, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta peningkatan sirkular ekonomi.

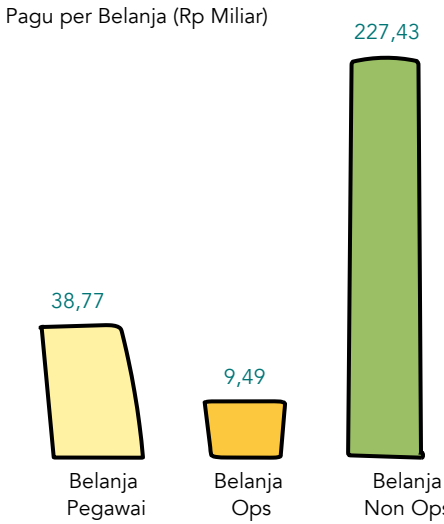

KINERJA	TARGET
Jumlah B3 yang dikelola	6 Juta Ton
Jumlah limbah B3 yang dikelola	86.967.196 Ton
Jumlah sampah yang dikelola	17.175.000 Ton
Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3	19 Triliun Rupiah
Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah	5,06 Miliar Rupiah
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	80 Poin

PAGU DAN KINERJA DITJEN PPKL

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pagu Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2024 sebesar **Rp 596.605.435.000,- .** Anggaran tersebut terbagi kedalam 2 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp62.412.721.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp534.192.714.000,- melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pemulihan Kerusakan Lingkungan. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Penguatan sistem peringatan dini bencana, penurunan beban pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pagu per Belanja (Rp Miliar)

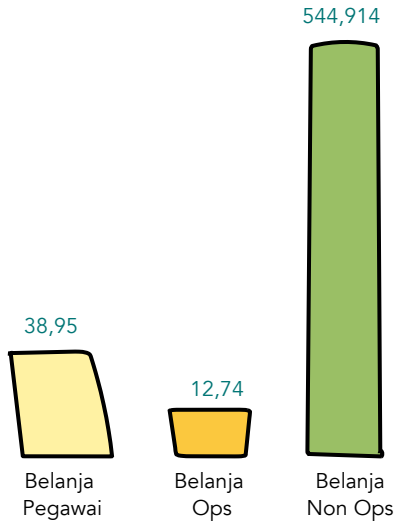

KINERJA	TARGET
Nilai Indeks Kualitas Udara	84,5 Poin
Nilai Indeks Kualitas Air	55,5 Poin
Nilai Indeks Kualitas Air Laut	60,5 Poin
Nilai Indeks Kualitas Lahan	65,5 Poin
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 Poin

PAGU DAN KINERJA BRGM

Kementerian mendorong pemenuhan kinerja program oleh Unit Kerja Eselon I dan BRGM ke dalam indikasi anggaran setiap program dan kinerja utama. Pagu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023 sebesar **Rp 321.384.038.000,- .** Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 3 program. Program dukungan manajemen sebesar Rp41.612.719.000,- melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp71.667.076.000,- melalui kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove. Program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp208.104.243.000,- melalui kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut. Pada tahun 2024 Sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk restorasi gambut di 7 provinsi dan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi.

KINERJA	TARGET
Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi	2.215Ha
Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi	355.000 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	80 Poin

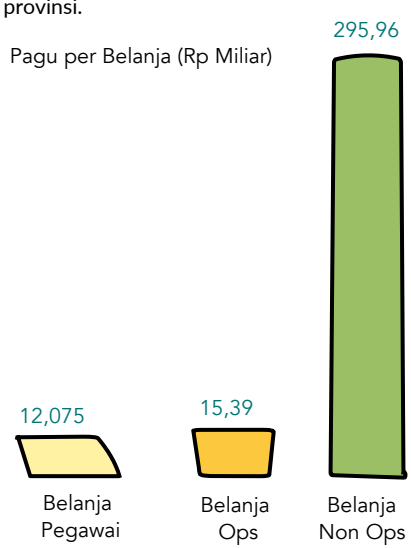

DUKUNGAN KLHK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan memiliki peran penting dalam mendukung prioritas nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Sejak tahun 2020, seluruh program dan kegiatan KLHK diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) yang telah dicanangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Pembangunan 5 tahunan yang pada tahun 2024 memasuki tahun terakhir menjadi penentu keberhasilan pencapaian target dengan arahan prioritas nasional yang telah ditetapkan. Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang ada, sebagian besar anggaran kegiatan KLHK tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung 4 (empat) PN yaitu : (PN 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggarkan sebesar **Rp.3.549.476.472.000,-** untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian per PN sebagai berikut:

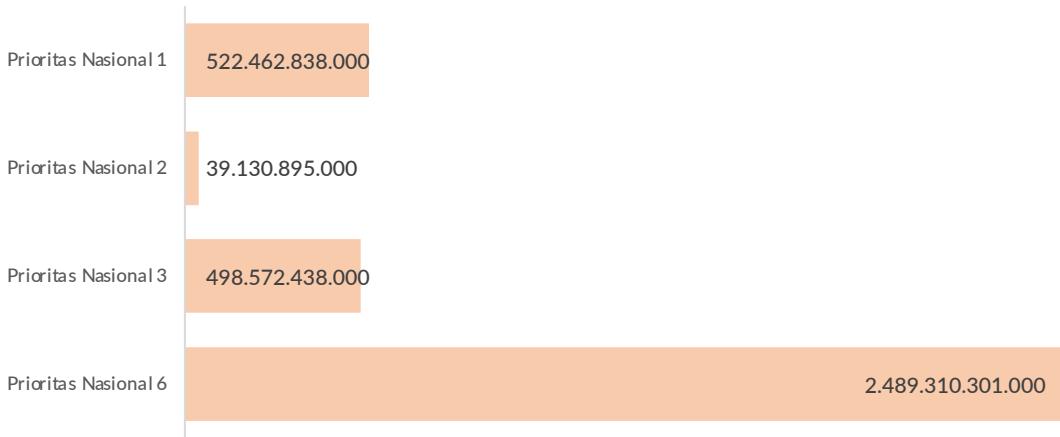

PRIORITAS NASIONAL 1

Prioritas Nasional 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan) diampu oleh enam Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alokasi Prioritas Nasional 1 sebesar Rp522.462.838.000,-. Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas diantaranya : peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata. Highlight pembangunan LHK untuk mendukung Prioritas Nasional tahun 2024 antara lain :

100 Titik
Mata air yang dipulihkan

480 Bangunan
Pengendali kerusakan perairan darat

40 Layanan
Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000m3/tahun keatas

15 Danau
dan segmen sungai yang dikendalikan kerusakannya

15 Destinasi
wisata alam prioritas yang dikembangkan

PRIORITAS NASIONAL 2

Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan) diampu oleh empat Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi Prioritas Nasional 2 sebesar Rp39.130.89.5000,-. Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara. Highlight pembangunan LHK untuk mendukung Prioritas Nasional 2 tahun 2024 antara lain :

500 hektar
Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS sekitarnya

1.200 hektar
Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara

68 ribu hektar
Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

PRIORITAS NASIONAL 3

Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan sdm berkulaitas dan berdaya saing) diampu oleh tiga Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Alokasi Prioritas Nasional 3 sebesar Rp498.572.438.000,-. Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keperantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Highlight pembangunan LHK untuk mendukung Prioritas Nasional 3 tahun 2024 antara lain :

183 ribu hektar
Izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan konservasi dan IPHPS

12 SK
pelepasan kawasan hutan untuk tanah obyek reforma agraria

100 Kelompok
tani hutan mandiri yang dibentuk

491 orang
Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

34 Kelompok
usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kelasnya menjadi gold/platinum

PRIORITAS NASIONAL 6

Prioritas Nasional 6 (Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim) diampu oleh sepuluh Unit Kerja Eselon (UKE) I yaitu Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE, Ditjen PKTL, BSILHK, BP2SDM, Ditjen PHLHK, Ditjen PPI, Ditjen PSLB3, Ditjen PPKL, BRGM. Alokasi Prioritas Nasional 6 sebesar Rp3.549.476.472.000,-. Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan. Highlight pembangunan LHK untuk mendukung Prioritas Nasional 6 tahun 2024 antara lain :

3.750
Usaha dan kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan

225
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

186
Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi

153
Alat pemantauan kualitas air otomatis

405.000
Hektar lahan gambut yang dipulihkan

2.915
Hektar luas rehabilitasi mangrove

DUKUNGAN KLHK TERHADAP MAJOR PROJECT

Major Project merupakan proyek-proyek yang konkrit dan memiliki daya ungkit tinggi serta terintegrasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024 berperan terhadap enam Major Project. Yaitu: 1). Pengembangan Destinasi Wisata Prioritas; 2). Pembangunana Ibu Kota Negara; 3). Pemulihan empat DAS Kritis; 4). Pembangunan fasilitas Pengelolaan limbah B3; 5). Pengutan sistem peringatan dini bencana; dan 6). Pengelolaan terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pagu Anggaran Major Project Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.120.461.935.000,-. Major Project ini dilaksanakan oleh enam Unit KerJa Eselon I (UKE I). Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah.

dalam ribu rupiah

NO	UNIT KERJA ESELON I	MAJOR PROJRECT						
		02-DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	10-PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN)	36-PEMULIHAN 4 DAS KRITIS	38-PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN LIMBAH B3	39-PENGUATAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA	44-PENGELOLAAN TERPADU UMKM	JUMLAH
1	DITJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	0	22.930.895	624.050.308	0	0	0	646.981.203
2	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	63.428.950	12.000.000	0	0	0	0	75.428.950
3	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	0	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
4	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	0	0	16.430.000	16.430.000
5	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	0	0	0	78.645.799	0	0	78.645.799
6	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	0	0	0	0	285.975.983	0	285.975.983
JUMLAH TOTAL		**63.428.950**	**51.930.895**	**624.050.308**	**78.645.799**	**285.975.983**	**16.430.000**	**1.120.461.935**

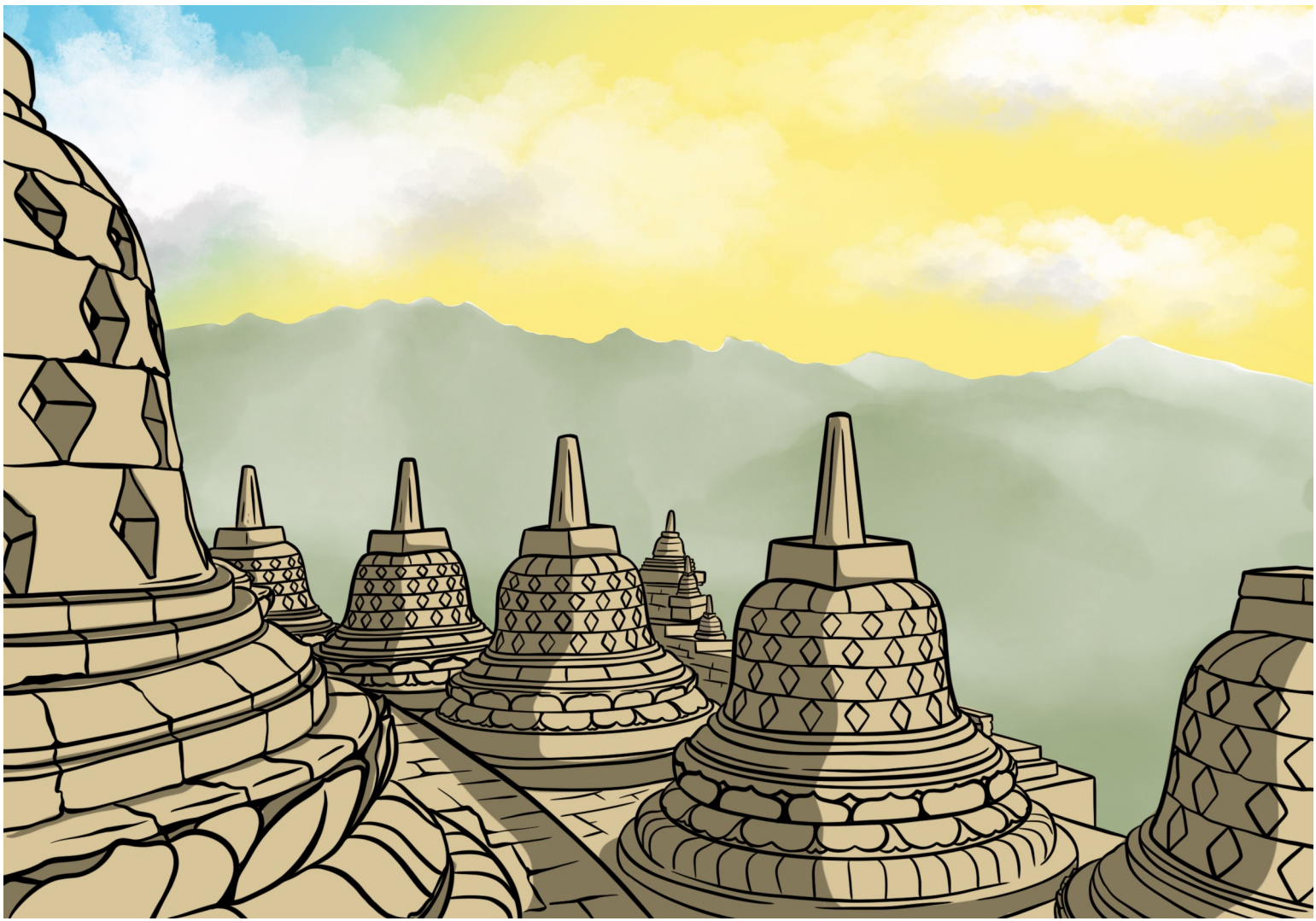

Undakan stupa Candi Borobudur yang terletak di Magelang.Jawa Tengah bertambah indah dengan latar Bukit Manoreh yang hijau. Rimbunya Bukit Manoreh merupakan menara air alami, yang menunjang kehidupan daerah penyangga sekitar.

Foto yang divektorkan oleh : M. Desby Adhitia

INDIKASI ANGGARAN
BERBASIS MASYARAKAT KLHK TA 2024

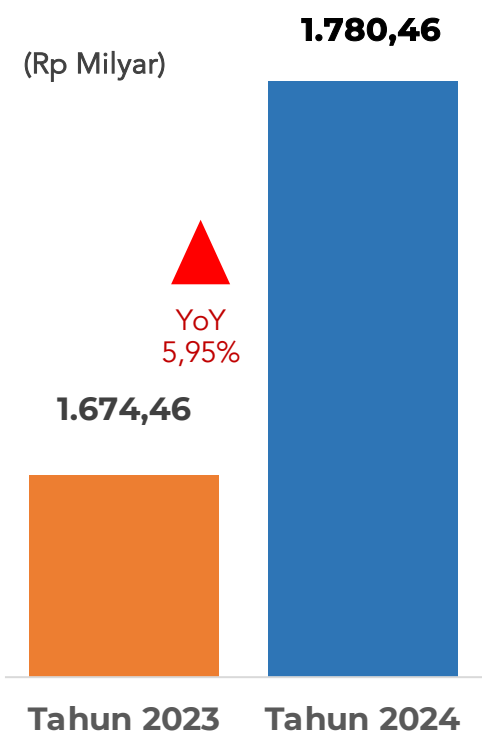

Intervensi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui belanja masyarakat diharapkan mampu memberi dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Perbaikan kualitas belanja berorientasi outcome menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menebalkan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, pada belanja Kementerian LHK 2024 dialokasikan anggaran **sebesar Rp 1,780 triliun atau 23,24%** dari total anggaran belanja kementerian untuk anggaran belanja yang berkarakteristik **untuk pemberdayaan masyarakat.**

Anggaran belanja berbasis masyarakat ini meningkat 5,95% (YoY) jika diperbandingkan dengan anggaran belanja tahun 2023. Peningkatan anggaran belanja berbasis masyarakat pada tahun 2024 menjadi salah satu investasi Kementerian LHK terhadap modal sosial masyarakat di tingkat tapak. Rincian aktivitas dan anggaran berbasis masyarakat pada setiap Unit Kerja Eselon I kami sajikan pada halaman berikutnya.

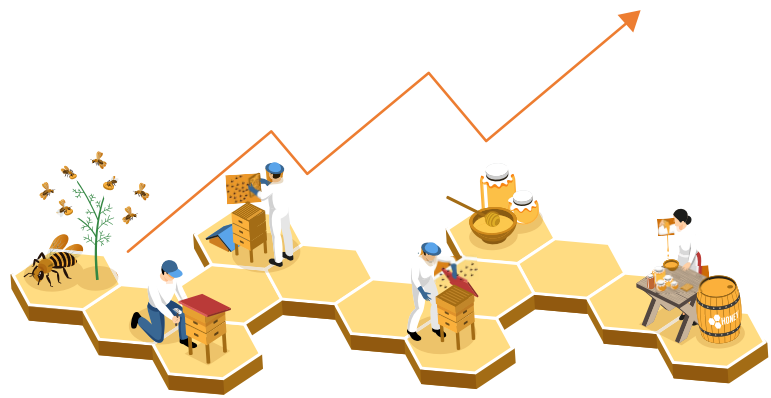

SEBARAN KEGIATAN BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2024 PER UNIT ESELON I

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

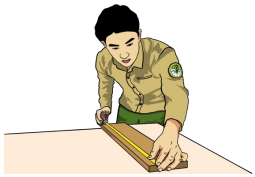

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp14.493.193.000,- melalui Fasilitasi UMKM untuk Kegiatan SVLK, Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan

Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp896.079.468.000,- melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kebun Bibit Rakyat, Produksi dan Distribusi Bibit Berkualitas, Penyediaan Bibit, Bangunan Konservasi Tanah dan Air, Rehabilitasi Mangrove

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp279.252.485.000,- melalui Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi, Fasilitasi Kelompok Masyarakat Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi, Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari), Penanaman Intensif Bersama Masyarakat, Pemeliharaan Bersama Masyarakat, Rehabilitasi Terumbu Karang Bersama Masyarakat, Pengendalian Jenis Invasif, Penanaman Pengkayaan Bersama Masyarakat, Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, Fasilitasi Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp27.468.607.000,- melalui Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan Mandiri, Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp42.595.000.000,- melalui Bang Pesona dan pemberian Alat Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum

Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp111.348.556.000,- melalui Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes, Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK, Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas, Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional, Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah, Fasilits Pengurangan Sampah

Ditjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Ditjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan menganggarkan belanja kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp109.650.000.000,- melalui pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum dan lokasi prioritas lain, Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menganggarkan kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp180.109.663.000,- melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut, Revegetasi Ekosistem Gambut, Revitalisasi Mata Pencaharian dan Ekonomi Masyarakat, Rehabilitasi Mangrove, Desa Mandiri Peduli Gambut

Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim menganggarkan kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp105.673.387.000,- melalui Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat, Program Kampung Iklim

Badan Strandardisasi Instrumen LHK

Badan Strandardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggarkan kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp13.960.000.000,- yang akan digunakan untuk Pengelolaan KHDTK

Merubah Arah Investasi

Antrian wisatawan yang akan menyebrangi jembatan tajuk sepanjang 64 meter yang menghubungkan 5 pohon Bangkirai di ketinggian 30 meter. PT Inhutani I Unit Balikpapan yang mengelola Wisata Alam Bukit Bangkirai tidak lagi bertumpu pada ekstrasi kayu tapi menawarkan wisata pesona alam hutan tropis.

Foto oleh : Sandi Kusuma

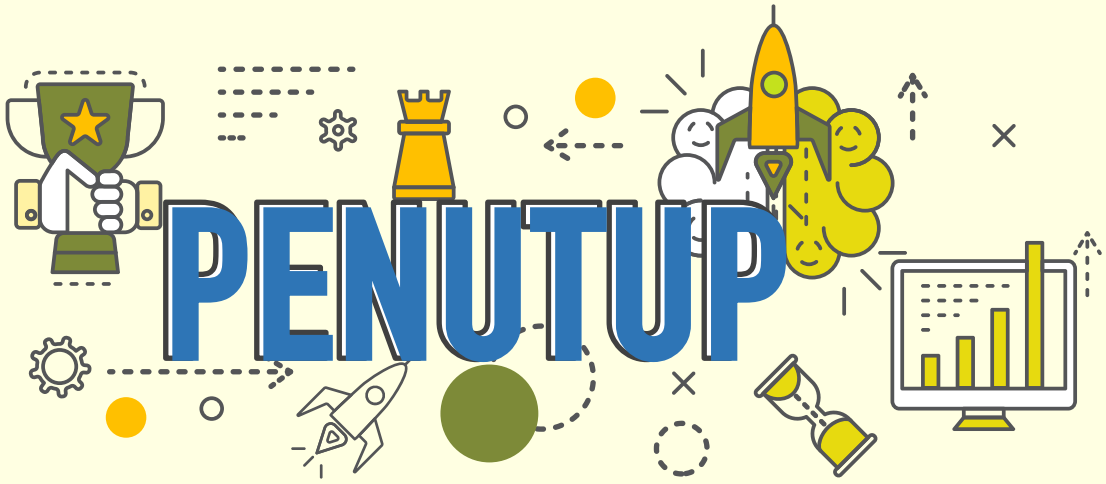
PENUTUP

MENCIPTAKAN MASA DEPAN YANG LEBIH HIJAU DAN BERKELANJUTAN BAGI BUMI

Rencana Kerja (Renja) KLHK Tahun 2024 menggambarkan target kinerja dan anggaran sesuai hasil kesepakatan tiga pihak (Kementerian LHK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan) dan persetujuan komisi terkait di DPR RI. Dengan anggaran yang terbatas, KLHK harus menempuh cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan KLHK juga harus mampu memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, tidak hanya fokus pada input, proses, output dan outcome, tetapi juga harus mampu menjelaskan *impact* dan benefit yang diperoleh masyarakat atas capaian-capaian kinerja KLHK.

Perlu adanya kebijakan integratif dalam rangka percepatan pencapaian target-target di lapangan yaitu kebijakan yang mampu menyentuh aspek strategis maupun aspek teknis. Sentuhan terhadap aspek strategis dimaksudkan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menggerakan bahkan memiliki daya paksa terhadap lintas sektor kementerian dan juga pemerintah daerah, yaitu dapat berupa Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden.

Sementara sentuhan terhadap aspek teknis dimaksudkan agar yang dikerjakan tidak hanya mengejar target sebagai tujuan utama tetapi perlu adanya aspek pengembangan dan pengendalian sebagai jaminan keberlanjutan target kinerja yang telah dicapai. Oleh karenanya, pada aspek teknis ini diperlukan dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis –Juklak dan Juknis- yang dapat menjadi peta jalan (*road map*) dalam menjamin pelaksanaan perluasan, pengembangan dan pengendalian capaian kinerja KLHK sehingga semangat pemulihan ekonomi nasional benar-benar dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya dokumen ini kelak akan ada kesinambungan pembangunan baik pemulihan ekonomi maupun lingkungan yang semakin nyaman untuk ditinggali.

Akhirnya, Renja KLHK Tahun 2024 ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Renja Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan UPT lingkup KLHK sehingga *cascading* pencapaian kinerja utama pembangunan LHK Tahun 2024 dapat terbaca sampai tingkat tapak dan terus memberikan kontribusi positif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2024.

LAMPIRAN
RENCANA KERJA KLHK
TAHUN 2024

Lampiran 1. Arsitektur Kinerja Renja KLHK Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
01-SEKRETARIAT JENDERAL											**453.870.125**
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	01-Biro Hubungan Masyarakat	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**958-Layanan Hubungan Masyarakat**	**3**	**Layanan**	**6.763.125**				**6.763.125**
				051-Layanan Jejaring Informasi Publik	1	Layanan	1.469.000				1.469.000
				052-Layanan Hubungan Antar Lembaga	1	Layanan	1.994.125				1.994.125
				053- Layanan Informasi Publik	1	Layanan	3.300.000				3.300.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**2.351.758**				**2.351.758**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	2.351.758				2.351.758
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**4**	**Unit**	**50.000**				**50.000**
				051-Pengadaan Peralatan dan Mesin	4	Unit	50.000				50.000
	5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	02-Pusat Data dan Informasi	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**963-Layanan Data dan Informasi**	**2**	**Layanan**	**5.680.657**				**5.680.657**
				051-Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Data KLHK	1	Layanan	2.796.329				2.796.329
				052-Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Informasi KLHK	1	Layanan	2.884.328				2.884.328
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.050.000				3.050.000
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	3.050.000				3.050.000
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	34	Unit	400.000				400.000
				051-Layanan Sarana Internal	34	Unit	400.000				400.000
			FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi	10.853.772				10.853.772
				051-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi	10.853.772				10.853.772
	5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	**03-Biro Perencanaan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**3.239.143**				**3.239.143**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	3.239.143				3.239.143
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	**952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran**	**24**	**Dokumen**	**13.410.467**				**13.410.467**
				051-Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran	10	Dokumen	6.500.000				6.500.000
				052-Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Kinerja	14	Dokumen	6.910.467				6.910.467

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK**	**04-Biro Umum**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**956-Layanan BMN**	**1**	**Layanan**	**6.915.388**				**6.915.388**
				051-Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	Layanan	6.915.388				6.915.388
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**959-Layanan Protokoler**	**1**	**Layanan**	**18.847.240**				**18.847.240**
				051-Pengelolaan dan Pembinaan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan Pimpinan Kementerian	1	Layanan	18.847.240				18.847.240
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**962-Layanan Umum**	**2**	**Layanan**	**47.822.477**				**47.822.477**
				051-Pengelolaan urusan Tata Usaha, Kearsipan dan Dokumentasi	1	Layanan	11.384.372				11.384.372
				052-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Rumah Tangga, Urusan Dalam dan Layanan Kesehatan Pegawai KLHK	1	Layanan	36.438.105				36.438.105
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**2**	**Layanan**	**198.355.569**				**198.355.569**
				001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	78.723.178				78.723.178
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	119.632.481				119.632.481
	5372-Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	**06-Biro Kerja Sama Luar Negeri**	**AEA-Koordinasi**	**001-Layanan Kerjasama Internasional**	**2**	**kegiatan**	**6.532.176**				**6.532.176**
				051-Fasilitasi Kerjasama Internasional	1	Kegiatan	4.454.784				4.454.784
				052-Fasilitasi Perjanjian Internasional	1	Kegiatan	2.077.392				2.077.392
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**2.100.000**				**2.100.000**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	2.100.000				2.100.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional**	**08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**6**	**Layanan**	**7.717.424**				**7.717.424**
				051-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Bali Nusra	1	Layanan	907.492				907.492
				052-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Jawa	1	Layanan	1.013.536				1.013.536
				053-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan	1	Layanan	1.610.838				1.610.838
				054-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Sulawesi Maluku	1	Layanan	1.432.672				1.432.672
				055-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Papua	1	Layanan	1.785.034				1.785.034
				056-Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Sumatera	1	Layanan	967.852				967.852
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**2**	**Layanan**	**67.501.658**				**67.501.658**
				001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	42.412.771				42.412.771
				002-Layanan Operasional dan Pemeliharaan	1	Layanan	25.088.887				25.088.887

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional**	**08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra**	**EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**951-Layanan Sarana Internal**	**116**	**Unit**	**1.695.450**				**1.695.450**
				051-Pengadaan Peralatan dan Mesin	116	Unit	1.695.450				1.695.450
		08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	**EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**971-Layanan Prasarana Internal**	**4**	**Unit**	**401.760**				**401.760**
				051-Pengadaan Prasarana Internal	4	Unit	401.760				401.760
		08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	**FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra**	**24**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**1.939.900**				**1.939.900**
				051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8	Daerah	641.000				641.000
				052-Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	8	Daerah	573.900				573.900
				053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8	Daerah	725.000				725.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional**	**07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa**	**FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa**	**10**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**2.400.000**				**2.400.000**
				051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	10	Daerah	800.000				800.000
				052-Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	10	Daerah	800.000				800.000
				053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	10	Daerah	800.000				800.000
		09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	**FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan**	**5**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**3.200.000**				**3.200.000**
				051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	5	Daerah	1.000.000				1.000.000
				052-Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	5	Daerah	1.200.000				1.200.000
				053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	5	Daerah	1.000.000				1.000.000
		10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	**FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku**	**30**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**2.287.139**				**2.287.139**
				051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	30	Daerah	763.786				763.786
				052-Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	30	Daerah	772.226				772.226
				053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	30	Daerah	751.127				751.127
		12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	**FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua**	**8**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/Kota**	**2.988.408**				**2.988.408**
				051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8	Daerah	900.000				900.000
				052-Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	8	Daerah	1.188.408				1.188.408
				053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8	Daerah	900.000				900.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional**	**13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera**	**FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera**	**22**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**3.314.500**				**3.314.500**
				051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	5	Daerah	1.096.500				1.096.500
				052-Layanan Pembinaaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	10	Daerah	1.146.500				1.146.500
				053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	7	Daerah	1.071.500				1.071.500
	5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	**14-Biro Keuangan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**2.427.275**				**2.427.275**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	2.427.275				2.427.275
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	**955-Layanan Manajemen Keuangan**	**3**	**Dokumen**	**2.500.000**	**2.512.809**			**5.012.809**
				051-Layanan Fasilitasi Peningkatan Nilai PNBP KLHK Melalui Tatakelola Akuntabel	1	Dokumen	23.580	1.022.720			1.046.300
				052-Layanan Fasilitasi Penyelesaian Piutang KLHK	1	Dokumen	554.200	250.000			804.200
				053-Layanan Pengelolaan Keuangan untuk Opini WTP	1	Dokumen	1.922.220	1.240.089			3.162.309
	5381-Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK	**15-Biro Kepegawaian dan Organisasi**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**	**1**	**Layanan**	**1.848.283**				**1.848.283**
				051-Layanan Organisasi dan Tatakelola	1	Layanan	1.848.283				1.848.283
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**2.160.000**				**2.160.000**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	2.160.000				2.160.000
			EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	**954-Layanan Manajemen SDM**	**2.500**	**Orang**	**5.315.601**				**5.315.601**
				051-Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	2.500	Orang	5.315.601				5.315.601

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5383-Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**17-Biro Hukum**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**957-Layanan Hukum**	**1**	**Layanan**	**4.045.026**				**4.045.026**
				051-Layanan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	1	Layanan	4.045.026				4.045.026
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**969-Layanan Bantuan Hukum**	**1**	**Layanan**	**730.684**				**730.684**
				051-Advokasi dan Bantuan Hukum	1	Layanan	730.684				730.684
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**2.200.000**				**2.200.000**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	2.200.000				2.200.000
	5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**18-Pusat Kebijakan Strategis**	**ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH**	**6**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.252.750**				**1.252.750**
				051-Penyusunan Rancangan/Rekomendasi Kebijakan LH	6	Dokumen	1.252.750				1.252.750
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan**	**6**	**Rekomendasi Kebijakan**	**2.507.306**				**2.507.306**
				051-Penyusunan Rancangan/Rekomendasi Kebijakan Kehutanan	6	Dokumen	2.304.606				2.304.606
				052-Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	80	Poin	202.700				202.700
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**1.356.515**				**1.356.515**
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1.356.515				1.356.515
	5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**051-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH**	**3**	**NSPK**	**2.654.173**				**2.654.173**
				051-Perumusan dan Fasilitasi Kebijakan Teknis Sarana Prasarana Pengelolaan Hutan	3	NSPK	1.379.345				1.379.345
				052-Perumusan dan Fasilitasi Kebijakan Teknis Sarana Prasarana Pengelolaan Lingkungan	3	NSPK	1.274.828				1.274.828
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**1.277.602**				**1.277.602**
				002-Operasional dan Pemeliharaan kantor	1	Layanan	1.277.602				1.277.602
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**6**	**Unit**	**264.000**				**264.000**
				051-Layanan Pengadaan Sarana Internal	6	Unit	264.000				264.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
02-INSPEKTORAT JENDERAL											**74.643.106**
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK**	**01-Sekretariat Inspektorat Jenderal**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**1**	**Layanan**	3.090.560				3.090.560
				061- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	3.090.560				3.090.560
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**963-Layanan Data dan Informasi**	**1**	**Layanan**	**1.260.994**				**1.260.994**
				051-Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan	1	Layanan	1.260.994				1.260.994
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**34.905.489**				**34.905.489**
				001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	28.947.141				28.947.141
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	5.958.348				5.958.348
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**185**	**Unit**	**2.415.135**				**2.415.135**
				051-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	40	Unit/Paket	1.518.635				1.518.635
				052- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	145	Unit/Paket	896.500				896.500
			EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	**954-Layanan Manajemen SDM**	**1**	**Layanan**	**2.503.074**				**2.503.074**
				051-Layanan Kepegawaian dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	1.192.564				1.192.564
				052-Peningkatan Kompetensi APIP	1	Layanan	1.310.510				1.310.510
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	**952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran**	**14**	**Dokumen**	**1.016.931**				**1.016.931**
				051-Perencanaan dan Penganggaran Internal	14	Dokumen	1.016.931				1.016.931
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	**953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi**	**19**	**Dokumen**	**935.576**				**935.576**
				051-Pemantauan dan Evaluasi Internal	19	Laporan	935.576				935.576

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK**	**02-Inspektorat Wilayah I**	**EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**001-Layanan Manajemen Resiko**	**60**	**Laporan**	**4.480.950**				**4.480.950**
				051-Layanan Manajemen Resiko pada Inspektorat Wilayah I	12	laporan	1.056.730				1.056.730
				052-Layanan Manajemen Resiko pada Inspektorat Wilayah II	12	Laporan	921.576				921.576
				053-Layanan Manajemen Resiko pada Inspektorat Wilayah III	12	Laporan	1.021.740				1.021.740
				054-Layanan Manajemen Resiko pada Inspektorat Wilayah IV	24	Laporan	1.480.920				1.480.920
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	**002-Layanan Pengendalian Internal**	**67**	**Laporan**	**4.367.450**				**4.367.450**
				051-Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah I	18	Laporan	1.190.450				1.190.450
				052-Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah II	14	Laporan	1.052.686				1.052.686
				053-Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah III	16	Laporan	1.120.350				1.120.350
				054-Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah IV	19	Laporan	1.003.950				1.003.950
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	**965-Layanan Audit Internal**	**282**	**Laporan**	**14.632.265**				**14.632.265**
				051-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	80	Laporan	3.761.491				3.761.491
				052-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II	66	Laporan	3.030.632				3.030.632
				053-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	52	Laporan	3.280.621				3.280.621
				054-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	84	Laporan	4.559.519				4.559.519
	5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	**06-Inspektorat Investigasi**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**1**	**layanan**	**2.234.601**				**2.234.601**
				051-Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	2.234.601				2.234.601
			BAH-Pelayanan Publik Lainnya	**002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**	**1**	**layanan**	**2.800.081**				**2.800.081**
				051-Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	1.303.936				1.303.936
				052-Pencegahan Korupsi	1	Layanan	1.496.145				1.496.145

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
03-DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI											**304.465.153**
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan**	**08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan**	**AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan**	**2**	**NSPK**	**261.688**	**380.455**			**642.143**
				051-Pembahasan dan Penyusunan NSPK	2	NSPK	261.688	380.455			642.143
			BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	**001-Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan**	**20**	**Lembaga**	**757.685**	**825.251**			**1.582.936**
				051-Bimbingan Teknis dan Supervisi Rencana Pengelolaan	2	Kegiatan	305.311	332.537			637.848
				052-Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan	20	Lembaga	340.846	371.240			712.086
				053-Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	2	Kegiatan	111.528	121.474			233.002
			BAH-Pelayanan Publik Lainnya	**001-Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**1**	**Dokumen**	**2.644.421**	**2.791.063**			**5.435.484**
				051-Identifikasi dan Evaluasi Kesesuaian Rencana	3	Kegiatan	750.315	817.223			1.567.538
				052-Layanan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan	1	Dokumen	1.124.652	1.135.769			2.260.421
				053-Pengembangan Database Pemanfaatan Kawasan Hutan	3	Kegiatan	769.454	838.071			1.607.525
			BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan**	**20**	**Lembaga**	**2.780.557**	**3.028.520**			**5.809.077**
				051-▪Fasilitasi Penyusunan Implementasi RPHJP/RPHJPd	20	Lembaga	2.780.557	3.028.520			5.809.077
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan**	**20**	**Lembaga**	**1.455.180**	**1.044.817**			**2.499.997**
				051-Supervisi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Oleh KPH	2	Kegiatan	296.459	322.895			619.354
				052-Pembinaan Teknis/ Supervisi Pembentukan KPH	20	Lembaga	462.572	503.822			966.394
				053-Bimtek/Pengembangan dan Penguatan KPH	2	Kegiatan	696.149	218.100			914.249

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan**	**08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan**	**QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari**	**46**	**Lembaga**	**11.703.954**	**2.396.036**			**14.099.990**
				051-Pendampingan dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	30	Lembaga	2.153.954	2.396.036			4.549.990
				052-Fasilitasi Penguatan KPH dalam rangka pencegahan Kebakaran Hutan	16	Lembaga	9.550.000				9.550.000
	6730-Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	**09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan**	**AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**001-NSPK usaha pemanfaatan hutan**	**1**	**NSPK**	**210.512**	**229.285**			**439.797**
				051-Pembahasan dan Penyusunan NSPK	1	NSPK	210.512	229.285			439.797
			BAH-Pelayanan Publik Lainnya	**001-Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan**	**44**	**Dokumen**	**1.637.329**	**1.783.339**			**3.420.668**
				051-Verifikasi Teknis Permohonan Perizinan, Penelahaan Areal dan Peta	44	Dokumen	1.637.329	1.783.339			3.420.668
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan**	**45**	**Badan Usaha**	**3.339.042**	**3.547.626**			**6.886.668**
				051-Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	45	Badan Usaha	3.339.042	3.547.626			6.886.668
			BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	**001-Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan**	**44**	**Badan Usaha**	**3.243.828**	**2.831.485**			**6.075.313**
				051-Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan	44	Badan Usaha	2.643.828	1.931.485			4.575.313
				052-Fasilitasi Pertemuan Forum Bisnis (Temu Usaha)	5	Kegiatan	600.000	900.000			1.500.000
	6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	**10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan**	**AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**001-NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan**	**1**	**NSPK**	**176.110**	**191.816**			**367.926**
				051-Pembahasan dan Penyusunan NSPK	1	NSPK	176.110	191.816			367.926
			BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan**	**32**	**Kelompok Masyarakat**	**935.600**	**1.019.040**			**1.954.640**
				051-Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	32	Kelompok Masyarakat	935.600	1.019.040			1.954.640
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan**	**34**	**Badan Usaha**	**1.956.777**	**2.131.275**			**4.088.052**
				051-Pembinaan Teknis/ Supervisi/Evaluasi Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	18	Badan Usaha	1.017.524	1.108.263			2.125.787
				052-Pembinaan dan Pengembangan Multi Usaha Kehutanan	16	Badan Usaha	939.253	1.023.012			1.962.265

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan**	**10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan**	**BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha**	**002-Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan**	**28**	**Badan Usaha**	**2.789.264**	**3.246.002**			**6.035.266**
				051-Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Multi Usaha Kehutanan/ Perlindungan Hutan/ Kemitraan Kehutanan	28	Badan Usaha	2.789.264	3.246.002			6.035.266
			QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**001-Layanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan**	**60**	**Badan Usaha**	**1.237.281**	**1.324.529**			**2.561.810**
				051-Layanan Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Berbasis Multiusaha Kehutanan	20	Badan Usaha	447.441	481.991			929.432
				052-Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfatan Hutan	40	Badan usaha	789.840	842.538			1.632.378
			QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**002- Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH**	**42**	**Badan usaha**	**2.635.968**	**2.764.032**			**5.400.000**
				051-Pengawasan dan Pengendalian Implementasi RKUPH/RKTPH	42	Badan Usaha	2.635.968	2.764.032			5.400.000
			QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	**001-Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan**	**84**	**Badan Usaha**	**5.100.908**	**5.549.092**			**10.650.000**
				051-Pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan/Multiusaha Kehutanan	42	Badan usaha	3.425.599	3.724.386			7.149.985
				052-Pengawasan dan pengendalian Perlindungan Hutan	42	Badan usaha	1.675.309	1.824.706			3.500.015
	6732-Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	**11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**001-NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**2**	**NSPK**	**254.075**	**276.735**			**530.810**
				051-Pembahasan dan Penyusunan NSPK	2	NSPK	254.075	276.735			530.810
			BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**001-Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**301**	**Badan Usaha**	**1.114.482**	**1.178.306**			**2.292.788**
				051-Layanan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional Bidang Pemanfaatan Hutan	6	Laporan	557.291	589.153			1.146.444
				052-Layanan Iuran Kehutanan	301	Badan Usaha	557.191	589.153			1.146.344
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**85**	**Badan Usaha**	**3.482.046**	**3.694.356**			**7.176.402**
				051-Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5	Badan Usaha	614.684	878.307			1.492.991
				052-Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Iuran Kehutanan	35	Badan Usaha	980.787	930.349			1.911.136
				053-Pembinaan Teknis/ Supervisi Terti Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengendalian Tenaga Professional bidang Pemanfaatan Hutan	45	Badan Usaha	1.886.575	1.885.700			3.772.275

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6732-Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha**	**002-Layanan Iuran dan Penatausahaan Hutan**	**216**	**Badan Usaha**	**1.922.683**	**2.094.135**			**4.016.818**
				051-Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Penatausahaan hasil Hutan	216	Badan Usaha	1.922.683	2.094.135			4.016.818
			BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	**001-Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan**	**301**	**Badan Usaha**	**3.335.536**	**3.525.971**			**6.861.507**
				051-Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan	301	Badan Usaha	3.335.536	3.525.971			6.861.507
	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	**12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**	**AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria**	**001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**	**1**	**NSPK**	**198.630**	**216.344**			**414.974**
				051-Pembahasan dan Penyusunan NSPK	1	NSPK	198.630	216.344			414.974
			BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan**	**450**	**Badan Usaha**	**3.405.871**	**3.598.122**			**7.003.993**
				051-Pelayanan Penerbitan Dokumen Ekspor dan atau Dokumen Impor	450	Badan Usaha	3.405.871	3.598.122			7.003.993
			BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**002-Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan**	**180**	**Badan Usaha**	**3.290.744**	**3.561.907**			**6.852.651**
				051-Fasilitasi/Sosialisasi/Pendampingan/Bimbingan Teknis Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	180	Badan Usaha	3.290.744	3.561.907			6.852.651
			PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**001-Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**286.911**	**312.497**			**599.408**
				051-Penyusunan Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	286.911	312.497			599.408
			QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar**	**40**	**Badan Usaha**	**1.103.507**	**1.546.085**			**2.649.592**
				051-Penelaahan/Verifikasi Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	40	Badan Usaha	695.210	757.205			1.452.415
				052-Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan Skala Besar	5	Kegiatan	408.297	788.880			1.197.177

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan**	**12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**	**QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM**	**001-UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Pusat**	**25**	**UMKM**	**1.964.429**	**2.884.591**			**4.849.020**
				051-Fasilitasi Sertifikan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM	25	UMKM	1.191.975	2.043.254			3.235.229
				052-Fasilitasi Pelatihan Auditor/Asesor/Pendamping SVLK Bagi Eksportir Industri Kecil / UMKM	20	Orang	233.943	254.805			488.748
				053-Bimbingan Teknis/Pembinaan UMKM ber-SVLK	25	UMKM	205.252	223.555			428.807
				054-Supervisi Impelementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian	25	UMKM	167.733	182.690			350.423
				055-Sosialisasi Peraturan SVLK/Pemberdayaan UMKM/Desain Pemasaran/Temu Bisnis	2	kegiatan	165.526	180.287			345.813
			QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	**002-UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL**	**75**	**UMKM**	**4.443.078**	**4.860.246**			**9.303.324**
				051-Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL	75	UMKM	4.443.078	4.860.246			9.303.324
			QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**001-Rekomendasi Kinerja Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**	**180**	**Badan Usaha**	**2.207.015**	**2.403.828**			**4.610.843**
				051-Pembinaan Teknis/ Supervisi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	180	Badan Usaha	1.191.789	1.298.068			2.489.857
				052-Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi LVLK	31	Badan Usaha	507.613	552.880			1.060.493
				053-Pembinaan Teknis/ Supervisi bagi Pelaku Ekspor/ Impor Produk Industri Kehutanan	100	Badan Usaha	507.613	552.880			1.060.493
			QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	**001-Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya**	**200**	**Badan Usaha**	**4.624.003**	**5.014.056**			**9.638.059**
				051-Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan / Harga Pasar Produk Olahan Hasil Hutan	200	Badan Usaha	4.624.003	5.014.056			9.638.059
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari**	**01-Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**22**	**Layanan**	**17.820.753**				**17.820.753**
				051-Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	14.446.948				14.446.948
				052-Layanan dukungan Direktorat	5	Layanan	400.000				400.000
				053-Layanan Dukungan Manajemen Satker	16	Layanan	2.973.805				2.973.805
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**17**	**Layanan**	**137.619.249**				**137.619.249**
				001-Gaji dan Tunjangan	17	Layanan	106.914.138				106.914.138
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	17	Layanan	30.705.111				30.705.111
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**207**	**Unit**	**1.367.975**				**1.367.975**
				051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	Unit	30.000				30.000
				052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	34	Unit	518.457				518.457
				053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	172	Unit	819.518				819.518
				971-Layanan Prasarana Internal	**3**	**Unit**	**2.907.220**				2.907.220
				051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	3	Unit	2.907.220				2.907.220

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
04-DITJEN PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN											**1.363.871.954**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6738-Rehabilitasi Perairan Darat**	**13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Unit kerja yang ditingkatkan kapasitas dalam Rehabilitasi Perairan Darat**	**34**	**Unit Kerja**	**1.200.000**				**1.200.000**
				051- Perencanaan dan data informasi Rehabilitasi Perairan Darat	34	Unit Kerja	114.380				114.380
				052-Bimbingan Teknis, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	34	Unit Kerja	435.000				435.000
				053-Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan	34	Unit Kerja	650.620				650.620
			PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	**001-Rekomendasi Kebijakan pemulihan Mata Air**	**100**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.800.000**				**1.800.000**
				051- Rencana Pemulihan / Perlindungan Mata Air	100	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000				1.800.000
			QII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	**001-Laporan Pemantauan Danau Prioritas yang Dikendalikan Kerusakannya**	**15**	**Laporan**	**2.123.020**				**2.123.020**
				051- Laporan Pemantauan Danau Prioritas yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Laporan	2.123.020				2.123.020
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat**	**480**	**Unit**	**4.733.822**				**4.733.822**
				051- Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	480	Unit	4.733.822				4.733.822
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan**	**05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan**	**36**	**Unit Kerja**	**2.000.000**				**2.000.000**
				051-Perencanaan dan Data Informasi Perbenihan	36	Unit Kerja	500.000				500.000
				052-Bimbingan Teknis, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	36	Unit Kerja	1.000.000				1.000.000
				053-Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	36	Unit Kerja	500.000				500.000
			RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Benih Berkualitas**	**37.500.000**	**unit**	**2.000.000**	-	-	-	**2.000.000**
				051-Penyediaan Benih Berkualitas dari sumber benih bersertifikat	37.500.000	unit	2.000.000				2.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan**	**05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan**	**RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif**	**41.000.000**	**unit**	**207.850.797**				**207.850.797**
				051-Produksi dan distribusi bibit berkualitas	37.500.000	unit	136.025.000				136.025.000
				052-Penyediaan bibit produktif	3.500.000	unit	70.000.000				70.000.000
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun**	**20**	**Hektar**	**11.246.830**				**11.246.830**
				051-Pembangunan sumber benih	20	Hektar	3.124.660				3.124.660
				052-Pemeliharaan Kebun Benih/ASDG	487	Hektar	8.122.170				8.122.170
	6734-Konservasi Tanah dan Air	**02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air**	**34**	**Unit Kerja**	**2.000.000**				**2.000.000**
				051-Perencanaan dan Data Informasi KTA	34	Unit Kerja	451.400				451.400
				052-Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	34	Unit Kerja	913.000				913.000
				053-Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	34	Unit Kerja	635.600				635.600
			CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Forest Program II**	**1**	**Unit**			**8.908.680**		**8.908.680**
				051-Forest Program II	1	Unit			8.908.680		8.908.680
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis**	**1.100**	**Unit**	**6.540.140**	**14.956.103**			**21.496.243**
				051-Bangunan Konservasi Tanah dan Air	1.100	Unit	6.540.140	14.956.103			21.496.243
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS**	**15.000**	**Hektar**	**574.200**	**925.800**			**1.500.000**
				051-Bimbingan Teknis Percepatan pelaksanaan Rehab DAS	15.000	Hektar	574.200	925.800			1.500.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**	**11-Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS**	**34**	**Unit Kerja**	**8.500.000**				**8.500.000**
				051-Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34	Unit Kerja	8.500.000				8.500.000
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya**	**34**	**Lembaga**	**2.006.500**	**1.393.500**			**3.400.000**
				051-Pengembangan Kelembagaan/Forum Peduli DAS	34	Lembaga	2.006.500	1.393.500			3.400.000
			UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	**001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time**	**34**	**Layanan**	**14.259.233**	**14.464.607**			**28.723.840**
				051-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34	Layanan	14.259.233	14.464.607			28.723.840
	6736-Rehabilitasi Hutan	**12-Direktorat Rehabilitasi Hutan**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan**	**34**	**Unit Kerja**	**3.850.000**				**3.850.000**
				051-Perencanaan dan data informasi RHL	34	Unit Kerja	962.800				962.800
				052-Supervisi, Monitoring dan evaluasi	34	Unit Kerja	963.050				963.050
				053-Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	34	Unit Kerja	1.924.150				1.924.150
			CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Forest Program III-Sulawesi Programme**	**1**	**Unit**			**550.000**		**550.000**
				051-Forest Programme III - Sulawesi Programme	1	Unit			550.000		550.000
			CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**002-Forest Program IV Watersheed Mamasa/Sulawesi**	**3**	**Unit**			**46.877.455**		**46.877.455**
				051-Forest Programme IV Sulawesi Barat	3	Unit			46.877.455		46.877.455

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6736-Rehabilitasi Hutan**	**12-Direktorat Rehabilitasi Hutan**	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	**001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif**	**17.000**	**Hektar**	**265.743.416**	**358.306.892**	-	-	**624.050.308**
				051-Penanaman	17.000	Hektar	219.743.416	100.686.892			320.430.308
				052-Pemeliharaan	42.850	Hektar		157.620.000			157.620.000
				053-Kebun Bibit Rakyat	1.100	unit	46.000.000	100.000.000			146.000.000
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya**	**500**	**Hektar**	**4.102.094**	**18.828.801**	-	-	**22.930.895**
				051-Penanaman	500	Hektar	4.102.094	7.694.906			11.797.000
				052-Pemeliharaan	1.500	Hektar	-	11.133.895			11.133.895
	6737-Rehabilitasi Mangrove	**13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove**	**34**	**Unit Kerja**	**1.300.000**				**1.300.000**
				051-Perencanaan dan data informasi Rehabilitasi Mangrove	34	Unit Kerja	605.000				605.000
				052-Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	34	Unit Kerja	295.000				295.000
				053-Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	34	Unit Kerja	400.000				400.000
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya**	**34**	**Lembaga**	**1.376.850**	**1.296.060**	-	-	**2.672.910**
				051-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga	1.376.850	1.296.060			2.672.910
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Rehabilitasi Hutan Mangrove**	**700**	**Hektar**	**9.655.213**	**19.852.677**	-	-	**29.507.890**
				051-Penanaman	700	Hektar	4.827.600	15.025.077			19.852.677
				052-Pemeliharaan	1.800	Hektar	4.827.613	4.827.600			9.655.213
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**	**01-Sekretariat Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**37**	**Layanan**	**44.641.456**				**44.641.456**
				051-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	25.641.456				25.641.456
				052-Layanan Dukungan Manajemen Satker	36	Layanan	19.000.000				19.000.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**37**	**Layanan**	**280.007.808**				**280.007.808**
				051-Gaji dan Tunjangan	37	Layanan	194.320.659				194.320.659
				052-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	37	Layanan	85.687.149				85.687.149

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
05-DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM											**1.773.960.108**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial**	**06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem**	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**001-Kebijakan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
				051-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	1	Rekomendasi Kebijakan	800.000				800.000
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan**	**11**	**Lembaga**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
				051-Fasilitasi Pengelolaan KEE/Koridor Hidupan Liar/Taman Kehati/ABKT	11	Lembaga	1.200.000				1.200.000
			QMA-Data dan Informasi Publik	**001-Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi**	**1**	**Dokumen**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
				051-Verifikasi Potensi Kawasan dengan Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi	1	Kegiatan	400.000				400.000
				052-Registrasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi	1	Dokumen	400.000				400.000
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi**	**9.349.174**	**Hektar**	**7.619.951**	**0**	**0**	**0**	**7.619.951**
				051-Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kehati Tinggi	9.349.174	Hektar	7.619.951				7.619.951
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**	**05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi**	**ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam yang Dikembangkan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
				051-Pengelolaan Destinasi Wisata Alam	1	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000				1.200.000
				052-Monitoring, Evaluasi, dan Pembinan Kinerja Perizinan Berusaha	1	Dokumen	900.000				900.000
				053-Pemasaran dan Promosi Destinasi Wisata Alam	1	Dokumen	900.000				900.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
				051-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	1	Rekomendasi Kebijakan	520.000				520.000
				052-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon	1	Rekomendasi Kebijakan	480.000				480.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**003-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
				051-Verifikasi, Fasilitasi, dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air	1	Rekomendasi Kebijakan	124.484				124.484
				052-Verifikasi, Fasilitasi dan Pembahasan usulan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	1	Dokumen	303.485				303.485
				053-Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	1	Kegiatan	572.031				572.031

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**	**05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi**	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan**	**13**	**Dokumen**	**759.455**	**540.545**	**0**	**0**	**1.300.000**
				051-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	7	Dokumen	321.620	223.550			545.170
				052-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon	6	Dokumen	437.835	316.995			754.830
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan**	**30**	**Dokumen**	**619.105**	**951.945**	**0**	**0**	**1.571.050**
				051-Tersedianya Areal Pemanfaatan Air Dalam kawasan Konservasi	30	Dokumen	461.935	621.215			1.083.150
				052-Terselenggaranya Izin Pemanfaatan Air Dalam Kawasan Konservasi	13	Dokumen	75.750	163.980			239.730
				053-Terselenggaranya Efektifitas Pemanfaatan Air Dalam Kawasan Konservasi	15	Dokumen	81.420	166.750			248.170
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)**	**27**	**Kelompok Masyarakat**	**3.513.202**	**6.253.298**	**0**	**0**	**9.766.500**
				051-Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK dalam rangka ekowisata	27	Kelompok Masyarakat	1.491.272	3.606.703			5.097.975
				052-Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	27	Kelompok Masyarakat	2.021.930	2.646.595			4.668.525
			RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan**	**15**	**Unit**	**13.179.695**	**2.820.305**	**0**	**0**	**16.000.000**
				051-Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	4	Dokumen	250.000	342.000			592.000
				052-Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam	15	Unit	11.844.055	405.945			12.250.000
				053-Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	15	Kegiatan	1.085.640	2.072.360			3.158.000
			RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan**	**53**	**Unit**	**24.732.284**	**7.530.166**	**0**	**0**	**32.262.450**
				051-Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	22	Dokumen	1.099.770	1.291.930			2.391.700
				052-Pengembangan Ecoedutourism dan Sarana Prasarana Wisata Alam	52	Unit	20.484.559	2.481.470			22.966.029
				053-Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE	53	Kegiatan	3.147.955	3.756.766			6.904.721
			RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan**	**7**	**Unit**	**4.803.200**	**596.800**	**0**	**0**	**5.400.000**
				051-Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	1	Dokumen	100.000				100.000
				052-Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Bahari	7	Unit	4.484.000	216.000			4.700.000
				053-Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Bahari	6	Kegiatan	219.200	380.800			600.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6739-Perencanaan Kawasan Konservasi**	**09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi**	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
				051-Kebijakan Verifikasi Kawasan Konservasi dengan Nilai Kehati Tinggi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000				1.600.000
			PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**002-Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	1.400.000	0	0	0	**1.400.000**
				051-Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Rekomendasi Kebijakan)	1	Rekomendasi Kebijakan	600.000				600.000
				052-Rekomendasi Penataan dan Rencana Pengelolaan KK dan Penandaan (Rekomendasi Kebijakan)	1	Rekomendasi Kebijakan	800.000				800.000
			PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**
				051-Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanakaragaman Hayati dan Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan	1	Rekomendasi Kebijakan	2.400.000				2.400.000
			AEC-Kerja sama	**001-Tata Kelola Kerja Sama di Kawasan Konservasi**	**74**	**Dokumen**	**2.287.865**	**3.712.135**	**0**	**0**	**6.000.000**
				051-Tata Kelola Kerja Sama Kawasan Konservasi	74	Dokumen Tata Kelola Kerjasama	2.287.865	3.712.135			6.000.000
			BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Forest Programme III - Sulawesi**	**2**	**Lembaga**	**0**	**0**	**14.413.230**	**0**	**14.413.230**
				051-Pengelolaan Keuangan dan Proyek	1	Dokumen			2.544.996		2.544.996
				052-Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)	1	Dokumen			9.237.947		9.237.947
				053-Peningkatan Kapasitas SDM	25	Orang			611.887		611.887
				054-Penandaan Batas Hidup	20	Desa			615.000		615.000
				055-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	12	Resort			448.005		448.005
				056-Pemulihan Ekosistem	110	Hektar			225.000		225.000
				057-Ecotourism dan Peningkatan Penyadartahuan	3	Kegiatan			337.000		337.000
				058-Infrastruktur dan Peralatan Pengelolaan Kawasan	2	Unit			393.395		393.395
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK**	**74**	**Unit Kerja**	**4.013.122**	**6.283.038**	**0**	**0**	**10.296.160**
				051-Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	20	Kawasan	504.720	1.370.590			1.875.310
				052-Penataan dan Rencana Pengelolaan KK dan Penandaan	74	Unit Kerja	3.508.402	4.912.448			8.420.850

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6739-Perencanaan Kawasan Konservasi**	**09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi**	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	**001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi**	**8.685.370**	**Hektar**	**6.379.084**	**11.824.756**	**0**	**0**	**18.203.840**
				051-Data Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK	8.685.370	Hektar	6.379.084	11.824.756			18.203.840
	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	**10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**001-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
				051-Kebijakan Verifikasi Areal Terbangun Dalam Rangka Penanganan Konflik Tenurial	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000				1.000.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**002-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**5.575.000**	**0**	**0**	**0**	**5.575.000**
				051-Evaluasi Kesesuaian Fungsi dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KK	1	Rekomendasi Kebijakan	3.275.000				3.275.000
				052- Penyusunan Kebijakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000				1.700.000
				053-Penerapan Konvensi dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berstatus Internasional	1	Rekomendasi Kebijakan	600.000				600.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
				051-Kebijakan Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000				1.200.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
				051-Dokumen Inventarisasi Wilayah dan verifikasi kemitraan konservasi	1	Dokumen	400.000				400.000
				052-Kebijakan Fasilitasi Pemberian akses kelola masyarakat	1	Rekomendasi Kebijakan	400.000				400.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**005-Kebijakan kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
				051-Kebijakan Pengembangan Kader Bina Cinta Alam di Sekitar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000				500.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**006-Kebijakan Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
				051-Kebijakan Pengembangan Usaha Kelompok Kemitraan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000				500.000
			BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi**	**1**	**Lembaga**	**0**	**0**	**14.497.545**	**0**	**14.497.545**
				051-Pengelolaan Hibah Luar Negeri FP IV	1	Lembaga			880.000		880.000
				052-Penguatan kelembagaan	2	Lembaga			3.143.605		3.143.605
				053-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	1	Kawasan			2.274.640		2.274.640
				054-Perencanaan Kawasan Konservasi	1	Dokumen			329.750		329.750
				055-Pembangunan Fasilitas dan Infrastuktur Kawasan	10	Unit			5.398.800		5.398.800
				056-Pemulihan Ekosistem	100	Hektar			1.677.000		1.677.000
				057-Penandaan Batas Kawasan	1	Kegiatan			793.750		793.750

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**002-Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project**	**5**	**Lembaga**	**0**	**0**	**5.520.250**	**0**	**5.520.250**
				051-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	5	Unit KK			4.126.050		4.126.050
				052-Penanganan Konflik Tenurial	1	Hektar			360.380		360.380
				053-Pemulihan Ekosistem	318	Hektar			822.220		822.220
				054-Pengembangan Ekowisata	2	Kegiatan			211.600		211.600
			QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	**001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya**	**277**	**Unit Kerja**	**3.179.640**	**2.420.630**	**0**	**0**	**5.600.270**
				051-Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	277	Unit Kerja	2.310.635	1.856.145			4.166.780
				053-Penerapan Konvensi dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berstatus Internasional	5	Unit KK	869.005	564.485			1.433.490
			QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	**001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**201**	**Orang**	**11.122.709**	**5.277.291**	**0**	**0**	**16.400.000**
				051-Pengembangan kader Konservasi	201	Orang	7.902.255	1.787.104			9.689.359
				052-Sosialisasi Bina Cinta Alam	74	Kegiatan	3.220.454	3.490.187			6.710.641
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya**	**500**	**Kelompok Masyarakat**	**4.382.825**	**5.617.175**	**0**	**0**	**10.000.000**
				051-Fasilitasi Kelompok Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Usahanya	396	Kelompok Masyarakat	1.685.865	3.266.335			4.952.200
				052-Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	104	Kelompok Masyarakat	2.696.960	2.350.840			5.047.800
			QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	**001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi**	**516**	**Kelompok Masyarakat**	**28.679.646**	**28.246.854**	**0**	**0**	**56.926.500**
				051-Pengembangan Kelembagaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	516	Kelompok Masyarakat	2.958.041	2.996.979			5.955.020
				052-Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	516	Kelompok Masyarakat	4.391.375	7.981.460			12.372.835
				053-Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	516	Kelompok Masyarakat	21.330.230	17.268.415			38.598.645
			QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	**001-Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi**	**605**	**Operasi**	**134.131.980**	**28.140.520**	**0**	**0**	**162.272.500**
				051-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	532	Operasi	112.009.537	21.155.036			133.164.573
				052-Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi	73	Operasi	22.122.443	6.985.484			29.107.927
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi**	**26.250**	**Hektar**	**5.232.757**	**9.743.243**	**0**	**0**	**14.976.000**
				051-Inventarisasi Wilayah & Verifikasi Kemitraan Konservasi	26.250	Hektar	3.097.753	5.188.647			8.286.400
				052-Fasilitasi Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat	26.250	Hektar	2.135.004	4.554.596			6.689.600

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	002-Konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	**280.000**	**Hektar**	**3.084.638**	**7.915.362**	**0**	**0**	**11.000.000**
				051-Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Subjek dan Objek Areal Terbangun Dalam Rangka Penanganan Konflik Tenurial	280.000	Hektar	3.084.638	7.915.362			11.000.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**670.000**
				051-Mekanisme Kompensasi Pemanfaatan Kehati untuk Pengelolaan Konservasi	1	Mekanisme	320.000				320.000
				052-Rekomendasi sistem pendanaan	1	Rekomendasi Kebijakan	350.000				350.000
			QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	**001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan**	**326**	**Lembaga**	**15.292.158**	**1.502.842**	**0**	**0**	**16.795.000**
				051-Pengelolaan Lembaga Konservasi	90	Lembaga	1.266.920	453.410			1.720.330
				052-Pengelolaan jenis Invasif	10	Dokumen	798.295	201.705			1.000.000
				053-Pengelolaan Zoonosis dan inplementasi sehatsatli	9	Lembaga	671.893	168.107			840.000
				054-Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2	Lembaga	2.150.000				2.150.000
				055-Produk Rekayasa genetik	4	Dokumen	1.350.000				1.350.000
				056-Penilaian Kelayakan penangkaran TSL	215	Lembaga	1.539.900	644.770			2.184.670
				057-Kerjasama Internasional dan Kemitraan	1	Kerjasama	4.500.000				4.500.000
				058-Perlindungan dan Pengawetan Jenis	1	Rekomendasi kebijakan	1.315.150	34.850			1.350.000
				059-Pemanfaatan dan Peredaran TSL	1	Dokumen	1.700.000				1.700.000
			QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	**002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)**	**463**	**Lembaga**	**1.962.012**	**4.092.988**	**0**	**0**	**6.055.000**
				051-Intervensi Manajemen TSL Peredaran	242	Lembaga	893.711	2.084.621			2.978.332
				052-Intervensi Manajemen TSL Penangkaran	200	Lembaga	372.108	734.560			1.106.668
				053-Potensi Pemanfaatan Bioprospeksi	21	Dokumen	696.193	1.273.807			1.970.000
			QMA-Data dan Informasi Publik	**001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati**	**1**	**Layanan**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
				051-Operasional sistem clearing house kehati	1	Layanan	972.500				972.500
				052-Koordinasi dan Konsultasi Multipihak	1	Kegiatan	527.500				527.500

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik**	**04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik**	**RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**001-Konservasi Keanekaragaman Hayati di IKN**	**4**	**Unit**	**8.461.800**	**1.538.200**	**0**	**0**	**10.000.000**
				051-Pembangunan koridor satwa di wilayah IKN	1	Unit	496.000	422.990			918.990
				052-Pengembangan Wildlife Rescue Unit (WRU)	1	Unit	2.911.350	597.710			3.509.060
				053-Pembangunan Pusat Konservasi Plasma Nutfah	2	Unit	5.054.450	517.500			5.571.950
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL**	**19.517.858**	**Hektar**	**22.347.575**	**11.520.837**	**0**	**0**	**33.868.412**
				051-Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	10.168.684	Hektar	16.202.987	7.978.132			24.181.119
				052-Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi	9.349.174	Hektar	6.144.588	3.542.705			9.687.293
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**002-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi**	**68.000**	**Hektar**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
				051-Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK	68.000	Hektar	896.660			896.660	896.660
				052-Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan	1	Dokumen	103.340			103.340	103.340
			REB-Konservasi Jenis/Spesies	**001-Penyelamatan Satwa Liar**	**478**	**Lokasi**	**37.513.416**	**10.198.172**	**0**	**0**	**47.711.588**
				051-Penanganan Satwa Transit	166	Lokasi	21.302.705	3.660.357	0		24.963.062
				052-Penanganan Satwa Konflik	312	Lokasi	15.710.711	6.537.815	0		22.248.526
				053-Penanganan Satwa Repatriasi	1	Lokasi	500.000				500.000
	6742-Pemulihan Ekosistem	**06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem**	**ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi dan ABKT**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	3.500.000	0	0	0	**3.500.000**
				051-Penyusunan Kebijakan Pemulihan Ekosistem	1	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000				3.500.000
			BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest**	**1**	**Lembaga**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**
				051-Pengelolaan Hibah Luar negeri	1	Lembaga			500.000		500.000
				052-Pengembangan Sarana prasarana	1	Unit			400.000		400.000
				053-Konservasi, Restorasi, dan Pengelolaan Hutan Mangrove Secara Berkelanjutan	80	Hektar			3.000.000		3.000.000
				054-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	10	Kelompok			1.100.000		1.100.000
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem**	**1.200**	**Hektar**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
				051-Pemeliharaan Ekosistem bersama Masyarakat	1.200	Hektar	1.000.000				1.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6742-Pemulihan Ekosistem**	**06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem**	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	**002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT**	**12.812**	**Hektar**	**10.203.132**	**18.182.460**	**0**	**0**	**28.385.592**
				051-Penanaman Intensif bersama Masyarakat	543	Hektar	1.547.720	1.234.830			2.782.550
				052-Pemeliharaan Bersama Masyarakat	1.394	Hektar	1.059.476	2.316.962			3.376.438
				053-Pemulihan Ekosistem Lamun dan Terumbu Karang Bersama Masyarakat	0,60	Hektar	625.627	1.588.198			2.213.825
				054-Pemulihan Ekosistem Melalui Mekanisme Alam	11.136,00	Hektar	4.387.331	8.884.487			13.271.818
				055-Pengendalian Jenis Invasif	344	Hektar	150.250	1.691.938			1.842.188
				056-Penanaman pengkayaan bersama masyarakat	787	Hektar	868.550	858.912			1.727.462
				057-Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	26	Dokumen	1.564.178	1.607.133			3.171.311
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**	**01-Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**75**	**Layanan**	**80.188.040**	**2.086.610**	**0**	**0**	**82.274.650**
				051-Program,anggaran, evaluasi, data dan informasi	75	Layanan	28.670.139	280.945			28.951.084
				052-Hukum dan kerjasama teknik	75	Layanan	4.729.626	47.585			4.777.211
				053-Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	75	Layanan	17.383.346	786.710			18.170.056
				054-Pengelolaan Keuangan dan Umum	75	Layanan	25.904.929	971.370			26.876.299
				055-Dukungan Manajemen Direktorat Perencanaan KK	1	Layanan	700.000				700.000
				056-Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan KK	1	Layanan	700.000				700.000
				057-Dukungan Manajemen Direktorat KKHSG	1	Layanan	700.000				700.000
				058-Dukungan Manajemen Direktorat PJLKK	1	Layanan	700.000				700.000
				059-Dukungan Manajemen Direktorat BPPE	1	Layanan	700.000				700.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**75**	**Layanan**	**1.051.208.130**	**0**	**0**	**0**	**1.051.208.130**
				001-Gaji dan Tunjangan	75	Layanan	759.565.813				759.565.813
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	75	Layanan	291.642.317				291.642.317
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**36**	**Unit**	**10.747.934**	**0**	**0**	**0**	**10.747.934**
				051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	10	Unit	6.291.240				6.291.240
				052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7	Unit	2.241.150				2.241.150
				053-Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	19	Unit	2.215.544				2.215.544
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**971-Layanan Prasarana Internal**	**25**	**Unit**	**31.442.556**	**0**	**0**	**0**	**31.442.556**
				051-Pembuatan Sertifikat Tanah	2	Unit	40.000				40.000
				052-Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	23	Unit	31.402.556				31.402.556

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
06-DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN											**721.379.764**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**5436-Pencegahan Dampak Lingkungan**	**05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**004-Dokumen RPPLH**	**7**	**Rekomendasi Kebijakan**	**451.000**	**3.549.000**			**4.000.000**
				051-Pengembangan NSPK dan Penerapan RPPLH Nasional	1	Rekomendasi Kebijakan	282.000	2.218.000			2.500.000
				052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah	6	Rekomendasi Kebijakan	169.000	1.331.000			1.500.000
			PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	**005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.994.000**	**15.706.000**			**17.700.000**
				051-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1	Dokumen	282.000	2.218.000			2.500.000
				052-Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH	2	Rekomendasi Kebijakan	1.712.000	13.488.000			15.200.000
			PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	**006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**113.000**	**887.000**			**1.000.000**
				051-Pengembangan NSPK dan Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan	2	Rekomendasi Kebijakan	113.000	887.000			1.000.000
		07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**007-Sistem kajian dampak lingkungan**	**40**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.420.000**	**11.184.748**			**12.604.748**
				051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilai Amdal)	40	Rekomendasi	129.000	1.012.709			1.141.709
				052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	150	Dokumen	74.000	585.316			659.316
				053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK	56.000	444.000			500.000
				054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	5	Laporan	1.161.000	9.142.723			10.303.723
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan**	**205**	**Layanan**	**676.000**	**5.324.000**			**6.000.000**
				051-Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL, serta Penerbitan SKKL	85	Layanan	275.000	2.162.500			2.437.500
				052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	70	Layanan	202.000	1.594.000			1.796.000
				053-Penilaian audit lingkungan hidup	20	Layanan	71.000	556.500,00			627.500
				054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	30	Laporan	98.000	772.000			870.000
				055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1	Laporan	30.000	239.000			269.000
		06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL**	**22**	**Layanan**	**1.239.000**	**9.761.000**			**11.000.000**
				051-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.239.000	9.761.000			11.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**5436-Pencegahan Dampak Lingkungan**	**06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan**	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL**	**22**	**Layanan**	**1.859.000**	**14.641.000**			**16.500.000**
				051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	22	Layanan	1.859.000	14.641.000			16.500.000
		05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi**	**40**	**Dokumen**	**1.690.000**	**13.310.000**			**15.000.000**
				051-Validasi KLHS daerah berbasis daya dukung dan daya tampung	40	Dokumen	451.000	3.549.000			4.000.000
				052-Pengembangan dan Penerapan NSPK Penyelenggaran KLHS	1	Rekomendasi Kebijakan	282.000	2.218.000			2.500.000
				053-Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS	1	Laporan	732.000	5.768.000			6.500.000
				054-Pengembangan Sistem Informasi KLHS	1	Laporan	225.000	1.775.000			2.000.000
			PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	**008 -Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**338.000**	**2.662.000**			**3.000.000**
				051 Pengembangan NSPK kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi	1	Rekomendasi Kebijakan	338.000	2.662.000			3.000.000
		07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi**	**2**	**Dokumen**	**45.000**	**355.000**			**400.000**
				051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	2	Dokumen	45.000	355.000			400.000
			UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	**001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan**	**1**	**Sistem Informasi**	**1.012.771**	**7.987.229**			**9.000.000**
				051-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Sistem Informasi	626.771	4.950.229			5.577.000
				052-Dukungan Operasional Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Laporan	386.000	3.037.000			3.423.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**	**02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan**	**30**	**Layanan**	**45.000**	**370.000**			**415.000**
				051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	layanan	32.000	218.000			250.000
				052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1	Layanan	13.000	87.000			100.000
				053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1	Layanan		35.000			35.000
				054-Evaluasi data pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan	1	Layanan		30.000			30.000
			BMA-Data dan Informasi Publik	**001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan**	**1**	**Layanan**	**68.050**	**431.950**			**500.000**
				051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan		190.000			190.000
				052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawsasan hutan	1	Dokumen	68.050	241.950			310.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**	**06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan**	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan**	**30**	**Rekomendasi Kebijakan**	**28.434.106**	**216.103.548**			**244.537.654**
				051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	15	Rekomendasi Kebijakan	8.252.669	177.631.391			185.884.060
				052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	9.387	Km	19.621.437	34.552.157			54.173.594
				053-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	19	Layanan	560.000	3.920.000			4.480.000
		06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**002-Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan**	**34**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.938.579**	**20.865.580**			**22.804.159**
				051 - Penataan batas kawasan hutan (reguler)	2.324	km	562.100	18.342.059			18.904.159
				052-Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	34	▪Rekomendasi Kebijakan	1.376.479	2.523.521			3.900.000
		02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**003- Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan**	**34**	**Rekomendasi Kebijakan**	**949.966**	**11.761.958**			**12.711.924**
				051-Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan	34	Rekomendasi Kebijakan	558.966	8.522.958			9.081.924
				053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka penetapan Kawasan Hutan	34	Layanan	207.000	1.475.000			1.682.000
				055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34	Layanan	125.000	1.179.000			1.304.000
				056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1	Layanan	59.000	585.000			644.000
			PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**004- Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA**	**34**	**Rekomendasi Kebijakan**	**3.801.960**	**7.428.000**			**11.229.960**
				051-Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan▪untuk TORA	34	Rekomendasi Kebijakan	3.738.960	6.991.000			10.729.960
				052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	2	Dokumen	63.000	437.000			500.000
	5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	**03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan**	**2**	**▪Dokumen**	**119.000**	**8.264.344**			**8.383.344**
				051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	50.000	7.783.344			7.833.344
				052-Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen	69.000	481.000			550.000
		06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL**	**307**	**layanan**	**4.124.110**	**13.442.546**			**17.566.656**
				051-Inventarisasi Hutan Nasional	307	Layanan	4.124.110	13.442.546			17.566.656
			BMA-Data dan Informasi Publik	**003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL**	**22**	**layanan**	**514.062**	**1.985.938**			**2.500.000**
				051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22	Layanan	514.062	1.985.938			2.500.000
		03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK**	**1**	**layanan**	**214.000**	**1.486.000**			**1.700.000**
				051-Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	1	Layanan	214.000	1.486.000			1.700.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**	**03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**	**2**	**layanan**	**51.000**	**349.000**			**400.000**
				051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	1	Layanan	38.000	262.000			300.000
				052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	1	Layanan	13.000	87.000			100.000
			BMA-Data dan Informasi Publik	**006-Data dan informasi deforestasi**	**1**	**layanan**	32.000	218.000			**250.000**
				051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1	Layanan	32.000	218.000			250.000
			BMA-Data dan Informasi Publik	**007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan**	**2**	**layanan**	**35.000**	**240.000**			**275.000**
				051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	Layanan	35.000	240.000			275.000
	6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	**04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**002-Penyusunan Rencana kehutanan**	**3**	**Rekomendasi Kebijakan**		**700.000**			**700.000**
				051-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1	Rekomendasi Kebijakan		150.000			150.000
				052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan		400.000			400.000
				053-Pemantauan dan evaluasi Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1	Rekomendasi Kebijakan		150.000			150.000
			ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	**003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)**	**4**	**Rekomendasi Kebijakan**		**550.000**			**550.000**
				051-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4	Rekomendasi Kebijakan		550.000			550.000
		06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	**BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha**	**001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL**	**200**	**Badan usaha**	**1.691.615**	**8.910.388**			**10.602.003**
				051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	200	Badan Usaha	1.691.615	8.910.388			10.602.003
		04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan**	**300**	**layanan**	**250.000**	**2.250.000**			**2.500.000**
				051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300	Layanan	250.000	1.500.000			1.750.000
				052-Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1	Dokumen		750.000			750.000
			BAH-Pelayanan Publik Lainnya	**002-Layanan Reviu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan**	**30**	**layanan**		**350.000**			**350.000**
				051-Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	Layanan		350.000			350.000
			BAH-Pelayanan Publik Lainnya	**003- Layanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka-RTRWP**	**2**	**layanan**		**300.000**			**300.000**
				051-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka-RTRWP	2	Layanan		300.000			300.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**004-Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala**	**12**	**layanan**	**283.000**	**217.000**			**500.000**
				051-Penyusunan/Update Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	Layanan	283.000	217.000			500.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi**	**530**	**Peta**	**250.000**	**162.600**			**412.600**
				051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530	Peta (update)	250.000	162.600			412.600
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**005-Data dan Areal Perhutanan Sosial**	**1**	**Layanan**		**200.000**			**200.000**
				051-Data Areal Perhutanan Sosial	1	Layanan		200.000			200.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5432-Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**	**01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**23**	**Layanan**	**30.474.814**	**13.588.284**			**44.063.098**
				051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan rencana Anggaran	5	Dokumen	10.717.512	412.310			11.129.822
				052-Layanan Pemantaian dan Evaluasi	6	Dokumen	759.476	226.105			985.581
				053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen	748.000	506.558			1.254.558
				056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Dokumen	599.940	676.530			1.276.470
				059- Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	22	Layanan	5.814.950	9.130.083			14.945.033
				060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1	Layanan	300.000	300.000			600.000
				061-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1	Layanan	650.000				650.000
				062-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat RPKHPWPH	1	Layanan	788.500	11.500			800.000
				063-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDKWS	1	Layanan	600.000				600.000
				064-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK	1	Layanan	600.000				600.000
				065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	589.748	424.000			1.013.748
				066-Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan	1.395.000	105.000			1.500.000
				067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan	757.000	388.850			1.145.850
				068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan	787.600	174.409			962.009
				069-Layanan Kearsipan	1	Layanan	452.920	305.456			758.376
				070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan	203.980	230.020			434.000
				071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan	227.903	256.997			484.900
				072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan	3.256.685	66.066			3.322.751
				073-Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1	Layanan	1.225.600	374.400			1.600.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5432-Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**	**01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**994-Layanan Perkantoran**	**23**	**Layanan**	**210.084.352**	**-**			**210.084.352**
				001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan	160.170.891				160.170.891
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan	49.913.461				49.913.461
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**712**	**Unit**	**3.833.710**	**10.992.661**			**14.826.371**
				051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	46	Unit	2.662.400	2.684.911			5.347.311
				052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	128	Unit	125.500	4.405.837			4.531.337
				053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	538	Unit	1.045.810	3.901.913			4.947.723
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**971-Layanan Prasarana Internal**	**23**	**Unit**	**738.873**	**16.074.022**			**16.812.895**
				051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	23	Unit	738.873	16.074.022			16.812.895
07-BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK											**278.213.848**
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	**6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**	**10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**	**BAB - Pelayanan Publik Kepada Lembaga**	**001 - Layanan Pengendalian Penerapan Standar Ketahanan Bencana dan Perubahan Ikim**	**40**	**Lembaga**	**2.400.000**				**2.400.000**
				051-Pengendalian, penilaian, pengujian dan validasi standar lembaga pelaksana standar instrumen penanganan bencana, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim	40	Lembaga	2.400.000				2.400.000
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**001-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**	**7**	**NSPK**	**1.763.915**				**1.763.915**
				051 - Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	7	NSPK	910.000				910.000
				052 - Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	7	Laporan	490.000				490.000
				053 - Koordinasi, interkoneksi dan bimbingan teknis	1	Kegiatan	363.915				363.915
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**002-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di IKN**	**6**	**NSPK**	**1.200.000**				**1.200.000**
				051 - Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	6	NSPK	780.000				780.000
				052 - Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	6	Laporan	420.000				420.000
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**003-Standar Instrumen Folu Net Sink**	**3**	**NSPK**	**600.000**				**600.000**
				051 - Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	3	NSPK	390.000				390.000
				052 - Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	3	Laporan	210.000				210.000
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**001-Layanan Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK**	**2**	**Layanan**	**140.000**				**140.000**
				051-Layanan Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK	2	Layanan	140.000				140.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup**	**07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup**	**BAB - Pelayanan Publik Kepada Lembaga**	**001 - Layanan Pengendalian Penerapan Standar Kualitas Lingkungan Hidup**	**40**	**Lembaga**	**2.400.000**				**2.400.000**
				051-Pengendalian, penilaian, pengujian dan validasi standar lembaga pelaksana standar instrumen kualitas lingkungan hidup	40	Lembaga	2.400.000				2.400.000
			CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001- Layanan Laboratorium lingkungan rujukan nasional dan dioxin furan**	**1**	**unit**	**98.774**	**1.327.795**			**1.426.569**
				051-Layanan laboratorium lingkungan rujukan nasional dan dioxin furan	1	Unit	98.774	1.327.795			1.426.569
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup**	**10**	**NSPK**	**2.910.000**				**2.910.000**
				051 - Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	10	NSPK	1.300.000				1.300.000
				052 - Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	10	Laporan	700.000				700.000
				053 - Koordinasi, interkoneksi dan bimbingan teknis	1	Kegiatan	910.000				910.000
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)**	**5**	**NSPK**	**1.000.000**				**1.000.000**
				051-Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha di IKN	5	NSPK	650.000				650.000
				052-Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	5	Laporan	350.000				350.000
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**003-Standar Instrumen Circular Ekonomi**	**3**	**NSPK**	**600.000**				**600.000**
				051-Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	3	NSPK	390.000				390.000
				052-Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	3	Laporan	210.000				210.000
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan**	**12**	**Lembaga**	**800.000**	**400.000**			**1.200.000**
				051-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan di daerah	12	Lembaga	800.000	400.000			1.200.000
			RDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001- Layanan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan**	**1**	**Unit**		**1.000.000**			**1.000.000**
				051-Layanan dan Pengembangan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan	1	Unit		1.000.000			1.000.000
	6760-Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**08-Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan**	**375**	**Lembaga**	**1.075.000**				**1.075.000**
				051 - Registrasi dan Pemantauan Lembaga yang Menerapkan Standar	375	Lembaga	1.075.000				1.075.000
			PEA-Koordinasi	**001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK**	**12**	**Kegiatan**	**480.000**				**480.000**
				051-Sosialisasi	12	Laporan	240.000				240.000
				052-Diseminasi	12	Kegiatan	240.000				240.000
			PEA-Koordinasi	**002-Layanan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**2**	**Kegiatan**	**300.000**				**300.000**
				051-Penerapan standar instrumen LHK	2	Kegiatan	150.000				150.000
				052-Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi	2	Laporan	150.000				150.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**	**09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**	**BAB- Pelayanan Publik Kepada Lembaga**	**001- Layanan Pengendalian Penerapan Standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**	**160**	**Lembaga**		**9.600.000**			**9.600.000**
				051-Pengendalian, penilaian, pengujian dan validasi standar lembaga pelaksana standar instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	160	Lembaga		9.600.000			9.600.000
			BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Protection of Mangrove Forest**	**1**	**Lembaga**			**18.500.000**		**18.500.000**
				051- Pelaksanaan FP VI : Protection of Mangrove Forest	1	Lembaga			18.500.000		18.500.000
			CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-KHDTK sebagai laboratorium lapangan**	**38**	**Unit**	**9.000.000**	**4.960.000**			**13.960.000**
				051-Pengelolaan KHDTK	38	Unit		3.800.000			3.800.000
				052 - Pembinaan KHDTK (Pertimbangan teknis usulan KHDTK baru/Kerjasama, dll)	10	Layanan	9.000.000	1.160.000			10.160.000
			CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**002-Layanan laboratorium**	**8**	**Unit**		**1.700.000**			**1.700.000**
				051-Layanan laboratorium kehutanan	7	Unit		700.000			700.000
				052 - Layanan Laboratorium Sutera Alam Indonesia	1	Unit		1.000.000			1.000.000
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Perijinan Berusaha**	**5**	**NSPK**	**1.000.000**	**1.100.000**			**2.100.000**
				051-Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	5	NSPK	650.000				650.000
				052 - Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	5	Laporan	350.000				350.000
				053 - Koordinasi, interkoneksi dan bimbingan teknis	1	Kegiatan		1.100.000			1.100.000
			PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	**002-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan DI IKN**	**10**	**NSPK**	**256.312**	**1.743.688**			**2.000.000**
				051-Penyusunan standar, produk, sistem, prosedur, uji dan usaha	10	NSPK	256.312	1.043.688			1.300.000
				052- Pengembangan (sistem penerapan, sistem standar, standar instrumen)	10	Laporan		700.000			700.000
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**001-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK**	**10**	**Dokumen**		**3.000.000**			**3.000.000**
				051-Penguatan Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	10	Dokumen		3.000.000			3.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**	**09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	001-Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk penguatan regulasi SDA dan LH	1	Dokumen		258.102			258.102
				051-Pemanfaatan Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) oleh stakeholder	1	Dokumen		258.102			258.102
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**6758-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK**	**01-Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**17**	**Layanan**	20.000.000				**20.000.000**
				051-Perencanaan Program dan Kegiatan	17	Layanan	5.848.257				5.848.257
				052-Perencanaan Anggaran	17	Layanan	5.446.820				5.446.820
				053-Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	17	Layanan	1.520.000				1.520.000
				054-Administrasi Keuangan	17	Layanan	1.109.423				1.109.423
				055-Adminstrasi Tata Usaha Rumah Tangga dan BMN	17	Layanan	1.302.500				1.302.500
				056-Administrasi Kerjasama Teknik	17	Layanan	1.545.000				1.545.000
				057-Pelaksanaan Urusan Kepegawaian	17	Layanan	1.135.000				1.135.000
				058-Pengelolaan Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	17	Layanan	1.325.000				1.325.000
				059-Penyiapan RPP dan Advokasi Hukum	1	Layanan	368.000				368.000
				060-Pelaksanaan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Reformasi Birokrasi	1	Layanan	400.000				400.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**6758-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK**	**01-Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**994-Layanan Perkantoran**	**17**	**Layanan**	**188.090.278**				**188.090.278**
				001-Gaji dan Tunjangan	17	Layanan	132.564.642				132.564.642
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	17	Layanan	55.525.636				55.525.636
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**90**	**Unit**	**509.984**				**509.984**
				051-Pengadaan Peralatan dan mesin	40	Unit	309.984				309.984
				052-Peralatan dan fasilitas perkantoran	50	Unit	200.000				200.000
08-BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM											**377.617.591**
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	**6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK**	**07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK**	**CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat**	**7**	**Unit**	**350.000**	**2.940.000**			**3.290.000**
				051-Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran Kediklatan	7	Unit	350.000	2.940.000			3.290.000
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	**001-Layanan Pengelolaan KHDTK**	**1**	**Layanan**	**50.000**	**250.000**			**300.000**
				051-Layanan Pengelolaan KHDTK	1	Layanan	50.000	250.000			300.000
			DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	**001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan**	**4.335**	**Orang**	**1.300.000**	**26.797.405**			**28.097.405**
				051-Diklat Teknis dan Fungsional	4.335	Orang	1.200.000	26.096.825			27.296.825
				052-Pendukung Kediklatan	8	Dokumen	100.000	700.580			800.580

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	**6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK**	**07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK**	**EBC-Layanan Manajemen SDM Internal**	**001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK**	**10**	**Orang**	**50.000**	**1.695.850**			**1.745.850**
				051-Pendidikan program S2 dalam negeri	7	Orang		861.250			861.250
				052-Pendidikan program S3 dalam negeri	3	Orang		526.000			526.000
				053-Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	1	Dokumen	50.000	308.600			358.600
			SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	**001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan**	**1.240**	**Orang**	**560.000**	**2.495.000**			**3.055.000**
				051-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	1.240	Orang	560.000	1.920.000			2.480.000
				052-Pendukung Kediklatan	8	Dokumen		575.000			575.000
			SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	**002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha**	**7.840**	**Orang**	**560.000**	**15.870.000**			**16.430.000**
				051-Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	7.840	Orang	560.000	15.120.000			15.680.000
				052-Pendukung Kediklatan	8	Dokumen		750.000			750.000
	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	**04-SMK Kehutanan**	**RAA-Sarana Bidang Pendidikan**	**001-Pengadaan Peralatan Sekolah**	**5**	**Paket**	**6.131.465**				**6.131.465**
				051-Pengadaan Peralatan Sekolah	5	Paket	6.131.465				6.131.465
			RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	**001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)**	**1**	**Paket**				**50.273.160**	**50.273.160**
				051-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1	Paket				50.273.160	50.273.160
			RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	**002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah**	**4**	**unit**	**6.909.821**				**6.909.821**
				051-Renovasi Gedung/ Bangunan Sekolah	4	Unit	6.909.821				6.909.821
			RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	**003 - Pembangunan SArana Prasarana Sekolah (RM)**	**1**	**Unit**	**1.025.000**				**1.025.000**
				051-Pembangunan gedung/Prasarana Sekolah	1	Unit	1.025.000				1.025.000
			SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	**001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat**	**491**	**Orang**	**59.213.780**				**59.213.780**
				051-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	491	Orang	46.996.440				46.996.440
				052-Penetapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015	5	Dokumen	290.000				290.000
				053-Dokumen Perencanaan dan Pembinaan	5	Dokumen	7.305.805				7.305.805
				054-Publikasi Pendidikan	5	Dokumen	660.000				660.000
				055-Kerjasama Pendidikan	5	Dokumen	250.000				250.000
				056-Operasional bakti alumni di bidang LHK	5	Laporan	3.711.535				3.711.535

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	**6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan**	**04-SMK Kehutanan**	**BAH - Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan**	**1**	**Layanan**	**2.719.934**				**2.719.934**
				051-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	1	Layanan	2.719.934				2.719.934
	6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**720**	**Orang**	**180.000**	**2.265.000**			**2.445.000**
				051-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	720	Orang	180.000	1.910.000			2.090.000
				052-Pembinaan dan pendampingan kader wirausaha kreatif	8	Laporan		355.000			355.000
		08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**3.350**	**Lembaga**	**155.000**	**3.695.000**			**3.850.000**
				051-Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	3.350	Lembaga	155.000	3.695.000			3.850.000
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**18**	**Lembaga**	**125.000**	**415.000**			**540.000**
				051-Pembinaan Gerakan Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	18	Lembaga	125.000	415.000			540.000
	6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	**02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK**	**5**	**Dokumen**	**100.000**	**920.000**			**1.020.000**
				051-Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	Dokumen	100.000	920.000			1.020.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK**	**5**	**Dokumen**	**100.000**	**1.070.000**			**1.170.000**
				051-Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5	Dokumen	100.000	1.070.000			1.170.000
			EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	**001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK**	**1.500**	**Orang**	**170.000**	**1.748.000**			**1.918.000**
				051-Pengujian Kompetensi / Sertifikasi SDM LHK	1.500	Orang	100.000	1.250.000			1.350.000
				052-Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	1	Dokumen	70.000	498.000			568.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5444-Peningkatan Penyuluhan**	**06-Pusat Penyuluhan**	**QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**	**001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal**	**1.000**	**Orang**	**2.400.000**				**2.400.000**
				051-Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	1.000	Orang	2.000.000				2.000.000
				052-Metode dan Materi Penyuluhan	1	Dokumen	400.000				400.000
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-KTH Mandiri**	**100**	**Kelompok Masyarakat**	**1.600.000**				**1.600.000**
				051-Pembentukan KTH Mandiri	50	Kelompok Masyarakat	1.000.000				1.000.000
				052-Pembinaan KTH Mandiri	50	Kelompok Masyarakat	300.000				300.000
				053-Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1	Dokumen	300.000				300.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5444-Peningkatan Penyuluhan**	**06-Pusat Penyuluhan**	**QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)**	**50**	**Kelompok Masyarakat**	**1.538.607**				**1.538.607**
				051-Pembentukan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	30	Kelompok Masyarakat	938.607				938.607
				052-Pengembangan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	20	Kelompok Masyarakat	600.000				600.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**	**01-Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**12**	**Layanan**	**17.284.560**				**17.284.560**
				051-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	4.870.000				4.870.000
				052-Layanan Dukungan Manajemen Satker	11	Layanan	12.414.560				12.414.560
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**15**	**Layanan**	**160.128.389**				**160.128.389**
				001- Gaji dan Tunjangan	15	Layanan	113.206.294				113.206.294
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15	Layanan	46.922.095				46.922.095
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**11**	**Paket**	**3.781.620**				**3.781.620**
				051-Pengadaan Sarana Fasilitas Perkantoran	11	Paket	3.781.620				3.781.620
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**971-Layanan Prasarana Internal**	**3**	**Paket**	**750.000**				**750.000**
				051-Renovasi Gedung dan Bangunan	3	Paket	**750.000**				**750.000**
09-DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN											**313.008.183**
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial**	**02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial**	**3**	**Dokumen**	**700.000**				**700.000**
				051-Penyusunan Perencanaan	1	Dokumen	350.000				350.000
				052-Evaluasi dan Pelaporan	2	Dokumen	350.000				350.000
			BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**002-Strengthening Social Forestry in Indonesia Project**	**4**	**Kelompok Masyarakat**			**49.000.000**		**49.000.000**
				051-Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mendukung Perhutanan Sosial	4	Kelompok Masyarakat			9.947.500		9.947.500
				052-Penguatan Kemampuan Masyarakat mengelola SDH melalui Perhutanan Sosial	4	Kelompok Masyarakat			36.270.100		36.270.100
				053-Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi	4	Kelompok Masyarakat			2.782.400		2.782.400
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial**	**300**	**Kelompok Masyarakat**	**6.165.228**	**6.645.696**			**12.810.924**
				051-Penyiapan Perhutanan Sosial Tingkat Tapak	300	Kelompok Masyarakat	943.278	2.900.000			3.843.278
				052-Monitoring izin Perhutanan Sosial	6	Kegiatan	1.281.092				1.281.092
				053-Verifikasi Teknis Perhutanan Sosial	300	Kelompok Masyarakat	3.940.858	3.745.696			7.686.554

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial**	**02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial**	**QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat**	**300**	**Kelompok Masyarakat**	**2.994.000**	**2.496.000**			**5.490.000**
				051-Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat	150	Kelompok Masyarakat	1.497.000	1.248.000			2.745.000
				052-Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan	150	Kelompok Masyarakat	1.497.000	1.248.000			2.745.000
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi**	**58**	**Kelompok Masyarakat**	**699.000**	**572.000**			**1.271.000**
				051-Evaluasi izin akses Perhutanan Sosial	58	Kelompok Masyarakat	699.000	572.000			1.271.000
	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	**05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat**	**3**	**Dokumen**	**700.000**				**700.000**
				051-Penyusunan Perencanaan	2	Dokumen	350.000				350.000
				052-Evaluasi dan Pelaporan	1	Dokumen	350.000				350.000
			BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001- Forest Programme V - Social Forestry Support Programme**	**4**	**Kelompok Masyarakat**			**35.900.000**		**35.900.000**
				051-Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan terkait Perhutanan Sosial	1	Kegiatan			3.045.000		3.045.000
				052-Implementasi Pengembangan Model Pengelolaan Hutan Berkelanjutan secara finansial dan tahan iklim oleh masyarakat lokal (setempat)	4	Kelompok Masyarakat			23.095.000		23.095.000
				053-Harmonisasi Kebijakan Perhutanan Sosial dengan Instansi terkait lainnya	1	Kegiatan			400.000		400.000
				054-Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi FP V	1	Kegiatan			7.740.000		7.740.000
				055-Kontijensi / Kegiatan Pendukung	1	Kegiatan			1.620.000		1.620.000
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan**	**22**	**Layanan**	**919.000**	**995.000**			**1.914.000**
				051-Identifikasi Potensi Konflik Tenurial Kawasan Hutan	22	Layanan	308.000	330.000			638.000
				052-Pemetaan/assesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan	22	Layanan	611.000	665.000			1.276.000
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penangananya**	**25**	**Layanan**	**1.368.000**	**1.482.000**			**2.850.000**
				051-Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	25	Layanan	1.368.000	1.482.000			2.850.000
			QAH-Pelayanan Publik Lainnya	**003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak**	**18**	**Layanan**	**1.452.000**	**1.632.000**			**3.084.000**
				051-Percepatan Penetapan Hutan Adat dan Data Kearifan Lokal	1	Kegiatan	624.000	676.000			1.300.000
				052-Penetapan Usulan HA dan Hutan Hak	18	Layanan	828.000	956.000			1.784.000
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat**	**14**	**Kelompok Masyarakat**	**563.987**	**549.000**			**1.112.987**
				051-Identifikasi dan Inventarisasi MHA, HA, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional	14	Kelompok Masyarakat	346.000	314.000			660.000
				052-Fasilitasi Etnografi MHA, Peta Hutan Adat dan Usulan Penetapan Hutan Adat	14	Kelompok Masyarakat	217.987	235.000			452.987

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial**	**06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial**	**3**	**Dokumen**	**2.317.000**	**1.149.000**			**3.466.000**
				051-Penyusunan Perencanaan	1	Dokumen	100.000				100.000
				052-Pengelolaan Data dan Informasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	1	Dokumen	100.000				100.000
				053-Koordinasi Pengembangan Usaha	1	Dokumen	150.000				150.000
				054-Penataan Usaha dan Pengelolaan BMN	1	Kegiatan	150.000				150.000
				055-Pembinaan Pengendalian	1	Kegiatan	200.000				200.000
				056-Supervisi dan Asistensi RKPS/RKT	1	Kegiatan	368.000	398.000			766.000
				057-Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perhutanan Sosial	1	Kegiatan	492.000	158.000			650.000
				058-Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Kelas KUPS	1	Kegiatan	418.000	182.000			600.000
				059-Penyusunan Nilai Transaksi Ekonomi KUPS	1	Kegiatan	123.000	177.000			300.000
				060-Penyusunan dan Monev Implementasi IAD	1	Kegiatan	96.000	104.000			200.000
				061-Verifikasi Penetapan Kelas Platinum	1	Kegiatan	120.000	130.000			250.000
			BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**003-Forest Programme III - Sulawesi Programme**	**1**	**Kelompok Masyarakat**			**2.697.680**		**2.697.680**
				051-Pelaksanaan Pendampingan Kelompok Masyarakat	1	Kelompok Masyarakat			1.000.000		1.000.000
				052-Fasilitasi Peningkatan Produktifitas Areal dan Nilai Produk Kelompok Mayarakat	1	Kelompok Masyarakat			1.000.000		1.000.000
				053-Monitoring dan Evaluasi	1	Kegiatan			697.680		697.680
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan**	**383**	**Kelompok Masyarakat**	**1.936.000**	**2.528.000**			**4.464.000**
				051-Penyusunan dokumen RKPS/RKT dan Sepervisi/Asistensi RKPS/RKT	383	Kelompok Masyarakat	908.000	1.007.000			1.915.000
				052-Pembentukan KUPS	383	Kelompok Masyarakat	172.000	211.000			383.000
				053-Monitoring dan Evaluasi KPS/KUPS	1	Kegiatan	356.000	410.000			766.000
				054-Pembinaan Pengelolaan PS	1	Kegiatan	500.000	900.000			1.400.000
			QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	**002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum**	**34**	**Kelompok Masyarakat**	**2.256.000**	**3.604.000**			**5.860.000**
				051-Fasilitasi Peningkatan Produktifitas Areal dan Nilai Produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	34	Kelompok Masyarakat	631.920	1.071.000			1.702.920
				052-Fasilitasi Penguatan Kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	34	Kelompok Masyarakat	629.920	1.073.000			1.702.920
				053-Masterplan IAD	5	Kegiatan	494.160	560.000			1.054.160
				054-Pengawasan Pengelolaan PS	1	Kegiatan	500.000	900.000			1.400.000
			QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	**001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan**	**653**	**Kelompok Masyarakat**	**36.735.000**				**36.735.000**
				051-Bang Pesona	580	Kelompok Masyarakat	31.900.000				31.900.000
				052-Alat Ekonomi Produktif	73	Kelompok Masyarakat	4.035.000				4.035.000
				053-Bimbingan Teknis	9	Kegiatan	800.000				800.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6752-Kemitraan Lingkungan**	**04-Direktorat Kemitraan Lingkungan**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Kemitraan Lingkungan**	**3**	**Dokumen**	**1.346.920**	**701.000**			**2.047.920**
				051-Penyusunan Perencanaan	2	Dokumen	642.625				642.625
				052-Evaluasi dan Pelaporan	1	Dokumen	57.375				57.375
				053-Dukungan administrasi Pendamping PS	1	Dokumen	646.920	701.000			1.347.920
			PEE-Kemitraan	**001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan**	**40**	**Surat Kesepakatan**	**1.485.000**	**1.609.000**			**3.094.000**
				051-Kemitraan Nasional Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	14	Surat Kesepakatan	878.400	951.000			1.829.400
				052-Kemitraan Regional Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	26	Surat Kesepakatan	606.600	658.000			1.264.600
			QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	**001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial**	**1.600**	**Orang**	**17.162.480**	**18.689.600**			**35.852.080**
				051-Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Program Perhutanan Sosial	1	Kegiatan	422.400	457.600			880.000
				052-Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Di Kawasan Perhutanana Sosial (Insentif, Transport, Bimbingan Teknis, Monev, Pelaporan)	1.600	Orang	15.972.080	17.400.000			33.372.080
				053-Dukungan administrasi BPSKL	1	Kegiatan	768.000	832.000			1.600.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**	**01-Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**7**	**Layanan**	**15.424.021**				**15.424.021**
				051-Layanan dukungan manajemen Eselon I	1	Layanan	11.415.041				11.415.041
				052-Layanan dukungan manajemen Satker	6	Layanan	4.008.980				4.008.980
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**7**	**Layanan**	**82.084.571**				**82.084.571**
				001-Gaji dan tunjangan	7	Layanan	46.005.729				46.005.729
				002-Operasional dan pemeliharaan kantor	7	Layanan	36.078.842				36.078.842
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**7**	**Layanan**	**6.450.000**				**6.450.000**
				051-Layanan sarana internal	7	Layanan	6.450.000				6.450.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
10-DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											**504.471.718**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**	**03-Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**	**QCE-Penanganan Perkara**	**001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani**	**45**	**Perkara**	**3.000.000**	**14.240.000**			**17.240.000**
				051-Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	32	Dokumen	300.000	3.500.000			3.800.000
				052-Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	32	Dokumen	300.000	600.000			900.000
				053-Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	28	Perkara	600.000	3.500.000			4.100.000
				054-Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	4	Perkara	300.000	1.500.000			1.800.000
				055-Pelaksanaan Persidangan	12	Dokumen	300.000	900.000			1.200.000
				056-Upaya Hukum	13	Perkara	600.000	2.500.000			3.100.000
				057- Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	2	Dokumen	600.000	1.000.000			1.600.000
				058-Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1	Layanan		740.000			740.000
	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	**04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif**	**DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup**	**001-PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**250**	**Orang**	**500.000**	**1.500.000**			**2.000.000**
				054-Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	250	Orang	500.000	1.500.000			2.000.000
				055-Pembentukan PPLH Bidang LHK							
			QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	**001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK**	**800**	**Badan Usaha**	**3.150.000**	**27.600.000**			**30.750.000**
				051-Penanganan Pengaduan Perusahaan	400	Badan Usaha	800.000	7.000.000			7.800.000
				052-Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	600	Pengaduan	800.000	5.000.000			5.800.000
				053-Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400	Badan Usaha	950.000	12.000.000			12.950.000
				054-Sanksi Administrasi	200	Sanksi	600.000	2.000.000			2.600.000
				055-Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1	Layanan		1.600.000			1.600.000
	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana**	**DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup**	**001-PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**200**	**Orang**	**400.000**	**3.000.000**			**3.400.000**
				058-Peningkatan PPNS LHK	170	Orang		2.000.000			2.000.000
				059-Pembentukan PPNS LHK	30	Orang	400.000	1.000.000			1.400.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana**	**QCE-Penanganan Perkara**	**001-Kasus Tindak Pidana LHK P21**	**180**	**Perkara**	**7.734.694**	**49.380.000**			**57.114.694**
				051-Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	200	Dokumen	2.800.000	18.000.000			20.800.000
				052-Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	180	Perkara	3.200.000	22.000.000			25.200.000
				053-Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	20	Laporan	814.694	5.000.000			5.814.694
				054-Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	15	Kegiatan	500.000	3.000.000			3.500.000
				055-Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	6	Layanan	420.000	1.380.000			1.800.000
			QCE-Penanganan Perkara	**002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan**	**150**	**Perkara**		**14.400.000**			**14.400.000**
				051-Pengumpulan bahan dan keterangan atas penggunaan kawasan hutan tanpa izin	150	Dokumen		4.400.000			4.400.000
				052-Penyusunan penetapan denda administratif	150	Perkara		6.000.000			6.000.000
				053- Verifikasi lapangan atas ketaatan terhadap penerapan denda administratif	45	Dokumen		4.000.000			4.000.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan**	**02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan**	**DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup**	**001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**300**	**Orang**	**1.000.000**	**2.000.000**			**3.000.000**
				051-Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	300	Orang	1.000.000	2.000.000			3.000.000
			QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	**001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan**	**100**	**Operasi**	**20.825.026**	**18.745.774**			**39.570.800**
				051-Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	200	Dokumen	5.244.226	7.745.774			12.990.000
				052-Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	98	Operasi	14.686.200	10.000.000			24.686.200
				053-Operasi Penyelamatan SDA	2	Operasi	894.600	1.000.000			1.894.600
			QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	**002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal**	**80**	**Operasi**	**14.656.539**	**21.000.000**			**35.656.539**
				051-Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal	160	Dokumen	3.392.000	7.000.000			10.392.000
				053-Sosialisasi dan kerjasama Pencegahan dan Pengamanan LHK	11	Kegiatan	500.000	500.000			1.000.000
				054-Operasi Pembalakan Liar	40	Operasi	4.498.000	6.000.000			10.498.000
				055-Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	40	Operasi	3.628.810	5.000.000			8.628.810
				057-Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	6	Kegiatan	2.637.729	2.500.000			5.137.729

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**01-Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**6**	**Layanan**	**22.209.685**	**11.541.382**			**33.751.067**
				053-Layanan Dukungan Manajemen Satker	5	Layanan	6.584.508	3.315.492			9.900.000
				054-Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit	5	Layanan	3.000.000	500.000			
				0051-Layanan Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik	1	Layanan	5.888.277	5.112.790			11.001.067
				052-Layanan Keuangan, Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	1	Layanan	6.736.900	2.613.100			9.350.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**6**	**Layanan**	**200.844.508**				**200.844.508**
				001-Gaji dan Tunjangan	6	Layanan	168.766.717				168.766.717
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	10	Layanan	32.077.791				32.077.791
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**6**	**Unit**	**6.065.492**	**60.678.618**			**66.744.110**
				051-Pengadaan Kendaraan Bermotor	13	Unit		4.746.261			4.746.261
				052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5	Paket	1.600.000	4.376.171			5.976.171
				053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	6	Paket	50.000	6.727.686			6.777.686
				054-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	6	Paket	4.415.492	44.828.500			49.243.992
11-DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM											**355.900.941**
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	**5446-Adaptasi Perubahan Iklim**	**02-Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim**	**BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**001-Kampung Iklim**	**222**	**Kelompok Masyarakat**	**504.077**	**592.000**			**2.096.077**
				051-Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas, Verifikasi Lokasi, dan Pemberian Penghargaan ProKlim	222	Kelompok Masyarakat	504.077	552.000			2.056.077
				052-Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Adaptasi	1	Kegiatan		40.000			40.000
			BMA-Data dan Informasi Publik	**001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim**	**1**	**Layanan**	**400.000**	**458.000**			**858.000**
				051-Penyediaan data dan informasi Kerentanan dan risiko perubahan iklim	1	Layanan	400.000	458.000			858.000
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	**5447-Mitigasi Perubahan Iklim**	**03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim**	**ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim**	**001-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO) dan HFC**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**276.000**				**276.000**
				051-Penyusunan kebijakan dan perangkat pengendalian BPO dan HFC	1	Rekomendasi Kebijakan	276.000				276.000
			BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Lembaga yang difasilitasi implementasi NDC bidang lingkungan hidup dan kehutanan**	**6**	**Lembaga**	**492.000**	**75.000**			**567.000**
				051-Pengembangan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim	5	Lembaga	350.000	50.000			400.000
				052-Implementasi Perangkat REDD plus pada Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD plus	1	Lembaga	142.000	25.000			167.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	**5447-Mitigasi Perubahan Iklim**	**03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim**	**BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**	**002-Lembaga yang mengimplementasikan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon**	**1**	**Lembaga**	**80.000**	**600.000**			**680.000**
				051-Peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi lembaga yang mengimplementasikan kebijakan pengendalian konsumsi BPO dan HFC	1	Lembaga	80.000	600.000			680.000
			BMA-Data dan Informasi Publik	**001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tervalidasi**	**6**	**Layanan**	**342.000**	**100.000**			**442.000**
				051-Koordinasi, Pemantauan dan validasi capaian aktual penurunan emisi GRK dalam rangka pemenuhan NDC	6	Layanan	342.000	100.000			442.000
			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	**001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga melalui Pre Investment Bio Carbon Fund For Initiative Sustainable Forest Landscape**	**5**	**Lembaga**			**8.625.000**		**8.625.000**
				051-Strengthening, Policy and institutional	5	Lembaga			3.347.000		3.347.000
				052-Project Management, Monitoring and Evaluation and Reporting	1	Dokumen			5.278.000		5.278.000
	5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	**04-Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan**	**2**	**Layanan**	**750.000**	**1.650.000**			**2.400.000**
				051-Data Inventarisasi GRK di 5 Sektor	**1**	Layanan	265.500	339.750			.605.250
				052-Data Verifikasi dan Registri yang termutakhirkan di 5 sektor	**1**	Layanan	484.500	1.310.250			1.794.750
	5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	**06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**	**QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**	**001-Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan**	**2.175**	**Kelompok Masyarakat**	**79.674.420**	**41.502.890**			**121.177.310**
				051-Penguatan Pencegahan Karhutla dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Karhutla	2.175	Kelompok Masyarakat	20.399.420	36.302.890			56.702.310
				052-Penyadartahuan Pencegahan Karhutla	28	Kegiatan	3.350.000	750.000			4.100.000
				053-Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalkarhutla	39	Paket	45.200.000				45.200.000
				054-Peningkatan Kapasitas dan Kinerja, Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla	63	Kegiatan	10.725.000	4.450.000			15.175.000
			QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	**001-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat**	**1.200**	**operasi**	**6.100.000**	**6.900.000**			**13.000.000**
				051-Peringatan dan Deteksi Dini	3	Kegiatan	1.250.000	1.950.000			3.200.000
				052-Pelaksanaan Pemadaman Darat	1.200	Operasi	4.850.000	4.950.000			9.800.000
			QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	**002-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman dari Udara**	**50**	**operasi**		**11.000.000**			**11.000.000**
				051-Pelaksanaan Pemadaman dari Udara, Pemantauan dari Udara dan/atau Evakuasi/Penyelamatan melalui Udara	50	operasi		11.000.000			11.000.000
	6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	**05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional**	**ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim**	**001-Rekomendasi Kebijakan Dukungan Implementasi NDC**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**300.000**	**400.000**			**700.000**
				051-Perumusan rekomendasi kebijakan tata kelola nilai ekonomi karbon	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000	400.000			550.000
				052-Perumusan Rekomendasi Kebijakan di bidang sains dan teknologi rendah karbon	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000				150.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	**6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional**	**05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional**	**ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim**	**002-Rekomendasi Kebijakan Perundingan Perubahan Iklim**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**305.000**	**500.000**			**805.000**
				051-Perumusan kertas posisi perundingan perubahan iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	305.000	500.000			805.000
			BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	**001-Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang sains dan informasi teknologi rendah karbon**	**350**	**Orang**	**145.000**	**455.000**			**600.000**
				051-Bimbingan teknis sains dan teknologi rendah karbon	350	Orang	145.000	455.000			600.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim**	**01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**6**	**Layanan**	**9.455.466**				**9.455.466**
				051-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	6	Layanan	7.055.466				7.055.466
				052-Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT Ditjen PPI	5	Layanan	2.400.000				2.400.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**6**	**Layanan**	**182.069.088**				**182.069.088**
				001-Gaji dan Tunjangan	6	Layanan	61.644.186				61.644.186
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6	Layanan	120.424.902				120.424.902
			EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**	**105**	**Unit**	**1.150.000**				**1.150.000**
				051-Layanan Sarana Internal	105	Unit	1.150.000				1.150.000
12-DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN											**275.700.789**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**5456-Pengelolaan Sampah**	**09-Direktorat Pengurangan Sampah**	**FAB-Sistem Informasi Pemerintahan**	**001- Sistem Informasi Pengurangan Sampah**	**2**	**Sistem Informasi**	**750.000**				**750.000**
				051-Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengurangan Sampah	2	Sistem Informasi	250.000				250.000
				052- Pemutakhiran Sistem Informasi Pengurangan Sampah	1	Layanan	500.000				500.000
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	**001-Kabupaten/kota yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi target pengurangan sampah dalam Jakstrada**	**80**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**3.020.000**				**3.020.000**
				051-Pembinaan dan Pendampingan Kab/Kota untuk memenuhi target pengurangan sampah dalam jakstrada	80	Kab/Kota	2.750.000				2.750.000
				052-Monitoring dan Pelaporan Penerapan Jakstrada Pengurangan Sampah	1	Dokumen	270.000				270.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**5456-Pengelolaan Sampah**	**09-Direktorat Pengurangan Sampah**	**QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM**	**001-Bank Sampah yang dibina dan difasilitasi**	**186**	**UMKM**	**6.650.000**				**6.650.000**
				051-Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan	160	UMKM	5.400.000				5.400.000
				052-Fasilitasi Bank Sampah	26	UMKM	1.250.000				1.250.000
			QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**001-Produsen yang difasilitasi dalam Penerapan EPR**	**100**	**Badan usaha**	**1.800.000**				**1.800.000**
				051-Sosialisasi Penerapan EPR dalam Pengurangan Sampah	1	Dokumen	500.000				500.000
				052-Penguatan tata laksana produsen dalam Penerapan EPR	100	Badan Usaha	1.000.000				1.000.000
				053-Monitoring dan Pelaporan Penerapan EPR	1	Dokumen	300.000				300.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**003-Fasilitas Pengurangan Sampah**	**2**	**Unit**	**2.000.000**				**2.000.000**
				051-Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	3	Dokumen	300.000				300.000
				052-Pengadaan Fasilitas Bank Sampah	2	Unit	1.700.000				1.700.000
		08-Direktorat Penanganan Sampah	**CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**001-Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik**	**2**	**Unit**	**5.300.000**				**5.300.000**
				051-Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS)	2	Unit	3.000.000				3.000.000
				052-Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Spesifik	40	Kab/Kota	2.000.000				2.000.000
				053-Penanganan Sampah Spesifik lainnya	1	Dokumen	300.000				300.000
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	**002-Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi target penanganan sampah dalam Jakstrada**	**110**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**6.600.000**				**6.600.000**
				051-Pembinaan dan Pendampingan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan sampah dalam Jakstrada	110	Kab/Kota	6.450.000				6.450.000
				052-Monitoring dan Pelaporan Penerapan Jakstrada Penanganan Sampah	1	Dokumen	150.000				150.000
			FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	**003-Kabupaten/Kota yang dinilai Kinerja Pengelolaan Sampahnya Melalui ADIPURA**	**320**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**12.150.000**				**12.150.000**
				051-Pelaksanaan ADIPURA	320	Kab/Kota	11.650.000				11.650.000
				052-Bimbingan Teknis Perhitungan IKPS	5	Regional	500.000				500.000
			QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	**002-Pelabuhan yang difasilitasi pelaksanaan Proper dalam Pengelolaan Sampah**	**30**	**Badan usaha**	**1.100.000**				**1.100.000**
				051-Pelaksanaan Proper Pelabuhan	30	Badan Usaha	1.100.000				1.100.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5456-Pengelolaan Sampah	08-Direktorat Penanganan Sampah	**RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**001-Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas**	**4**	**Unit**	**24.740.000**				**24.740.000**
				051-Persiapan Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	1	Dokumen	250.000				250.000
				052-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	4	Unit	11.940.000				11.940.000
				053-Fasilitas Penunjang Penanganan Sampah di Lokasi prioritas	1	Paket	11.700.000				11.700.000
				054-Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah di Kab/Kota DAS Citarum	13	Kab/Kota	650.000				650.000
				055-Monitoring dan pelaporan Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	1	Dokumen	200.000				200.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**002-Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional**	**3**	**Unit**	**3.500.000**				**3.500.000**
				051-Persiapan Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman nasional	1	Dokumen	200.000				200.000
				052-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata/TN	3	Unit	2.100.000				2.100.000
				053-Peningkatan kapasitas pengolahan sampah terpadu di Destinasi Wisata/TN/KK	20	Lokasi	1.000.000				1.000.000
				054-Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	1	Dokumen	200.000				200.000
			FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	**002-Sistem Informasi Penanganan Sampah**	**1**	**Sistem Informasi**	**350.000**				**350.000**
				051-Operasional dan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	1	Sistem Informasi	200.000				200.000
				052-Kalkulator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	1	Modul Aplikasi	150.000				150.000
	6755-Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	**ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3**	**4**	**Rekomendasi Kebijakan**	**2.212.406**				**2.212.406**
				051-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	1	Rekomendasi Kebijakan	200.000				200.000
				052-Rekomendasi Kebijakan Penerapan Konvensi Stockholm	1	Rekomendasi Kebijakan	628.600				628.600
				053-Rekomendasi Kebijakan Penerapan Konvensi Minamata	1	Rekomendasi Kebijakan	853.646				853.646
				054-Rekomendasi Kebijakan Penerapan Konvensi Rotterdam	1	Rekomendasi Kebijakan	530.160				530.160
			BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3**	**170**	**Badan Usaha**	**1.250.000**				**1.250.000**
				051-Layanan Registrasi dan Notifikasi B3	140	Badan Usaha	600.000				600.000
				052-Layanan Rekomendasi Pengangkutan B3	30	Badan usaha	350.000				350.000
				053-Inventarisasi Peredaran dan Penggunaan B3	1	Dokumen	150.000				150.000
				054-Inventarisasi Lingkungan Terdampak B3	1	Dokumen	150.000				150.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	6755-Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Fasilitasi dalam rangka pemusnahan Alkes bermerkuri**	**2**	**Layanan**	**9.324.201**				**9.324.201**
				051-Koordinasi Pengumpulan dan Penyimpanan Alkes Bermerkuri	13	Provinsi	650.000				650.000
				052-Pengangkutan dan Pemusnahan Alkes Bermerkuri	2	Layanan	8.474.201				8.474.201
				053-Monitoring dan Pelaporan	1	Dokumen	200.000				200.000
			FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	**001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3**	**1**	**Sistem Informasi**	**900.000**				**900.000**
				051-Pemutakhiran Data dan Informasi pengelolaan B3	1	Dokumen	350.000				350.000
				052-Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan B3	1	Sistem Informasi	550.000				550.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Lokasi PESK**	**5**	**Unit**	10.200.000				**10.200.000**
				051-Koordinasi dan Persiapan Pembangunan	1	Dokumen	600.000				600.000
				052-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Bebas Merkuri di Lokasi PESK	5	Unit	8.500.000				8.500.000
				053-Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan merkuri	5	Lokasi	900.000				900.000
				054-Monitoring dan Pelaporan	1	Dokumen	200.000				200.000
	6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	**ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3**	**3**	**Rekomendasi Kebijakan**	**400.000**				**400.000**
				051-Perumusan naskah akademis	3	Dokumen	100.000				100.000
				052-Koordinasi dengan stakeholder	3	Dokumen	100.000				100.000
				053-Pengambilan contoh uji dan analisa sampel	3	Dokumen	100.000				100.000
				054-Perumusan konsep kebijakan	3	Rekomendasi Kebijakan	100.000				100.000
			BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	**001-Layanan Persetujuan Teknis, Kelayakan Operasi PLB3 dan Rekomendasi**	**400**	**Badan Usaha**	**3.157.594**				**3.157.594**
				051-Telaahan Dokumen Persetujuan Teknis dan Rekomendasi	400	Badan Usaha	400.000				400.000
				052-Verifikasi Lapangan Persetujuan Teknis dan Kelayakan Operasi PLB3	400	Badan Usaha	1.000.000				1.000.000
				053-Penetapan Status, Persetujuan Teknis dan Rekomendasi Limbah B3 dan Limbah Non B3	400	Badan Usaha	663.514				663.514
				054-Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Persetujuan Teknis dan Kelayakan Operasi PLB3	1	Dokumen	580.000				580.000
				055-Kontribusi Keanggotaan Konvensi Basel	1	Dokumen	514.080				514.080

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun**	**07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang mempunyai nilai Ekonomi**	**1**	**Layanan**	**700.000**				**700.000**
				051-Pemutakhiran Data dan Informasi sirkular ekonomi dari pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3	1	Dokumen	300.000				300.000
				052-Peningkatan kapasitas dan sosialisasi pemanfaatan Limbah B3 dan limbah non B3 untuk mendorong sirkular ekonomi	1	Layanan	400.000				400.000
			BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	**001-Industri yang dibina dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3**	**2.800**	**Industri**	**3.600.000**				**3.600.000**
				051-Persiapan dan koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	Dokumen	200.000				200.000
				052-Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	2.800	Industri	3.200.000				3.200.000
				053-Monitoring dan Pelaporan Kegiatan	1	Dokumen	200.000				200.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes**	**9**	**Unit**	**75.785.799**				**75.785.799**
				051-Persiapan dan koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	Dokumen	250.000				250.000
				052-Penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dari fasyankes	8	Unit	74.135.800				74.135.800
				053-Peningkatan kapasitas SDM pengolahan limbah B3 dari fasyankes	3	Paket	1.200.000				1.200.000
				054-Pemantauan dan monitoring Kegiatan	1	Dokumen	199.999				199.999
			RBR-Dukungan Teknis	**001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu**	**2**	**Dokumen**	**2.860.000**				**2.860.000**
				051-Penyusunan Dokumen Lingkungan Proyek KPBU PLB3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu Regional Sumatera	1	Dokumen	2.360.000				2.360.000
				052-Pendampingan penyusunan dokumen Proyek KPBU PLB3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu Regional Kalimantan	1	Dokumen	500.000				500.000
			FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	**001-Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3**	**1**	**Sistem Informasi**	**1.150.000**				**1.150.000**
				051-Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	1	Sistem Informasi	700.000				700.000
				052-Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	4	Modul Aplikasi	450.000				450.000
	6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	**05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun**	**ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemulihan Lahan dan Tanggap Darurat Limbah B3**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**550.000**				**550.000**
				051-Penyusunan Kerangka Regulasi Bidang Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Kedaruratan Limbah B3	2	Rekomendasi Kebijakan	250.000				250.000
				052-Pembahasan Penyusunan Kerangka Regulasi Bidang Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Kedaruratan Limbah B3	2	Rekomendasi Kebijakan	300.000				300.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun**	**05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah**	**17**	**Layanan**	**3.800.000**				**3.800.000**
				051-Perencanaan Kegiatan Kesiapsiagaan dan Pengelolaan Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3	1	Dokumen	300.000				300.000
				052-Penguatan Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3	17	Layanan	2.500.000				2.500.000
				053-Tindak Lanjut dan Evaluasi Kedaruratan	1	Dokumen	500.000				500.000
				054-Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1	Dokumen	500.000				500.000
			CEA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Institusi yang dipulihkan**	**200.000**	**Ton**	**2.000.000**				**2.000.000**
				051-Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1	Dokumen	200.000				200.000
				053-Supervisi Pelaksanaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	200.000	Ton	1.000.000				1.000.000
				054-Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1	Dokumen	700.000				700.000
				055-Pemantauan Pasca Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1	Dokumen	100.000				100.000
			REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Non Institusi yang dipulihkan**	**10.750**	**Ton**	**20.200.000**				**20.200.000**
				051-Persiapan Pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 Non institusi	1	Dokumen	500.000				500.000
				052-Pelaksanaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	10.750	Ton	19.300.000				19.300.000
				053-Monitoring dan Pelaporan	1	Dokumen	400.000				400.000
			FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	**001-Sistem Informasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap darurat Limbah B3**	**1**	**Sistem Informasi**	**350.000**				**350.000**
				051-Pemutakhiran Sistem Informasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap darurat Limbah B3	1	Sistem Informasi	200.000				200.000
				052- Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap darurat Limbah B3	1	Layanan	150.000				150.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**6754-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**01-Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**1**	**Layanan**	**20.787.022**				**20.787.022**
				051-Layanan Program, Evaluasi, dan Kehumasan	1	Dokumen	4.150.000				4.150.000
				052-Layanan Keuangan dan Umum	1	Dokumen	4.187.022				4.187.022
				053-Layanan Hukum dan Kerjasama Teknis	1	Dokumen	3.350.000				3.350.000
				054-Layanan Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana	1	Dokumen	1.700.000				1.700.000
				055-Layanan Dukungan Manajemen Ditjen PSLB3	1	Dokumen	7.400.000				7.400.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**963-Layanan Data dan Informasi**	**1**	**Layanan**	250.000				**250.000**
				051-Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	1	Layanan	250.000				250.000
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**48.263.767**				**48.263.767**
				001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	38.773.499				38.773.499
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	9.490.268				9.490.268
13-DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN											**596.605.435**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan**	**02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual**	**500**	**Layanan**	**6.500.000**				**6.500.000**
				051-Pemantauan Kualitas Udara Secara Manual	500	Layanan	6.500.000				6.500.000
		03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual**	**652**	**Layanan**	**8.600.000**				**8.600.000**
				051-Pemantauan Kualitas Air secara Manual	652	Layanan	8.600.000				8.600.000
		04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut**	**37**	**Layanan**	**5.000.000**				**5.000.000**
				051-Pemantauan Kualitas Air Laut	37	Layanan	5.000.000				5.000.000
			QMA-Data dan Informasi Publik	**004-Data dan Informasi Sampah Laut**	**23**	**Layanan**	**2.000.000**				**2.000.000**
				051-Pemantauan Sampah Laut	23	Layanan	2.000.000				2.000.000
		05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan**	**514**	**Layanan**	**1.000.000**				**1.000.000**
				058-Pemantauan Kualitas Tutupan lahan	514	Layanan	1.000.000				1.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan**	**06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut**	**4**	**Layanan**	**2.500.000**				**2.500.000**
				051-Pembuatan peta kesatuan hidrologis gambut skala 1:50.000	4	Layanan	2.100.000				2.100.000
				052-Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	4	Pemda	400.000				400.000
		03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA**	**40**	**Layanan**	**250.000**				**250.000**
				051-Pemantauan Effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA	40	Layanan	250.000				250.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis**	**153**	**Unit**	**184.251.904**				**184.251.904**
				051-Pemantauan Kualitas Air Otomatis	153	Unit	184.251.904				184.251.904
		02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	**RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis**	**72**	**Unit**	**93.400.000**				**93.400.000**
				052-Pemantauan Kualitas Udara Secara Otomatis	72	Unit	93.400.000				93.400.000
		03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	**RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis**	**94**	**Unit**	**14.164.384**				**14.164.384**
				051-Perawatan Alat Pemantau Kualitas Air Otomatis	94	Unit	14.164.384				14.164.384
		02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	**RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis**	**41**	**Unit**	**8.324.079**				**8.324.079**
				051-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara	41	Unit	8.324.079				8.324.079
	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	**04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut**	**QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha**	**001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut**	**30**	**Badan usaha**	**1.300.000**				**1.300.000**
				051-Evaluasi Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Pelabuhan	30	Badan Usaha	1.300.000				1.300.000
		02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	**QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri**	**001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara**	**3.750**	**Industri**	**3.600.000**				**3.600.000**
				051-Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran udara	3.750	Industri	3.600.000				3.600.000
		03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	**QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri**	**002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air**	**3.750**	**Industri**	**11.200.000**				**11.200.000**
				051-Peningkatan Kinerja Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.750	Industri	7.800.000				7.800.000
				052-Evaluasi Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air Limbah	3.750	Industri	3.400.000				3.400.000
		05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	**QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri**	**003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan**	**113**	**Industri**	**1.167.347**				**1.167.347**
				051-Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Tambang	113	Industri	1.167.347				1.167.347

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	**004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**	**400**	**Industri**	**2.700.000**				**2.700.000**
				051-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	400	Industri	**2.700.000**				2.700.000
		03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	**005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah**	**16**	**Industri**	**100.000**				**100.000**
				051-Pemanfaatan Air Limbah oleh Perusahaan	16	Industri	100.000				100.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum**	**30**	**Unit**	**4.000.000**				**4.000.000**
				051-Fasilitas pengelolahan air limbah di DAS Citarum	30	Unit	4.000.000				4.000.000
			RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**002-Instalasi Pengolahan Air Limbah**	**83**	**Unit**	**63.350.000**				**63.350.000**
				051-Pengelolaan Air Limbah	83	Unit	63.350.000				63.350.000
		04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**002- Infrastruktur Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut**	**10**	**Unit**	**10.600.000**				**10.600.000**
				051-Penanggulangan Pencemaran Tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir laut	2	Provinsi	400.000				400.000
				052-Infrastruktur Hijau	10	Unit	8.000.000				8.000.000
				052-Kerjasama, Perencanaan dan Kebijakan	1	Dokumen	1.400.000				1.400.000
				053-Monitoring, Evaluasi dan SPIP	3	Dokumen	800.000				800.000
		03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	**003-Layanan Kinerja Kab / Kota dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air**	**514**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	1.785.000				**1.785.000**
				051-Pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH)	514	Daerah	1.785.000				1.785.000
		02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	**004-Layanan Kinerja Kab / Kota dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Udara**	**514**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**2.100.000**				**2.100.000**
				051-Pelaksanaan Langit Biru	514	Daerah	2.100.000				2.100.000
		04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	**005-Layanan kinerja provinsi dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir dan laut**	**34**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**1.000.000**				**1.000.000**
				051- Bimtek Pantai Lestari	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000				500.000
				052-Implementasi program pantai lestari	5	Provinsi	500.000				500.000
	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan		RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	**003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya**	**7**	**Unit**	**600.000**	**3.000.000**			**3.600.000**
				051-Pemulihan Ekosistem Padang Lamun/Terumbu Karang	7	Unit	600.000	3.000.000			3.600.000
		05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	**001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan**	**120**	**Hektar**	**18.200.000**				**18.200.000**
				051-Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	120	Hektar	18.200.000				18.200.000

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan**	**06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	**002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya**	**50.000**	**Hektar**	**65.000.000**				**65.000.000**
				051-Pemulihan lahan gambut yang terdegradasi di areal penggunaan lainnya	50.000	Hektar	65.000.000				65.000.000
		05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	**UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**001-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan**	**514**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**3.500.000**				**3.500.000**
				051-Pelaksanaan Gerakan Indonesia Hijau	514	Kab/Kota	1.500.000				1.500.000
		06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	**UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**	**002-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**	**132**	**Daerah (Prov/Kab/Kota)**	**1.500.000**				**1.500.000**
				051-Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	132	Daerah (Prov/Kab/Kota)	**1.500.000**				1.500.000
			UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	**001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi**	**60**	**Desa**	**13.500.000**				**13.500.000**
				051-Fasilitasi desa dalam menjaga ekosistem gambut	60	Desa	**13.500.000**				13.500.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup**	**01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**1**	**Layanan**	**10.721.309**				**10.721.309**
				051-Layanan Dukungan Manajemen Ditjen PPKL	1	Layanan	10.721.309				10.721.309
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**51.691..412**				**51.691.412**
				001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	38.949.216				38.949.216
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	12.742.196				12.742.196

PROGRAM	KEGIATAN	UKE II	(MEMO PAGU ALOKASI 2024)								
			KRO	RO/ KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU				PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	HLN	SBSN	
14-BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE											**321.384.038**
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	**6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut**	**04-Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi**	**106**	**Layanan**	**75.808.580**				75.808.580
				051 - Penyediaan Data dan Informasi perencanaan dan evaluasi Restorasi Gambut	106	Layanan	67.808.580				67.808.580
				052 - Pemasangan/Relokasi Alat Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah Dalam Rangka Konsolidasi	153	Unit	6.000.000				6.000.000
				053 - Pemeliharaan Alat Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah	153	Unit	2.000.000				2.000.000
		02-Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	**001-Lahan Gambut yang Direstorasi**	**355.000**	**Hektar**	**117.958.259**				**117.958.259**
				051 - Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut	355.000	Hektar	39.998.259				39.998.259
				052 - Operasi Pembasahan Rutin	168	Kali	25.900.000				25.900.000
				053 - Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut	3.756	Unit	30.560.000				30.560.000
				054 - Revegetasi Ekosistem Gambut	300	Hektar	7.500.000				7.500.000
				055 - Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	70	Paket	14.000.000				14.000.000
		05-Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Partisipasi, Kemitraan	**UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa**	**001-Desa mandiri peduli gambut**	**75**	**Desa**	**14.337.404**				**14.337.404**
				051 - Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut	75	Desa	6.798.636				6.798.636
				052 - Edukasi dan Sosialisasi Restorasi Gambut	75	Desa	5.582.132				5.582.132
				053 - Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Restorasi Gambut	75	Desa	1.956.636				1.956.636
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**6764-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove**	**01-Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem**	**001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove**	**2.215**	**Hektar**	**71.667.076**				**71.667.076**
				051- Penanaman Mangrove	2.215	Hektar	54.045.309				54.045.309
				052 - Pemeliharaan Mangrove	3.863	Hektar	17.621.767				17.621.767
029.WA-Program Dukungan Manajemen	**6763-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**	**03-Sekretariat Badan**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**1**	**Layanan**	**14.147.825**				**14.147.825**
				051 - Penyusunan Perencanaan Anggaran	1	Layanan	2.532.405				2.532.405
				052 - Layanan Umum dan Ketatausahaan	1	Layanan	4.038.475				4.038.475
				053 - Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengawasan Internal	1	Layanan	4.499.297				4.499.297
				054 - Penyusunan Produk Hukum, Kerjasama dan Kehumasan	1	Layanan	3.077.648				3.077.648
			EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	**994-Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**27.464.894**				**27.464.894**
				001 - Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	12.075.825				12.075.825
				002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	15.389.069				15.389.069

Lampiran 2. Dukungan KLHK dalam RKP Tahun 2024

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
02-Inspektorat Jenderal	5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	965-Layanan Audit Internal						003 - Anggaran Responsif Gender		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	001-Layanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	002- Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	001-Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	001-Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	001-UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Pusat		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	003 - Anggaran Responsif Gender		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	002-UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	003 - Anggaran Responsif Gender		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	001-Rekomendasi Kinerja Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	001-Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6738-Rehabilitasi Perairan Darat	001-Unit kerja yang ditingkatkan kapasitas dalam Rehabilitasi Perairan Darat						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6738-Rehabilitasi Perairan Darat	001-Rekomendasi Kebijakan pemulihan Mata Air		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	007 - Adaptasi perubahan iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6738-Rehabilitasi Perairan Darat	001-Laporan Pemantauan Danau Prioritas yang Dikendalikan Kerusakannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	007 - Adaptasi perubahan iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6738-Rehabilitasi Perairan Darat	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	001-Benih Berkualitas		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6734-Konservasi Tanah dan Air	001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6734-Konservasi Tanah dan Air	001-Forest Program II						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6734-Konservasi Tanah dan Air	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6734-Konservasi Tanah dan Air	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS						007 - Adaptasi perubahan iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	001-Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	007 - Adaptasi perubahan iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	007 - Adaptasi perubahan iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6736-Rehabilitasi Hutan	001-Forest Program III- Sulawesi Programme						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6736-Rehabilitasi Hutan	002-Forest Program IV Watersheed Mamasa/Sulawesi						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6736-Rehabilitasi Hutan	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	36-Pemulihan 4 DAS Kritis	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6736-Rehabilitasi Hutan	004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	10-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6737-Rehabilitasi Mangrove	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6737-Rehabilitasi Mangrove	001-Rehabilitasi Hutan Mangrove		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	001-Kebijakan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	001-KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	001-Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingku06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistemngan Tinggi	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	003 - Anggaran Responsif Gender		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	001-Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	002-Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	001-Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	003 - Anggaran Responsif Gender		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	001-Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	003 - Anggaran Responsif Gender		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	003 - Anggaran Responsif Gender		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	001-Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	002-Konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	-		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	07-Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	001-Konservasi Keanekaragaman Hayati di IKN	10-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	002-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	10-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	001-Penyelamatan Satwa Liar		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6742-Pemulihan Ekosistem	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	10-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6742-Pemulihan Ekosistem	002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	004-Dokumen RPPLH		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	007-Sistem kajian dampak lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	008 -Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	002-Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	003- Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	004- Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	000 - Bukan Tematik		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL						003 - Anggaran Responsif Gender		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL						003 - Anggaran Responsif Gender		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	000 - Bukan Tematik		
06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	001-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	03-Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	002-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di IKN		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	003-Standar Instrumen Folu Net Sink		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	03-Pembangunan Rendah Karbon	02-Pemulihan Lahan Berkelanjutan	03-Pengurangan Laju Deforestasi	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	001-Layanan Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01-Penanggulangan Bencana	02-Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	003-Standar Instrumen Circular Ekonomi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	001-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup		39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	001- Layanan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760-Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760-Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	002-Layanan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Perijinan Berusaha		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	002-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan DI IKN	10-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Nusantara	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	001-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	001-Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk penguatan regulasi SDA dan LH		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan						003 - Anggaran Responsif Gender		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	44-Pengelolaan Terpadu UMKM	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	05-Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	02-Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	003-Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (RM)		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	001-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan						005 - Anggaran Pendidikan		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan						003 - Anggaran Responsif Gender		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	007 - Adaptasi perubahan iklim		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK						003 - Anggaran Responsif Gender		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5444-Peningkatan Penyuluhan	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5444-Peningkatan Penyuluhan	001-KTH Mandiri		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	003 - Anggaran Responsif Gender		
08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5444-Peningkatan Penyuluhan	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	001-Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial						007 - Adaptasi perubahan iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	002-Strengthening Social Forestry in Indonesia Project						003 - Anggaran Responsif Gender		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	001-Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat						007 - Adaptasi perubahan iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	001- Forest Programme V - Social Forestry Support Programme						007 - Adaptasi perubahan iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	007 - Adaptasi perubahan iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penangananya		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	007 - Adaptasi perubahan iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	001-Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						003 - Anggaran Responsif Gender		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	003-Forest Programme III - Sulawesi Programme						003 - Anggaran Responsif Gender		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6752-Kemitraan Lingkungan	001-Layanan Kemitraan Lingkungan						003 - Anggaran Responsif Gender		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6752-Kemitraan Lingkungan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6752-Kemitraan Lingkungan	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender		
09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender		
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	001-PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya						003 - Anggaran Responsif Gender	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	002-Badan Usaha yang Dikenakan Denda Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya						004 - Mitigasi perubahan Iklim	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim	04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	
10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5446-Adaptasi Perubahan Iklim	001-Kampung Iklim						003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5446-Adaptasi Perubahan Iklim	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim						007 - Adaptasi perubahan iklim		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	001-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO) dan HFC						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	001-Lembaga yang difasilitasi implementasi NDC bidang lingkungan hidup dan kehutanan						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	002-Lembaga yang mengimplementasikan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tervalidasi						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga melalui Pre Investment Bio Carbon Fund For Initiative Sustainable Forest Landscape		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	03-Pembangunan Rendah Karbon	02-Pemulihan Lahan Berkelanjutan	03-Pengurangan Laju Deforestasi	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan						004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		196-Menguranggi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	001-Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim	01-Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	001-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim	01-Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	002-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman dari Udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	004 - Mitigasi perubahan Iklim	01-Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	001-Rekomendasi Kebijakan Dukungan Implementasi NDC						003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	002-Rekomendasi Kebijakan Perundingan Perubahan Iklim						003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	001-Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang sains dan informasi teknologi rendah karbon						003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim 007 - Adaptasi perubahan iklim		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender, 000 - Bukan Tematik		077-Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	994-Layanan Perkantoran						003 - Anggaran Responsif Gender, 000 - Bukan Tematik		
11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		077-Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	001-Bank Sampah yang dibina dan difasilitasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	003 - Anggaran Responsif Gender		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	001-Produsen yang difasilitasi dalam Penerapan EPR		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	003-Fasilitas Pengurangan Sampah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	003-Kabupaten/Kota yang dinilai Kinerja Pengelolaan Sampahnya Melalui ADIPURA						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	002-Pelabuhan yang difasilitasi pelaksanaan Proper dalam Pengelolaan Sampah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	001-Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	002-Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6755-Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	001-Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Lokasi PESK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	003 - Anggaran Responsif Gender		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	001-Industri yang dibina dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3						003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	001-Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes	38-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	000 - Bukan Tematik		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	38-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	000 - Bukan Tematik		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	001-Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Non Institusi yang dipulihkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	003 - Anggaran Responsif Gender		
12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6754-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	004-Data dan Informasi Sampah Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	002-Instalasi Pengolahan Air Limbah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	002- Infrastruktur Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	003-Layanan Kinerja Kab / Kota dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		

UKE I	KEGIATAN	RO	MP	PN	PP	KP	PRO PN	TEMATIK	NAWACITA	JANPRES
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	004-Layanan Kinerja Kab / Kota dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik	06-Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	005-Layanan kinerja provinsi dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir dan laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	003 - Anggaran Responsif Gender		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	001-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	002-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	000 - Bukan Tematik		
13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	000 - Bukan Tematik		
14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	001-Lahan Gambut yang Direstorasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	000 - Bukan Tematik		
14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	001-Desa mandiri peduli gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	000 - Bukan Tematik		
14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6764-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	000 - Bukan Tematik		

Lampiran 3. Cascading Renstra KLHK (Rev) ke Renja KLHK

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.1 Meningkatnya kualitas udara **(PPKL)**	T1.S1.1.1.1 Nilai indeks kualitas udara **(84,5 Poin)**	T1.S1.1.1.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas udara	T1.S1.1.1.1.1.1 Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) **(72 Lokasi)**	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	72	Unit	93.400.000
				02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	41	Unit	8.324.079
			T1.S1.1.1.1.1.2 Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara **(500 Kab/Kota)**	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	500	layanan	6.500.000
		T1.S1.1.1.1.2 Menurunnya beban emisi pencemaran udara	T1.S1.1.1.1.2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi **(3.375 Perusahaan)**	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	3.750	Industri	3.600.000
				02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran udara	514	Daerah	2.100.000
T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air **(PPKL)**	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air **(55,5 Poin)**	T1.S1.1.2.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas air	T1.S1.1.2.1.1.1 Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) **(153 Lokasi)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	153	Unit	184.251.904
				03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	94	Unit	14.164.384
			T1.S1.1.2.1.1.2 Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual **(652 Lokasi)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual	652	layanan	8.600.000
		T1.S1.1.2.1.2 Menurunnya beban pencemaran air	T1.S1.1.2.1.2.1 Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum **(30 Unit)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	30	Unit	4.000.000
			T1.S1.1.2.1.2.2 Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air **(93 Unit)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Instalasi Pengolahan Air Limbah	83	Unit	63.350.000
				03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.785.000
			T1.S1.1.2.1.2.3 Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari **(0,053 Persen)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	3.750	Industri	11.200.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air **(PPKL)**	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air **(55,5 Poin)**	T1.S1.1.2.1.2 Menurunnya beban pencemaran air	T1.S1.1.2.1.2.4 Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA **(40 Kab/kota)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA	40	layanan	250.000
T1.S1.1.3 Meningkatnya kualitas air laut **(PPKL)**	T1.S1.1.3.1 Nilai indeks kualitas air laut **(60,5 Poin)**	T1.S1.1.3.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas air laut	T1.S1.1.3.1.1.1 Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya **(37 Provinsi)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut	37	layanan	5.000.000
			T1.S1.1.3.1.1.2 Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up **(23 Kab/kota)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Data dan Informasi Sampah Laut	23	layanan	2.000.000
		T1.S1.1.3.1.2 Menurunnya pencemaran air laut	T1.S1.1.3.1.2.1 Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut **(35 Pelabuhan)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	30	Badan usaha	1.300.000
			T1.S1.1.3.1.2.2 Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan pengendalian pencemaran kerusakan pesisir dan laut **(10 Lokasi)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Infrastruktur Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	10	Unit	10.600.000
				04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan kinerja provinsi dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/Kab/Kota	1000.000
		T1.S1.1.3.1.3 Meningkatnya areal ekosistem pesisir dan laut yang dipulihkan	T1.S1.1.3.1.3.1 Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya **(7 Lokasi)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	7	Unit	3.600.000
T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut **(PPKL)**	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan **(65,5 Poin)**	T1.S1.1.4.1.1 Tersedianya data pemantauan ekosistem gambut	T1.S1.1.4.1.1.1 Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (-)							
			T1.S1.1.4.1.1.2 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1 : 50.000 **(4 KHG)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	4	layanan	2.500.000
		T1.S1.1.4.1.2 Menurunnya tingkat kerusakan lahan dan gambut	T1.S1.1.4.1.2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya **(113 Perusahaan)**	05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	113	Industri	1.167..347
			T1.S1.1.4.1.2.2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut **(400 Perusahaan)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	400	Industri	2.700.000
		T1.S1.1.4.1.3 Meningkatnya lahan yang dipulihkan	T1.S1.1.4.1.3.1 Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya **(120 Hektar)**	05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	120	Hektar	18.200.000
				05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514	layanan	1.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut **(PPKL)**	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan **(65,5 Poin)**	T1.S1.1.4.1.4 Meningkatnya areal kawasan hidrologi gambut yang dipulihkan	T1.S1.1.4.1.4.1 Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi **(60 Desa)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi	60	Desa	13.500.000
			T1.S1.1.4.1.4.2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) **(43 Kab/Kota)**	05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan lahan	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.500.000
				06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut	132	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000
			T1.S1.1.4.1.4.3 Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat **(50.000 Hektar)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	50.000	Hektar	65.000.000
T1.S1.1.5 Meningkatnya pengelolaan B3 **(PSLB3)**	T1.S1.1.5.1 Jumlah B3 yang dikelola **(6.000.000 Ton)**	T1.S1.1.5.1.1 Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar	T1.S1.1.5.1.1.1 Jumlah B3 yang dikelola **(6.000.000 Ton)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3	170	Badan Usaha	1.250.000
			T1.S1.1.5.1.1.2 Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs **(70 %)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	1	Sistem Informasi	900.000
			T1.S1.1.5.1.1.3 Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs **(2 Jenis B3)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	2.212.406
		T1.S1.1.5.1.2 Meningkatnya upaya penghapusan penggunaan merkuri pada PESK	T1.S1.1.5.1.2.1 Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin **(5 Unit)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Lokasi PESK	5	Unit	10.200.000
			T1.S1.1.5.1.2.2 Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019 **(20 %)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Fasilitasi dalam rangka pemusnahan Alkes bermerkuri	2	Layanan	9.324.201
T1.S1.1.6 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 **(PSLB3)**	T1.S1.1.6.1 Jumlah limbah B3 yang dikelola **(86.967.196 Ton)**	T1.S1.1.6.1.1 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola	T1.S1.1.6.1.1.1 Pelayanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 **(100 %)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Persetujuan Teknis, Kelayakan Operasi PLB3 dan Rekomendasi	400	Badan Usaha	3.157.594
				07-Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	3	Rekomendasi Kebijakan	400.000
			T1.S1.1.6.1.1.2 Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu **(2 Dokumen Teknis)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	RBR-Dukungan Teknis	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	2	Dokumen	2.860.000
			T1.S1.1.6.1.1.3 Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3 **(86.967.196 Ton)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Industri yang dibina dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	2.800	Industri	3.600.000
				07-Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	1	Sistem Informasi	1.150.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.6 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 **(PSLB3)**	T1.S1.1.6.1 Jumlah limbah B3 yang dikelola **(86.967.196 Ton)**	T1.S1.1.6.1.2 Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu	T1.S1.1.6.1.2.1 Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) **(8 Unit)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes	8	Unit	75.785.799
		T1.S1.1.6.1.3 Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang terpulihkan	T1.S1.1.6.1.3.1 Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non institusi **(10.750 Ton)**	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Non Institusi yang dipulihkan	10.750	Ton	20.200.000
			T1.S1.1.6.1.3.2 Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang dipulihkan **(200.000 Ton)**	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	CEA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Institusi yang dipulihkan	200.000	Ton	2.000.000
		T1.S1.1.6.1.4 Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3	T1.S1.1.6.1.4.1 Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 **(100 %)**	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah	17	Layanan	3.800.000
				05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3		ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemulihan Lahan dan Tanggap Darurat Limbah B3	2	Rekomendasi Kebijakan	550.000
						FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap darurat Limbah B3	1	Sistem Informasi	350.000
T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan **(PKTL)**	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan **(74 Dokumen)**	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program. **(40 Dokumen KLHS)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	40	Dokumen	15.000.000
			T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan **(2 Dokumen)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program **(9 Dokumen)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
				05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	2	Rekomendasi Kebijakan	17.700.000
		T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL **(22 Layanan)**	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	11.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan **(PKTL)**	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan **(74 Dokumen)**	T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air **(65 Juta Hektar)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	008 -Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	1	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
			T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL							
	T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan **(230 Laporan)**	T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup **(1 Sistem)**	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan	40	Rekomendasi Kebijakan	12.604.748
						UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1	Sistem Informasi	9.000.000
		T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH **(22 layanan)**	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	16.500.000
		T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan **(205 Layanan)**	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	205	Layanan	6.000.000
		T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi **(2 layanan)**	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	2	Dokumen	400.000
T1.S1.1.8 Meningkatnya Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(BSI LHK)**	T1.S1.1.8.1 Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(40 Lembaga)**	T1.S1.1.8.1.1 Tersedianya standar instrumen lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.1.1 Jumlah standar instrumen kualitas lingkungan hidup **(18 NSPK)**	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	10	NSPK	2.910.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)	5	NSPK	1.000.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	003-Standar Instrumen Circular Ekonomi	3	NSPK	600.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001- Layanan Laboratorium lingkungan rujukan nasional dan dioxin furan	1	unit	1.426.569
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	12	Lembaga	1.200.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	RDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Layanan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan	1	unit	1.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.8 Meningkatnya Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(BSI LHK)**	T1.S1.1.8.1 Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(40 Lembaga)**	T1.S1.1.8.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema, sistem prosedur dan standar) lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya **(40 Lembaga)**	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	BAB - Pelayanan Publik Kepada Lembaga	001 - Layanan Pengendalian Penerapan Standar Kualitas Lingkungan Hidup	40	Lembaga	2.400.000
T1.S1.1.9 Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan Bidang LHK **(PHLHK)**	T1.S1.1.9.1 Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan **(53 %)**	T1.S1.1.9.1.1 Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	T1.S1.1.9.1.1.1 Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK **(800 Badan Usaha)**	04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001- Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	800	Badan Usaha	30.750.000
			T1.S1.1.9.1.1.2 Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya **(250 Orang)**	04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	250	Orang	2.000.000
			T1.S1.1.9.1.1.3 Jumlah Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan							
T1.S1.1.10 Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan **(PHLHK)**	T1.S1.1.10.1 Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani **(225 kasus)**	T1.S1.1.10.1.1 Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	T1.S1.1.10.1.1.1 Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap **(180 kasus)**	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	180	Perkara	57.114.694
			T1.S1.1.10.1.1.2 Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya **(200 Orang)**	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang	3.400.000
			T1.S1.1.10.1.1.3 Jumlah Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan **(150 Perkara)**	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QCE-Penanganan Perkara	002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	150	Perkara	14.400.000
		T1.S1.1.10.1.2 Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	T1.S1.1.10.1.2.1 Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan **(45 kasus)**	03-Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE-Penanganan Perkara	001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	45	Perkara	17.240.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,74 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.11 Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial **(KSDAE)**	T1.S1.1.11.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi **(9.350.000 Hektar)**	T1.S1.1.11.1.1 Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	T1.S1.1.11.1.1.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi **(9.349.174 Hektar)**	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Dokumen	800.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	9.349.174	Hektar	7.619.951
		T1.S1.1.11.1.2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	T1.S1.1.11.1.2.1 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya **(11 unit KEE)**	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1	Rekomendasi Kebijakan	800.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	11	Lembaga	1.200.000
T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional **(PDASRH)**	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya **(15 Danau)**	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya **(100 Mata Air)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan pemulihan Mata Air	100	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000
			T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya **(15 Danau)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	QII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	001-Laporan Pemantauan Danau Prioritas yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Laporan	2.123.020
			T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat **(480 Unit)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	480	Unit	4.733.822
				13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Unit kerja yang ditingkatkan kapasitas dalam Rehabilitasi Perairan Darat	34	Unit Kerja	1.200.000
T1.S1.1.13 Meningkatnya kualitas ekosistem gambut di 7 Provinsi **(BRGM)**	T1.S1.1.13.1 Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi **(355.000 Hektar)**	T1.S1.1.13.1.1 Terfasilitasinya percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di 7 Provinsi	T1.S1.1.13.1.1.1 Lahan gambut yang direstorasi **(355.000 Hektar)**	02-Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi	Pemantauan, Pengendalian, Dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Gambut yang Direstorasi	355.000	Hektar	117.958.259
				02-Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi	Pemantauan, Pengendalian, Dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi	106	layanan	75.808.580
		T1.S1.1.13.1.2 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi	T1.S1.1.13.1.2.1 Desa Mandiri Peduli Gambut **(75 Desa)**	04-Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan	Pemantauan, Pengendalian, Dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa mandiri peduli gambut	75	Desa	14.337.404

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S2
Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah

Indikator (IKU/IKP)

T1.S2.1
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
(70 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S2.1.1 Meningkatnya Pengelolaan Sampah **(PSLB3)**	T1.S2.1.1.1 Jumlah Sampah yang dikelola **(17.175.000 Ton)**	T1.S2.1.1.1.1 Meningkatnya jumlah pengurangan sampah (30% dari proyeksi timbulan sampah)	T1.S2.1.1.1.1.1 Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen **(600 Ton)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Produsen yang difasilitasi dalam Penerapan EPR	100	Badan usaha	1.800.000
			T1.S2.1.1.1.1.2 Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 **(186 Unit)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Bank Sampah yang dibina dan difasilitasi	186	UMKM	6.650.000
				09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Fasilitas Pengurangan Sampah	2	Unit	2.000.000
			T1.S2.1.1.1.1.3 Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas **(80 Kab/Kota)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Kabupaten/kota yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi target pengurangan sampah dalam Jakstrada	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/Kota	3.020.000
		T1.S2.1.1.1.2 Meningkatnya jumlah penanganan sampah (70% dari proyeksi timbulan sampah)	T1.S2.1.1.1.2.1 Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas **(110 Kab/Kota)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi target penanganan sampah dalam Jakstrada	110	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.600.000
				08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Pelabuhan yang difasilitasi pelaksanaan Proper dalam Pengelolaan Sampah	30	Badan usaha	1.100.000
				08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	002-Sistem Informasi Penanganan Sampah	1	Sistem Informasi	350.000
			T1.S2.1.1.1.2.2 Jumlah kab/kota yang memiliki nilai adipura masuk kategori baik (nilai adipura > 71) **(320 Kab/Kota)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Kabupaten/Kota yang dinilai Kinerja Pengelolaan Sampahnya Melalui ADIPURA	320	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.150.000
			T1.S2.1.1.1.2.3 Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi **(6.935 Ton)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	4	Unit	24.740.000
			T1.S2.1.1.1.2.4 Jumlah sampah spesifik tertangani **(1.440 Ton)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001- Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik	1	Unit	5.300.000
		T1.S2.1.1.1.3 Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018	T1.S2.1.1.1.3.1 Jumlah Kab/kota, Kawasan Konservasi dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu **(20 Lokasi)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	3	Unit	3.500.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S3
Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S3.1
Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan
(17,47 Persen)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S3.1.1 Meningkatnya tata kelola Penurunan Emisi GRK **(PPI)**	T1.S3.1.1.1 Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim **(3 Dokumen)**	T1.S3.1.1.1.1 Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC	T1.S3.1.1.1.1.1 Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim **(2 Dokumen)**	03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Tervalidasi	6	Layanan	442.000
				03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga melalui Pre Investment Bio Carbon Fund For Initiative Sustainable Forest Landscape	5	Lembaga	8.625.000
				03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga yang difasilitasi implementasi NDC bidang lingkungan hidup dan kehutanan	6	Lembaga	567.000
				03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga yang mengimplementasikan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon	1	Lembaga	680.000
	T1.S3.1.1.2 Jumlah wilayah yang berketahanan iklim **(222 Kelompok Masyarakat)**	T1.S3.1.1.2.1 Meningkatnya ketahanan iklim wilayah	T1.S3.1.1.2.1.1 Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah **(1 Dokumen)**	02-Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	Adaptasi Perubahan Iklim	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim	1	layanan	858.000
			T1.S3.1.1.2.1.2 Jumlah desa berketahanan iklim **(222 kelompok masyarakat)**	02-Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	Adaptasi Perubahan Iklim	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kampung Iklim	222	Kelompok Masyarakat	2.096.077
	T1.S3.1.1.3 Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP **(3 Dokumen)**	T1.S3.1.1.3.1 Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim	T1.S3.1.1.3.1.1 Tersediannya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim **(1 Dokumen)**	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Mobilisasi Sumber Daya Sektoral Dan Regional	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	002-Rekomendasi Kebijakan Perundingan Perubahan Iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	805.000
			T1.S3.1.1.3.1.2 Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional **(1 Dokumen)**	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Mobilisasi Sumber Daya Sektoral Dan Regional	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Rekomendasi Kebijakan Dukungan Implementasi NDC	2	Rekomendasi Kebijakan	700.000
		T1.S3.1.1.3.2 Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon	T1.S3.1.1.3.2.1 Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon **(350 Orang)**	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Mobilisasi Sumber Daya Sektoral Dan Regional	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang sains dan informasi teknologi rendah karbon	350	Orang	600.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S3
Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S3.1
Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan
(17,47 Persen)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S3.1.1 Meningkatnya tata kelola Penurunan Emisi GRK **(PPI)**	T1.S3.1.1.4 Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor **(1 Dokumen)**	T1.S3.1.1.4.1 Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional	T1.S3.1.1.4.1.1 Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan **(1 Dokumen)**	04-Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Serta Monitoring, Pelaporan Dan Verifikasi	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	2	layanan	2.400.000
	T1.S3.1.1.5 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon **(121, 19 ODP Ton)**	T1.S3.1.1.5.1 Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon	T1.S3.1.1.5.1.1 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton **(121,19 ODP Ton)**	03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO) dan HFC	1	Rekomendasi Kebijakan	276.000
T1.S3.1.2 Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan setiap tahun **(PPI)**	T1.S3.1.2.1 Penurunan luas areal kebakaran lahan dan hutan dan lahan **(2 %)**	T1.S3.1.2.1.1 Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	T1.S3.1.2.1.1.1 Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 2019 **(2%)**	06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2.175	Kelompok Masyarakat	121.177.310
				06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	1.200	operasi	13.000.000
				06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	QBD- Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	002-Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman dari Udara	50	operasi	11.000.000
T1.S3.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim **(BSI LHK)**	T1.S3.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang disusun **(16 NSPK)**	T1.S3.1.3.1.1 Menyiapkan standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.1.1 Jumlah standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim **(16 NSPK)**	10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	NSPK	1.763.915
				10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK	2	Layanan	140.000
				10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di IKN	6	NSPK	1.200.000
				10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	003-Standar Instrumen Folu Net Sink	3	NSPK	600.000
		T1.S3.1.3.1.2 Meningkatkan kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang ditingkatkan kualitasnya **(40 Lembaga)**	10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	BAB - Pelayanan Publik Kepada Lembaga	001 - Layanan Pengendalian Penerapan Standar Ketahanan Bencana dan Perubahan Ikim	40	Lembaga	2.400.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.1 Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan **(PHL)**	T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan **(453.000 Hektar)**	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan **(453.000 Ha)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	60	Badan Usaha	2.561.810
				10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002- Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	42	Badan Usaha	5.400.000
		T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung **(6 Juta Hektar)**	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	Dokumen	5.435.484
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	2	NSPK	642.143
			T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan **(20 KPH)**	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	20	Lembaga	1.582.936
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	20	Lembaga	5.809.077
			T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari **(20 KPH)**	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	46	Lembaga	14.099.990
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	20	Lembaga	2.499.997

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi **(KSDAE)**	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif **(19 Juta Hektar)**	T1.S4.1.2.1.1 Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	T1.S4.1.2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (kumulatif) **(19 Juta Hektar)**	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	8.685.370	Hektar	18.203.840
			T1.S4.1.2.1.1.2 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan **(209 Unit KK)**	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Rekomendasi kebijakan Pemolaan, Penataan, dan Rencana Pengelolaan KK	2	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000
			T1.S4.1.2.1.1.3 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi **(74 Dokumen)**	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme III - Sulawesi	2	Lembaga	14.413.230
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaran Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	2.400.000
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	AEC-Kerja sama	001-Tata Kelola Kerja Sama di Kawasan Konservasi	74	Dokumen	6.000.000
		T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi **(280.000 Hektar)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1000.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	280.000	Hektar	11.000.000
			T1.S4.1.2.1.2.2 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran **(560 Unit)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001- Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1	Lembaga	14.497.545
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	005-Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5	Lembaga	5.520.250
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	605	Operasi	162.272.500

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi **(KSDAE)**	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif **(19 Juta Hektar)**	T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.3 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya **(277 Unit KK)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	5.575.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	277	Rekomendasi Kebijakan	5.600.270
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kawasan konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	74	Unit Kerja	10.296.160
		T1.S4.1.2.1.3 Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.3.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif **(12,10 Juta Hektar)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	19.517.858	Hektar	23.868.412
				04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	68.000	Hektar	1.000.000
			T1.S4.1.2.1.3.2 Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun **(-)**							
			T1.S4.1.2.1.3.3 Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati **(1 Mekanisme)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1	layanan	1.500.000
		T1.S4.1.2.1.4 Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	T1.S4.1.2.1.4.1 Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL **(300 entitas)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	326	Lembaga	16.795.000
			T1.S4.1.2.1.4.2 Jumlah penyelamatan satwa liar **(500 kejadian)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	REB-Konservasi Jenis/Spesies	001-Penyelamatan Satwa Liar	478	Lokasi	47.711.588
				04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Konservasi Keanekaragaman Hayati di IKN	4	Unit	10.000.000
		T1.S4.1.2.1.5 Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	T1.S4.1.2.1.5.1 Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati **(1 Mekanisme)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1	Rekomendasi Kebijakan	670.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi **(KSDAE)**	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif **(19 Juta Hektar)**	T1.S4.1.2.1.6 Meningkatnya pemulihan ekosistem	T1.S4.1.2.1.6.1 Luas ekosistem yang dipulihkan **(14.012 Hektar)**	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan ABKT	1	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	1.200	Hektar	1.000.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	12.812	Hektar	28.385.592
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme VI - Protection of Mangrove Forest	1	Lembaga	5.000.000
T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai **(PDASRH)**	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi **(18.200 Hektar)**	T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.1.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan **(15.000 Hektar)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	15.000	Hektar	1.500.000
				02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Forest Program II	1	Unit	8.908.680
		T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	T1.S4.1.3.1.2.1 Jumlah bangunan konservasi tanah dan air **(1.100 Unit)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	1.100	Unit	21.496.243
				02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	34	Unit Kerja	2.000.000
		T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time **(108 DAS)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Perencanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34	Layanan	28.723.840
			T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya **(34 Lembaga/Forum)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Perencanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga	3.400.000
				02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Perencanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34	Unit Kerja	8.500.000
		T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif **(17.000 Hektar)**	12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	17.000	Hektar	624.050.308
				12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	34	Unit Kerja	3.850.000
				12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Forest Program III-Sulawesi Programme	1	Unit	550.000
				12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Forest Program IV Watersheed Mamasa/Sulawesi	3	Unit	46.877.455

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai **(PDASRH)**	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi **(18.200 Hektar)**	T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan Das Sekitarnya **(500 Hektar)**	12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	500	Hektar	22.930.895
		T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi **(700 Hektar)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan Mangrove	700	Hektar	29.507.890
				13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove	34	Unit Kerja	1.300.000
			T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya **(34 Lembaga/Forum)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga	2.672.910
		T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun **(20 Hektar)**	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun	20	Hektar	11.246.830
			T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif **(41.000.000 Batang)**	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	41.000.000	unit	207.850.797
			T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat **(37.500.000 Butir)**	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Benih Berkualitas	37.500.000	unit	2.000.000
				05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	36	Unit Kerja	2.000.000
T1.S4.1.4 Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman **(PHLHK)**	T1.S4.1.4.1 Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman **(1.200.000 Hektar)**	T1.S4.1.4.1.1 Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	T1.S4.1.4.1.1.1 Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup **(100 Operasi)**	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	100	operasi	39.570.000
			T1.S4.1.4.1.1.2 Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya **(300 Orang)**	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	300	Orang	3.000.000
			T1.S4.1.4.1.1.3 Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar **(80 Operasi)**	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	80	operasi	35.656.539

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.5 Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan **(PKTL)**	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **(584 Layanan)**	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP **(530 Peta)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	530	Peta	412.600
		T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan **(30 Layanan)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Reviu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	350.000
			T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP **(2 Layanan)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003- Layanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka RTRWP	2	layanan	300.000
			T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030 **(9 Dokumen)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan	700.000
			T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) **(4 Dokumen)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4	Rekomendasi Kebijakan	550.000
		T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial **(9 Rekomendasi)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1	layanan	200.000
		T1.S4.1.5.1.4 Terfasilitasinya rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH (-)					-	-	-

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan **(PKTL)**	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan **(33 Layanan)**	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan **(2 Dokumen)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	2	Dokumen	8.383.344
			T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan **(2 Laporan)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	layanan	275.000
			T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH **(307 Klaster)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	307	layanan	17.566.656
			T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut **(2 SK & Peta)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	layanan	400.000
			T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia **(1 Dokumen)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	250.000
			T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH **(22 Layanan)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	layanan	2.500.000
		T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK **(1 Laporan)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	1.700.000
T1.S4.1.7 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas **(BRGM)**	T1.S4.1.7.1 Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi **(2.215 Hektar)**	T1.S4.1.7.1.1 Terwujudnya percepatan rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat pada areal kerja BRGM	T1.S4.1.7.1.1.1 Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi **(2.215 Hektar)**	05-Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	2.215	Hektar	71.667.076
T1.S4.1.8 Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan **(PSKL)**	T1.S4.1.8.1 Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial **(153.200 Hektar)**	T1.S4.1.8.1.1 Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial	T1.S4.1.8.1.1.1 Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan **(383 Kelompok Masyarakat)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	383	Kelompok Masyarakat	4.464.000
		T1.S4.1.8.1.2 Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	T1.S4.1.8.1.2.1 Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial **(1.600 orang)**	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1.600	Orang	35.852.080

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S1
Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah

Indikator (IKU/IKP)

T2.S1.1
Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)
(15 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3 **(PSLB3)**	T2.S1.1.1.1 Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 **(19 Triliun Rupiah)**	T2.S1.1.1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3	T2.S1.1.1.1.1.1 Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2020 **(19 Triliun Rupiah)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang mempunyai nilai Ekonomi	1	Layanan	700.000
T2.S1.1.2 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di Bank Sampah **(PSLB3)**	T2.S1.1.2.1 Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah **(5.069.116.000 Rupiah)**	T2.S1.1.2.1.1 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di bank sampah	T2.S1.1.2.1.1.1 Peningkatan jumlah omset bank sampah **(5.069.116.000 Rupiah)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001- Sistem Informasi Pengurangan Sampah	2	Sistem Informasi	750.000
T2.S1.1.3 Meningkatnya unit usaha yang melakukan pemanfaatan air limbah **(PPKL)**	T2.S1.1.3.1 Unit usaha pemanfaatan air limbah	T2.S1.1.3.1.1 Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	T2.S1.1.3.1.1.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah **(3.750 Perusahaan)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16	Industri	100.000
T2.S1.1.4 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup **(BSI LHK)**	T2.S1.1.4.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup **(18 NSPK)**	T2.S1.1.4.1.1 Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	T2.S1.1.4.1.1.1 Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen LHK **(375 Lembaga)**	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan	375	Lembaga	1.075.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	PEA-Koordinasi	001-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	12	Kegiatan	480.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	PEA-Koordinasi	002-Layanan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	Kegiatan	300.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S2.1
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)
(122,2 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat **(PHL)**	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat **(60 Juta M3)**	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas **(15 Unit)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	34	Badan Usaha	4.088.052
				10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK pengendalian usaha pemanfaatan hutan	1	NSPK	367.926
			T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu **(450.000 Ton)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	84	Badan Usaha	10.650.000
			T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan **(15 Unit)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	28	Badan Usaha	6.035.266
		T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan **(11 Unit)**	09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	44	Dokumen	3.420.668
				09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK usaha pemanfaatan hutan	1	NSPK	439.797
			T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan **(107 juta US$)**	09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	44	Badan Usaha	6.075.313
				09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	45	Badan Usaha	6.886.668
T2.S2.1.2 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(PSKL)**	T2.S2.1.2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(1,5 Triliun Rupiah)**	T2.S2.1.2.1.1 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	T2.S2.1.2.1.1.1 Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan **(653 Kelompok Masyarakat)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	653	Kelompok Masyarakat	36.735.000
			T2.S2.1.2.1.1.2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum **(34 Kelompok Masyarakat)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	34	Kelompok Masyarakat	5.860.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S2.1
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)
(122, Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S2.1.2 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(PSKL)**	T2.S2.1.2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(1,5 Triliun Rupiah)**	T2.S2.1.2.1.1 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	T2.S2.1.2.1.1.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha PS **(3 Dokumen)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Layanan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3	Dokumen	3.466.000
				06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003-Forest Programme III - Sulawesi Programme	1	Kelompok Masyarakat	2.697.680
		T2.S2.1.2.1.2 Meningkatnya Peran Mitra dalam penguatan kelompok perhutanan sosial	T2.S2.1.2.1.2.1 Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan **(40 Surat keterangan)**	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan	PEE-Kemitraan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan	40	Surat Kesepakatan	3.094.000
			T2.S2.1.2.1.2.2 Fasilitasi Kemitraan Lingkungan **(3 Dokumen)**	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Kemitraan Lingkungan	3	Dokumen	2.047.920
T2.S2.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(BSI LHK)**	T2.S2.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(15 NSPK)**	T2.S2.1.3.1.1 Tersedianya standardisasi usaha dan produk yang berkualitas dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan **(15 NSPK)**	09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Perijinan Berusaha	5	NSPK	2.100.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN)	10	NSPK	2.000.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Protection of Mangrove Forest	1	Lembaga	18.500.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	051-KHDTK sebagai laboratorium lapangan	38	Unit	13.960.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Layanan laboratorium	8	Unit	1.700.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	10	Dokumen	3.000.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) oleh stakeholder	1	Dokumen	258.102

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S2.1
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)
(122,2 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S2.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(BSI LHK)**	T2.S2.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(15 NSPK)**	T2.S2.1.3.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) usaha dan produk dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang ditingkatkan kualitasnya **(160 Produk)**	09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	BAB- Pelayanan Publik Kepada Lembaga	001- Layanan Pengendalian Penerapan Standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	160	Produk	9.600.000
T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan **(BP2SDM)**	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan **(0,5 Triliun Rupiah)**	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri) **(100 Kelompok Masyarakat)**	06-Pusat Penyuluhan	Peningkatan Penyuluhan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri	100	Kelompok Masyarakat	1.600.000
			T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan **(50 Kelompok Masyarakat)**	06-Pusat Penyuluhan	Peningkatan Penyuluhan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	50	Kelompok Masyarakat	1.538.607
		T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya kapasitas Penyuluh	T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) **(1.000 Orang)**	06-Pusat Penyuluhan	Peningkatan Penyuluhan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.000	Orang	2.400.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S3
Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting

Indikator (IKU/IKP)

T2.S3.1
Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
(16 US$ Milyar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan **(PHL)**	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan **(10,5 U$D Milyar)**	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat VLK **(45 juta M3)**	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1	NSPK	414.974
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	599.408
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Rekomendasi Kinerja Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	180	Badan Usaha	4.610.843
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	200	Badan Usaha	9.638.059
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	40	Badan Usaha	2.649.592
		T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan **(17 Juta Ton)**	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	450	Badan Usaha	7.003.993
			T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/Penilikan SVLK **(100 UMKM)**	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Pusat	25	UMKM	4.849.020
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	002-UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	75	UMKM	9.303.324
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	180	Badan Usaha	6.852.651
T2.S3.1.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan **(KSDAE)**	T2.S3.1.2.1 Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan **(2,2 Triliun Rupiah)**	T2.S3.1.2.1.1 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.2.1.1.1 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL **(463 Entitas)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	QAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	463	Lembaga	6.055.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S4
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S4.1
Nilai PNBP Fungsional KLHK
(7,48 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan **(PHL)**	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan **(3,302 Triliun Rupiah)**	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB) **(301 Wajib Bayar)**	11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	301	Badan Usaha	6.861.507
				11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	2	NSPK	530.810
				11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	301	Badan Usaha	2.292.788
			T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT **(301 Unit)**	11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	85	Badan Usaha	4.176.402
				11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Layanan Iuran dan Penatausahaan Hutan	216	Badan Usaha	4.016.818
T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan **(PKTL)**	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku **(300 Pemohon)**	T2.S4.1.2.1.1 Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan **(300 Dokumen)**	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan	2.500.000
			T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH **(200 unit)**	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	200	Badan usaha	10.602.003
			T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala **(12 kali Update)**	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	layanan	500.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S4
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S4.1
Nilai PNBP Fungsional KLHK
(7,48 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S4.1.3 Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari **(KSDAE)**	T2.S4.1.3.1 Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari **(250 milyar Rupiah)**	T2.S4.1.3.1.1 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	T2.S4.1.3.1.1.1 Jumlah destinasi wisata alam prioritas **(15 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam yang Dikembangkan	1	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15	Unit	16.000.000
			T2.S4.1.3.1.1.2 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon **(13 Entitas)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	2	Rekomendasi Kebijakan	1000.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	13	Dokumen	1.300.000
			T2.S4.1.3.1.1.3 Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air **(30 Entitas)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	1	Rekomendasi Kebijakan	1000.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	30	Dokumen	1.571.050
			T2.S4.1.3.1.1.4 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education **(53 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	27	Kelompok Masyarakat	9.766.500
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	53	Unit	32.262.450
			T2.S4.1.3.1.1.5 Jumlah destinasi wisata alam bahari **(7 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	7	Unit	5.400.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S1
Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate

Indikator (IKU/IKP)

T3.S1.1
Luas kawasan hutan dengan status penetapan
(10 Juta Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap **(PKTL)**	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) **(10 Juta Hektar)**	T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi **(10 Juta Hektar)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003- Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	34	Rekomendasi Kebijakan	12.711.924
			T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan **(1 Judul)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000
			T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga **(2.324 KM)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	34	Rekomendasi Kebijakan	22.804.159
			T3.S1.1.1.1.1.4 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH **(0 Dokumen)**							
	T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan **(30 Layanan)**	T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses **(30 Pemohon)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	415.000
			T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN **(- Hektar)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S2
Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T3.S2.1
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
(119.390 Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA **(PKTL)**	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA **(119.390 Hektar)**	T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA **(119.390 Hektar)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004- Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	34	Rekomendasi Kebijakan	11.229.960
			T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH **(30 Provinsi)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	30	Rekomendasi Kebijakan	244.537.654

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S3
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

Indikator (IKU/IKP)

T3.S3.1
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
(224.250 Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S3.1.1 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat **(PSKL)**	T3.S3.1.1.1 Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat **(183.000 Hektar)**	T3.S3.1.1.1.1 Meningkatnya penanganan konflik tenurial dan penetapan hutan adat	T3.S3.1.1.1.1.1 Pemetaan kasus konflik tenurial **(22 Kasus)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	22	Layanan	1.914.000
			T3.S3.1.1.1.1.2 Penanganan kasus konflik tenurial **(25 Kasus)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penanganannya	25	Layanan	2.850.000
			T3.S3.1.1.1.1.3 Penetapan hutan adat dan hutan hak **(18 Layanan)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	18	Layanan	3.084.000
			T3.S3.1.1.1.1.4 Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat **(14 Kelompok Masyarakat)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat	14	Kelompok Masyarakat	1.112.987
			T3.S3.1.1.1.1.5 Fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat **(3 Dokumen)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	3	Dokumen	700.000
				05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001- Forest Programme V - Social Forestry Support Programme	4	Kelompok Masyarakat	35.900.000
		T3.S3.1.1.1.2 Meningkatnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun	T3.S3.1.1.1.2.1 Luas prakondisi persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS **(183 Ribu Hektar)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	300	Kelompok Masyarakat	12.810.924
			T3.S3.1.1.1.2.2 Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat **(183 Ribu Hektar)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	300	Kelompok Masyarakat	5.490.000
			T3.S3.1.1.1.2.3 Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial **(58 SK)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi	58	Kelompok Masyarakat	1.271.000
			T3.S3.1.1.1.2.4 Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial **(3 Dokumen)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	3	Dokumen	700.000
				02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Strengthening Social Forestry in Indonesia Project	4	Kelompok Masyarakat	49.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S3
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

Indikator (IKU/IKP)

T3.S3.1
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
(224.250 Ribu Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat **(PHL)**	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat **(15.000 Hektar)**	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat **(15.000 Hektar)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	32	Kelompok Masyarakat	1.954.640
T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi **(KSDAE)**	T3.S3.1.3.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat **(1.200 Desa)**	T3.S3.1.3.1.1 Terjaminnya peningkatan kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1.1.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat **(516 Desa)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	516	Lembaga	56.926.500
			T3.S3.1.3.1.1.2 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi **(26.250 Hektar)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	800.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	26.250	Hektar	14.976.000
			T3.S3.1.3.1.1.3 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam **(201 Orang)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	201	Orang	16.400.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Kebijakan kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
			T3.S3.1.3.1.1.4 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan **(500 Kelompok)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Kebijakan Unit Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	500	Kelompok Masyarakat	10.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S1
Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas

Indikator (IKU/IKP)

T4.S1.1
Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
(80 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan **(BP2SDM)**	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya **(14.915 Orang)**	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan diklat non aparatur LHK (**1.240 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	1.240	Orang	3.055.000
			T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan diklat aparatur LHK **(4.335 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	4.335	Orang	28.097.405
			T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan pendidikan karya siswa **(10 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10	Orang	1.745.850
			T4.S1.1.1.1.1.4 Lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha **(7.840 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	7.840	Orang	16.430.000
		T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan SDM LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (**5 jenis Jabatan)**	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	Dokumen	1.020.000
			T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Komponen SDM Non Aparatur LHK **(5 Jenis Jabatan)**	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5	Dokumen	1.170.000
			T4.S1.1.1.1.2.3 Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi **(1.500 Orang)**	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Dan Pengembangan Sdm	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	1.500	Orang	1.918.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S1
Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas

Indikator (IKU/IKP)

T4.S1.1
Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
(80 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan **(BP2SDM)**	T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat **(491 Orang)**	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat **(491 Orang)**	04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	491	Orang	59.213.780
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah	5	Paket	6.131.465
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1	Paket	50.273.160
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4	unit	6.909.821
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	1	Layanan	2.719.934
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	003 - Pembangunan SArana Prasarana Sekolah (RM)	1	Unit	1.025.000
	T4.S1.1.1.3 Indeks efektifitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan **(70 Poin)**	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	T4.S1.1.1.3.1.1 Nilai KHDTK yang dikelola **(69 Poin)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7	Unit	3.290.000
				07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pengelolaan KHDTK	1	Layanan	300.000
	T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup **(3.368 Lembaga)**	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan **(3.368 Unit)**	08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.350	Lembaga	3.850.000
				08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18	Lembaga	540.000
		T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya jiwa kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah orang yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas **(720 Orang)**	08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	720	Orang	2.445.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(80 Poin)**	T4.S2.1.1.1.1 Meningkatnya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang akuntabel	T4.S2.1.1.1.1.1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah **(78 Poin)**	03-Biro Perencanaan	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	24	Dokumen	13.410.467
			T4.S2.1.1.1.1.2 Tingkat kepuasan layanan perencanaan **(4 Poin)**	03-Biro Perencanaan	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.239.143
		T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari **(82 Poin)**	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	22	Layanan	17.820.753
			T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari **(4 Level)**	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	17	Layanan	137.619.249
			T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	207	Unit	1.367.975
				03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	3	Unit	2.907.220
		T4.S2.1.1.1.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan **(78 Poin)**	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Das Dan Rehabilitasi Hutan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	37	Layanan	44.641.456
			T4.S2.1.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan **(4 Level)**	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengengelolaan Das Dan Rehabilitasi Hutan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	37	Layanan	280.007.808
			T4.S2.1.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel **(- Dokumen)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(80 Poin)**	T4.S2.1.1.1.4 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	T4.S2.1.1.1.4.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem **(78 Poin)**	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	75	Layanan	82.274.650
			T4.S2.1.1.1.4.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem **(3 Level)**	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	75	Layanan	1.051.208.130
			T4.S2.1.1.1.4.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	36	Unit	10.747.934
				05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	25	Unit	31.442.556
		T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **(80 Poin)**	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	44.063.098
			T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **(3 Level)**	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	210.084.352
			T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	712	Unit	14.826.371
				06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	23	Unit	16.812.895
		T4.S2.1.1.1.6 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.6.1 Nilai SAKIP pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(78 Poin)**	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17	Layanan	20.000.000
			T4.S2.1.1.1.6.2 Level Maturitas SPIP Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(4 Level)**	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	17	Layanan	188.090.278

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I**)	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(80 Poin)**	T4.S2.1.1.1.6 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.6.3 Laporan keuangan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	90	Unit	509.984
		T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM **(78 poin)**	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	12	Layanan	17.284.560
			T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM **(4 Level)**	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	15	Layanan	160.128.389
			T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	11	Paket	3.781.620
				08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	3	Paket	750.000
		T4.S2.1.1.1.8 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	T4.S2.1.1.1.8.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan **(74 Poin)**	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	7	Layanan	15.424.021
			T4.S2.1.1.1.8.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan **(4 Level)**	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	7	Layanan	82.084.571
			T4.S2.1.1.1.8.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	7	Unit	6.450.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(80 Poin)**	T4.S2.1.1.1.9 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.9.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(78 Poin)**	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	33.751.067
			T4.S2.1.1.1.9.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(4 Level)**	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan	200.844.508
			T4.S2.1.1.1.9.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Unit	66.744.110
		T4.S2.1.1.1.10 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	T4.S2.1.1.1.10.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim **(80 Poin)**	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	9.455.466
			T4.S2.1.1.1.10.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim **(4 Level)**	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan	182.069.088
			T4.S2.1.1.1.10.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	105	Layanan	1.150.000
		T4.S2.1.1.1.11 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	T4.S2.1.1.1.11.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 **(78 Poin)**	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	21.037.022
			T4.S2.1.1.1.11.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 **(4 Level)**	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	48.263.767
			T4.S2.1.1.1.11.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel **(-)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(80 Poin)**	T4.S2.1.1.1.12 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	T4.S2.1.1.1.12.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan **(78 Poin)**	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan	51.691.412
			T4.S2.1.1.1.12.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan **(3 Level)**	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	10.721.309
			T4.S2.1.1.1.12.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel **(-)**							
		T4.S2.1.1.1.13 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	T4.S2.1.1.1.13.1 Nilai SAKIP pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove **(78 Poin)**	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	27.464.894
			T4.S2.1.1.1.13.2 Level Maturitas SPIP Badan Restorasi Gambut dan mangrove **(4 Level)**	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	14.147.825
			T4.S2.1.1.1.13.3 Laporan keuangan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang tertib dan akuntabel **(-)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) **(Setjen (Roum))**	T4.S2.1.2.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK **(365 Poin)**	T4.S2.1.2.1.1 Meningkatnya reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang optimal	T4.S2.1.2.1.1.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK **(365 Poin)**	15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian LHK	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	2.500	Orang	5.315.601
			T4.S2.1.2.1.1.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kepegawaian dan Organisasi **(4 Poin)**	15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.848.283
				15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.160.000
T4.S2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efesien, Efektif, dan Akuntabel **(Setjen (Rokeu dan Roum)**	T4.S2.1.3.1 Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK **(4 Poin)**	T4.S2.1.3.1.1 Meningkatnya pengelolaan dokumen BMN yang akuntabel	T4.S2.1.3.1.1.1 Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel **(6 Dokumen BMN)**	04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	6.915.388
		T4.S2.1.3.1.2 Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan KLHK	T4.S2.1.3.1.2.1 Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker (Nilai Kerja Anggaran dalam SMART DJA) **(92 Poin)**	14-Biro Keuangan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen	6.012.809
			T4.S2.1.3.1.2.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan keuangan **(4 Poin)**	14-Biro Keuangan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.427.275
	T4.S2.1.3.2 Survei Kepuasan Publik **(4 Poin)**	T4.S2.1.3.2.1 Meningkatnya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan KLHK	T4.S2.1.3.2.1.1 Tingkat kepuasan layanan perizinan KLHK **(4 Poin)**	04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	3	Layanan	47.882.477
				04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	198.355.659
			T4.S2.1.3.2.1.2 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan umum KLHK **(4 pusat)**	04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	959-Layanan Protokoler	1	Layanan	18.847.240
T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK **(Setjen (Rohumas)**	T4.S2.1.4.1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK **(88 Poin)**	T4.S2.1.4.1.1 Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	T4.S2.1.4.1.1.1 Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga **(4 Poin)**	01-Biro Hubungan Masyarakat	Penyiaran Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat	3	Layanan	6.763.125
				01-Biro Hubungan Masyarakat	Penyiaran Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	951-Layanan Sarana Internal	4	Unit	50.000
			T4.S2.1.4.1.1.2 Pemberitaan positif di media massa **(4.000 Berita)**	01-Biro Hubungan Masyarakat	Penyiaran Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.351.758

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK **(Setjen (Rokum)**	T4.S2.1.5.1 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan **(5 Poin)**	T4.S2.1.5.1.1 Meningkatnya layanan hukum, bantuan hukum dan penataan perundangundangan yang berkualitas	T4.S2.1.5.1.1.1 Tingkat kepuasan layanan hukum **(4 Poin)**	17-Biro Hukum	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.200.000
			T4.S2.1.5.1.1.2 Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani **(40 Perkara)**	17-Biro Hukum	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	969-Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	730.684
			T4.S2.1.5.1.1.3 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan **(5 Poin)**	17-Biro Hukum	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	1	Layanan	4.045.026
T4.S2.1.6 Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri bidang LHK **(Setjen (Biro KLN))**	T4.S2.1.6.1 Jumlah Dokumen Kerjasama **(30 Dokumen)**	T4.S2.1.6.1.1 Meningkatnya dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program KLHK	T4.S2.1.6.1.1.1 Dokumen hasil analisis kerja sama bilateral, multilateral, intra kawasan, dan ormas asing **(30 Dokumen)**	06-Biro Kerja Sama Luar Negeri	Pembinaan Dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	AEA-Koordinasi	001-Layanan Kerjasama Internasional	2	Kegiatan	6.532.176
			T4.S2.1.6.1.1.2 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan kerjasama luar negeri **(4 poin)**	06-Biro Kerja Sama Luar Negeri	Pembinaan Dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.100.000
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.1 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) **(3,7 Poin)**	T4.S2.1.7.1.1 Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK	T4.S2.1.7.1.1.1 Data dan informasi KLHK (IKLH, statistik, SLHI, status hutan) **(4 Dokumen)**	02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	5.680.657
			T4.S2.1.7.1.1.2 Tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi KLHK **(4 Poin)**	02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.050.000
				02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	34	Unit	400.000
			T4.S2.1.7.1.1.3 Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) **(3,70 Poin)**	02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi	10.853.772

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(80 Poin)**	T4.S2.1.7.2.1 Meningkatnya kualitas kebijakan strategis KLHK	T4.S2.1.7.2.1.1 Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis **(12 Dokumen Rancangan)**	18-Pusat Kebijakan Strategis	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	6	Rekomendasi Kebijakan	1.252.750
				18-Pusat Kebijakan Strategis	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan	6	Rekomendasi Kebijakan	2.507.306
			T4.S2.1.7.2.1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(80 Poin)**	18-Pusat Kebijakan Strategis	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.356.515
		T4.S2.1.7.2.2 Meningkatnya pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan yang efektif dan efisien	T4.S2.1.7.2.2.1 NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya **(3 NSPK)**	19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH	3	NSPK	2.654.173
			T4.S2.1.7.2.2.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penetapannya **(4 Poin)**	19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.277.602
				19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Unit	264.000
		T4.S2.1.7.2.3 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Bali - Nusra	T4.S2.1.7.2.3.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E **(4 Poin)**	08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	907.492
				08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	67.501.658
				08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	116	Unit	1.695.450
			T4.S2.1.7.2.3.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion **(8 Pemda)**	08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	24	Daerah	1.939.900

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(80 Poin)**	T4.S2.1.7.2.4 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Jawa	T4.S2.1.7.2.4.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E **(4 Poin)**	07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.013.536
			T4.S2.1.7.2.4.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion **(10 Pemda)**	07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	11	Daerah	1.908.125
		T4.S2.1.7.2.5 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Kalimantan	T4.S2.1.7.2.5.1 Tingkat kepuasan publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.610.838
			T4.S2.1.7.2.5.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan Ekoregion **(5 Pemda)**	09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	5	Daerah	3.200.000
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(80 Poin)**	T4.S2.1.7.2.6 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi Maluku	T4.S2.1.7.2.6.1 Tingkat kepuasan publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.432.672
			T4.S2.1.7.2.6.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan Ekoregion **(30 Pemda)**	10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	30	Daerah	2.287.139
		T4.S2.1.7.2.7 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua	T4.S2.1.7.2.7.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.785.034
			T4.S2.1.7.2.7.2 Jumlah layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion **(8 Pemda)**	12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8	Daerah	2.988.408
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(80 Poin)**	T4.S2.1.7.2.8 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera	T4.S2.1.7.2.8.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	4	Unit	401.760
				13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	967.852
			T4.S2.1.7.2.8.2 Jumlah layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion **(22 Pemda)**	13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumateral	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	22	Daerah	3.314.500

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(85 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.8 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal **(Itjen)**	T4.S2.1.8.1 Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK **(3,3 Poin)**	T4.S2.1.8.1.1 Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	T4.S2.1.8.1.1.1 Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 **(100 %)**	02-Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Manajemen Resiko	60	Laporan	4.480.966
	T4.S2.1.8.2 Nilai Maturitas SPIP KLHK **(3,5 poin)**	T4.S2.1.8.2.1 Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	T4.S2.1.8.2.1.1 persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 **(100 %)**	02-Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	002-Layanan Pengendalian Internal	67	Laporan	4.367.436
	T4.S2.1.8.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK **(3,5 Poin)**	T4.S2.1.8.3.1 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	T4.S2.1.8.2.3.1 Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal **(86 Poin)**	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	Dokumen	1.016.931
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Dokumen	935.576
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.260.994
			T4.S2.1.8.2.3.2 Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal **(3,5 Poin)**	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	3.090.560
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	33.905.489
			T4.S2.1.8.2.3.3 Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP **(3,5 Poin)**	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	2.503.074
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	185	Unit	2.415.135
		T4.S2.1.8.3.2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	T4.S2.1.8.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen **(3,5 Poin)**	02-Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	282	Laporan	14.632.263
	T4.S2.1.8.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK **(3,25 Poin)**	T4.S2.1.8.4.1 Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	T4.S2.1.8.4.1.1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti **(100 %)**	06-Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	2.234.601
			T4.S2.1.8.4.1.2 Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Kumulatif) **(30 Unit)**	06-Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	2.800.081
										7.715.092.753